



Kementerian PPN/
Bappenas

LAPORAN PELAKSANAAN PENCAPAIAN TPB/SDGS TAHUN 2021

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

LAPORAN PELAKSANAAN PENCAPAIAN
TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (TPB/SDGs)
TAHUN 2021



Penyelaras Akhir : Vivi Yulaswati

Reviewer : Yanuar Nugroho

Tim Penyusun : Gantjang Amannullah, Sanjoyo, Rachman Kurniawan, Setyo Budiantoro, Indriana Nugraheni, Alimatul Rahim, Ardhiantie, Diky Avianto, Larassita Damayanti, M. Robbi Qawi, Prayoga Dahirsa, Khairanis Rahmanda Irina, Adhika Dibya Reswati, Chiquita Abidin, Farhana Zahrotunnisa, Fitriyani Yasir, Anggita Sulisetiasih, Abdul Halim, Anita Wahyuni Yamin, Fadlan Muzakki, Hapsari Octaviani, Sari Anindita

Layout/Desain : Ongky Arisandi

Diterbitkan Oleh:

Kedeputan Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam,
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Isi dan materi yang ada pada buku ini dapat diproduksi dan disebarluaskan dengan tidak mengurangi isi dan arti dari dokumen ini. Diperbolehkan untuk mengutip isi buku ini dengan menyebutkan sumbernya.

KATA PENGANTAR MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS



Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) telah menjadi norma dan arah pembangunan dunia sejak dicanangkan pada September 2015. Sebagai komitmen untuk menjalankan dan mewujudkannya, Indonesia mengarusutamakan dan mengintegrasikan target-target TPB/SDGs ke dalam rencana dan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional maupun daerah. Dengan demikian, TPB/SDGs bukanlah hal baru atau tambahan tanggung jawab dalam menjalankan pembangunan. Di Indonesia, menjalankan TPB/SDGs berarti sekaligus menjalankan dan mewujudkan visi dan prioritas pembangunan nasional, dan memenuhi mandat konstitusi.

Paradigma atau cara pandang ini menjadi kunci setidaknya dalam dua hal. Pertama, dalam upaya untuk bangkit dari terpaan pandemi COVID-19 yang mendera semua bangsa, termasuk Indonesia. Pandemi memang sempat meluluh-lantakkan berbagai capaian pembangunan dan mengakibatkan krisis kesehatan, ekonomi, sosial, bahkan politik. Namun negeri ini bertekad bangkit kembali –dengan lebih kuat. Presiden bahkan menegaskan agar target-target TPB/SDGs tidak diturunkan karena alasan pandemi. Kedua, dalam upaya meraih dan mengejar visi Indonesia 2045 –yakni mewujudkan cita-cita bangsa ini menjadi salah satu pemimpin dunia dengan ekonomi keempat atau kelima terbesar di dunia. Target-target TPB/SDGs yang harus bisa dicapai pada tahun 2030 adalah jembatan untuk menuju terwujudnya visi negeri ini pada 2045 nanti.

Untuk mencapai itu semua, diperlukan orkestrasi, sinergi dan integrasi dari seluruh potensi pemangku kepentingan baik pemerintah dan nonpemerintah untuk percepatan pencapaian TPB/SDGs. Apalagi saat ini dunia telah memasuki periode *Decade of Actions* –10 tahun terakhir yang tersisa untuk mencapai Agenda 2030 yang harus diisi dengan tindakan nyata. Dengan sisa waktu kurang dari delapan tahun, semua pihak harus bisa bekerjasama dan berkolaborasi mencapai target-target pembangunan dalam TPB/SDGs.

Oleh karena itu, saat ini merupakan waktu yang tepat untuk melakukan evaluasi awal dari pelaksanaan lima tahun kedua TPB/SDGs di Indonesia. Untuk itu, sesuai mandat Peraturan Presiden Nomor 59/2017 yang diperbaharui dengan Perpres Nomor 111/2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian TPB, Kementerian PPN/Bappenas menyusun Laporan Pelaksanaan TPB/SDGs Indonesia Tahun 2021 ini.

Laporan Pelaksanaan TPB/SDGs Tahun 2021 merupakan laporan pertama pada periode Rencana Aksi Nasional (RAN) 2021-2024 yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Laporan ini menyampaikan situasi capaian indikator-indikator dari 17 Tujuan TPB/SDGs hingga akhir tahun 2021, sekaligus memberikan pemutakhiran (*updating*) dari laporan tahun sebelumnya dengan mengacu pada Metadata Indikator TPB/SDGs Indonesia Edisi II. Pada beberapa indikator, laporan ini dilengkapi dengan analisis berdasarkan sektor pembangunan, wilayah, serta karakteristik demografi dan sosial ekonomi penduduk untuk membantu mengidentifikasi isu, wilayah, atau kelompok masyarakat yang masih memerlukan

perhatian khusus. Laporan ini juga memetakan tantangan yang dihadapi dan kebijakan yang diperlukan untuk mengakselerasi pencapaian target-target TPB/SDGs di masa depan.

Kami mengucapkan terima kasih dan menyampaikan penghargaan sebesar-besarnya kepada seluruh pihak baik yang sudah terlibat dalam penyusunan laporan ini, baik dari unsur pemerintah maupun nonpemerintah. Secara khusus: Badan Pusat Statistik (BPS), kementerian/lembaga, institusi terkait yang telah menyediakan data-data capaian indikator TPB/SDGs; demikian juga para pelaku usaha, organisasi masyarakat sipil, dan perguruan tinggi yang telah membagikan berbagai praktik baik (*best practices*) untuk disampaikan dalam laporan ini.

Akhirnya, kami berharap Laporan Pelaksanaan TPB/SDGs 2021 ini dapat menjadi referensi bagi seluruh pemangku kepentingan dalam bergandengan tangan lebih erat dan menyatukan langkah lebih padu untuk mencapai TPB/SDGs dan membangun jembatan menuju Indonesia Emas 2045.

Jakarta, Desember 2022



Suharso Monoarfa

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
selaku Koordinator Pelaksana Nasional TPB/SDGs

(*)



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR KOTAK	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR SINGKATAN	ix
PANDUAN BAGI PEMBACA	xiii
RINGKASAN EKSEKUTIF	xvi
BAB 1 KOORDINASI PELAKSANAAN TPB/SDGs DI INDONESIA	1
1.1. Pencapaian TPB/SDGs Pada Tingkat Nasional	1
1.2. Pencapaian TPB/SDGs Pada Tingkat Daerah	6
BAB 2 KEMAJUAN PENCAPAIAN TPB/SDGs	10
2.1. Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan	13
2.2. Tujuan 2 Tanpa Kelaparan	18
2.3. Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera.....	23
2.4. Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas.....	30
2.5. Tujuan 5 Kestaraan Gender	35
2.6. Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak	39
2.7. Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau	43
2.8. Tujuan 8 Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan Layak.....	47
2.9. Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur	52
2.10. Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan	57
2.11. Tujuan 11 Kota dan Pemukiman Yang Berkelanjutan.....	62
2.12. Tujuan 12 Pola Konsumsi dan Produksi Yang Bertanggung Jawab.....	66
2.13. Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim	70
2.14. Tujuan 14 Ekosistem Lautan	75
2.15. Tujuan 15 Ekosistem Daratan	80
2.16. Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan Yang Tangguh.....	85
2.17. Tujuan 17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan	91
BAB 3 KETERSEDIAAN DATA TPB/SDGs	96
3.1. Penguatan Penyediaan Data TPB/SDGs.....	96
3.2. Pengembangan Dashboard SDGs	97
BAB 4 PENUTUP	99
DAFTAR PUSTAKA	101
LAMPIRAN TABEL CAPAIAN INDIKATOR TPB/SDGs TAHUN 2021	107

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Sebaran SDGs <i>Center</i> yang telah terbentuk di Indonesia hingga akhir tahun 2021	3
Gambar 2.1	Status Capaian Indikator TPB/SDGs 2021	10
Gambar 2.2	Tren kemiskinan ekstrem dan kemiskinan nasional, 2015-2021.....	13
Gambar 2.3	Tren tingkat kemiskinan nasional berdasarkan jenis kelamin, daerah tempat tinggal, dan kelompok umur, 2020-2021.....	14
Gambar 2.4	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan, 2018-2021	15
Gambar 2.5	Akses terhadap layanan dasar berdasarkan kuintil pengeluaran, 2019-2021 .	16
Gambar 2.6	Tren prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (PoU) dan penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat (FIES) (%), 2017-2021.....	18
Gambar 2.7	Prevalensi <i>stunting</i> dan <i>wasting</i> balita (%), 2013, 2018-2021	19
Gambar 2.8	Nilai tambah pertanian per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/ peternakan/ perikanan/kehutanan, 2015-2021	20
Gambar 2.9	Indeks Anomali Harga Pangan (IAHP), 2019-2021.....	21
Gambar 2.10	Proporsi perempuan yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan, 2020-2021	23
Gambar 2.11	Jumlah infeksi baru HIV per 1.000 penduduk tidak terinfeksi, 2018 dan 2020-2021	24
Gambar 2.12	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk , 2015-2021.....	24
Gambar 2.13	Persentase merokok pada penduduk umur ≥ 15 tahun, 2015-2021.....	26
Gambar 2.14	Kepadatan dan distribusi tenaga Kesehatan per 1.000 penduduk, 2020-2021	28
Gambar 2.15	Tingkat Penyelesaian Pendidikan Jenjang SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat, 2015-2021	30
Gambar 2.16	Proporsi anak-anak dan remaja (a) kelas 5 (b) kelas 8, dan (c) usia 15 tahun yang mencapai setidaknya tingkat kemahiran minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika, 2021.....	31
Gambar 2.17	Tren Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT), 2020-2021	32
Gambar 2.18	Tren prevalensi kekerasan terhadap perempuan, 2016 dan 2021	35
Gambar 2.19	Tren perkawinan sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun, 2015-2021	36
Gambar 2.20	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Layanan Air Minum yang Dikelola Secara Aman Berdasarkan Wilayah, Tahun 2020 (dalam %)	39
Gambar 2.21	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Layanan Sanitasi Layak Berdasarkan Katagori, Tahun 2021 (dalam %).....	40
Gambar 2.22	Persentase Rumah Tangga yang Masih Mempraktikkan Buang Air Besar Sembarangan (BAB) di Tempat Terbuka (dalam %).....	40

Gambar 2.23	Indeks Kualitas Air (IKA)	41
Gambar 2.24	Rasio Elektrifikasi dan Rasio Desa Berlistrik	43
Gambar 2.25	Bauran Energi Terbarukan	44
Gambar 2.26	Laju Pertumbuhan PDB per Kapita dan PDB Perkapita	47
Gambar 2.27	Proporsi Tenaga Kerja Informal berdasarkan Jenis Kelamin	48
Gambar 2.28	Tingkat Pengangguran Terbuka (8.5.2*), Tingkat Setengah Pengangguran (8.5.2.(a)), Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET) (8.6.1*).....	49
Gambar 2.29	Persentase Akses UMKM ke Layanan Keuangan	49
Gambar 2.30	Jumlah Wisatawan Mancanegara (Juta Orang) (kiri) dan Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Pariwisata terhadap PDB (kanan).....	50
Gambar 2.31	Proporsi Sektor Industri Manufaktur Terhadap PDB (Persen)	52
Gambar 2.32	Nilai Tambah Sektor Industri Manufaktur Terhadap PDB (Rupiah)	52
Gambar 2.33	Laju Pertumbuhan PDB Industri Manufaktur	53
Gambar 2.34	Proporsi Tenaga Kerja pada Sektor Industri Manufaktur	53
Gambar 2.35	Kontribusi Ekspor Produk Industri Berteknologi Tinggi.....	53
Gambar 2.36	Proporsi Penduduk yang Terlayani <i>Mobile Broadband</i>	54
Gambar 2.37	Proporsi Penduduk Terlayani <i>Mobile Broadband</i> pada 34 Provinsi.....	55
Gambar 2.38	Rasio Gini	57
Gambar 2.39	Rasio Gini pada 34 Provinsi.....	57
Gambar 2.40	Persentase Penduduk yang Hidup di Bawah Garis Kemiskinan Nasional dan Persentase Penduduk Miskin di Daerah Tertinggal.....	58
Gambar 2.41	Persentase Rencana Anggaran untuk Belanja Fungsi Perlindungan Sosial Pemerintah Pusat.....	59
Gambar 2.42	Proporsi Peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	59
Gambar 2.43	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak Tahun 2021 (dalam %)	62
Gambar 2.44	Persentase Populasi yang Mendapatkan Akses yang Nyaman Pada Transportasi Publik dan yang Terlayani Transportasi Umum (dalam %).....	63
Gambar 2.45	Indeks Kualitas Udara (IKU).....	64
Gambar 2.46	Komposisi sampah berdasarkan jenis sampah dan sumber sampah, 2022	67
Gambar 2.47	Pengurangan dan penghapusan merkuri pada sektor (dalam ton).....	68
Gambar 2.48	Jumlah limbah B3 yang terdata dan terkelola	68
Gambar 2.49	Frekuensi Kejadian Bencana Berdasarkan Jenisnya Tahun 2015-2021.....	70
Gambar 2.50	Persentase Potensi Penurunan Emisi GRK (%).....	72
Gambar 2.51	Penurunan sampah plastik yang terbuang ke laut	75
Gambar 2.52	Perkembangan Kawasan Konservasi Laut	76
Gambar 2.53	Proporsi tangkapan jenis ikan laut yang berada dalam batasan biologis yang aman, 2017-2021	77

Gambar 2.54	Proporsi Tutupan Hutan Terhadap Total Luas Lahan, 2015-2020	80
Gambar 2.55	Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), 2021.....	81
Gambar 2.56	Kasus Peredaran TSL Ilegal yang Telah Diproses Sampai dengan P.21	83
Gambar 2.57	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui, 2015-2021	85
Gambar 2.58	Indeks Perilaku Anti Korupsi, 2018 -2021.....	86
Gambar 2.59	Jumlah Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori Kepatuhan tinggi (zona hijau).....	86
Gambar 2.60	Jumlah Badan Publik yang berkualifikasi informatif, 2018-2021	87
Gambar 2.61	Capaian Indikator 16.6.1.(b) Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) \geq B, 2018-2021	88
Gambar 2.62	Capaian Indikator 16.6.1.(b) Persentase instansi pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) \geq B, 2018-2021	88
Gambar 2.63	Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya, 2018 dan 2021	89
Gambar 2.64	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18, 2021.....	89
Gambar 2.65	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB dan Rasio penerimaan pajak terhadap PDB, 2015 -2021.....	91
Gambar 2.66	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik, 2015 -2021..	91
Gambar 2.67	Pertumbuhan ekspor produk non migas, 2015-2021.....	92
Gambar 2.68	Proporsi volume remitansi PMI (dalam US dollars) terhadap PDB, 2018 -2021	93
Gambar 2.69	Persentase pelanggan terlayani jaringan internet akses tetap pitalebar (<i>fixed broadband</i>) terhadap total rumah tangga, 2018-2021	94
Gambar 2.70	Persentase pengguna internet, 2016 -2021	94
Gambar 3.1	Perkembangan <i>Dashboard</i> SDGs	98



DAFTAR KOTAK

Kotak 1.1	Gambaran Pelaksanaan TPB/SDGs di Provinsi Jawa Timur	7
Kotak 1.2	Gambaran Pelaksanaan TPB/SDGs di Provinsi Sumatera Utara	8



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Kejadian dan Korban Bencana Hidrometeorologi Tahun 2021	71
Tabel 2.2	Emisi Gas Rumah Kaca Berdasarkan Sektor.....	72
Tabel 2.3	Populasi 25 Spesies Prioritas yang Masuk dalam IUCN <i>Red- List Index</i>	82

DAFTAR SINGKATAN

3T	:	Terdepan, Terkecil dan Tertinggal
ABKT	:	Area Bernilai Konservasi Tinggi
AKE	:	Angka Kecukupan Energi
APBD	:	Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
APBN	:	Anggaran Pendapatan Belanja Negara
APK	:	Angka Partisipasi Kasar
ART	:	Anggota Rumah Tangga
ATS	:	Anak Tidak Sekolah
B3	:	Bahan Berbahaya dan Beracun
BABS	:	Buang Air Besar Sembarangan
Balita	:	Anak Usia Bawah Lima Tahun
Bansos	:	Bantuan Sosial
BLT- DD	:	Bantuan Langsung Tunai melalui Dana Desa
BNPB	:	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
BPK	:	Badan Pemeriksa Keuangan
BPS	:	Badan Pusat Statistik
BPJS	:	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
BPNT	:	Bantuan Pangan Non Tunai
BPUM	:	Bantuan Produktif untuk Usaha Mikro
BST	:	Bantuan Sosial Tunai
BUMN	:	Badan Usaha Milik Negara
Catahu	:	Catatan tahunan
CHSE	:	<i>Cleanliness, Healthy, Sustainability and Environment</i>
COVID-19	:	<i>Coronavirus Disease of 2019</i>
DAK	:	Dana Alokasi Khusus
DAS	:	Daerah Aliran Sungai
DPSP	:	Destinasi Pariwisata Super Prioritas
DTKS	:	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
DTPK	:	Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan
E-Monev	:	<i>Electronic Monitoring and Evaluation</i>
EBT	:	Energi Baru dan Terbarukan
FGD	:	<i>Focus Group Discussion</i>
FIES	:	<i>Food Insecurity Experience Scale</i>
FKTP	:	Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
FLW	:	<i>Food Loss and Waste</i>
FOLU	:	<i>Forestry and Other Land Uses</i>
Germas	:	Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
GKN	:	Garis Kemiskinan Nasional

GRK	:	Gas Rumah Kaca
HCV	:	<i>High Conservation Value</i>
HIV	:	<i>Human Immunodeficiency Virus</i>
HLPF	:	<i>High Level Political Forum</i>
HPK	:	Hari Pertama Kehidupan
IAHP	:	Indikator Anomali Harga Pangan
ICW	:	<i>Indonesia Corruption Watch</i>
IKA	:	Indeks Kualitas Air
IKU	:	Indeks Kualitas Udara
IPAK	:	Indeks Perilaku Anti Korupsi
IPALD	:	Instalasi Pengelolaan Air Limbah Domestik
IUCN	:	<i>The International Union for Conservation of Nature</i>
JKN	:	Jaminan Kesehatan Nasional
Kemendes PDTT	:	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kementerian PPN/Bappenas	:	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Kementerian LHK	:	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
K/L	:	Kementerian/Lembaga
KB	:	Keluarga Berencana
KBI	:	Kawasan Barat Indonesia
KBPU	:	Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha
KEE	:	Kawasan Ekonomi Esensial
KIE	:	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi
KKP	:	Kementerian Kelautan dan Perikanan
KKPD	:	Kawasan Konservasi Perairan Daerah
KLHK	:	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
KPAI	:	Komisi Perlindungan Anak Indonesia
KPPPA	:	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
KRT	:	Kepala Rumah Tangga
KSST	:	Komite Stabilitas Sistem Keuangan
KTI	:	Kawasan Timur Indonesia
LPTK	:	Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan
LPG	:	<i>Liquefied Petroleum Gas</i>
MSY	:	<i>Maximum Sustainability Yield</i>
NEET	:	<i>Not In Education, Employment or Training</i>
NTP/TKP	:	Nilai Tambah Pertanian Per Tenaga Kerja
OJK	:	Otoritas Jasa Keuangan
PAUD	:	Pendidikan Anak Usia Dini
PBI	:	Penerima Bantuan Iuran
PDB	:	Produk Domestik Bruto

PEN	:	Pemulihan Ekonomi Nasional
Perpres	:	Peraturan Presiden
PIP	:	Program Indonesia Pintar
PJJ	:	Pembelajaran Jarak Jauh
PKBM	:	Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
PKH	:	Program Keluarga Harapan
PLTS	:	Pembangkit Listrik Tenaga Surya
PLTU	:	Pembangkit Listrik Tenaga Uap
PM10	:	<i>Particulate Matter 10</i>
PMI	:	Pekerja Migran Indonesia
PoU	:	<i>Prevalence of Undernourishment</i>
PPH	:	Pola Pangan Harapan
PPP	:	<i>Purchasing Power Parity</i>
PPRG	:	Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender
PRK	:	Pembangunan Rendah Karbon
PT	:	Perguruan Tinggi
PTM	:	Penyakit Tidak Menular
PUG	:	Pengarusutamaan Gender
Puskesmas	:	Pusat Kesehatan Masyarakat
RAD	:	Rencana Aksi Daerah
RAN	:	Rencana Aksi Nasional
RB	:	Reformasi Birokrasi
RE	:	Rasio Elektrifikasi
RIPB	:	Rencana Induk Penanggulangan Bencana
Risikedas	:	Riset Kesehatan Dasar
RKP	:	Rencana Kerja Pemerintah
RPB	:	Rencana Penanggulangan Bencana
RPBD	:	Rencana Penanggulangan Bencana Daerah
RPJMN	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
SAE	:	<i>Small Area Estimation</i>
Sakernas	:	Survei Angkatan Kerja Nasional
SAKIP	:	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
SBM	:	Setara Barel Minyak
SD	:	Sekolah Dasar
SDI	:	Sumber Daya Ikan
SDM	:	Sumber Daya Manusia
Sembako	:	Sembilan Bahan Pokok
SITASI	:	Survei Pertanian Terintegrasi
SJSN	:	Sistem Jaminan Sosial Nasional
SLB	:	Sekolah Luar Biasa
SMA	:	Sekolah Menengah Atas

SMK	:	Sekolah Menengah Kejuruan
SMP	:	Sekolah Menengah Pertama
SPAM	:	Sistem Pengelolaan Air Minum
SPHPN	:	Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional
SPKUA	:	Stasiun Pemantauan Kualitas Udara
SSGBI	:	Studi Status Gizi Balita di Indonesia
SSGI	:	Studi Status Gizi Indonesia
STBM	:	Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
Stranas PK	:	Strategi Nasional Pencegahan Korupsi
Susenas	:	Survei Sosial Ekonomi Nasional
TBC	:	Tuberkulosis
TDS	:	<i>Total Dissolve Solid</i>
TIK	:	Teknologi Informasi dan Komunikasi
TK	:	Taman Kanak- Kanak
TORA	:	Tanah Objek Reforma Agraria
TPB/SDGs	:	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ <i>Sustainable Development Goals</i>
TSL	:	Tanaman Satwa Liar
VNR	:	<i>Voluntary National Review</i>
UN	:	<i>United Nations</i>
UN ECOSOC	:	<i>United Nations Economic and Social Council</i>
UNFCCC	:	<i>United Nations Framework Convention on Climate Change</i>
UNICEF	:	United Nations Children's Fund
UMKM	:	Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
UPT	:	Unit Pelaksana Teknis
USD	:	United States Dollar
VNR	:	<i>Voluntary National Review</i>
WHO	:	<i>World Health Organization</i>

PANDUAN BAGI PEMBACA

A. Untuk siapa laporan ini ditujukan?

Laporan ini dimaksudkan untuk dibaca oleh:

1. Parapihak (*stakeholders*) yang terlibat dalam berbagai dialog kebijakan tentang pelaksanaan Agenda 2030 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs). Parapihak ini mencakup pejabat pemerintahan dan perwakilan kelompok-kelompok antar-pemerintah, masyarakat sipil, organisasi non-pemerintah, media, akademisi dan para pelaku usaha/bisnis.
2. Para analis/peneliti yang bermaksud mengidentifikasi isu-isu prioritas dalam TPB/SDGs yang membutuhkan studi/kajian lebih lanjut.
3. Para ahli yang mengembangkan metodologi untuk mengukur kemajuan pencapaian TPB/SDGs.
4. Masyarakat umum yang tertarik untuk mengikuti perkembangan pencapaian TPB/SDGs di Indonesia.

B. Bagaimana membaca data capaian dalam laporan ini?

Saat membaca laporan ini, baik narasi inti maupun lampirannya, khususnya mengenai capaian TPB/SDGs, para pembaca perlu mengingat hal-hal berikut:

1. Setiap tujuan (*goal*) dalam TPB/SDGs mempunyai *nilai dan bobot yang sama-setara* dalam analisis. Tidak ada tujuan dan target yang mempunyai bobot lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan tujuan dan target lain. Terdapat 17 tujuan (*goal*), 169 target, dan 289 indikator nasional TPB/SDGs sesuai Metadata Indikator TPB/SDGs Indonesia Edisi II.
2. Dalam laporan ini, indikator yang ditampilkan pada narasi setiap tujuan (*goal*) di Bab II merupakan indikator terpilih yang sengaja ditonjolkan perkembangan pencapaiannya di tahun 2021. Detail capaian tahun 2021 dari seluruh (289) indikator TPB/SDGs dapat dilihat pada lampiran tabel *Form 1* monitoring dan evaluasi.
3. Untuk membantu pembaca, capaian setiap indikator TPB/SDGs yang dilaporkan ditunjukkan hanya dengan tiga penanda (simbol) sebagai berikut:

Simbol	Keterangan
(●) : Tercapai (<i>achieved</i>)	<ol style="list-style-type: none">a. Untuk indikator yang memiliki angka target: target tahun berjalan tercapai.b. Untuk indikator yang tidak memiliki angka target: capaian tahun berjalan lebih baik dari capaian tahun sebelumnya.c. Untuk indikator kualitatif yang diukur dengan ketersediaan kerangka regulasi/kebijakan, Jika regulasi/kebijakan telah tersedia atau telah ditetapkan maka indikator telah tercapai

Simbol	Keterangan
(▶) : Akan tercapai/ membaik (<i>positive change</i>)	Tren capaian naik/membaik dari tahun sebelumnya, dengan jarak kenaikan dari <i>baseline</i> mencapai 50% atau lebih menuju target tahun berjalan.
(▼) : Perlu perhatian Khusus	<p>a. Untuk indikator yang memiliki angka target:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tren capaian turun/memburuk dari tahun sebelumnya dan target tahun berjalan tidak tercapai. Tren capaian naik/membaik dari tahun sebelumnya tetapi jarak kenaikan dari <i>baseline</i> masih kurang dari 50% menuju target tahun berjalan. <p>b. Untuk indikator yang tidak memiliki angka target: capaian tahun berjalan memburuk dari tahun sebelumnya.</p>
(–) : Data tidak tersedia	Tidak dapat dinilai/diberikan notifikasi capaian karena data tahun 2021 tidak tersedia (N/A) akibat survei pengumpulan datanya tidak dilakukan pada tahun tersebut atau belum tersedia (PM) sampai dengan laporan disusun.

- Beberapa indikator yang memiliki angka capaian dan target pada level subindikator dilakukan perhitungan komposit dari status capaian seluruh subindikator untuk mendapatkan notifikasi status capaian pada level indikatornya.
- Status capaian yang ditunjukkan dalam laporan ini adalah perbandingan secara relatif antara angka capaian indikator pada tahun 2021 terhadap target dan angka dasar (*baseline*) RAN TPB/SDGs. Dengan demikian, diharapkan bisa terlihat secara lebih jelas perbaikan/kemajuan yang sudah dicapai dan perlu dipertahankan, ataupun indikator yang tidak tercapai targetnya dan perlu mendapatkan perhatian khusus.
- Capaian indikator yang ditampilkan adalah *angka nasional* sehingga meskipun sebagian besar indikator sudah mencapai target (berstatus hijau), tidak menampilkan kemungkinan bahwa terdapat kelompok masyarakat dan wilayah (provinsi/kabupaten/kota) tertentu yang masih tertinggal capaiannya dan membutuhkan perhatian khusus. Hal ini baru akan terlihat dari disagregasi data berdasarkan wilayah dan sosial ekonomi, yang dapat dipelajari lebih lanjut pada *Dashboard SDGs* (<http://sdgs.bappenas.go.id>).

C. Apa/dari mana sumber data laporan ini?

- Data capaian indikator TPB/SDGs yang digunakan sebagai basis laporan ini berasal dari beberapa sumber data dengan konsep dan definisi, serta metode perhitungan mengacu Metadata Indikator TPB/SDGs Indonesia Edisi II.

2. Terdapat dua jenis data yaitu: (a) data sektoral yang berasal dari kementerian/lembaga dan institusi penyedia data lain yang terkait; dan (b) data statistik dasar yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS).
3. Angka target yang digunakan untuk mengukur kinerja pencapaian TPB/SDGs pada laporan ini utamanya berdasarkan dokumen RAN TPB/SDGs 2021-2024. Apabila terdapat target indikator yang belum tersedia pada RAN TPB/SDGs, maka angka target merujuk pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021 atau dokumen perencanaan pemerintah lainnya yang terpublikasi.
4. Analisis capaian indikator TPB/SDGs dalam laporan ini menggunakan data per 31 Desember 2021 atau sesuai waktu pengambilan data untuk indikator yang bersifat dinamis. Sedangkan untuk narasi capaian kualitatif melaporkan progres pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs sampai dengan 31 Agustus 2022.

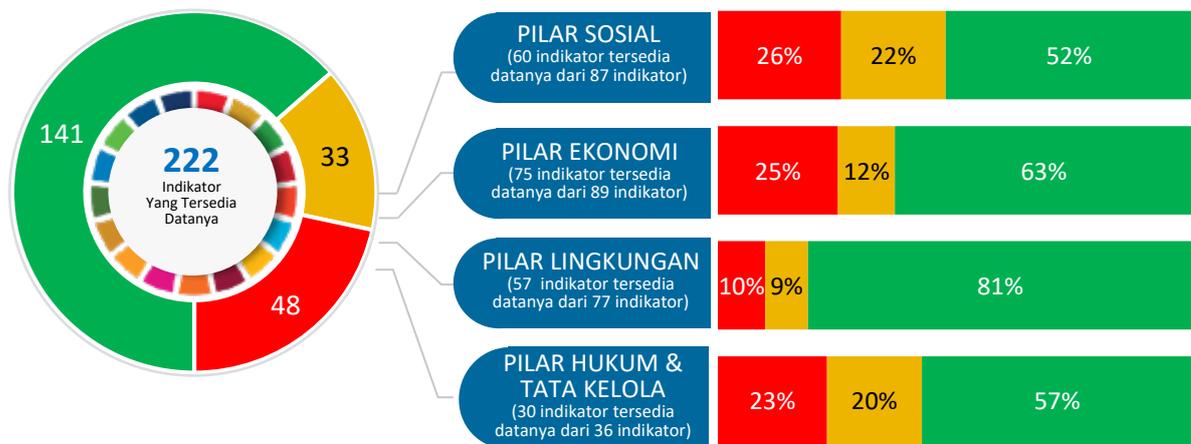
RINGKASAN EKSEKUTIF

Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) di Indonesia telah memasuki tahun keenam pasca ditetapkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 yang kini diperbaharui dengan Perpres Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Salah satu amanat Perpres tersebut adalah penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN) 2021-2024 dan pelaporannya. Laporan Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs Tahun 2021 ini merupakan laporan evaluasi pelaksanaan tahun pertama dari RAN TPB/SDGs periode 2021–2024.

Pada tahun 2021, pelaksanaan TPB/SDGs di Indonesia masih berada dalam fase pandemi yang dimulai sejak Maret 2020. Selama masa pandemi, pencapaian beberapa target dan indikator TPB/SDGs mengalami koreksi angka capaiannya dan bahkan sebagian koreksi ini cukup dalam. Misalnya, angka kemiskinan nasional kembali meningkat menjadi *double digit* setelah sebelumnya (2019) pertamakalinya dalam sejarah bisa diturunkan mencapai *single digit*. Ini membuat tingkat kemiskinan kembali ke situasi tiga tahun sebelumnya dan angka ketimpangan (rasio gini) meningkat. Berbagai upaya pengendalian pandemi –khususnya pembatasan pergerakan (mobilitas) orang dan sebagian barang— mengakibatkan dampak sosial, kultural, dan ekonomi secara signifikan.

Namun demikian, pada Pembukaan *SDGs Annual Conference 2021*, Presiden menegaskan bahwa meski tantangan untuk mencapai target TPB/SDGs semakin berat dengan adanya pandemi COVID-19, tantangan ini tidak boleh menyurutkan semangat dan tidak boleh menurunkan target SDGs. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya mesti dilakukan dengan berbagai inovasi, mencari cara-cara baru, dan mengupayakan terobosan-terobosan baru untuk melakukan lompatan dalam mencapai target TPB/SDGs. Untuk itu, Kementerian PPN/Bappenas menyiapkan orkestrasi nasional yang berkelanjutan, melibatkan semua pemangku kepentingan publik, guna mengejar percepatan pencapaian target TPB/SDGs sampai 2030.

Berdasarkan analisis dari 222 indikator TPB/SDGs yang tersedia datanya pada laporan ini, sekitar 63% atau 141 indikator telah mencapai target yang ditetapkan pada RAN 2021-2024 untuk tahun 2021. Jika ditambahkan dengan 15% atau 33 indikator yang menunjukkan tren membaik atau akan tercapai, maka terdapat sekitar **78% indikator TPB/SDGs yang telah tercapai dan mengalami kemajuan menuju pencapaian yang lebih baik**. Akan tetapi, kita perlu memfokuskan upaya pada **indikator yang memerlukan perhatian khusus** yang mencakup sekitar **22% atau 48 indikator**.



Keterangan:

■ Tercapai
 ■ Akan tercapai/membaik
 ■ Perlu perhatian khusus

Capaian indikator TPB/SDGs tahun 2021

Jika dilihat pencapaian pada setiap pilar, seluruh pilar pembangunan TPB/SDGs telah menunjukkan kemajuan yang baik dalam pencapaian target tahun 2021. Kemajuan yang cukup progresif dapat kita lihat pada pilar pembangunan lingkungan dan ekonomi. Namun demikian, masih terdapat 67 indikator yang datanya tidak tersedia sehingga belum dapat dinilai kemajuan pencapaiannya pada tahun 2021. Data yang belum tersedia ini terbagi menjadi 3 (tiga) kategori: (a) data yang capaian tahun 2021 belum disampaikan atau belum selesai dihitung sebanyak 29 indikator; (b) data yang belum pernah dilaporkan sama sekali sebanyak 22 indikator; dan (c) data yang survei pengumpulan datanya tidak dilaksanakan pada tahun 2021 sebanyak 16 indikator. Untuk itu, diperlukan inovasi penguatan data statistik dasar dan sektoral untuk monitoring dan evaluasi TPB/SDGs yang lebih komprehensif.

Secara global, pelaksanaan SDGs memasuki *decade of actions*, yaitu 10 tahun terakhir implementasi yang harus diisi dengan tindakan konkrit dari parapihak untuk mempercepat capaian TPB/SDGs sampai tahun 2030. Di tingkat internasional, Indonesia telah menyampaikan *Voluntary National Reviews (VNR) ke-3* pada *High-Level Political Forum on Sustainable Development (HLPF-SD)* di kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat. VNR tahun 2021 mengambil tema “*Sustainable and resilient recovery from the COVID-19 pandemic for the achievement of the 2030 Agenda*”. Penyusunan VNR 2021 mengedepankan inklusivitas dengan melibatkan seluruh elemen baik pemerintah dan parlemen, organisasi dan media, Filantropi dan pelaku usaha serta akademisi dan pakar. Dalam dokumen VNR 2021 menampilkan lebih dari 30 contoh baik/*best practices* yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk percepatan pelaksanaan TPB/SDGs di Indonesia. Indonesia juga menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang menerbitkan SDGs *Bond*. Penerbitan SDGs *Bond* sebesar EUR 500 juta berkontribusi dalam mempersempit kesenjangan pembiayaan, memungkinkan pemerintah untuk membiayai proyek-proyek berorientasi SDGs, serta mempercepat pemulihan yang berkelanjutan.

Pada tingkat nasional, Kementerian PPN/Bappenas melalui Sekretariat Nasional TPB/SDGs mendorong terbentuknya *SDGs Center* di perguruan tinggi baik perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. Hingga saat ini terdapat 34 universitas/perguruan tinggi di Indonesia yang sudah memiliki *SDGs Center/SDGs Hub/SDGs Network*. Diharapkan perguruan tinggi lainnya yang belum membentuk *SDGs Center* untuk melakukan persiapan, pendirian dan peresmian sehingga ke depan *SDGs Center* semakin banyak terbentuk dan terinternalisasi ke dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi (penelitian, pengajaran dan pengabdian masyarakat). Selain itu, Kementerian PPN/Bappenas melakukan koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mendorong penyusunan *Sustainability Report* dan penerbitan *Roadmap Keuangan Berkelanjutan* tahap II (2021-2025) dan Taksonomi Hijau.

Pada bulan November 2021, Kementerian PPN/Bappenas meluncurkan *Dashboard* SDGs versi 2.0. *Dashboard* ini nantinya akan dikelola bersama oleh Pusat data dan Informasi Kementerian PPN/Bappenas dan Sekretariat Nasional TPB/SDGs. *Dashboard* SDGs berisi data capaian indikator TPB/SDGs yang bisa dimanfaatkan oleh semua pihak untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan TPB/SDGs di Indonesia. Selain itu, Kementerian PPN/Bappenas melaksanakan *SDGs Annual Conference 2021* dengan tema “*Recovery and Resilience: Pendanaan Inklusif Untuk Pencapaian SDGs 2030*”. Fokus konferensi ini adalah menggali potensi dan strategi pendanaan inovatif dan inklusif untuk pencapaian TPB/SDGs.

Pada tingkat daerah, Kementerian PPN/Bappenas mengoordinasikan dan memberikan fasilitasi dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs di tingkat provinsi yang didalamnya melibatkan pemerintah kabupaten/kota dan pemangku kepentingan nonpemerintah dipimpin oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Sampai saat ini, terdapat 31 provinsi yang sudah menetapkan Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs melalui Peraturan Gubernur.

Seluruh data dalam laporan ini menunjukkan secara umum bahwa pencapaian TPB/SDGs di Indonesia hingga tahun keenam ini berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan, meski menghadapi tantangan dan hambatan yang tidak sedikit. Seluruh capaian TPB/SDGs yang telah diraih perlu dipertahankan, sedangkan yang masih kurang mesti ditingkatkan dan lebih mendapatkan perhatian. Percepatan atau akselerasi capaian TPB/SDGs ini membutuhkan beberapa prasyarat:

- Kepemimpinan di tingkat nasional dan daerah yang memprioritaskan dan mengarusutamakan visi TPB/SDGs secara tegas dalam rencana pembangunan;
- Ketersediaan data yang handal, terpercaya, akurat dan bisa dibagi-pakaikan (mengikuti kaidah Satu Data Indonesia) sebagai dasar pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan terkait perencanaan pembangunan baik di tingkat nasional maupun daerah;
- Komunikasi dan koordinasi yang lebih erat antar kementerian/lembaga dan antara perangkat pemerintah pusat dan daerah;
- Kolaborasi yang lebih erat serta ko-kreasi antara pemerintah dengan aktor non pemerintah (*non-state actors* atau NSA) khususnya pelaku usaha, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, media, serta berbagai organisasi/kelompok lainnya; dan
- Keterlibatan publik/warganegara dalam berbagai praktik pembangunan.

BAB 1

KOORDINASI PELAKSANAAN TPB/SDGs DI INDONESIA

1.1. Pencapaian TPB/SDGs Pada Tingkat Nasional

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 yang diperbaharui dengan Perpres Nomor 111 Tahun 2022 mengamanatkan Kementerian PPN/Bappenas selaku Koordinator Pelaksana untuk menyusun dan menetapkan **Rencana Aksi Nasional (RAN) TPB/SDGs periode 2021-2024** melalui Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas. RAN TPB/SDGs 2021-2024 ini memuat analisis kondisi pencapaian dan tantangan pelaksanaan TPB/SDGs yang telah memperhatikan juga dampak pandemi COVID-19 terhadap pencapaian target-target TPB/SDGs, target, dan arah kebijakan pencapaian TPB/SDGs.

Penyusunan RAN TPB/SDGs 2021-2024 memperhatikan arahan Presiden Republik Indonesia pada acara Konferensi Tahunan TPB/SDGs tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020, bahwa tantangan untuk mencapai target TPB/SDGs yang semakin berat akibat dampak pandemi COVID-19 tidak boleh menyurutkan semangat kita dan tidak boleh menurunkan target TPB/SDGs kita. Selain itu, saat ini kita juga telah memasuki *decade of actions* dengan sisa waktu kurang dari 9 tahun lagi untuk pencapaian target-target Agenda 2030. Transformasi di segala bidang pembangunan mutlak diperlukan agar upaya pencapaian target-target TPB/SDGs yang sudah sejalan dengan prioritas nasional dapat diakselerasi.

Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dan perlu kolaborasi yang konstruktif dengan multipihak agar Agenda 2030 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dapat direalisasikan. RAN TPB/SDGs 2021-2024 memiliki peran sentral dalam mengorkestrasikan dan mensinergikan seluruh program dan kegiatan serta potensi pembiayaan yang berasal dari pemerintah dan nonpemerintah agar memberikan daya ungkit yang lebih tinggi dalam percepatan pencapaian target-target TPB/SDGs.

Pada tahun 2021, Indonesia menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang **menerbitkan SDGs Bond**. Penerbitan SDGs Bond sebesar EUR 500 juta berkontribusi dalam mempersempit kesenjangan pembiayaan, memungkinkan pemerintah untuk membiayai proyek-proyek berorientasi SDG, serta mempercepat pemulihan yang berkelanjutan. SDGs Bond mengacu pada *the Republic of Indonesia SDGs Government Securities Framework*, yang menguraikan dua area fokus (*green/blue focus and social focus*) untuk *eligible SDG Expenditures* yang dapat dibiayai oleh tematik *bond* Indonesia.

Pada tahun fiskal 2021, SDGs Bond Indonesia telah mendanai empat proyek berbeda di tiga sektor di bawah empat kementerian. Proyek-proyek ini telah membawa dampak bagi lebih dari 20 juta penduduk Indonesia di 34 provinsi dalam bidang pendidikan, kesehatan, serta teknologi informasi dan komunikasi. Obligasi tersebut telah memberikan kontribusi terhadap sektor kesehatan dengan memberikan 63,7 juta dosis vaksin secara gratis di bawah program yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan.

Sektor pendidikan juga digarap melalui pemberian beasiswa bagi 10,4 juta anak SD dan 1 juta siswa SD Islam, termasuk 28,4 ribu siswa penyandang disabilitas. Beasiswa yang dikelola Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan Kementerian Agama itu menjangkau pelajar dari 34 provinsi, termasuk 9,4 ribu daerah terdepan, terpencil dan tertinggal (3T).

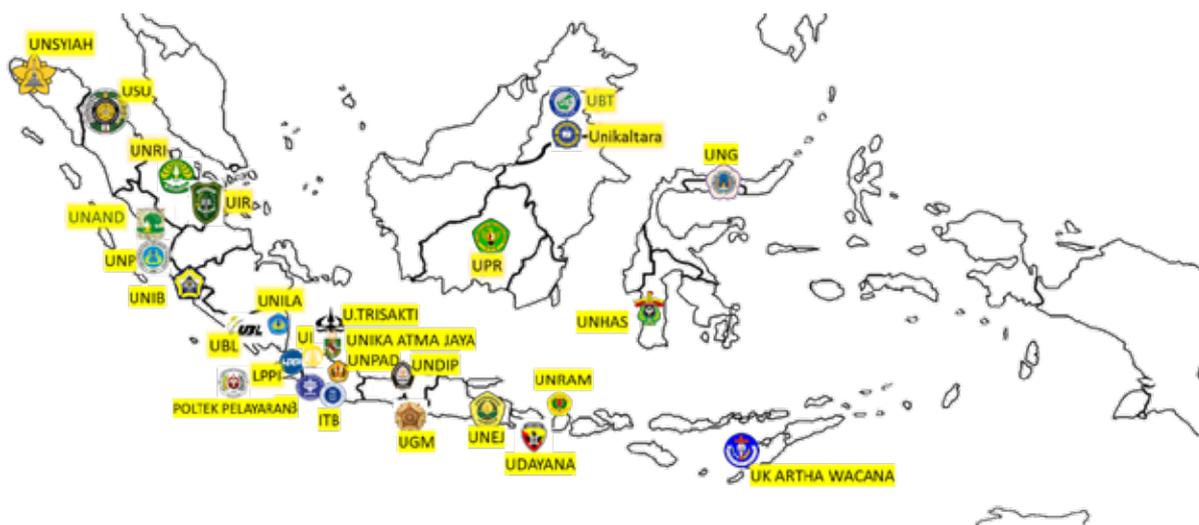
Di sektor infrastruktur internet dan komunikasi, SDGs *Bond* telah mendukung infrastruktur akses internet baru di 3.203 lokasi di Indonesia melalui program yang dikelola Kementerian Komunikasi dan Informatika. Lokasi-lokasi ini merupakan bagian dari wilayah 3T yang dianggap tidak layak secara komersial oleh penyedia layanan internet swasta.

Kementerian Keuangan berkoordinasi dengan Kementerian PPN/Bappenas dan kementerian/lembaga terkait menyeleksi *underlying project* yang akan dibiayai dari anggaran nasional dari penerbitan SDGs *Bond*. Proses seleksi *underlying project* mempertimbangkan keselarasan dengan TPB/SDGs dan prioritas dan sasaran nasional.

Pengembangan SDGs Center. Salah satu pemangku kepentingan TPB/SDGs yaitu platform Akademisi dan Pakar yang sebagian besar berasal dari Perguruan Tinggi. Perguruan Tinggi memiliki peran signifikan pada pelaksanaan TPB/SDGs berdasarkan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan/pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Peran-peran tersebut dapat diwujudkan terutama melalui peningkatan kapasitas dan inovasi data, pemantauan dan evaluasi, dan *policy research*, baik untuk kepentingan internal maupun para pemangku kepentingan lainnya. Peran Perguruan Tinggi dan dengan kapasitas *knowledge* yang dimilikinya akan sangat bermanfaat bagi para pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan TPB/SDGs, baik di tingkat nasional maupun daerah. Perguruan Tinggi atau lembaga sejenis yang menjadi pusat unggulan (*center of excellence*) dalam pelaksanaan TPB/SDGs diharapkan bisa membentuk SDGs *Center*.

SDGs *Center* diharapkan bisa lebih fokus mendukung pelaksanaan TPB/SDGs yang selaras dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, sekaligus menjadi mitra para pemangku kepentingan lainnya dalam mempercepat pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs. Sejak awal pelaksanaan TPB/SDGs, Kementerian PPN/Bappenas sebagai koordinator pelaksanaan TPB/SDGs mendorong pembentukan SDGs *Center* di berbagai Perguruan Tinggi dan lembaga sejenis di seluruh Indonesia. Hingga akhir tahun 2021, secara kumulatif telah terbentuk 29 SDGs *Center* di berbagai Perguruan Tinggi dan Lembaga sejenis. Selama kurun waktu tahun 2021 terdapat pembentukan tujuh SDGs *Center* baru yang terdiri dari empat Perguruan Tinggi Negeri dan tiga Perguruan Tinggi Swasta. SDGs *Center* yang terbentuk tahun 2021 tersebut antara lain: (1) SDGs *Center* Universitas Bandar Lampung; (2) *Atmajaya Sustainability Hub*, Universitas Katolik Indonesia Atmajaya; (3) *Trisakti Sustainability Center (TSC)* Universitas Trisakti; (4) SDGs *Center* Universitas Sumatera Utara; (5) Pusat Kajian SDGs, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS); (6) Sekretariat TPB/SDGs, Politeknik Pelayaran Banten; dan (7) SDGs *Center* Universitas Negeri Padang. Sampai laporan ini disusun telah terjadi penambahan 5 SDGs *Center* baru, sehingga secara keseluruhan saat ini telah terbentuk 31 SDGs *Center* di berbagai wilayah Indonesia.

Secara khusus Pemerintah juga terus mendorong untuk mengoptimalkan peran dan kontribusi perguruan tinggi melalui pembentukan jejaring *SDGs Center*. Jaringan ini dapat menjadi sarana untuk berbagi pengalaman, model, dan fokus pengembangan *SDGs Center*, serta mendukung pendirian *SDGs Center* baru terutama di daerah-daerah yang belum memiliki. Hal ini juga akan membuka kemungkinan inisiasi pendirian program studi TPB/SDGs di berbagai Perguruan Tinggi.



Gambar 1.1 Sebaran *SDGs Center* yang telah terbentuk di Indonesia hingga akhir tahun 2021

Koordinasi *SDGs Desa*. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang intinya mengatur tata kelola pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa yang difokuskan pada mewujudkan *SDGs Desa*, merupakan pelaksanaan amanat Perpres 59 Tahun 2017 oleh Kemendesa PDTT. Sejak *SDGs Desa* dicanangkan pada tahun 2020 tersebut maka koordinasi antara Kementerian PPN/Bappenas dengan Kemendesa PDTT terus dilakukan agar pelaksanaan *SDGs Desa* sesuai yang direncanakan dan diharapkan agar tepat sasaran.

Sepanjang tahun 2021 telah dilakukan konsolidasi di Kementerian PPN/Bappenas untuk mengkoordinasi pelaksanaan Permen Desa PDTT Nomor 21/2020 tersebut, yang terkait dengan Pendataan Desa atas indikator *SDGs Desa* yang ditetapkan Kemendesa PDTT. Koordinasi juga dilakukan dengan Kemendesa PDTT untuk memastikan pendataan untuk *SDGs Desa* menggunakan indikator yang selaras dengan indikator nasional. Sekretariat Nasional TPB/SDGs juga memberikan masukan pada *Focus Group Discussion* (FGD) untuk membahas bahan yang akan disampaikan pada *workshop* G20-OECD-UNDP tentang pelokalan TPB/SDGs di kota dan desa.

Koordinasi *Sustainability Report*. Penerbitan *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan tahap II (2021-2025) dan Taksonomi Hijau oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong percepatan

transformasi dunia bisnis dan keuangan pada era keberlanjutan. *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan mewajibkan perusahaan terbuka yang menyampaikan untuk menyampaikan laporan keberlanjutan. Setidaknya, kini 168 perusahaan terbuka telah menyampaikan laporan keberlanjutan. Meski masih belum semua perusahaan terbuka, namun beberapa tahun terakhir telah terjadi percepatan.

Meski belum terlalu lama dikeluarkan, adanya Taksonomi Hijau juga telah mempercepat penyaluran kredit yang lebih memperhatikan aspek keberlanjutan. Hal ini dikonfirmasi dari penelitian mengenai dampak setelah terjadinya Taksonomi Hijau. Beberapa perbankan besar, juga telah mendeklarasikan untuk tidak memberikan pinjaman baru pada sektor energi yang berbahan bakar batu bara. Keuangan berkelanjutan agaknya akan segera menjadi era baru di Indonesia.

Tahun 2021 merupakan kali ketiga Indonesia menyampaikan laporan ke tingkat global melalui **Voluntary National Review (VNR)**, setelah sebelumnya pada tahun 2017 dan 2019 disampaikan VNR pertama dan kedua ke *United Nations* melalui UN ECOSOC. Pada laporan VNR 2021 ini, Indonesia berfokus pada sembilan Tujuan yang diangkat pada tema HLPF 2021 tentang “*Sustainable and resilient recovery from the COVID-19 pandemic for the achievement of the 2030 Agenda*” yaitu Tujuan 1, 2, 3, 8, 10, 12, 13, 16, dan 17. Keterkaitan antar kesembilan Tujuan tersebut menjadi dasar dalam penyusunan VNR yang tertuang pada *framework* atau kerangka pemikiran untuk analisis laporan. Analisis laporan tersebut bertumpu pada kebijakan reformasi yang ditetapkan Indonesia pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021 dalam upaya mengatasi dampak pandemi COVID-19. Untuk melengkapi analisis dari kesembilan Tujuan tersebut, disampaikan pula sekilas capaian dari kedelapan Tujuan lainnya yang juga didukung dengan lampiran statistik yang lengkap atas capaian semua indikator TPB/SDGs Indonesia.

Penyusunan *Voluntary National Review (VNR)* Indonesia dilakukan dengan menerapkan prinsip inklusif dan transparan dengan melibatkan empat platform partisipasi yang terdiri dari pemerintah pusat dan daerah, organisasi kemasyarakatan dan media, filantropi dan pelaku usaha, serta akademisi dan pakar. Proses penyusunan VNR juga direviu oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan dikonsultasikan dengan parlemen. UN *System* juga UN ESCAP yang dikoordinasikan oleh UN *Resident Coordinator* memfasilitasi dan memperkaya analisis 9 (sembilan) tujuan yang dianalisis pada VNR 2021. UN *system* juga mendukung proses pengolahan data statistik oleh BPS termasuk data terpilah untuk menganalisis capaian TPB/SDGs pada kelompok rentan, antara lain penduduk miskin, perempuan, anak, dan penyandang disabilitas.

Pengembangan *Dashboard* SDGs. Pada bulan November 2021, Kementerian PPN/Bappenas meluncurkan *Dashboard* SDGs versi 2.0 sebagai platform digital yang bertujuan untuk memudahkan seluruh pemangku kepentingan dalam memantau kemajuan pencapaian indikator-indikator TPB/SDGs di Indonesia. Berbeda dari versi sebelumnya, *Dashboard* SDGs versi 2.0 memuat data capaian dari 44 indikator TPB/SDGs terpilih sesuai Metadata Edisi II dan menampilkan fitur yang jauh lebih lengkap, termasuk analisis kewilayahan, fitur ketersediaan data, dan *deep analytic* yang mencakup korelasi, analisis multi grafik, dan *specific age*. Ke

depan, pengembangan *Dashboard* SDGs akan terus dilakukan untuk memutakhirkan data capaian serta menambahkan lebih banyak indikator dan fitur analitik yang dibutuhkan.

Selain *Dashboard* SDGs, **pengembangan sistem e-monev SDGs** juga menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan efektivitas pemantauan dan evaluasi terutama pada tataran program/kegiatan yang tercantum pada rencana aksi TPB/SDGs. Untuk pemerintah pusat, sistem *e-monev* SDGs memanfaatkan data realisasi rincian *output* kementerian/lembaga yang telah dilakukan penandaan (*tagging*) TPB/SDGs dari aplikasi e-monev Bappenas. Sistem e-monev SDGs juga memiliki fitur untuk pelaporan program/kegiatan pemangku kepentingan nonpemerintah yang tercantum pada Matriks 3 dan 4 RAN TPB/SDGs. Ke depan, pemanfaatan sistem e-monev SDGs akan diperluas untuk pemantauan dan evaluasi RAD TPB/SDGs provinsi.

Kementerian PPN/Bappenas telah menyelenggarakan **Konferensi Tahunan SDGs Tahun 2021** pada tanggal 23-24 November 2021, dengan mengangkat tema “*Recovery and Resilience: Pendanaan Inklusif Untuk Pencapaian SDGs 2030*” yang selaras dengan salah satu kesepakatan *Financing for Development* yang tercantum dalam *Addis Ababa Action Agenda*. Tema ini diangkat mengingat Indonesia tetap berkomitmen untuk tidak menurunkan target-target yang telah ditetapkan guna pencapaian TPB/SDGs pada tahun 2030 meskipun disrupsi pencapaian target TPB/SDGs dipengaruhi dampak pandemi COVID-19. Komitmen ini memerlukan tata kelola kelembagaan dan mekanisme kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dan pendekatan yang tidak *business as usual*.

Konferensi TPB/SDGs bertujuan untuk mendapatkan masukan dan rekomendasi para pakar dan praktisi tentang pendanaan inovatif yang inklusif, berbagi pengalaman strategi pendanaan TPB/SDGs dalam perspektif global dan nasional, serta memetakan kebutuhan dan peluang pendanaan untuk TPB/SDGs. Semua topik tersebut didiskusikan dalam dua hari acara Konferensi bersama seluruh pemangku kepentingan untuk mengajak serta dalam upaya pemenuhan gap pendanaan TPB/SDGs.

Para undangan yang hadir pada Konferensi Tahunan SDGs berasal dari seluruh platform partisipasi TPB/SDGs, yaitu: Pemerintah dan Parlemen, Filantropi dan Pelaku Usaha, Organisasi Kemasyarakatan, Media, Akademisi dan Pakar. Kehadiran seluruh pemangku kepentingan ini adalah bukti Indonesia tetap melaksanakan prinsip inklusif dan dalam rangka memastikan *No One Left Behind*.

Pada Konferensi SDGs tahun 2021 telah dilaksanakan *soft launching* Rencana Aksi Nasional TPB/SDGs Periode 2021-2024, peluncuran *Dashboard* SDGs Versi 2.0, serta *SDGs Investment Platform*. Menteri PPN/Kepala Bappenas memberikan apresiasi atas sumbangsih seluruh pemangku kepentingan yang selama ini aktif terlibat baik dalam RAN TPB/SDGs periode 2017-2019 maupun periode 2021-2024. Konferensi ini juga melibatkan generasi muda, Duta Kampus SDGs dari 11 SDGs *Center*, serta penampilan SDGs *Center* Universitas Padjadjaran dan *2030 Youth Force*.

1.2. Pencapaian TPB/SDGs Pada Tingkat Daerah

Sampai dengan September 2022, terdapat 31 provinsi yang telah menetapkan Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs melalui Peraturan Gubernur. Sementara itu, Provinsi Maluku, Maluku Utara, dan Papua Barat masih dalam proses finalisasi RAD dan penetapan regulasinya. Selanjutnya terdapat 9 (sembilan) provinsi yang masa berlaku RAD-nya telah berakhir pada tahun 2021, yaitu Provinsi Sumatera Barat, Bengkulu, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara. Provinsi Kalimantan Utara telah menyelesaikan RAD periode 2022-2026, sementara delapan provinsi lainnya masih dalam tahap proses penyusunan RAD periode kedua.

Selain menyusun RAD TPB/SDGs, sesuai amanat Perpres Nomor 59 Tahun 2017 yang diperbaharui dengan Perpres Nomor 111 Tahun 2022 pemerintah daerah provinsi juga berkewajiban untuk menyusun laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan TPB/SDGs. Hingga akhir tahun 2021, terdapat 10 provinsi yang telah menyampaikan laporan pencapaian TPB/SDGs dan jumlah ini terus bertambah menjadi 23 provinsi pada September 2022.

Dalam mensukseskan pelaksanaan TPB/SDGs pada tingkat daerah, peningkatan kapasitas serta dukungan bagi daerah dilakukan secara berkesinambungan. Peningkatan kapasitas bagi daerah dilakukan 2 (dua) arah, yaitu difasilitasi oleh Sekretariat Nasional TPB/SDGs ataupun Sekretariat TPB/SDGs daerah secara mandiri mengadakan agenda peningkatan kapasitas secara *offline* ataupun *online*. Sekretariat Nasional TPB/SDGs telah mengadakan beberapa kali *workshop* peningkatan kapasitas bagi daerah, antara lain: *Workshop* Monitoring dan Evaluasi, *Workshop* Strategi Komunikasi TPB/SDGs di daerah, dan *Workshop* Pengarusutamaan TPB/SDGs dalam Penyusunan KLHS-RPJMD. Selain memberikan peningkatan kapasitas, Sekretariat Nasional TPB/SDGs juga memfasilitasi penyediaan data capaian indikator TPN/SDGs di tingkat daerah yang bersumber dari BPS dan kementerian/lembaga untuk mendukung penyusunan RAD TPB/SDGs dan juga laporan monitoring dan evaluasi TPB/SDGs.

Pembelajaran pelaksanaan TPB/SDGs di daerah dapat dilihat dari Provinsi Jawa Timur dan Sumatera Utara. Provinsi Jawa Timur telah menetapkan Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs untuk 2 (dua) periode yaitu RAD TPB/SDGs 2018-2019 (Peraturan Gubernur Nomor 70/2018) dan RAD TPB/SDGs 2020-2024 (Peraturan Gubernur Nomor 83/2020). Dari sisi pelaporan, Provinsi Jawa Timur juga secara rutin menyampaikan laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan TPB/SDGs di wilayahnya untuk tahun 2019, 2020, dan 2021. Hal yang sangat baik adalah pada setiap tahunnya terjadi peningkatan kualitas laporan terutama dari sisi kelengkapan substansi sesuai pedoman.

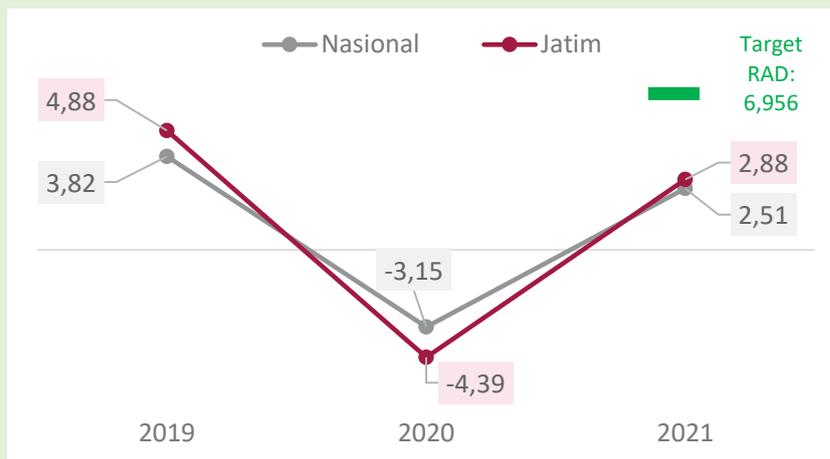
Kotak 1.1 Gambaran Pelaksanaan TPB/SDGs di Provinsi Jawa Timur

Kemiskinan masih menjadi permasalahan utama di Provinsi Jawa Timur. Pada saat pandemi COVID-19, angka kemiskinan sempat meningkat. Namun, pada tahun 2021 angkanya sudah kembali menurun sebagai hasil dari berbagai upaya untuk memulihkan kondisi perekonomian dan memperluas perlindungan sosial. Pertumbuhan ekonomi yang sempat berkontraksi pada tahun 2020 sudah dapat dipulihkan pada tahun 2021, walaupun angkanya masih lebih rendah dari target RAD. Capaian ini sudah lebih tinggi dari rata-rata nasional. Pada tahun 2021, rasio Gini Provinsi Jawa Timur (0,364) sudah lebih baik dari rata-rata nasional (0,381), tetapi terjadi stagnansi capaian selama 3 (tiga) tahun terakhir. Untuk itu, diperlukan terobosan untuk mengurangi ketimpangan.



Penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional (%)

Sumber: Susenas, BPS



Laju Pertumbuhan PDB per kapita (%)

Sumber: Susenas, BPS

Provinsi Jawa Timur juga menghadapi beberapa kendala dalam pemantauan dan evaluasi TPB/SDGs antara lain penyediaan data sektoral dan data terdisagregasi, keterbatasan sumber daya manusia dan kompetensi dalam proses pengumpulan dan pengolahan data, serta keterlibatan nonpemerintah dalam pemantauan dan evaluasi. Ke depan, upaya akan difokuskan pada peningkatan kapasitas kabupaten/kota dalam menyusun rencana program/kegiatan untuk TPB/SDGs, peningkatan kapasitas pemantauan dan evaluasi, sinkronisasi dan peningkatan ketersediaan data, dan penguatan kolaborasi dengan nonpemerintah.

Demikian pula dengan pelaksanaan TPB/SDGs di Provinsi Sumatera Utara. Diawali dengan penetapan Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs tahun 2019-2023 melalui Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2022. Dalam memastikan efektivitas pelaksanaannya, Provinsi Sumatera Utara melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara reguler, serta menyusun laporan tahunan 2020 dan 2021 yang telah disampaikan ke tingkat pusat. Inklusif dan partisipatif adalah refleksi pelaksanaan TPB/SDGs di Provinsi Sumatera Utara. Hal ini tercermin dari proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi TPB/SDGs yang senantiasa melibatkan pemerintah dan aktor nonpemerintah.

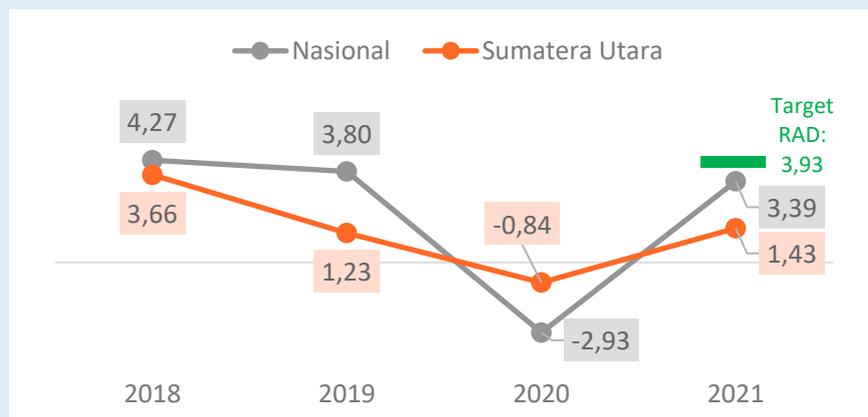
Kotak 1.2 Gambaran Pelaksanaan TPB/SDGs di Provinsi Sumatera Utara

Penyediaan lapangan kerja, berkurangnya pengangguran, dan peningkatan daya saing melalui sektor industri manufaktur menjadi fokus Provinsi Sumatera Utara yang dimuat dalam RPJMD 2019-2023. Saat ini, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) masih relatif tinggi. Peningkatan sebesar 1,52% terjadi pada 2020 sebagai dampak pandemi COVID-19. Meskipun TPT menurun, diperlukan intervensi kebijakan untuk mengembalikan capaian sebelum pandemi atau lebih rendah. Pada sektor ekonomi, pemulihan terlihat dengan kembali positifnya capaian laju PDB industri manufaktur yang meningkat 2,27%. Pemerataan pendidikan juga memperlihatkan perkembangan yang baik, hal tersebut ditandai dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi yang hampir menyamai capaian nasional sebesar 31,10%.



Tingkat Pengangguran Terbuka

Sumber: Sakernas, BPS



Laju Pertumbuhan PDB Industri Manufaktur

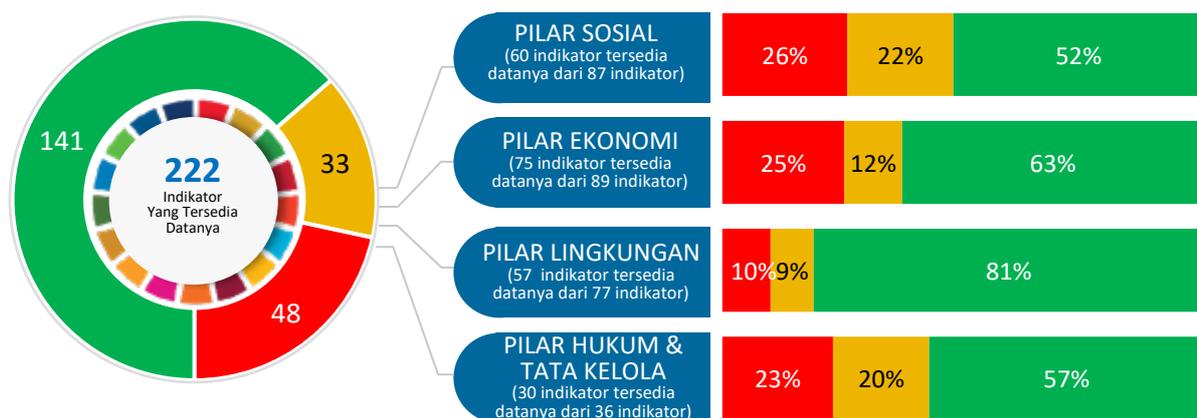
Sumber: BPS

Pelaksanaan TPB/SDGs di Provinsi Sumatera Utara selama ini telah menggunakan pendekatan partisipatif dengan pelibatan perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, dan pelaku usaha untuk mengakselerasi pencapaian target-target yang telah ditetapkan pada RAD. Saat ini, masih terdapat tantangan yang dihadapi antara lain ketersediaan data, serta keterbatasan jumlah dan kapasitas sumber daya manusia. Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi terus bekerjasama dengan BPS Provinsi untuk penyediaan data dan meningkatkan kapasitas perangkat daerah dan pemerintah kabupaten/kota dalam perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung TPB/SDGs.

BAB 2 KEMAJUAN PENCAPAIAN TPB/SDGs

Pelaksanaan agenda pembangunan tahun 2021 memiliki tantangan yang cukup berat dengan adanya pandemi COVID-19 yang ditetapkan sebagai Darurat Kesehatan Masyarakat oleh Presiden RI sejak April tahun 2020. Pandemi COVID-19 telah menimbulkan disrupsi pada kehidupan dunia termasuk di Indonesia. Dampak yang dirasakan Indonesia juga cukup besar dengan terputusnya mata rantai pasokan barang dan jasa, terganggunya mobilitas masyarakat, dan terhentinya kegiatan ekonomi khususnya pada sektor industri dan pariwisata yang berdampak pada meningkatnya angka-angka pengangguran dan kemiskinan serta pada akhirnya menimbulkan kontraksi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Namun hal ini mengalami dinamika seiring dengan adanya pemulihan ekonomi yang terjadi sepanjang tahun 2021. Hal juga tercermin pada capaian berbagai target dan indikator TPB/SDGs di tingkat nasional.

Laporan Pencapaian TPB/SDGs Tahun 2021 merupakan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Nasional (RAN) TPB/SDGs Tahun 2021-2024. Laporan ini disusun atas 222 indikator yang tersedia datanya dari 289 indikator yang tercantum dalam metadata indikator TPB/SDGs Edisi II. Capaian indikator dinilai berdasarkan klasifikasi tercapai (hijau), akan tercapai/membaik (kuning), perlu perhatian khusus (merah) dan data tidak tersedia (-). Secara umum lebih dari separuh (63%) indikator SDGs yang tersedia datanya telah tercapai dan 33 indikator (15%) membaik, meskipun masih terdapat 48 indikator (22%) yang memerlukan perhatian khusus. Hal ini memerlukan upaya percepatan agar kembali *on-track* sesuai target yang telah ditetapkan. Seluruh pilar pembangunan SDGs menunjukkan kemajuan yang baik pada tahun 2021 (Gambar 2.1).



Keterangan:

■ Tercapai
 ■ Akan tercapai/membaik
 ■ Perlu perhatian khusus

Gambar 2.1 Status Capaian Indikator TPB/SDGs 2021

Berdasarkan perkiraan dampak COVID-19 terhadap kegiatan pembangunan pada RKP Tahun 2021 dan dinamika pencapaian target TPB/SDGs, terdapat pengaruh dinamika pandemi COVID-19 terhadap pencapaian target TPB/SDGs terutama pada pilar pembangunan ekonomi dan pilar pembangunan lingkungan. Kondisi lingkungan yang dicerminkan oleh membaiknya capaian indikator TPB/SDGs pilar pembangunan lingkungan diperkirakan terutama karena berkurangnya mobilitas masyarakat dan aktivitas sektor industri sejak awal pandemi COVID-19 berlangsung. Sehingga hampir 80% data terkait indikator pilar pembangunan lingkungan menunjukkan tercapainya target indikator TPB/SDGs. Pada awal tahun 2021 dengan adanya berbagai upaya pemulihan terhadap pandemi, mobilitas masyarakat dan kegiatan ekonomi mulai meningkat kembali. Sehingga terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi pada awal tahun 2021 yang cukup signifikan. Pada pertengahan tahun 2021 pertumbuhan ekonomi sempat mengalami penurunan kembali, namun kembali menunjukkan peningkatan hingga akhir tahun 2021. Hal ini juga tercermin dari lebih 60% indikator TPB/SDGs pada pilar pembangunan ekonomi memiliki tercapai targetnya. Dinamika ini mendorong terjadinya tren penurunan tingkat pengangguran dan penurunan persentase penduduk miskin pada akhir tahun 2021.

1 TANPA KEMISKINAN



TUJUAN 1

Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk di Manapun

Tingkat kemiskinan ekstrem dan kemiskinan nasional mengalami penurunan pada tahun 2021, walaupun dampak dari pandemi COVID-19 masih belum sepenuhnya terpulihkan.

Tingkat kemiskinan ekstrem (USD 1,9 PPP)

Maret 2021 4,0%

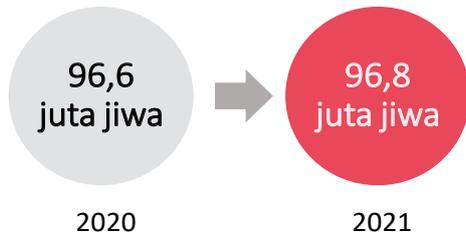
Tingkat kemiskinan nasional

Maret 2021 10,14%

Sep 2021 9,71%

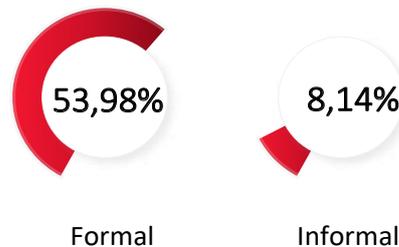
Sumber: BPS

Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN



Sumber: BPJS Kesehatan

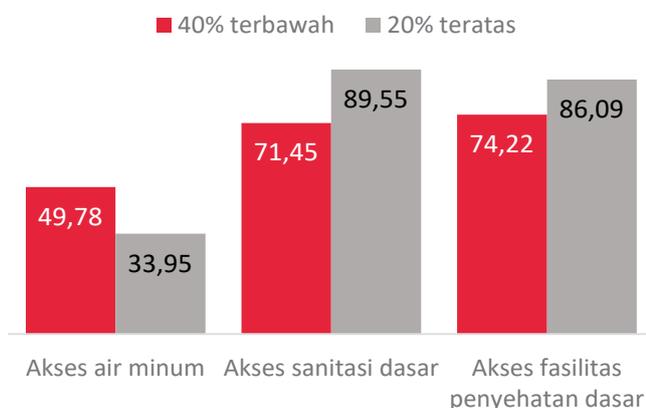
Proporsi peserta BPJS Ketenagakerjaan



Sumber: BPJS Ketenagakerjaan (2021)

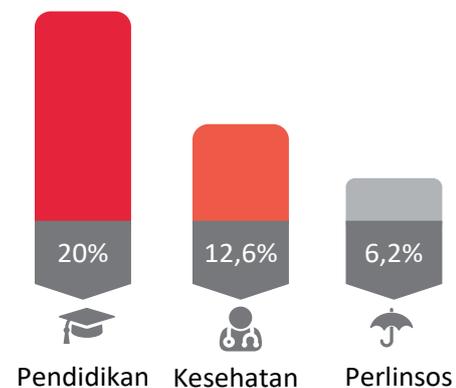
Perlindungan sosial sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mempercepat pengentasan kemiskinan terus ditingkatkan, baik dari sisi cakupan maupun ketepatan sasaran penerima program.

Akses layanan dasar terutama sarana sanitasi dan higiene pada penduduk 40% terbawah masih perlu ditingkatkan.



Sumber: BPS (2021)

Alokasi anggaran pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial terus diprioritaskan.



Sumber: Kemenkeu (2021)

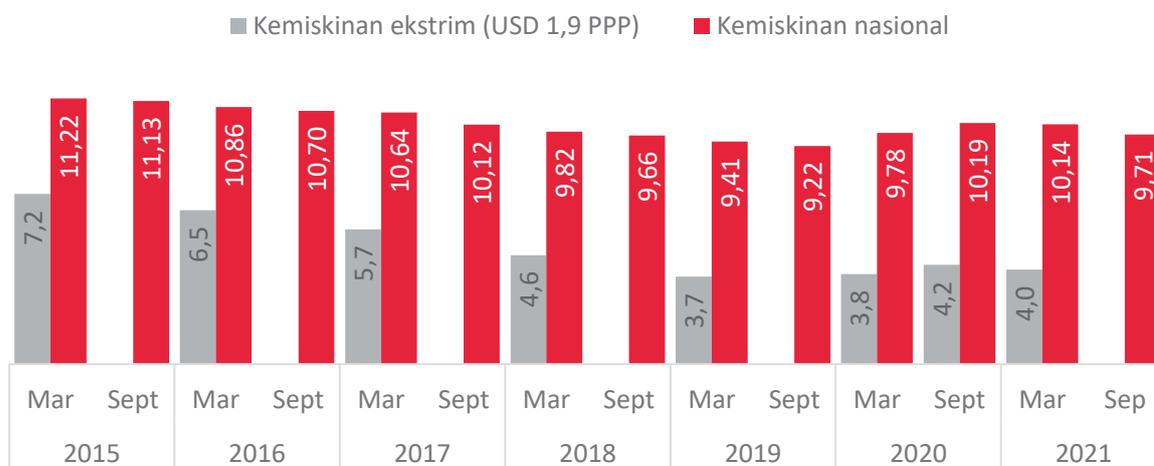
2.1. Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan

A. Pengentasan Kemiskinan

Penurunan tingkat kemiskinan ekstrem (USD PPP 1,9 per kapita/hari) pada tahun 2021 telah melampaui target yang ditetapkan. Meskipun sempat meningkat menjadi 4,2% (September 2020) akibat pandemi COVID-19, kemiskinan ekstrem berhasil turun kembali menjadi 4,0% (Maret 2021). Demikian halnya dengan persentase penduduk yang hidup di bawah Garis Kemiskinan Nasional (GKN) yang juga sempat meningkat pada tahun 2020, saat ini angkanya sudah kembali mencapai satu digit.

1. Kemiskinan Ekstrem dan Kemiskinan Nasional

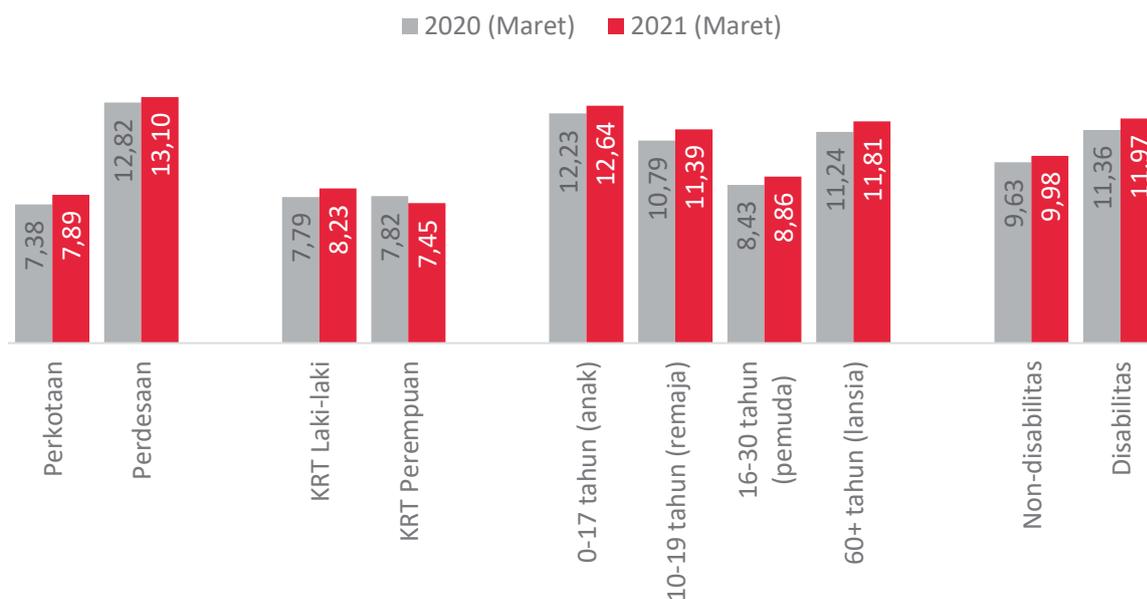
Pada periode 2015-2021, proporsi penduduk yang hidup di tingkat kemiskinan ekstrem telah berkurang hampir setengahnya dari 7,2% (Maret 2015) menjadi 4,0% (Maret 2021). Upaya percepatan penurunan penghapusan kemiskinan ekstrem menjadi “0%” pada tahun 2024 terus dilakukan melalui pemberian stimulus fiskal berupa bantuan sosial, antar lain Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako, Program Indonesia Pintar (PIP), penerima bantuan iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), bantuan sosial tunai (BST), bantuan subsidi listrik, dan bantuan program PEN (Prakerja BPUM dan BLT-DD).



Gambar 2.2 Tren kemiskinan ekstrem dan kemiskinan nasional, 2015-2021

Sumber: Susenas, BPS

Pada tahun 2021, tingkat kemiskinan nasional ditemukan lebih tinggi pada kepala rumah tangga laki-laki, penduduk yang tinggal di daerah perdesaan, kelompok usia anak dan lanjut usia, serta penduduk dengan disabilitas. Kelompok penduduk lansia dan disabilitas juga lebih berisiko tinggi dalam kemiskinan ekstrem.



Gambar 2.3 Tren tingkat kemiskinan nasional berdasarkan jenis kelamin, daerah tempat tinggal, dan kelompok umur, 2020-2021

Sumber: Susenas, BPS

Upaya pengentasan kemiskinan masih menghadapi tantangan akurasi (ketepatan) sasaran dari program-program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial yang menasar kelompok miskin dan rentan. Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022, pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan sosial bagi kelompok rentan, antara lain anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, kelompok tuna sosial, migran bermasalah dan korban perdagangan orang dengan melakukan reformasi sistem perlindungan sosial.

2. Sumber Daya Untuk Pengentasan Kemiskinan

Keterbatasan fiskal pada tahun 2021 mendorong pemerintah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengalokasian anggaran. Alokasi anggaran pemerintah untuk program pengentasan kemiskinan menurun dari Rp495,5 triliun (18,07% terhadap APBN 2020) menjadi Rp469,38 triliun (16,84% terhadap APBN 2021). Demikian pula alokasi pengeluaran pemerintah untuk perlindungan sosial yang menurun dari 18,1% (2020) menjadi 12,6% (2021).

Dalam sumber daya tersebut, pemerintah terus berupaya menekan tingkat kemiskinan dan meningkatkan akurasi target sasaran dengan melakukan integrasi dan digitalisasi bantuan sosial secara nontunai, antara lain, (a) integrasi PKH dan PIP, (b) transformasi subsidi energi (LPG dan listrik) menjadi bansos terintegrasi dengan Program Sembako, (c) penguatan desain pembayaran bantuan sosial nontunai, dan (d) pengembangan graduasi berkelanjutan untuk seluruh program bantuan sosial.

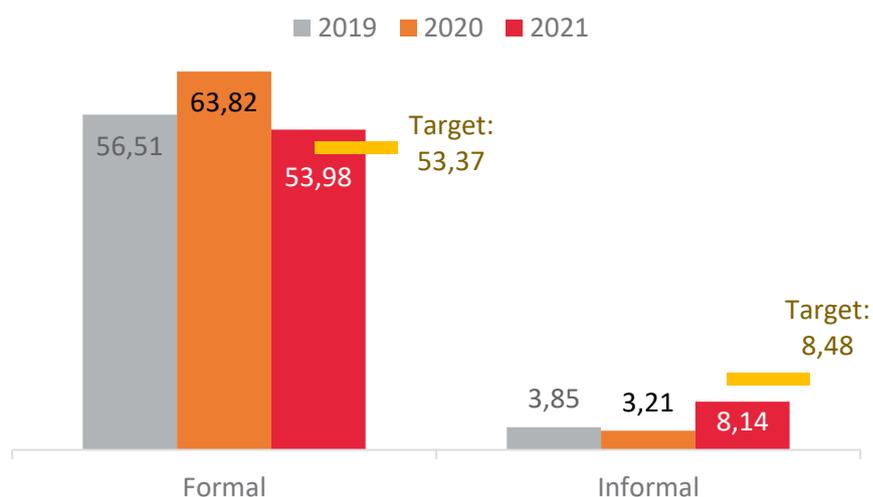
Disisi lain, pengeluaran pemerintah untuk anggaran kesehatan sudah di atas 5% dan cenderung meningkat dari 5,2% (2020) menjadi 6,2% (2021). Alokasi anggaran pendidikan juga sudah dialokasikan sesuai amanat Undang-Undang sebesar 20,0% pada tahun 2021.

B. Reformasi Sistem Perlindungan Sosial

Pada tahun 2021, sekitar 96,8 juta penduduk dengan pengeluaran 40% terbawah menerima bantuan premi (PBI) JKN. Jumlah ini lebih tinggi dari 96,2 juta penduduk pada tahun sebelumnya. Sejalan dengan pemulihan kondisi perekonomian pasca pandemi, penyempurnaan penyelenggaraan program bantuan dan jaminan sosial yang lebih akurat, terintegrasi dan adaptif difokuskan pada: (a) perbaikan akurasi data untuk ketepatan sasaran penduduk miskin dan rentan; (b) penguatan skema pendampingan dan layanan terpadu; (c) perluasan data registrasi sosial ekonomi mencakup 70% populasi melalui digitalisasi monografi desa/kelurahan; dan (d) penguatan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) kesehatan dan ketenagakerjaan yang komprehensif dan terintegrasi.

Selain perbaikan akurasi data program perlindungan sosial, pemerintah juga melakukan penguatan fungsi pendampingan dalam melaksanakan program bantuan sosial serta edukasi penerima manfaat untuk mendorong perubahan perilaku kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Selain itu, peningkatan kemandirian ekonomi kelompok miskin dan rentan juga terus dilakukan, antara lain melalui akselerasi penguatan ekonomi keluarga, pendampingan usaha dan peningkatan kualitas produksi usaha kecil dan mikro.

Sejalan dengan penguatan pendampingan usaha kecil dan mikro, cakupan kepesertaan program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan pada pekerja informal menunjukkan peningkatan signifikan dari 3,21% pada tahun 2020 menjadi 8,14% pada tahun 2021, walaupun belum mencapai target 8,48%. Sementara itu, pekerja formal yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan mengalami penurunan dari 63,82% (2020) menjadi 53,98% (2021) meskipun angkanya masih melebihi target di tahun 2021.

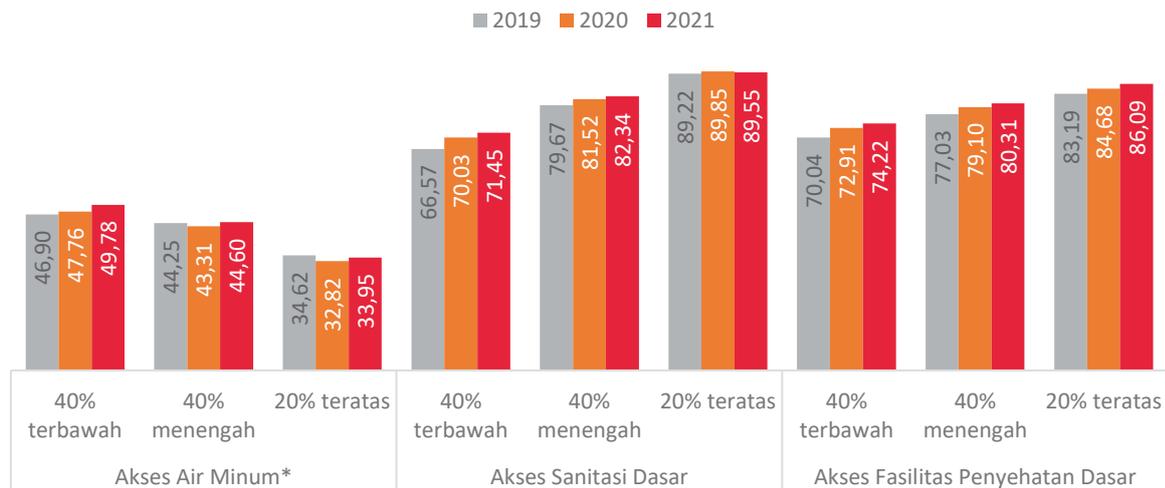


Gambar 2.4 Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan, 2018-2021

Sumber: BPJS Ketenagakerjaan

C. Akses dan Kualitas Layanan Dasar dan Kepemilikan Atas Tanah

Pemerataan penyediaan infrastruktur layanan dasar di bidang kesehatan, air minum dan sanitasi, perumahan dan pemukiman khususnya bagi masyarakat miskin dan rentan (kelompok 40% ekonomi terbawah) mengalami tren peningkatan dalam tiga tahun terakhir. Hal ini menandakan komitmen pemerintah untuk terus menanggulangi kemiskinan dan mengurangi ketimpangan, guna meningkatkan pemerataan kualitas hidup masyarakat.



Gambar 2.5 Akses terhadap layanan dasar berdasarkan kuintil pengeluaran, 2019-2021

Sumber: Susenas, BPS

Keterangan: *Akses air minum aman dari segi kualitas fisik

Perbaikan akses layanan dasar yang cukup konsisten terlihat pada penduduk miskin dan rentan. Pada tahun 2021, akses layanan air minum pada kelompok 40% pengeluaran terbawah mencapai 49,78% dan sudah melebihi rata-rata nasional yaitu 43,81%. Sedangkan layanan sanitasi dasar pada kelompok ini masih sebesar 71,45% atau dibawah rata-rata nasional sebesar 80,29%. Untuk akses fasilitas penyehatan dasar (fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air) baru mencapai 74,22%, atau dibawah rata-rata nasional sebesar 79,59%.

Secara nasional akses rumah tangga terhadap hunian dengan status rumah milik mengalami sedikit peningkatan dari 80,10% (2020) menjadi 81,08% (2021). Selain itu, selama 5 tahun terakhir proporsi masyarakat pengeluaran 40% terbawah yang memiliki rumah milik cenderung lebih tinggi dibandingkan kelompok lainnya. Pada tahun 2021, masyarakat ekonomi 40% terbawah yang memiliki rumah mencapai 85,55%, lebih tinggi dibandingkan masyarakat berpendapatan menengah (80,84%) dan terkaya (75,05%). Untuk mendorong standar hidup layak bagi seluruh penduduk, pemerintah terus berkomitmen untuk meningkatkan penyediaan infrastruktur layanan dasar termasuk hunian bagi masyarakat miskin dan berpendapatan rendah.

2 TANPA KELAPARAN

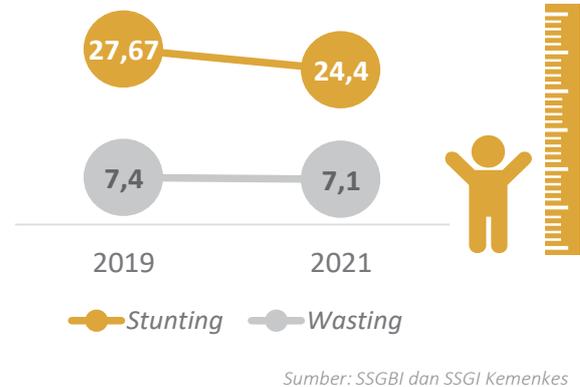


TUJUAN 2

Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan

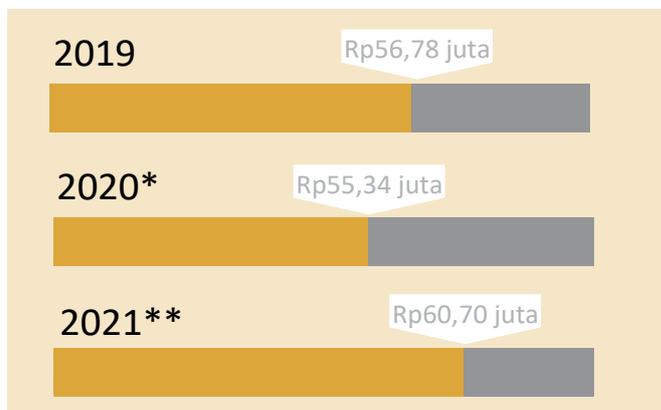
Pandemi COVID-19 berdampak pada menurunnya ketahanan pangan.

- **8,49%** penduduk mengonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi (BPS, 2021).
- **4,79%** penduduk mengalami kerawanan pangan sedang atau berat (BPS, 2021).



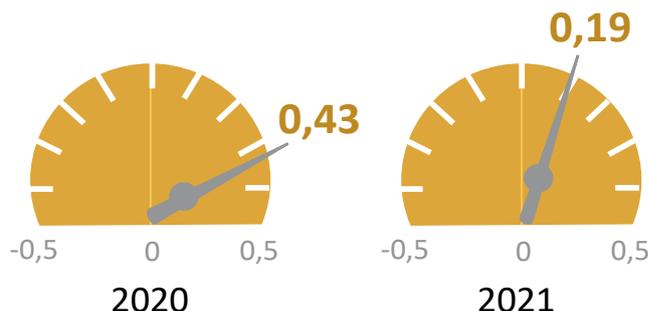
Prevalensi *stunting* pada balita terus menurun, meskipun belum mencapai target sebesar 21,1% pada tahun 2021.

Nilai tambah pertanian (NTP) per tenaga kerja yang sempat turun pada tahun 2020 kembali membaik. Capaian NTP bervariasi antarprovinsi.



Sumber: BPS
Ket: menggunakan PDRB *angka sementara, **angka sangat sementara

- ↑ **Tertinggi**
Provinsi Riau
Rp186,13 juta
- ↓ **Terendah**
Provinsi NTT
Rp22,86 juta



Selama masa pandemi, indikator anomali harga pangan (IAHP) masih terjaga dalam kategori normal ($-0,5 \leq \text{IAHP} < 0,5$)

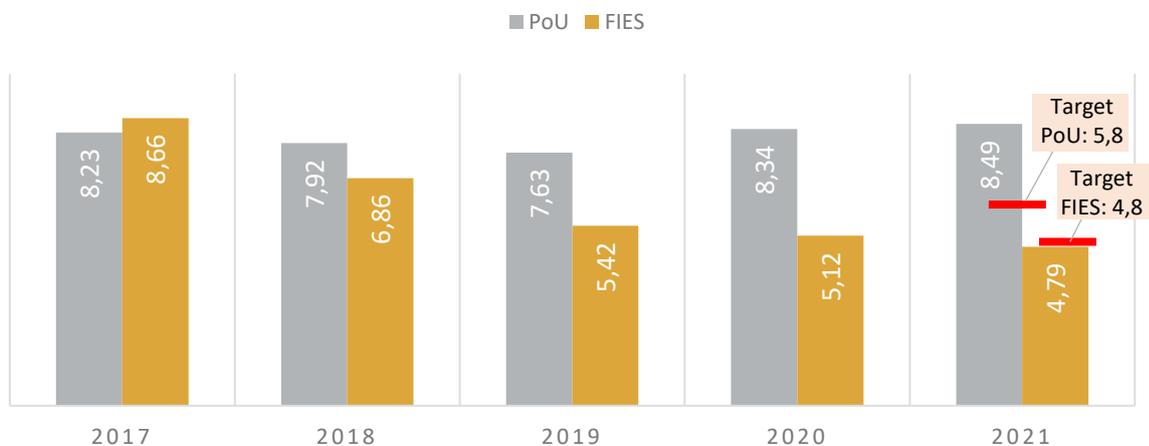
Sumber: BPS

2.2. Tujuan 2 Tanpa Kelaparan

A. Penguatan Ketahanan Pangan Nasional

1. Ketidacukupan Konsumsi Pangan dan Kerawanan Pangan

Pandemi COVID-19 berdampak pada peningkatan ketidacukupan konsumsi pangan (*prevalence of undernourishment/PoU*). Tren PoU meningkat dari 8,34% (2020) menjadi 8,49% (2021). PoU ditemukan lebih tinggi pada kelompok penduduk dengan pengeluaran 40% terbawah (12,51%) dibandingkan kelompok menengah ke atas, rumah tangga dengan kepala rumah tangga (KRT) perempuan (11,14%) dibandingkan KRT laki-laki (8,19%), dan rumah tangga dengan penyandang disabilitas (12,02%) dibandingkan non-disabilitas (8,40%).



Gambar 2.6 Tren prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan (PoU) dan penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat (FIES) (%), 2017-2021

Sumber: BPS

Sementara itu, prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat (FIES) terus menurun dari 5,12% (2020) menjadi 4,79% (2021), dan sudah lebih rendah dari target 4,8%. Langkah pemerintah untuk mengantisipasi kerawanan pangan akibat pandemi COVID-19 mencakup pemberian stimulus pangan melalui bantuan pangan untuk rumah tangga rawan pangan dan penguatan fungsi rantai pasok dan penyimpanan. Upaya lainnya termasuk bantuan sosial dan transfer bantuan tunai kepada penduduk berpendapatan rendah dan yang kehilangan pekerjaan.

2. Kualitas Konsumsi Pangan

Dengan menggunakan Angka Kecukupan Energi (AKE) sebesar 2.100 kkal/kapita/hari sesuai Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) XI tahun 2018, skor pola pangan harapan (PPH) membaik dari 86,30 (2020) menjadi 87,20 (2021). Kualitas konsumsi pangan di perkotaan (86,90) cenderung lebih baik dibandingkan di perdesaan (82,70) pada tahun 2021.

B. Peningkatan Status Gizi

Data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) menunjukkan bahwa prevalensi *stunting* balita menurun sebesar 3,27% poin dari 27,67% (2019) menjadi 24,4% pada tahun 2021. Meskipun demikian capaian tersebut belum mencapai target sebesar 21,1% pada tahun 2021. Di sisi lain, disparitas prevalensi *stunting* pada anak balita masih cukup lebar antarprovinsi.



Gambar 2.7 Prevalensi *stunting* dan *wasting* balita (%), 2013, 2018-2021

Sumber: Riskesdas 2013 dan 2018, SSGBI 2019, SSGI 2021

Pada tahun 2021, provinsi dengan prevalensi *stunting* tinggi ($\geq 30\%$) adalah Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Aceh, Kalimantan Selatan, dan Nusa Tenggara Barat. Selain itu, daerah yang memiliki jumlah anak *stunting* yang cukup banyak seperti di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten dan Sumatera Utara juga perlu mendapat perhatian.

Sementara itu, prevalensi *wasting* pada anak balita mengalami penurunan yang lambat selama pandemi COVID-19, angkanya turun dari 7,44% (SSGBI 2019) menjadi 7,1% (SSGI 2021). *Wasting* menjadi salah satu indikator yang paling terdampak oleh pandemi COVID-19 dalam jangka pendek, karena dipengaruhi oleh penurunan pendapatan dan hambatan dalam keterjangkauan dan ketersediaan makanan bergizi dalam rumah tangga.

Pada tahun 2022, upaya percepatan penurunan *stunting* dan *wasting* tetap dilanjutkan melalui penajaman intervensi spesifik dan sensitif dengan pemberian makanan tambahan bagi balita kurus, pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita, edukasi pola asuhan gizi, peningkatan cakupan imunisasi dasar lengkap, penguatan tatalaksana gizi buruk, peningkatan akses air minum dan sanitasi layak, serta pendampingan bagi keluarga 1.000 Hari Pertama Kelahiran (HPK).

C. Produktivitas Tenaga Kerja Pertanian

1. Produktivitas tenaga kerja pertanian dan pendapatan petani skala kecil

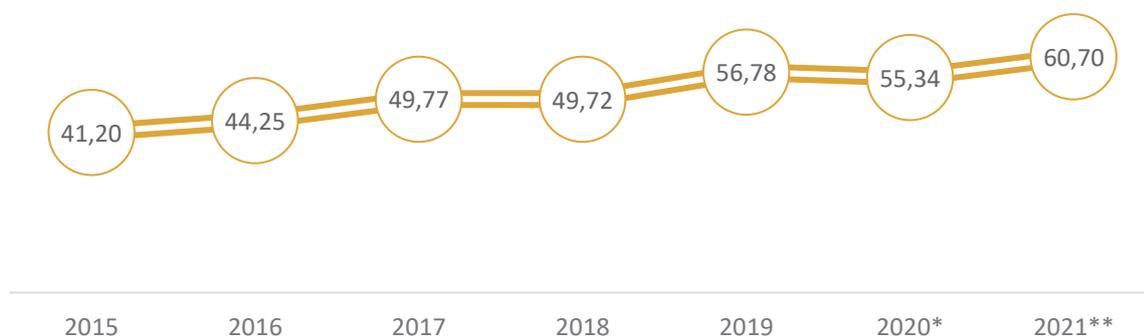
Merujuk hasil SITASI 2021, volume produksi pertanian skala kecil per tenaga kerja secara nasional (dalam *Purchasing Power Parity*/PPP) mencapai USD PPP 45,32/hari kerja atau sekitar Rp215.650/hari kerja¹. Secara agregat, volume produksi pertanian skala kecil per tenaga kerja

¹ Berdasarkan nilai konversi 1 USD PPP = Rp4.758,70.

tertinggi di Provinsi Riau (USD PPP 65,30 per hari kerja) atau setara dengan Rp310.747/hari kerja dan terendah di Provinsi Papua (USD PPP 12,73 per hari kerja) atau setara dengan Rp60.584/hari kerja. Sementara itu, rata-rata pendapatan bersih produsen pertanian skala kecil pada tahun 2021 adalah sebesar USD PPP 1.099,88 PPP atau setara dengan Rp5.234.019,99 dalam setahun. Nilai pendapatan bersih petani skala kecil disagregasi per provinsi bervariasi dari yang tertinggi di Provinsi Lampung (USD PPP 1.675,62 setara dengan Rp7.973.787) dan yang terendah di Provinsi Nusa Tenggara Barat (USD PPP 344,36 atau setara dengan Rp1.638.708). Ketimpangan masih cukup lebar antar provinsi, besarnya biaya produktivitas pertanian yang dikeluarkan oleh petani skala kecil sangat mempengaruhi pendapatan bersih mereka dalam setahun.

2. Nilai tambah pertanian per tenaga kerja

Tren nilai tambah pertanian per tenaga kerja (NTP/TKP) meningkat cukup signifikan pada periode 2015-2021. Nilai tambah pertanian walaupun sempat turun yaitu sebesar Rp55,34 juta pada tahun 2020, sudah kembali meningkat menjadi Rp60,70 juta per tenaga kerja (2021). Capaian NTP/TKP per provinsi bervariasi, dari yang tertinggi di Provinsi Riau (Rp186,13 juta) dan yang terendah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Rp22,86 juta). Variasi tersebut dipengaruhi oleh kemajuan teknologi pertanian yang digunakan, kepadatan tenaga kerja pertanian, dan guncangan dari faktor luar seperti pandemi atau bencana lainnya.



Gambar 2.8 Nilai tambah pertanian per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/ peternakan/ perikanan/kehutanan, 2015-2021

Sumber: Sakernas, BPS Keterangan: *Menggunakan pembagi PDB/PRDB Angka Sementara, **Menggunakan pembagi PDB/PRDB Angka Sangat Sementara

D. Menjamin Sistem Pertanian Berkelanjutan

1. Areal pertanian produktif dan berkelanjutan

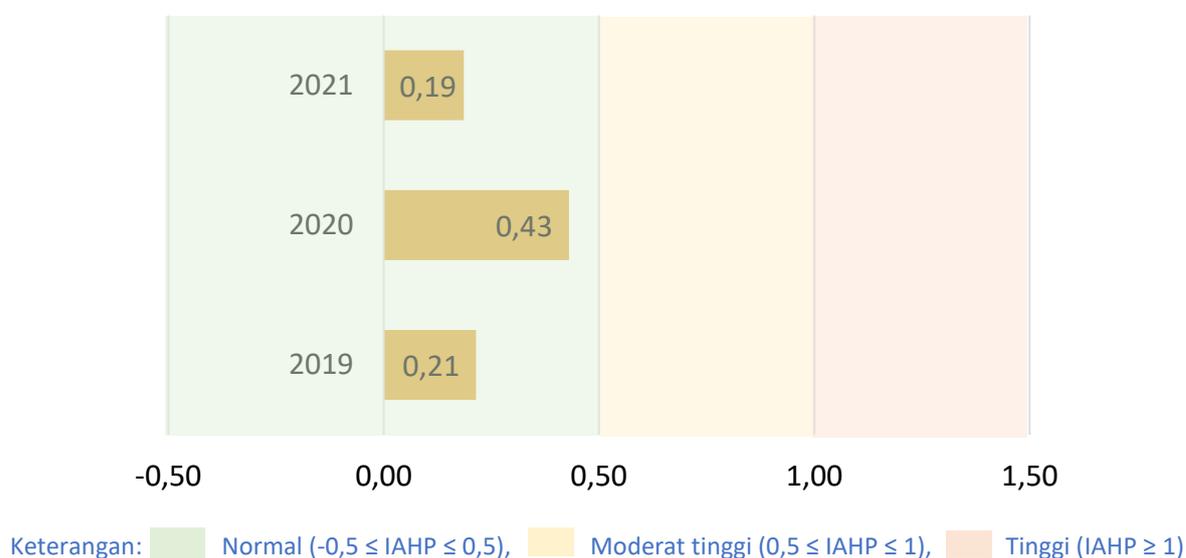
Berdasarkan data SITASI 2021 yang mencakup subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan, proporsi areal pertanian yang telah memenuhi standar produktivitas pertanian sebagai lahan pertanian yang berkelanjutan secara nasional hanya 10,46%. Sementara itu nilai capaian lahan pertanian tidak berkelanjutan sebesar 89,54% yang menandakan penggunaan lahan pertanian di Indonesia belum memenuhi standar pengelolaan produktif sebagai lahan pertanian yang berkelanjutan.

2. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)

Proporsi luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan pada tahun 2021 telah mencapai 88,21%, meningkat dari 50% pada tahun 2020. Sebagian besar lahan tersebut merupakan lahan sawah beririgasi teknis, semi teknis, sederhana, dan perdesaan; lahan reklamasi, rawa pasang surut dan nonpasang surut; dan lahan tadah hujan.

E. Pengendalian Volatilitas Harga Pangan

Pada tahun 2021, nilai indikator anomali harga pangan (IAHP) nasional sebesar 0,19 yang termasuk pada kategori normal (jika $-0,5 \leq \text{IAHP} < 0,5$). Meskipun terjadi pandemi COVID-19, nilai rata-rata nasional IAHP tahun 2020 juga berada pada tingkat normal. Dengan demikian, secara nasional stabilitas harga dan pasokan komoditas pangan masih tetap terjaga.



Gambar 2.9 Indeks Anomali Harga Pangan (IAHP), 2019-2021

Sumber: BPS

Kestabilan harga-harga pangan selama tiga tahun terakhir menjadikan Indonesia mendapatkan penghargaan dari *International Rice Research Institute* karena dinilai mampu mencapai sistem ketahanan pangan dan swasembada beras sejak tahun 2019. Dalam kerangka pemulihan ekonomi tahun 2022, upaya difokuskan pada peningkatan produksi domestik dan ketersediaan pangan berkualitas dan aman melalui: (1) penguatan akses petani ke input produksi dan lembaga keuangan; (2) pengawalan dan pendampingan lapangan (secara ketat); (3) pelatihan vokasional petani muda; (4) penguatan sistem pangan nasional dan lokal yang bergizi, inklusif, adil, andal dan berkelanjutan; dan (5) pengembangan potensi pangan lokal dan pangan lain, termasuk sorgum yang didukung dengan kelembagaan riset, promosi, pusat distribusi dan akses pasar.



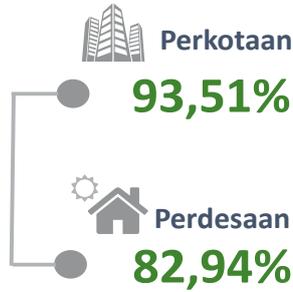
TUJUAN 3

Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia



Persalinan di fasilitas Kesehatan, 2021

Proporsi perempuan yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan terus meningkat, namun kesenjangan antarwilayah masih terjadi.



Sumber: Susenas, BPS (2021)

Upaya pencegahan dan pengendalian penyakit terus dilakukan.

Infeksi baru HIV

(per 1.000 penduduk tidak terinfeksi)



Sumber: Kemenkes

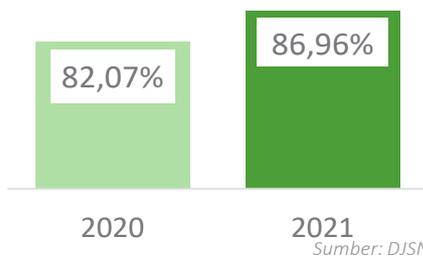
Insiden Tuberkulosis (ITB)

(per 100.000 penduduk)



Sumber: WHO Global TB Report 2022

Penguatan sistem kesehatan terus dilakukan untuk mempercepat pemenuhan pelayanan kesehatan yang berkualitas di seluruh wilayah.



Sumber: DJSN

Cakupan kepesertaan JKN terus diperluas, mencakup 235,7 juta penduduk (2021).



Sumber: Kemenkes



Fasilitas Kesehatan dengan ketersediaan paket obat esensial terus meningkat.



Pemenuhan dan pemerataan distribusi tenaga kesehatan dilakukan melalui berbagai skema penempatan dan penugasan khusus berbasis tim dan individu.

48,17%

Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar

75,31%

RSUD kabupaten/kota dengan 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis lainnya

Sumber: Kemenkes, 2021

2.3. Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera

A. Peningkatan Kesehatan Ibu

Dalam upaya pencegahan kematian ibu, cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih dan di fasilitas kesehatan terus ditingkatkan. Namun, pada tahun 2021 terdapat fenomena kecenderungan penurunan persalinan di fasilitas kesehatan pada kelompok ekonomi 20% teratas, tinggal di perkotaan, dan dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Disparitas antarprovinsi juga masih lebar. Di saat sebagian besar provinsi memiliki capaian persalinan di fasilitas kesehatannya telah melebihi 80%, Provinsi Maluku dan Sulawesi Tenggara capaiannya masih di bawah 60% sehingga perlu perhatian khusus.



Gambar 2.10 Proporsi perempuan yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan, 2020-2021

Sumber: Susenas, BPS

Pada tahun 2020, pelayanan kesehatan esensial yang meliputi pelayanan kesehatan ibu, anak, gizi, dan kesehatan reproduksi sempat terdisrupsi akibat fokus utama pelayanan kesehatan pada penanganan pandemi COVID-19. Pada tahun 2022, pemerintah mengupayakan percepatan penurunan kematian ibu yang difokuskan pada pengembangan sistem rujukan maternal, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, penguatan deteksi dini faktor risiko ibu hamil, pemenuhan sarana, ketersediaan darah setiap waktu, KB pascasalin, serta revitalisasi akses dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi melalui pengembangan akses ke poskesdes dan Pelayanan KB di RS (PKBRS) serta Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dan pendampingan bagi remaja dalam penyiapan kehidupan berkeluarga.

B. Peningkatan Pengendalian Penyakit

1. Pengendalian HIV-AIDS

Dari hasil pemodelan, insiden HIV turun dari 0,24 (2018) menjadi 0,10 per 1.000 penduduk tidak terinfeksi pada tahun 2021. Capaian ini merupakan angka terendah sejak empat tahun terakhir dan sudah jauh lebih rendah dari target yang ditetapkan.



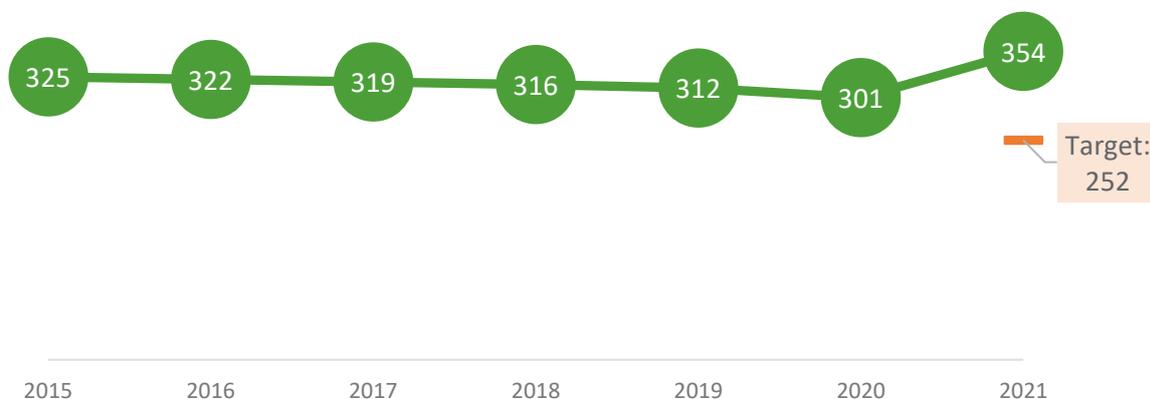
Gambar 2.11 Jumlah infeksi baru HIV per 1.000 penduduk tidak terinfeksi, 2018 dan 2020-2021

Sumber: Kemenkes

Walaupun infeksi baru menurun, pengendalian HIV-AIDS masih menghadapi tantangan, antara lain fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) yang mampu melakukan skrining HIV belum merata. Selain itu, kesadaran dan kepatuhan orang dengan HIV (ODHIV) untuk melakukan pengobatan antiretroviral (ARV) juga masih rendah akibat stigma dari keluarga, petugas kesehatan, maupun masyarakat luas. Pada tahun 2021, baru 62,2% orang dengan HIV-AIDS yang menjalani terapi ARV. Capaian ini menurun dari tahun 2020 yaitu sebesar 65%. Beberapa langkah strategis yang sudah dilakukan pemerintah antara lain perluasan akses pencegahan, layanan diagnosis dan pengobatan *antiretroviral* (ARV), kerjasama dengan pemangku kepentingan terkait, dan inovasi pencegahan dan pengendalian HIV.

2. Tuberkulosis

Indonesia masih menduduki peringkat ke-3 dengan penderita Tuberkulosis (TB) tertinggi di dunia setelah India dan China. Pada periode 2015-2020, insiden TB secara konsisten menurun dari 325 menjadi 301 per 100.000 penduduk. Namun, pada tahun 2021 angkanya kembali meningkat signifikan menjadi 354 per 100.000 penduduk atau naik 18% dari kondisi 2020. Notifikasi kasus TB ditemukan lebih tinggi pada laki-laki dewasa (53%) dibandingkan pada perempuan dewasa (38%) dan kelompok usia anak (9%) (*WHO Global TB Report, 2022*).



Gambar 2.12 Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk , 2015-2021

Sumber: WHO Global TB Report

Pada masa pandemi COVID-19, pencatatan dan pelaporan kasus, serta pemantauan pengobatan TB cenderung menurun. Pada tahun 2021, diperkirakan sebanyak 42,6% penderita TB (380.765 dari estimasi 824.000 kasus) yang tidak ditemukan dan diobati (Kementerian Kesehatan). Pelaporan dari fasyankes swasta dan klinik praktek mandiri pun masih rendah. Untuk itu, diperlukan upaya ekstra untuk pengendalian TB, antara lain melalui: (1) peningkatan deteksi TB di fasyankes; (2) perluasan *testing* secara agresif berbasis desa, mewajibkan *contact tracing*, dan meningkatkan utilisasi mesin Tes Cepat Molekuler (TCM); (3) penguatan sistem kesehatan untuk surveilans *real time* dan terpadu; (4) memperluas kapasitas pemerintah daerah dan keterlibatan swasta; (5) meningkatkan upaya promotif dan preventif; (6) memperkuat kapasitas produksi logistik (obat, bahan, dan alat kesehatan) penanggulangan TB dalam negeri; dan (7) memperkuat pemantauan dan pendampingan.

3. Malaria

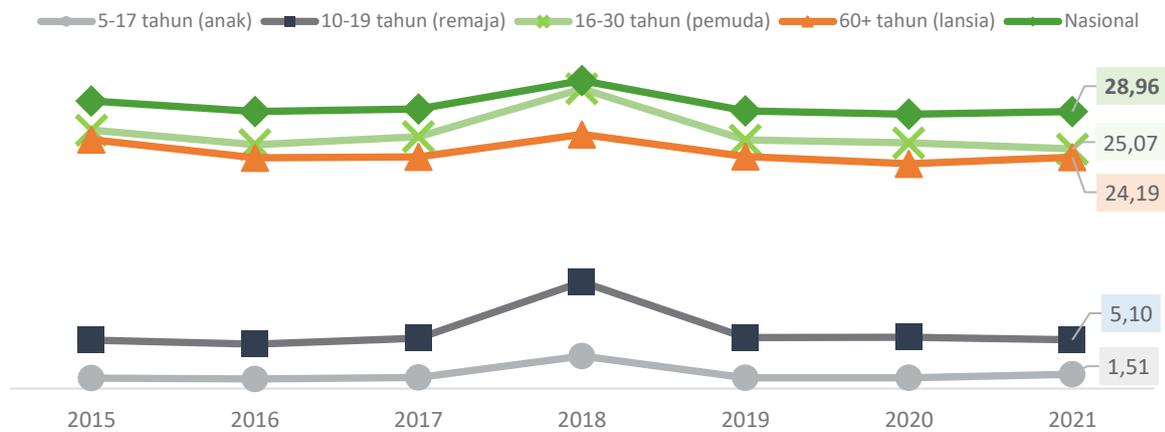
Pada tahun 2021, kejadian malaria cenderung meningkat dari 0,94 (2020) menjadi 1,12 per 1.000 penduduk. Masih terdapat 4 (empat) provinsi yang memiliki beban penyakit malaria tinggi, yaitu Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan Timur. Pada tahun 2021 sebanyak 347 (67,5%) kabupaten/kota telah masuk dalam tahap pemeliharaan/bebas penularan malaria. Capaian ini sudah lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 345 kabupaten/kota.

Kesenjangan kejadian malaria yang lebar antarwilayah, terutama di Kawasan Timur Indonesia (KTI) masih menjadi tantangan. Wilayah dengan status endemis menengah-tinggi ini perlu mendapatkan prioritas. Beberapa strategi yang dilakukan pemerintah dalam upaya eliminasi malaria diantaranya adalah: (1) akselerasi strategi pengendalian malaria di wilayah endemis tinggi, yaitu Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan NTT; (2) intensifikasi strategi pengendalian malaria di luar KTI seperti daerah tambang, pertanian, kehutanan, transmigrasi, dan pengungsian; dan (3) strategi eliminasi di daerah endemis rendah dengan penemuan kasus aktif, pengobatan yang tepat, penguatan surveilans migrasi dan surveilans daerah rawan perindukan vektor (reseptif), dan penguatan rumah sakit rujukan.

4. Hepatitis B

Berdasarkan pemodelan yang dilakukan oleh Subdit Hepatitis dan Penyakit Infeksi Saluran Pencernaan, Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan, insiden Hepatitis B menurun dari 1,77% (2020) menjadi 1,69% (2021). Walaupun menurun, capaian ini belum mencapai target sebesar 1,54% pada tahun 2021. Sebanyak 27 dari 34 provinsi telah melaksanakan deteksi dini hepatitis B (Kementerian Kesehatan, 2021). Program Nasional dalam Pencegahan dan Pengendalian Virus Hepatitis B saat ini fokus pada pencegahan Penularan Ibu ke Anak (PIA) karena 95% anak berisiko tertular Hepatitis B kronik dari ibunya yang positif Hepatitis B.

5. Perilaku Merokok



Gambar 2.13 Persentase merokok pada penduduk umur ≥ 15 tahun, 2015-2021

Sumber: Susenas, BPS

Persentase merokok penduduk usia ≥ 15 tahun cenderung meningkat dari 28,69% (2020) menjadi 28,96% (2021). Perilaku merokok di perdesaan cenderung lebih tinggi dibandingkan perkotaan. Perokok pada kelompok usia remaja 10-19 tahun menurun dari 5,35% (2020) menjadi 5,10% (2021), namun terjadi kenaikan pada kelompok usia anak 5-17 tahun yaitu dari 1,14% (2020) menjadi 1,51% (2021). Untuk itu, upaya perlu difokuskan pada pencegahan perokok pemula.

Upaya penurunan persentase perokok usia anak perlu difokuskan pada intervensi kunci yang melibatkan lintas-sektor, yaitu: (1) perluasan Kawasan Tanpa Rokok (KTR); (2) perluasan layanan berhenti merokok di sekolah; (3) pelarangan ketat iklan dan promosi rokok (TV, luar ruang, internet); (4) penerapan sanksi bagi penjualan rokok bagi anak; (5) peningkatan tarif cukai secara signifikan; dan (6) pelarangan penjualan rokok secara ketengan/satuan.

C. Penguatan Sistem Kesehatan Nasional

1. Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional

Setelah sempat menurun pada masa pandemi COVID-19, cakupan kepesertaan program JKN meningkat signifikan dari 82,07% (2020) menjadi 86,96% pada tahun 2021. Capaian tersebut sudah lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 85%. Namun demikian, terdapat tujuh provinsi yang cakupannya masih di bawah 80% di antaranya adalah Sumatera Utara, Riau, Jambi, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Barat dan Maluku Utara.

Dalam upaya pencapaian target kepesertaan JKN, beberapa kebijakan yang diterapkan khususnya pada masa pandemi COVID-19, antara lain: (1) mempertahankan iuran dan manfaat sesuai Perpres No.64/2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No. 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan; (2) penyusunan kajian dan peraturan terkait kebutuhan dasar kesehatan (KDK) dan kelas standar JKN; (3) pemutakhiran data penetapan PBI JKN; (4) penjangkauan kepesertaan pada segmen kepesertaan mandiri (Pekerja Bukan Penerima Upah

(PBPU) dan bukan pekerja); (5) pengawasan dan penegakan kepatuhan terkait pendaftaran kepesertaan Pekerja Penerima Upah (PPU), serta pembayaran iuran pemberi kerja dan pekerja; dan (6) peningkatan peran aktif kementerian/lembaga dalam mengakselerasi pencapaian target JKN (Inpres No. 1/2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program JKN).

2. Ketersediaan Obat Esensial

Akses terhadap paket obat esensial merupakan bagian integral menuju cakupan kesehatan semesta. Keterjangkauan akses paket obat esensial sampai ke daerah terpencil dilaksanakan oleh pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) untuk memelihara rantai pasokan paket obat esensial di wilayah kerjanya. Selain itu, puskesmas juga diminta untuk secara mandiri melaporkan ketersediaan paket obat esensial di fasilitasnya.

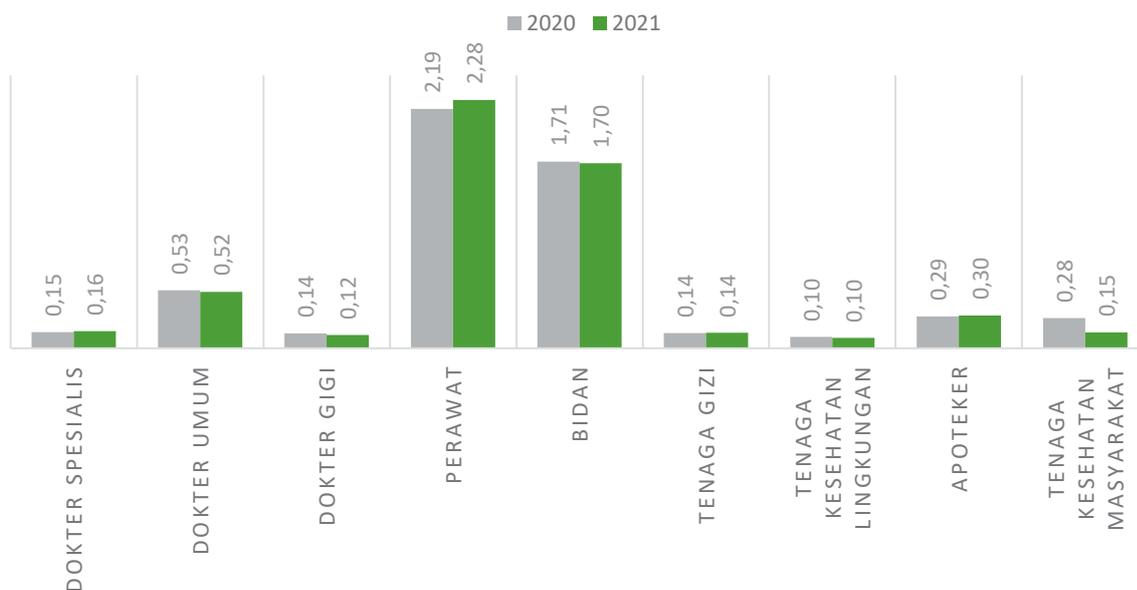
Pada tahun 2021, puskesmas dengan ketersediaan paket obat esensial (standar 40 jenis obat esensial) telah mencapai target yang ditetapkan yaitu mencapai 92,33%. Capaian ini telah mengalami peningkatan dibandingkan capaian tahun 2020 (92,12%), seiring dengan telah membaiknya kondisi pasca pandemi COVID-19. Namun, terdapat beberapa provinsi yang capaiannya cenderung menurun dan di bawah 80% yaitu Provinsi Maluku (63,38%), Banten (72,02%), Lampung (76,38%) dan Sumatera Selatan (78,30%).

3. *Unmet Need* Pelayanan Kesehatan

Unmet need pelayanan kesehatan atau persentase penduduk yang memiliki keluhan kesehatan dan terganggu aktivitasnya namun tidak berobat jalan menurun dari 5,44% (2020) menjadi 5,03% (2021). Kebutuhan pelayanan kesehatan yang tidak terpenuhi ditemukan lebih tinggi pada kelompok lansia, penduduk dengan disabilitas sehingga memerlukan perhatian untuk peningkatan pelayanan kesehatan dan perlindungan sosial. Beberapa provinsi mengalami kenaikan signifikan *unmet need* pelayanan kesehatan yaitu Provinsi Jawa Tengah (8,28%) dan Nusa Tenggara Barat (8,49%). Kondisi geografis dan sosial ekonomi masyarakat yang rendah di daerah tersebut mempengaruhi akses terhadap pelayanan kesehatan.

4. Kepadatan dan Distribusi Tenaga Kesehatan

Capaian rasio tenaga medis yaitu dokter spesialis, dokter umum, dan dokter gigi pada tahun 2021 masih rendah yaitu baru mencapai 0,16; 0,52; dan 0,12 per 1.000 penduduk. Demikian pula untuk tenaga preventif dan promotif seperti tenaga gizi, kesehatan lingkungan, dan kesehatan masyarakat baru mencapai 0,14; 0,10; dan 0,15 per 1.000 penduduk. Upaya pemerintah untuk meningkatkan rasio tenaga kesehatan masih menghadapi tantangan, antara lain masih kurangnya produksi beberapa jenis tenaga kesehatan dan belum meratanya distribusi tenaga kesehatan di seluruh wilayah.



Gambar 2.14 Kepadatan dan distribusi tenaga Kesehatan per 1.000 penduduk, 2020-2021

Sumber: Sistem Registrasi Tenaga Kesehatan (KKI dan KTKI), Kementerian Kesehatan

Walaupun meningkat, persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar baru mencapai 48,17% atau di bawah target yang ditetapkan sebesar 59% pada tahun 2021. Sementara persentase RSUD kabupaten/kota yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis lainnya capaiannya sudah cukup baik yaitu 75,31% (2021). Untuk pemerataan tenaga kesehatan, pemerintah terus melakukan strategi afirmasi pendayagunaan dan mekanisme redistribusi tenaga kesehatan yang ditempatkan di fasilitas pelayanan kesehatan.

Secara umum, dampak pandemi COVID-19 masih menjadi tantangan sistem kesehatan nasional hingga tahun 2022. Berbagai bentuk intervensi pemerintah baik secara promotif, preventif, maupun kuratif, termasuk pelaksanaan vaksinasi untuk mencapai *herd immunity* terus dilanjutkan. Pandemi COVID-19 juga menjadi momentum untuk penguatan sistem kesehatan nasional dengan meningkatkan keamanan dan ketahanan kesehatan.

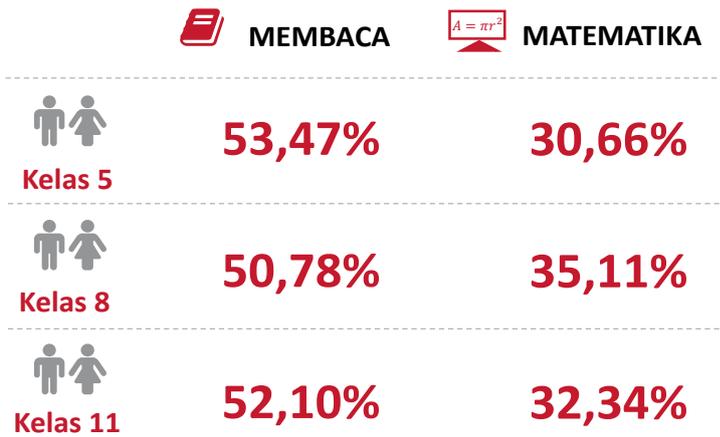
Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dilakukan melalui keberlanjutan reformasi sistem kesehatan nasional yang difokuskan pada: (1) penguatan pendidikan dan penempatan tenaga kesehatan; (2) penguatan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP); (3) peningkatan kapasitas Rumah Sakit (RS) dan pelayanan kesehatan di Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK); (4) peningkatan kemandirian farmasi dan alat kesehatan; (5) penguatan keamanan dan ketahanan kesehatan (*health security* dan *resilience*); (6) pengendalian penyakit dan imunisasi; (7) peningkatan efektivitas pembiayaan kesehatan; dan (8) pengembangan teknologi informasi, digitalisasi, dan pemberdayaan masyarakat termasuk pembudayaan gerakan masyarakat hidup sehat (Germas).



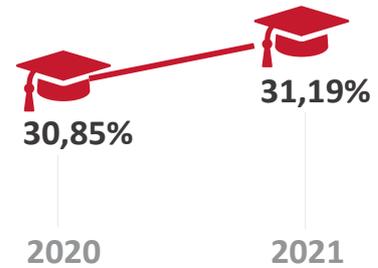
TUJUAN 4

Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua

Proporsi siswa kelas 5, 8, dan 11 yang mencapai kompetensi minimum dalam membaca dan matematika masih perlu ditingkatkan.



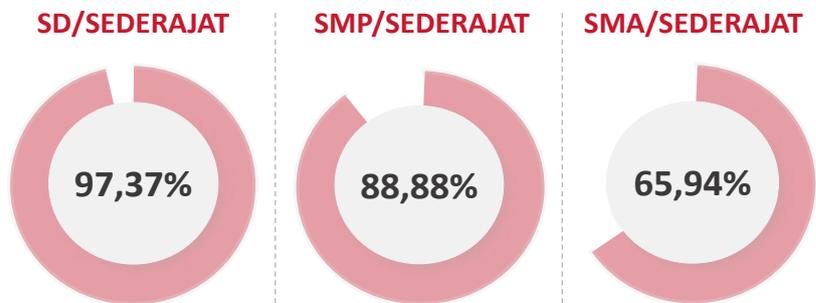
Sumber: AKM Kemendikbud Ristek, 2021



Sumber: Susenas, BPS

APK Perguruan Tinggi terus meningkat, namun perlu upaya percepatan untuk mendorong daya saing SDM Indonesia.

Tingkat penyelesaian pendidikan terus meningkat. Semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin rendah tingkat penyelesaian sekolah.



Sumber: Susenas, BPS (2021)

Guru dengan kualifikasi minimal S1/D4



73,17%

Guru yang bersertifikat pendidik



25,76%

Kualitas pendidikan masih perlu ditingkatkan baik dari sisi pengembangan kurikulum maupun kualifikasi dan kompetensi pendidik.

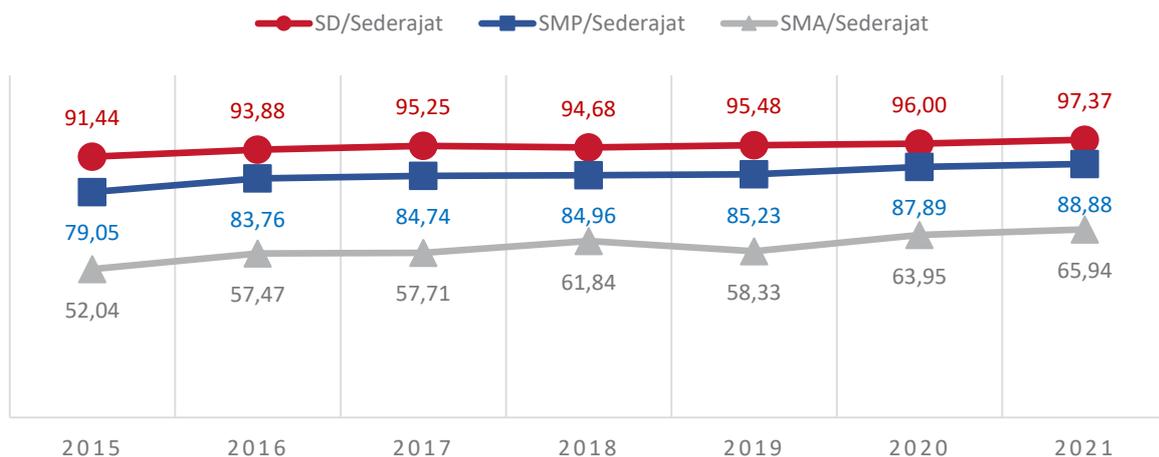
Sumber: Dapodik Kemendikbud Ristek, 2021

2.4. Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas

A. Afirmasi Akses dan Percepatan Wajib Belajar 12 Tahun

Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang terorganisir satu tahun sebelum masuk sekolah dasar cenderung menurun dari 92,76% (2020) menjadi 92,72% (2021). Pada tahun 2021, penurunan tingkat partisipasi ini secara drastis terjadi pada kelompok siswa dengan disabilitas yaitu dari 80,89% (2020) menjadi 69,95% (2021). Penurunan partisipasi pendidikan satu tahun pra sekolah salah satunya disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang menyebabkan dihentikannya pembelajaran tatap muka termasuk PAUD. Selain itu, juga tidak lepas dari ketersediaan satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) terutama untuk menjangkau masyarakat miskin.

Pada tahun 2015-2021, secara umum tingkat penyelesaian pendidikan meningkat untuk semua jenjang. Namun, semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin rendah tingkat penyelesaian sekolah. Pada saat yang bersamaan, peningkatan tertinggi terjadi pada jenjang SMA/ sederajat sebesar 1,99% poin dari 63,95% (2020) menjadi 65,94% (2021).



Gambar 2.15 Tingkat Penyelesaian Pendidikan Jenjang SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat, 2015-2021

Sumber: Susenas Kor, BPS

Pemerataan kesempatan pendidikan menunjukkan hasil yang nyata. Anak-anak perempuan memiliki kesempatan yang sama bahkan sedikit lebih besar dibandingkan anak laki-laki dalam mengakses pendidikan. Kesenjangan partisipasi pendidikan terlihat masih cukup lebar pada jenjang Perguruan Tinggi antara perdesaan dan perkotaan dan antara kuintil terbawah dan kuintil teratas. Kesenjangan partisipasi antara anak dengan disabilitas dan tanpa disabilitas terjadi pada semua jenjang pendidikan dan semakin lebar pada jenjang yang lebih tinggi.

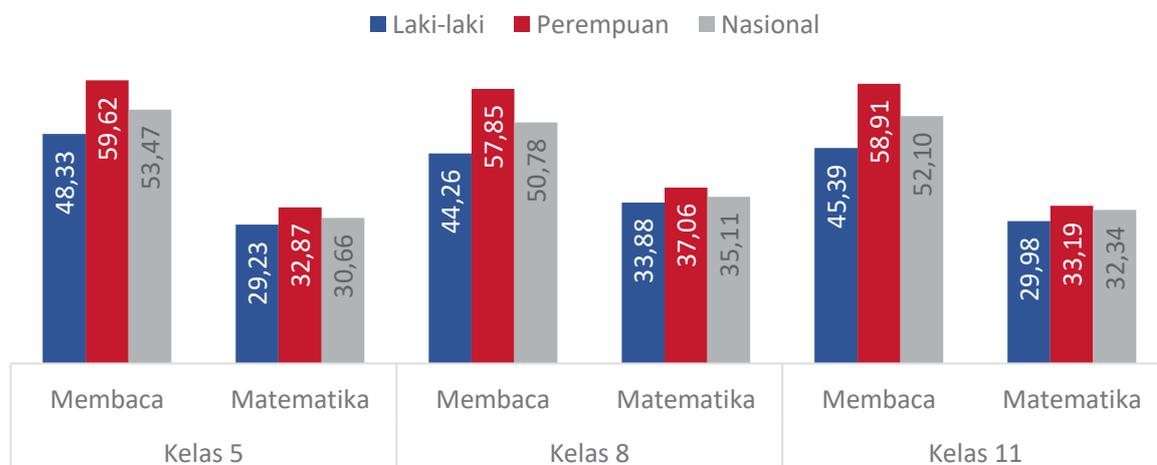
Berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kemendikbudristek, masih ada satuan pendidikan yang belum memiliki listrik terutama jenjang SD. Proporsi satuan pendidikan yang menggunakan internet dan juga komputer untuk tujuan pembelajaran masih rendah, khususnya di jenjang SD, SMP dan SLB. Padahal dalam pembelajaran jarak jauh (PJJ), dukungan

fasilitas belajar mengajar yang memadai menjadi sangat penting. Sarana dan prasarana dasar seperti fasilitas cuci tangan, akses air minum layak, dan sanitasi dasar yang terpisah per jenis kelamin juga belum tersedia di seluruh satuan pendidikan dan menurun cukup signifikan pada tahun 2021.

Pada tahun 2022, percepatan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun difokuskan pada pencegahan putus sekolah, strategi pendataan, penjangkauan, dan sinkronisasi upaya lintas sektor dalam penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS), pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan, afirmasi kewilayahan termasuk pemulihan akibat bencana, peningkatan strategi lintas sektor untuk penerapan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD-HI), dan penguatan layanan satu tahun pra-sekolah.

B. Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran serta Penjaminan Mutu Pendidikan

Kualitas pengajaran dan pembelajaran ditunjukkan melalui kualitas hasil belajar peserta didik termasuk kemampuan literasi dan numerasi. Data Asesmen Nasional 2021 menunjukkan kemampuan minimum siswa kelas 5 dan 8 SD serta kelas 11 SMP dalam membaca dan matematika juga masih perlu ditingkatkan. Capaian pembelajaran pada anak perempuan cenderung lebih tinggi daripada anak laki-laki.



Gambar 2.16 Proporsi anak-anak dan remaja (a) kelas 5 (b) kelas 8, dan (c) usia 15 tahun yang mencapai setidaknya tingkat kemahiran minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika, 2021

Sumber: Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) 2021, Kemendikbud

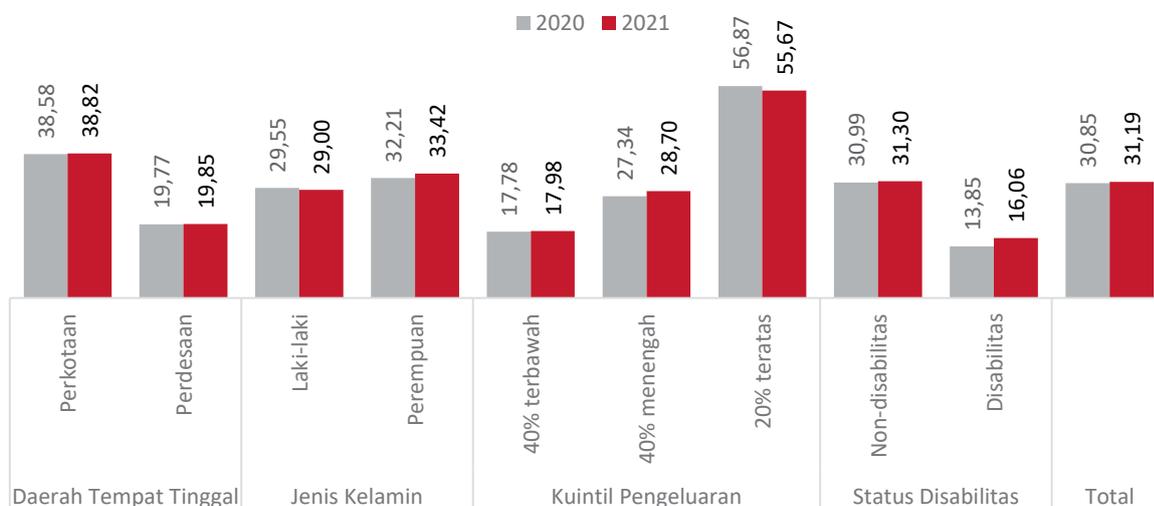
Kemampuan siswa dalam literasi dan numerasi juga dipengaruhi oleh kualitas guru. Berdasarkan Dapodik Kemendikbudristek, kurang dari separuh guru-guru di Indonesia telah memiliki sertifikasi. Jika dibandingkan dengan tahun 2020, proporsi guru tersertifikasi pada tahun 2021 cenderung menurun. Selain itu, masih ada guru-guru dengan kualifikasi di bawah S1/D4 terutama pada jenjang pendidikan TK dan SLB.

Perubahan proses belajar mengajar, yang semula dilakukan secara tatap muka menjadi Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), baik luring maupun daring, belum sepenuhnya berjalan secara efektif. Selain itu, ketidaksiapan keluarga untuk pendampingan anak dalam PJJ dan kapasitas keluarga yang beragam, termasuk kemampuan finansial, memberikan pengaruh pada menurunnya hasil belajar dan munculnya potensi putus sekolah.

Pada tahun 2022, peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran serta penjaminan mutu pendidikan terus dilanjutkan dengan: (a) penerapan kurikulum dan model pembelajaran yang dapat mendorong penguasaan kemampuan berpikir tingkat tinggi; (b) penguatan sistem kualitas penilaian hasil belajar termasuk penilaian pada tataran kelas oleh pendidik; (c) peningkatan kompetensi pendidik; (d) penguatan keterampilan nonteknis dan pendidikan karakter; peningkatan pemanfaatan TIK dalam pembelajaran; (e) peningkatan kualitas kepemimpinan sekolah; (f) peningkatan pengasuhan dan peran keluarga dalam pendidikan; (g) kesejahteraan siswa (*student well-being*) serta kesehatan mental dalam pendidikan; (h) peningkatan pengelolaan, penempatan, dan pemenuhan pendidik dan tenaga kependidikan yang merata, dengan percepatan revitalisasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dan penguatan Pendidikan Profesi Guru (PPG); (i) peningkatan kualifikasi guru dan dosen; (j) penerapan strategi distribusi dan redistribusi berbasis pemetaan kebutuhan; (k) peningkatan kualitas sistem penilaian kinerja; dan (l) peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan.

C. Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Berbasis Kerja sama Industri serta Penguatan Pendidikan Tinggi Berkualitas

Angka Partisipasi Kasar (APK) perguruan tinggi terus meningkat dari 30,85% (2020) menjadi 31,19% (2021). Pada tahun 2021, berdasarkan tingkat sosial ekonomi, APK perguruan tinggi ditemukan lebih rendah pada penduduk laki-laki dibandingkan perempuan, perdesaan dibandingkan perkotaan, kuintil 40% terbawah dibandingkan kuintil 20% teratas, dan penduduk dengan disabilitas dibandingkan tanpa disabilitas.



Gambar 2.17 Tren Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT), 2020-2021

Sumber: Susenas Kor, BPS

Upaya penyediaan layanan pendidikan tinggi yang berkualitas dihadapkan pada tantangan peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengakses layanan pendidikan tinggi. Pada konteks pendidikan vokasi dan juga pendidikan tinggi, tantangan kualitas pendidikan yang paling nyata adalah mengatasi ketidaksesuaian atau *mismatch* antara kompetensi lulusan atau *supply* tenaga kerja lulusan pendidikan vokasi dengan ekspektasi (*demand*) industri. Lembaga pendidikan vokasi belum mampu menghasilkan lulusan untuk memenuhi pekerjaan berketerampilan tinggi. Mayoritas pekerja (57,16% atau 73,43 juta) berpendidikan rendah (lulusan SMP/ sederajat ke bawah) serta banyak lulusan semi-terampil, namun daya serap pasar kerja terbatas.

Pada tahun 2022, peningkatan pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerja sama industri serta penguatan pendidikan tinggi berkualitas dilakukan melalui: (a) peningkatan peran dan kerja sama industri dalam pendidikan dan pelatihan vokasi; (b) reformasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi; (c) peningkatan kualitas dan kompetensi pendidik/instruktur vokasi; (iv) penguatan sistem sertifikasi kompetensi; dan (d) penguatan tata kelola pendidikan dan pelatihan vokasi.

5 KESETARAAN GENDER

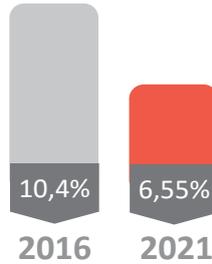


TUJUAN 5

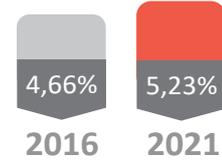
Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan



Upaya dan tata kelola pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak masih perlu terus ditingkatkan.



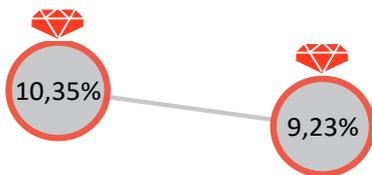
Kekerasan (fisik, seksual, emosional) oleh pasangan/mantan pasangan



Kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan

Sumber: SPHPN, Kemen PPPA dan BPS

Angka perkawinan anak terus menurun.



Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang usia kawin pertamanya sebelum umur 18 tahun

Sumber: Susenas, BPS



3 dari 10

posisi manajer diduduki **PEREMPUAN**

Sumber: Susenas, BPS (2021)

Partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan masih perlu ditingkatkan.



LAKI-LAKI



PEREMPUAN



1 dari 5

Penduduk pertanian memiliki sertifikat kepemilikan yang sah atas lahan pertanian.

Penduduk pertanian yang memiliki sertifikat kepemilikan lahan pertanian adalah **PEREMPUAN**.

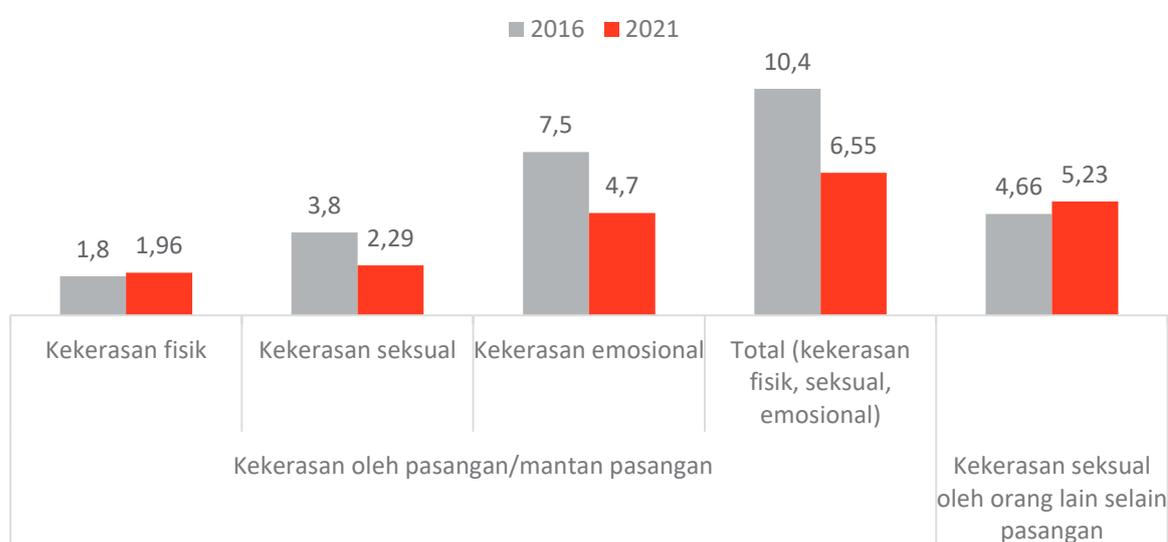
Sumber: SITASI 2021, BPS

Masih terjadi ketimpangan dalam akses dan kontrol perempuan atas sumber daya ekonomi termasuk hak atas lahan pertanian.

2.5. Tujuan 5 Kesetaraan Gender

A. Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak dan Perempuan

Persentase perempuan yang pernah/sedang menikah mengalami kekerasan oleh pasangan selama satu tahun terakhir menurun signifikan dari 10,4% (2016) menjadi 6,55% (Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional, 2021). Angka kekerasan tertinggi ditemukan pada tindak kekerasan emosional yaitu sebesar 4,7%. Di sisi lain, persentase perempuan dewasa dan anak (usia 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam satu tahun terakhir meningkat dari 4,66% (2016) menjadi 5,23% (2021), dengan kejadian pada perempuan belum kawin/belum pernah punya pasangan lebih besar (16,57%) dibandingkan perempuan pernah/sedang punya pasangan (3,04%).



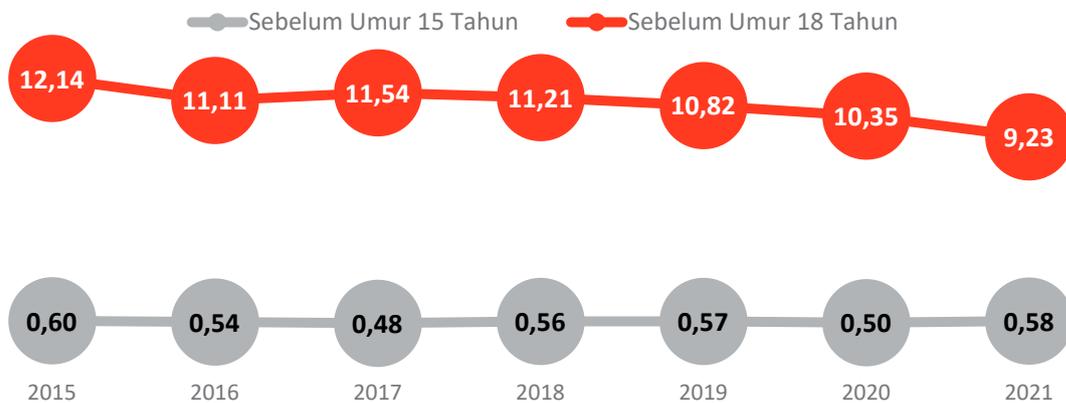
Gambar 2.18 Tren prevalensi kekerasan terhadap perempuan, 2016 dan 2021

Sumber: SPHPN (Kementerian PPPA dan BPS)

Kasus kekerasan terhadap kaum perempuan masih menjadi fenomena gunung es di Indonesia karena jumlah kasus terlapor belum dapat merepresentasikan jumlah kasus sesungguhnya. Pembatasan sosial selama masa pandemi berpotensi meningkatkan kasus kekerasan pada perempuan dan anak, namun laporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di tahun 2020 justru menunjukkan penurunan. Hal ini mengindikasikan bahwa selama pandemi, hanya sebagian kecil korban yang melaporkan kekerasan yang dialaminya kepada lembaga layanan karena keterbatasan akses dan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap adanya layanan bagi korban, serta kurangnya kesiapan lembaga penyedia layanan dalam memberikan pendampingan kepada korban dalam situasi pandemi.

Ketersediaan dan keterjangkauan beragam jenis layanan komprehensif yang dibutuhkan korban kekerasan juga masih minim. Upaya KIE yang selama ini dilakukan belum efektif sehingga masih banyak perempuan dewasa dan anak perempuan yang belum sepenuhnya menyadari berbagai bentuk kekerasan dan hak atas perlindungan.

Angka perkawinan anak di Indonesia terus menurun. Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau hidup bersama sebelum umur 18 tahun turun dari 12,14% (2015) menjadi 9,23% (2021). Walaupun demikian, data mengindikasikan adanya tantangan baru yaitu adanya peningkatan kasus perkawinan anak di usia yang lebih muda (di bawah 15 tahun), yakni dari 0,50% (2020) ke 0,58% (2021).



Gambar 2.19 Tren perkawinan sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun, 2015-2021

Sumber: Susenas Kor, BPS

Perkawinan anak lebih banyak terjadi pada perempuan yang tinggal di perdesaan, dan berasal dari rumah tangga dengan pengeluaran 40 persen terbawah. Selain itu, anak perempuan yang menikah di usia anak cenderung memiliki tingkat pendidikan yang rendah.

Faktor penyebab praktik perkawinan anak di Indonesia sangat kompleks mulai dari tingkat individu anak, keluarga, norma sosial dan budaya yang berkembang di masyarakat, serta kebijakan. Pada tingkat individu, anak dan remaja kurang memiliki resiliensi dan pemahaman terkait kesehatan reproduksi dan dampak negatif perkawinan anak. Di dalam keluarga, faktor ekonomi/kemiskinan dengan banyaknya jumlah anak, pendidikan orang tua yang rendah, serta lemahnya pemahaman dampak perkawinan anak. Di tingkat nasional, masih terdapat tantangan belum lengkapnya aturan pelaksana dari pendewasaan usia perkawinan yang ditetapkan di dalam UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain itu tingkat pemahaman aparaturnya terkait pemberian dispensasi kawin juga menjadi salah satu faktor penyebab tingginya praktik perkawinan anak.

Pada tahun 2022, peningkatan perlindungan anak dan perempuan difokuskan pada: (a) penguatan layanan penanganan kekerasan bagi anak secara terpadu, termasuk di ranah daring; (b) optimalisasi upaya pencegahan perkawinan anak dan penarikan anak dari pekerjaan terburuk dengan melibatkan berbagai pihak; (c) optimalisasi pengasuhan berbasis hak anak pada lembaga pengasuhan alternatif; (d) peningkatan koordinasi dalam upaya pemenuhan hak anak yang berada pada kondisi khusus; (e) penciptaan lingkungan ramah anak; dan (f) penguatan regulasi, kelembagaan, sinergi data, dan mekanisme koordinasi pencegahan, penanganan korban, serta pencatatan dan pelaporan kasus kekerasan dan TPPO.

B. Peningkatan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Berbagai peraturan perundangan mendorong keterwakilan perempuan dalam posisi pengambilan keputusan baik di pemerintahan maupun swasta. Pada tahun 2021, hanya Provinsi Lampung, Kepulauan Riau, Jawa Timur dan Sulawesi Barat yang memiliki wakil perempuan di posisi Gubernur dan Wakil Gubernur. Pada posisi Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, sebagian besar provinsi telah memiliki wakil perempuannya kecuali Provinsi Sumatera Barat, Bengkulu, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Bali, NTT, dan Papua. Secara nasional, data Sakernas menunjukkan persentase perempuan yang menduduki posisi managerial terus meningkat dari 22,32% (2015) menjadi 33,08% (2020). Namun, pada tahun 2021 terjadi penurunan partisipasi perempuan di posisi managerial menjadi 32,50%.

Budaya patriarki menciptakan hambatan dari sisi individu perempuan, dan hambatan dari sisi lingkungan yang tidak mendukung partisipasi perempuan sebagai pengambil keputusan. Untuk terjun ke dunia politik, tantangan perempuan dari faktor internal adalah adanya keterbatasan sumber daya (finansial, jejaring sosial), pengalaman politik, serta rendahnya motivasi/ambisi/minat perempuan untuk berkarir di dunia politik.

Hasil Survei Pertanian Terintegrasi (SITASI) BPS tahun 2021 menunjukkan bahwa baru 52,09% penduduk laki-laki dewasa di sektor pertanian dan 13,61% perempuan usia dewasa di sektor pertanian yang memiliki sertifikat kepemilikan tanah yang sah. Kesenjangan akses lahan pertanian masih terjadi antarprovinsi. Capaian tertinggi ada di Provinsi Sumatera Barat (22,38%) dan terendah di Provinsi Bali (3,08%). Dari seluruh penduduk dewasa yang memiliki hak yang aman atas lahan pertanian, 19,65% diantaranya adalah perempuan. Dari capaian tersebut, terlihat ketimpangan yang masih cukup besar dalam kepemilikan lahan yang aman antara laki-laki dan perempuan.

Ketimpangan dalam akses dan kontrol formal atas lahan pertanian oleh perempuan tersebut disebabkan oleh beberapa hal antara lain pewarisan sumber daya ekonomi yang lebih banyak dialokasikan pada anak/ahli waris laki-laki, akses garapan dan informasi terkait garapan yang lebih banyak diberikan pada kepala keluarga, anggapan bahwa tanggungjawab utama perempuan merupakan ranah domestik, serta belum terakomodasinya kebutuhan perempuan petani dan/atau perempuan adat.

Pada tahun 2022, peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan terus dilakukan dengan fokus utama sebagai berikut: (a) penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah; (b) peningkatan pemberdayaan ekonomi perempuan khususnya perempuan miskin, korban kekerasan dan bencana, serta perempuan kepala keluarga, melalui kewirausahaan dan penguatan kapasitas pendamping program pemberdayaan ekonomi; dan (c) peningkatan literasi politik perempuan.

6 AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK



TUJUAN 6

Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua

Layanan Air Minum Aman



Sumber: Survei Kualitas Air Minum Rumah Tangga, Kementerian Kesehatan

Akses air aman di Pulau Kalimantan melebihi capaian nasional yaitu sebesar 16,30 %.
Diikuti Pulau Jawa dan Bali 13,8% dan Pulau Sulawesi sebesar 11,6%.

Pandemi COVID-19 telah meningkatkan kesadaran kolektif akan pentingnya sanitasi yang dikelola secara aman

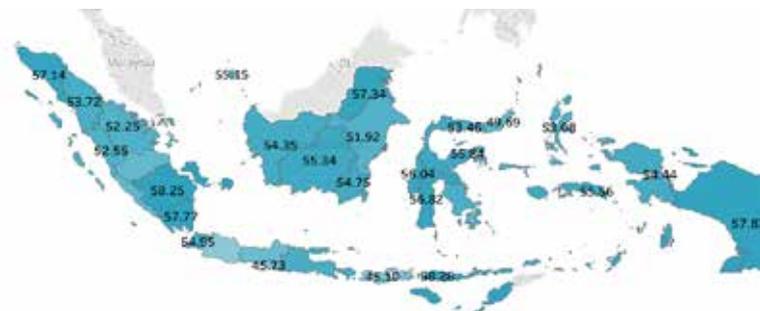


Sumber: Susenas, BPS

Indeks Kualitas Air

Indeks Kualitas Air Nasional pada tahun 2021

52,81



Indes Kualitas Air Provinsi Bangka Belitung merupakan yang tertinggi pada tingkat provinsi, yaitu 58,37; Diikuti Nusa Tenggara Timur, dan Sumatera Selatan.

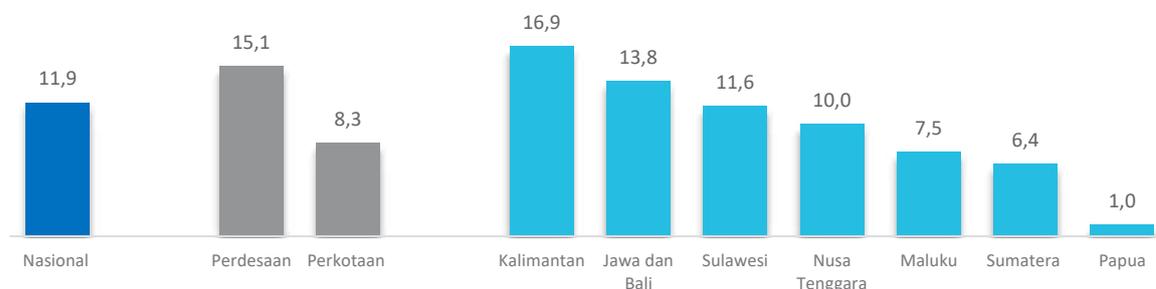
Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

2.6. Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak

A. Akses Terhadap Air Minum yang Aman

Pandemi COVID-19 memberikan dampak pada semua lini kehidupan, termasuk kesadaran akan pentingnya kebutuhan terhadap air sebagai penunjang kehidupan masyarakat yang sehat dan produktif. Akses air minum yang aman di Indonesia baru mencapai 11,9% pada tahun 2020 (Kemenkes, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa hanya 1 dari 10 rumah tangga yang telah menikmati air minum aman yang telah memenuhi syarat kualitas air minum. Adapun kriteria yang digunakan untuk menilai air minum aman yaitu berdasarkan kontaminasi TDS, Bakteri E.coli, pH, Nitrat, dan Nitrit. Pemerintah terus berupaya untuk memenuhi akses terhadap layanan air minum aman yang mana terdapat peningkatan akses terhadap akses air minum yang dikelola secara aman sebesar 5,2% dari tahun 2019 hingga tahun 2020. Pada tahun 2024, pemerintah menetapkan target cakupan air minum aman nasional sebesar 15% (RPJMN 2020-2024). Meskipun demikian, Indonesia masih membutuhkan kerja keras untuk mewujudkan akses air minum yang universal (100%) pada tahun 2030.

Capaian terhadap akses air minum aman di perdesaan (15,1%) lebih tinggi dari pada di perkotaan (8,3%). Sementara itu, pada lingkup region atau kepulauan, Kalimantan merupakan wilayah yang memiliki akses air minum tertinggi yaitu sebesar 16,9%, diikuti Jawa-Bali sebesar 13,8%, Sulawesi sebesar 11,6%, dan Nusa Tenggara sebesar 10%. Wilayah dengan cakupan akses air minum aman terendah adalah Papua yang hanya sebesar 1%.



Gambar 2.20 Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Layanan Air Minum yang Dikelola Secara Aman Berdasarkan Wilayah, Tahun 2020 (dalam %)

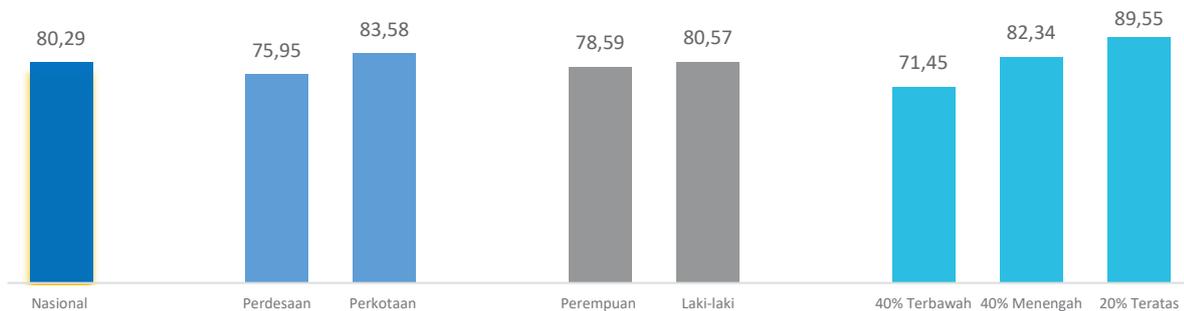
Sumber : Survei Kualitas Air Minum, Kemenkes, 2021

B. Cakupan Sanitasi

1. Sanitasi Layak

Penanganan dan pencegahan penyebaran COVID-19 sangat memerlukan dukungan akses layanan dasar seperti layanan sanitasi dan fasilitas cuci tangan. Cakupan rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak bertambah jumlahnya dari 79,53% pada tahun 2020 menjadi 80,29% pada tahun 2021. Akses sanitasi layak pada perkotaan sebesar 83,58%, lebih tinggi dari wilayah perdesaan yang hanya 75,95%. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, perempuan memiliki akses terhadap sanitasi layak yang lebih rendah (78,59%) dibandingkan

laki-laki (80,57%). Pada kelompok pendapatan 40% terbawah, capaiannya masih di bawah angka nasional yaitu sebesar 71,45%.



Gambar 2.21 Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Layanan Sanitasi Layak Berdasarkan Katagori, Tahun 2021 (dalam %)

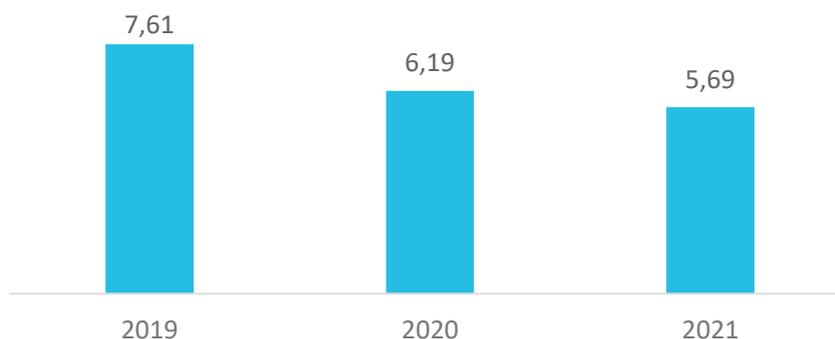
Sumber : Susenas, BPS, 2021

2. Fasilitas Cuci Tangan dengan Sabun dan Air

Kesadaran masyarakat untuk mencuci tangan dengan air dan sabun terus meningkat seiring dengan terjadinya pandemi COVID-19. Persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun mengalami kenaikan dari 78,30% pada tahun 2020 menjadi 79,59% pada tahun 2021 (BPS, 2021).

3. Praktik Buang Air Besar Sembarangan

Praktik buang buang air besar sembarangan (BABS) di tempat terbuka terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, persentase rumah tangga yang masih mempraktikkan BABS di tempat terbuka sebesar 5,69%. Penyadaran untuk melakukan perubahan perilaku hidup bersih dan sehat serta berhenti melakukan praktik buang air besar sembarangan dilakukan melalui Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).



Gambar 2.22 Persentase Rumah Tangga yang Masih Mempraktikkan Buang Air Besar Sembarangan (BAB) di Tempat Terbuka (dalam %)

Sumber: RKP 2023

Dalam penyediaan akses air minum aman dan sanitasi yang layak, tantangan yang dihadapi antara lain: (i) masih rendahnya komitmen dan kapasitas teknis pemerintah daerah maupun operator air minum dan sanitasi dalam memperluas dan meningkatkan layanan; (ii) rendahnya

pemanfaatan infrastruktur air minum yang telah terbangun; serta (iii) terbatasnya ketersediaan akses air minum dan sanitasi pada daerah kepulauan, kawasan perbatasan, serta daerah rawan air dan sanitasi. Kebijakan dan strategi yang dilakukan terdiri dari: (i) penyediaan akses air minum aman yang difokuskan pada rencana pengamanan dan pengawasan kualitas air minum; (ii) peningkatan ketersediaan akses air minum jaringan perpipaan yang difokuskan pada optimalisasi kapasitas SPAM yang sudah terpasang dan penyediaan akses air minum untuk daerah kepulauan, kawasan perbatasan, daerah rawan air, dan daerah prioritas nasional lainnya; (iii) percepatan penyediaan akses air minum dan sanitasi aman dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat melalui penguatan kapasitas pemerintah daerah; dan (iv) penyediaan akses sanitasi aman yang berfokus kepada pengembangan sambungan rumah yang terhubung Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD).

C. Kualitas Air

Kualitas air baku (air permukaan) diukur dengan Indeks kualitas air (IKA). Angka IKA fluktuatif dari tahun ke tahun yang mana pada tahun 2018 hingga 2020 terus meningkat namun di tahun 2021 terjadi penurunan. Indeks Kualitas Air pada tahun 2020 berada pada kondisi tertinggi selama 7 tahun terakhir yaitu sebesar 53,53. Pada tahun 2021, IKA menurun pada angka 52,82. Bangka Belitung menempati provinsi dengan nilai IKA tertinggi sebesar 58,37. Masih terdapat 11 provinsi yang memiliki kualitas air di bawah angka nasional dengan provinsi terendah yaitu DKI Jakarta (44,19) dan Jawa Barat (43,09).



Gambar 2.23 Indeks Kualitas Air (IKA)

Sumber: KLHK, 2022

Tantangan yang dihadapi dalam peningkatan kualitas air yaitu tingginya pencemaran di badan air yang mengakibatkan turunnya kualitas air yang tersedia; serta kuantitas dan kualitas tampungan air yang menurun karena keterbatasan sumber daya untuk pemeliharaan. Upaya dan kebijakan yang dilakukan di antaranya: (i) peningkatan ketersediaan dan keamanan air, melalui pembangunan dan optimalisasi pemanfaatan infrastruktur penyedia air; (ii) peningkatan pengelolaan dan efisiensi pemanfaatan sumber daya air; (iii) serta konservasi dan pengendalian kerusakan dan pencemaran Daerah Aliran Sungai (DAS) untuk menjaga sumber air.



TUJUAN 7

Menjamin Akses Energi Yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern Untuk Semua

Ketahanan dan kemandirian sektor energi menjadi prioritas Pemerintah, terlebih dengan kontraksi akibat pandemi COVID-19. Berbagai intervensi kebijakan dilakukan untuk memastikan aksesibilitas, pengembangan EBT, dan efisiensi energi



Konsumsi Listrik Per Kapita

2020	↑	2021
1.089 kwh		1.123 kwh

Upaya peningkatan konsumsi listrik didorong dengan penggunaan *electric vehicle*

Bauran Energi Terbarukan

2020	2021
11,20%	12,16%



Peningkatan **0,50%** dipicu penambahan kapasitas pembangkit *on grid & off grid*, pembangunan PLTS atap, dan biomassa PLTU

Rasio Elektrifikasi

2020	2021
99,20	99,45



2021



117 desa dengan **13.477** rumah tangga teraliri listrik Program Listrik Pedesaan

Intensitas Energi Primer

2020

133.50 SBM/Miliar

2021

133.90 SBM/Miliar



Melampaui target **138 SBM/Miliar** pada 2021 yang didukung dengan kebijakan konversi dan substitusi energi fosil dan penggunaan teknologi baru

Pengembangan energi hijau berkelanjutan akan ditingkatkan melalui pemerataan akses dan kehandalan listrik, percepatan pembangunan proyek tenaga listrik, dan investasi bidang tenaga listrik



2.7. Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau

A. Akses dan Keterjangkauan Energi dan Ketenagalistrikan

Pandemi global COVID-19 selama dua tahun (2020 dan 2021) memberikan dampak besar bagi perekonomian nasional dan memberikan pelajaran berharga tentang betapa pentingnya kemandirian dan ketahanan dalam menghadapi gejolak, termasuk dalam sektor energi. Upaya pemerintah dalam pembangunan terus dilakukan di tengah pandemi, termasuk meningkatkan akses terhadap energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern.

Pada tahun 2021, Rasio Elektrifikasi (RE) Nasional mengalami peningkatan dari 99.20% pada tahun 2020 menjadi 99.45% pada tahun 2021. Realisasi tersebut masih dibawah penetapan target 100%. Pencapaian RE pada tahun 2021 telah mencakup teralirinya listrik untuk 117 desa dengan total pelanggan 13.477 rumah tangga dari total 433 desa yang belum berlistrik (Program Listrik Pedesaan).



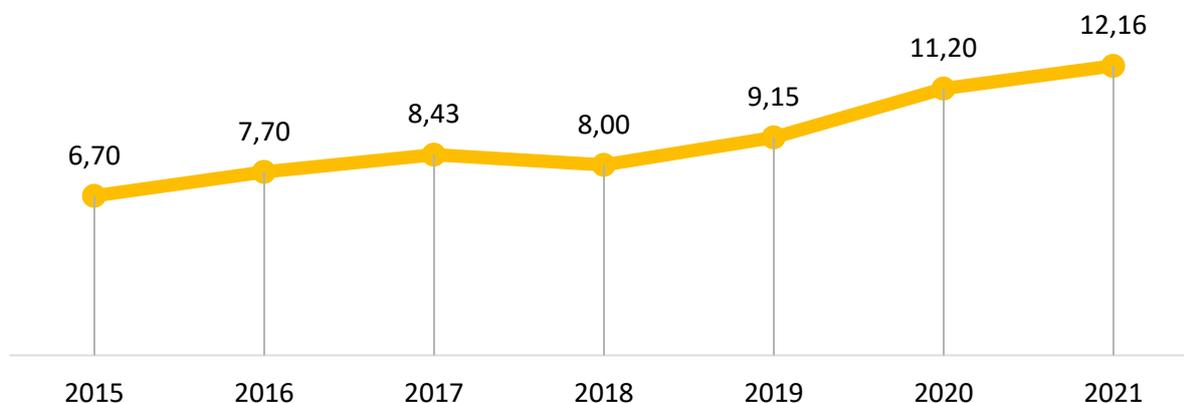
Gambar 2.24 Rasio Elektrifikasi dan Rasio Desa Berlistrik

Sumber: Kementerian ESDM, 2022

Pada tahun 2021, pemerintah juga memberikan stimulus sektor ketenagalistrikan untuk masyarakat dan pelaku usaha tertentu. Bantuan ini merupakan salah satu upaya mempercepat Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan memanfaatkan energi listrik untuk aktivitas produktif. Upaya lainnya untuk meningkatkan konsumsi listrik per kapita nasional adalah dengan peningkatan program akses listrik ke seluruh pelosok negeri serta mendorong pemanfaatan *electric vehicle* dan kompor induksi listrik. Pada tahun 2021, realisasi konsumsi listrik perkapita naik 34kWh/kapita dibandingkan tahun 2020 menjadi 1.123 kWh/kapita. Tantangan dalam penyediaan ketenagalistrikan yaitu masih rendahnya dan belum meratanya konsumsi listrik di seluruh wilayah Indonesia, serta belum meratanya akses serta rendahnya tingkat kehandalan.

B. Akselerasi Pengembangan Pembangkit Energi Terbarukan

Salah satu tolak ukur penyediaan energi bersih dan berkelanjutan dapat dilihat dari indikator bauran energi terbarukan. Pangsa energi baru dan terbarukan (EBT) dalam pasokan energi primer mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi 12,60% mengalami kenaikan 0,96% dari tahun 2020. Kenaikan bauran EBT tahun 2021 disebabkan pencapaian beberapa hal, diantaranya penambahan kapasitas pembangkit on grid dan off grid, Penambahan kapasitas pembangkit PLTS Atap serta implementasi *CoFiring Biomassa* pada PLTU. Tantangan yang dihadapi yaitu ketersediaan energi di Indonesia mayoritas masih ditopang oleh energi fosil, adanya perubahan pola konsumsi energi di masyarakat, bisnis, dan industri dikarenakan adanya kebijakan pembatasan kegiatan oleh pemerintah; terlambatnya pelaksanaan pembangunan proyek-proyek energi dan ketenagalistrikan; serta terhambatnya investasi sektor ketenagalistrikan dan energi baru terbarukan.



Gambar 2.25 Bauran Energi Terbarukan

Sumber: Kementerian ESDM, 2022

C. Peningkatan Pelaksanaan Efisiensi Energi

Salah satu pendekatan yang digunakan untuk menggambarkan tingkat efisiensi energi dalam perekonomian adalah intensitas energi primer. Indikator ini merupakan rasio jumlah pasokan energi primer yang diperlukan (dalam satuan Setara Barel Minyak/SBM) dengan nilai ekonomi produk domestik bruto konstan (dalam satuan Miliar Rupiah Konstan 2010). Indikator ini menggambarkan kemampuan suatu negara dalam mentransmisikan pasokan energi primer dalam menghasilkan output ekonomi. Nilai yang semakin kecil menunjukkan tingkat efisiensi yang semakin besar.

Realisasi intensitas energi primer pada tahun 2021 mencapai angka 133.9 SBM/Miliar Rupiah, pencapaian ini melebihi target yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu sebesar 138 SBM/Miliar rupiah. Di satu sisi hal ini menunjukkan kinerja yang sangat positif dengan penurunan intensitas yang melebihi target yang ditetapkan. Di sisi lain, capaian kinerja indikator ini tidak terlepas dari efek pandemi COVID-19 yang berlangsung mulai awal tahun 2020 dan 2021. Sektor ekonomi Indonesia mengalami guncangan sehingga terjadi penurunan output ekonomi yang disertai perubahan struktur dan perilaku ekonomi. Pembatasan-pembatasan mobilitas diberlakukan terutama pada sektor-sektor ekonomi yang memerlukan pasokan energi yang

sangat tinggi seperti sektor industri sehingga tingkat utilisasi mengalami penurunan. Dengan keberhasilan penanganan pandemi selama 2020-2021 diperkirakan pemulihan ekonomi akan berjalan dengan baik. Kebijakan ini tentunya akan meningkatkan mobilitas pergerakan pelaku ekonomi dan utilitas sektor industri sehingga terjadi peningkatan pasokan energi primer yang diperkirakan akan meningkatkan intensitas energi primer secara besar.

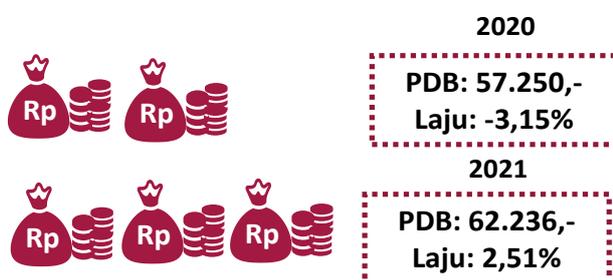


TUJUAN 8

Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja Yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan Yang Layak Untuk Semua

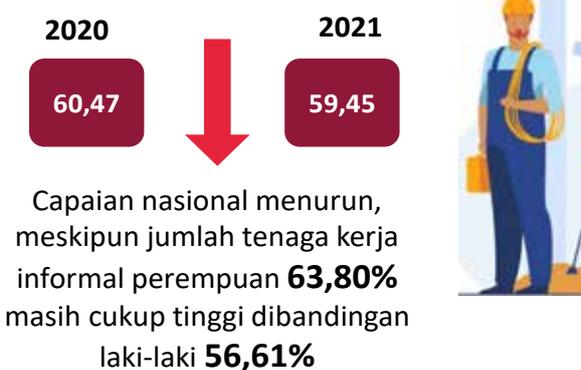
Peningkatan pertumbuhan ekonomi, perluasan lapangan kerja, pemberdayaan UMKM, dan optimalisasi serapan devisa sektor pariwisata menjadi fokus utama pada program Pemulihan Ekonomi Nasional 2021

PDB dan Laju PDB Per Kapita



Masih berlakunya pembatasan mobilitas pada 2021, dapat diimbangi dengan kebijakan PEN tetap menghasilkan tren positif peningkatan PDB dan laju PDB

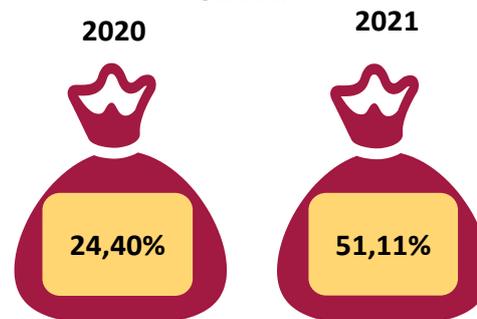
Proporsi Tenaga Kerja Informal



TPT, Setengah Penangguran, NEET



Akses Pembiayaan UMKM



UMKM yang memiliki akses pembiayaan meningkat hampir **2** kali lipat pada 2021 dibandingkan 2020 dan menjadi peningkatan tertinggi selama **6** tahun terakhir

Nilai Tambah Sektor Pariwisata



Akselerasi PEN didorong beberapa intervensi; stimulus bantuan rumah tangga, UMKM, *rehiring & retraining* tenaga kerja, optimalisasi DPSP, dan penerapan CHSE

2.8. Tujuan 8 Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan Layak

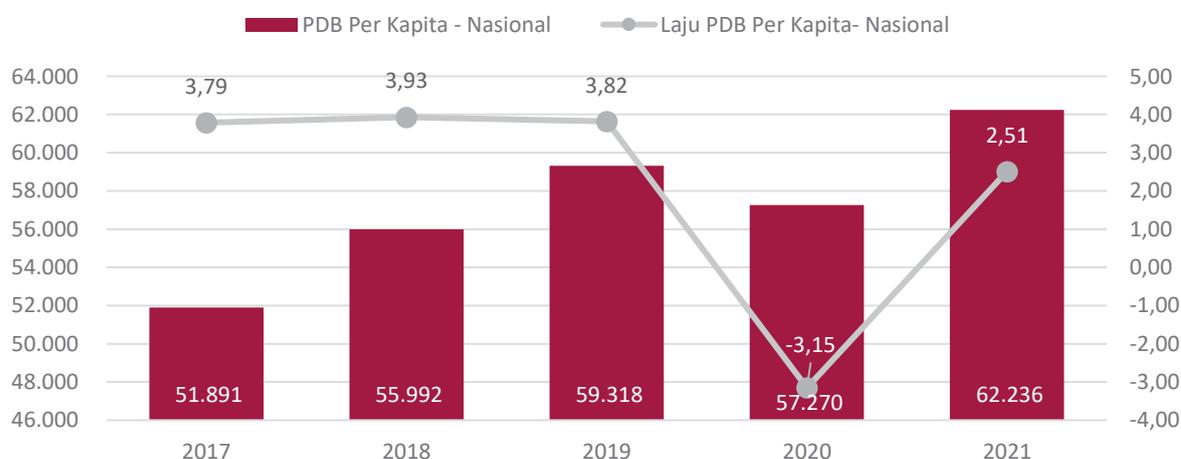
A. Pertumbuhan Ekonomi

Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) merupakan inisiasi kebijakan pemerintah untuk merespons pandemi COVID-19. Program PEN fokus pada penanganan krisis kesehatan yang berdampak pada aspek sosial dan penurunan aktivitas ekonomi khususnya sektor informal dan UMKM. Melalui program PEN diharapkan perekonomian Indonesia bergerak menuju tren perbaikan. Selain pelaksanaan program PEN berbagai langkah strategis dilakukan untuk memastikan pengendalian pandemi COVID-19 maupun pemulihan ekonomi.

Meskipun pandemi COVID-19 masih ada di tengah masyarakat hingga saat ini. Namun perbaikan ekonomi secara perlahan memperlihatkan hasil yang berarti. Hal tersebut terefleksi salah satunya pada indikator makro pembangunan seperti Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto yang meningkat signifikan dari -2,07 pada 2020 menjadi 3,69 pada 2021. Pertumbuhan ekonomi juga memberikan dampak positif pada penurunan tingkat pengangguran terbuka dari 6,49 pada 2021 menjadi 5,86 pada 2022.

Dampak positif lain adalah meningkatnya PDB per kapita pada 2021 sebagai indikator capaian perekonomian Indonesia mengalami peningkatan dari 57,27 juta rupiah di tahun 2020 menjadi 62,24 juta rupiah. Tren peningkatan ini juga diikuti oleh laju pertumbuhan PDB per kapita menjadi 2,51% dari pertumbuhan negatif -3,15 pada tahun 2020.

Tantangan yang dihadapi terkait pemulihan ekonomi secara umum berasal dari pembatasan mobilisasi dan ruang gerak masyarakat untuk pengendalian pandemi Covid-19. Seiring dengan belum berakhirnya pandemi COVID-19 dan perkiraan vaksinasi yang baru mencapai *herd immunity*/kekebalan kelompok pada awal tahun 2022, agenda pemulihan ekonomi masih menjadi bagian penting dalam rangka mencapai sasaran kerangka ekonomi makro tahun 2022. Langkah kebijakan untuk memastikan terkendalinya pandemi COVID-19 masih menjadi prioritas. Demikian pula, bantuan terhadap dunia usaha dan rumah tangga tetap perlu diberikan untuk mengakselerasi proses pemulihan ekonomi.



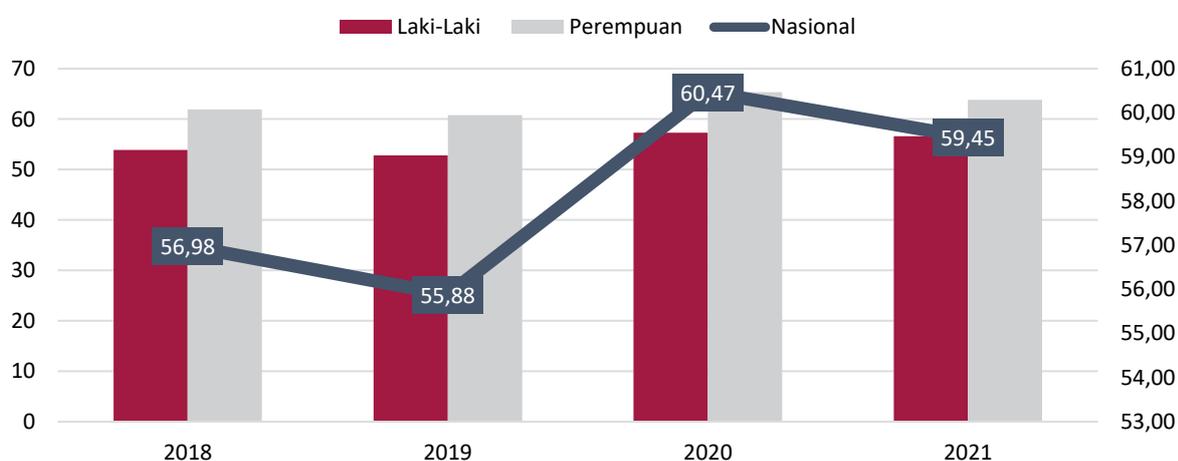
Gambar 2.26 Laju Pertumbuhan PDB per Kapita dan PDB Perkapita

Sumber: BPS, 2022

B. Perkembangan Sektor Ketenagakerjaan

Dari sektor ketenagakerjaan, pemulihan ekonomi juga berdampak pada pertumbuhan PDB per tenaga kerja. Pada tahun 2021, laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja mengalami peningkatan yang positif menjadi 1,64% jika dibandingkan angka realisasi pada tahun 2020 yaitu -1,84%. Pada sektor informal, pada tahun 2021 proporsi tenaga kerja informal mengalami penurunan dari tahun 2020 sebesar 60,47% menjadi 59,45%. Penurunan tersebut salah satunya disebabkan oleh afirmasi kebijakan yang mendorong terciptanya lapangan pekerjaan yang lebih baik dan inklusif.

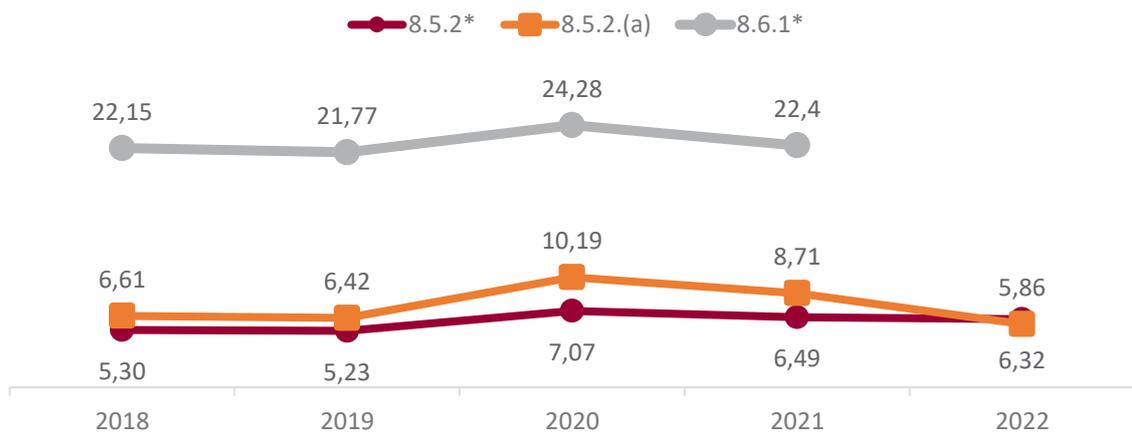
Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, proporsi pekerja informal laki-laki dan perempuan mengalami penurunan di masa pemulihan ekonomi, tetapi proporsi pekerja informal perempuan cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Pembatasan aktivitas pada saat adanya pandemi menyebabkan meningkatnya pengangguran.



Gambar 2.27 Proporsi Tenaga Kerja Informal berdasarkan Jenis Kelamin

Sumber: BPS, 2022

Pada tahun 2021, jumlah pengangguran mencapai 9,10 juta orang dengan tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 5,86 (2022) dari 6,49 (2021), tingkat setengah pengangguran menjadi 6,32 (2022) dari 8,71 (2021), dan persentase usia muda yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET) menjadi 22,40 (2021) dari 22,28 (2020). Penurunan pada ketiga indikator tersebut memperlihatkan perbaikan sektor ketenagakerjaan sejalan dengan penanganan pandemi Covid-19 yang semakin baik. Dalam mengatasi tingkat pengangguran akibat pandemi, pemerintah telah melakukan program perluasan lapangan kerja melalui penyediaan stimulus dunia usaha, pemulihan tenaga kerja dan pemulihan jam kerja melalui *rehiring* dan *retraining* tenaga kerja di berbagai sektor salah satunya sektor pariwisata, perluasan lapangan kerja melalui program padar karya dan tenaga kerja mandiri (TKM), bantuan subsidi upah, dan Kartu Prakerja.

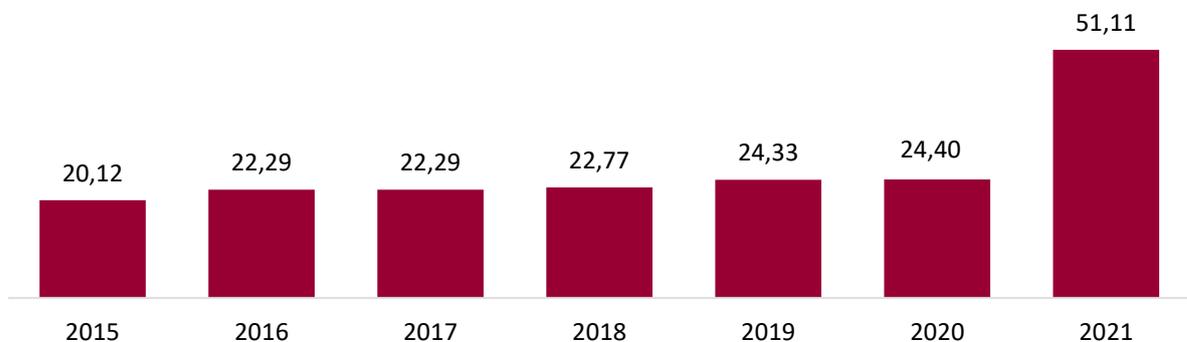


Gambar 2.28 Tingkat Pengangguran Terbuka (8.5.2*), Tingkat Setengah Pengangguran (8.5.2.(a)), Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET) (8.6.1*)

Sumber: Sakernas BPS, 2022

C. Peningkatan Kapasitas Usaha dan Akses Pembiayaan Bagi UMKM

Dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi, pemerintah telah mengeluarkan dana sebesar Rp699,43 triliun untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di tahun 2021. Salah satu program strategisnya yaitu melakukan stimulus UMKM melalui Kredit Usaha Rakyat serta peningkatan nilai tambah ekonomi untuk pengembangan UMKM.



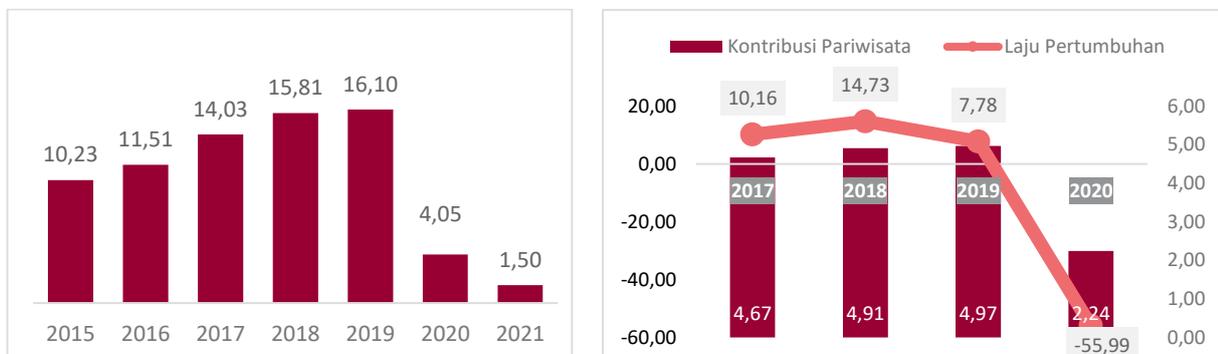
Gambar 2.29 Persentase Akses UMKM ke Layanan Keuangan

Sumber: BI, 2022

Capaian ini dapat terlihat pada indikator 8.3.1.(a) persentase akses UMKM ke layanan keuangan, pada tahun 2021 meningkat 2 kali lipat dari tahun-tahun sebelumnya menjadi 51.11%. Dari segi pengembangan UMKM pada saat pemulihan ekonomi terdapat beberapa tantangan antara lain dalam penyaluran stimulus kepada pelaku UMKM yang tepat sasaran, belum terintegrasinya kegiatan lintas Kementerian/Lembaga (K/L) terkait UMKM, nilai tambah produk UMKM masih rendah, kurangnya akses informasi pembiayaan dan pemasaran kepada pelaku UMKM, serta belum optimalnya layanan pendampingan dan konsultasi usaha.

D. Kondisi Nilai Tambah Sektor Pariwisata

Pengendalian penyebaran COVID-19 pada pembatasan aktivitas masyarakat, sangat berdampak pada sektor pariwisata. Jumlah wisatawan mancanegara mengalami penurunan signifikan menjadi 1.5 juta orang pada tahun 2021. Pada saat pandemi berlangsung jumlah wisatawan mancanegara telah mengalami penurunan menjadi 4 juta di tahun 2020, dengan proporsi kontribusi pariwisata sebesar 2,24%, setengah dari proporsi di tahun 2019. Kebijakan yang dilakukan untuk mendukung sektor pariwisata di masa pandemi antara lain pemulihan pasar pariwisata melalui hibah pemulihan dunia usaha, penerapan standar *cleanliness, healthy, sustainability and environment* (CHSE) di destinasi dan industri pariwisata; penyelesaian pembangunan lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP); pemulihan pariwisata Bali dan destinasi pariwisata unggulan lainnya (Batam-Bintan, Bandung, dan Banyuwangi); serta pemulihan usaha kreatif yang didukung akses pembiayaan dan reaktivasi pasar produk dan jasa kreatif.



Gambar 2.30 Jumlah Wisatawan Mancanegara (Juta Orang) (kiri) dan Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Pariwisata terhadap PDB (kanan)

Sumber: BPS, 2022



TUJUAN 9

Membangun Infrastruktur Yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi

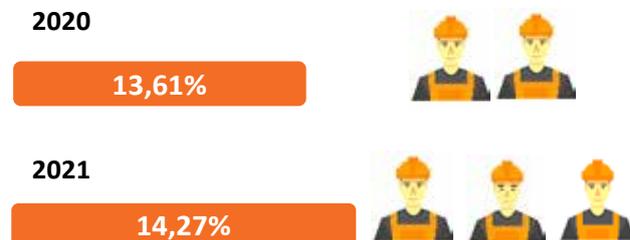
Pemulihan sektor industri, pemerataan infrastruktur digital, dan peningkatan inovasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus upaya *build back better* pasca COVID-19 menjadi prioritas Pemerintah

Proporsi dan Nilai Tambah Industri Manufaktur



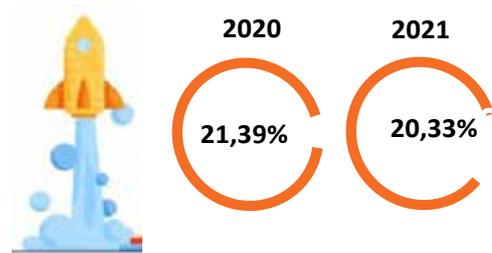
Meskipun capaian proporsi dan nilai tambah fluktuatif, laju pertumbuhan PDB kembali positif pada **3,39%** setelah sebelumnya terkontraksi sebesar **-2,93%**

Proporsi Tenaga Kerja Sektor Industri Manufaktur



Tenaga kerja sektor industri manufaktur perlahan meningkat menjadi **14,27%** sejalan dengan berbagai stimulus yang diberikan pada sektor industri

Kontribusi Ekspor Produk Teknologi Tinggi



Ekspor produk berteknologi tinggi mengalami penurunan sebesar **1,06%** salah satunya disebabkan keterbatasan bahan baku

Proporsi Penduduk Terlayani Mobile Broadband



Layanan *mobile broadband* nasional sudah mencapai level *hardrock* atau di atas **90%** selama 4 tahun terakhir, capaian terkini meningkat sebesar **0,09%**

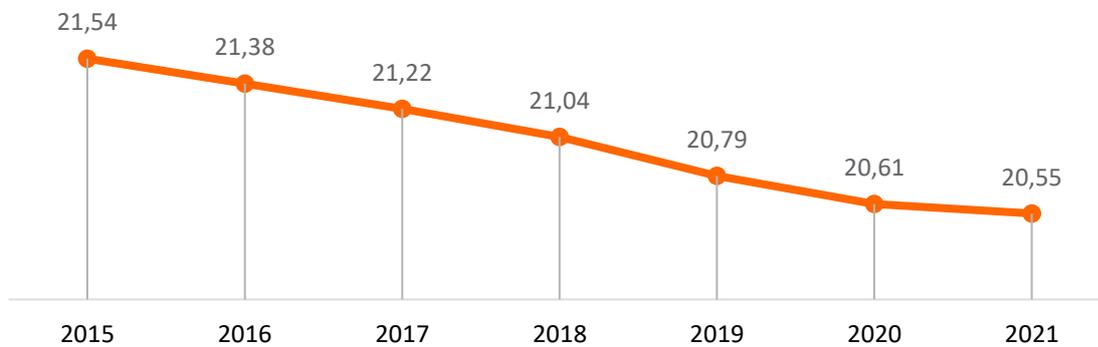
Intervensi kebijakan dalam kerangka infrastruktur, industri, dan inovasi antara lain **pendanaan industri prioritas, pemerataan infrastruktur TIK, dan perbaikan kapasitas fiskal**

2.9. Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur

Pembangunan Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur merupakan bagian dari strategi Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi, yang difokuskan pada pemulihan sektor industri, yaitu pemulihan dan peningkatan nilai tambah ekonomi serta diversifikasi ekonomi.

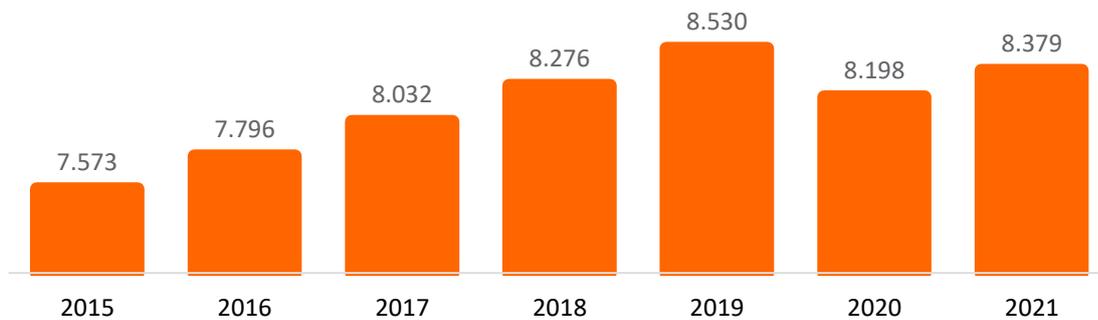
A. Industri untuk Pemulihan dan Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Diversifikasi Ekonomi

Sektor industri manufaktur menjadi sektor kedua yang mengalami tantangan terbesar dari pandemi, namun dari beberapa indikator industri manufaktur telah memperlihatkan mengalami perbaikan.



Gambar 2.31 Proporsi Sektor Industri Manufaktur Terhadap PDB (Persen)

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022



Gambar 2.32 Nilai Tambah Sektor Industri Manufaktur Terhadap PDB (Rupiah)

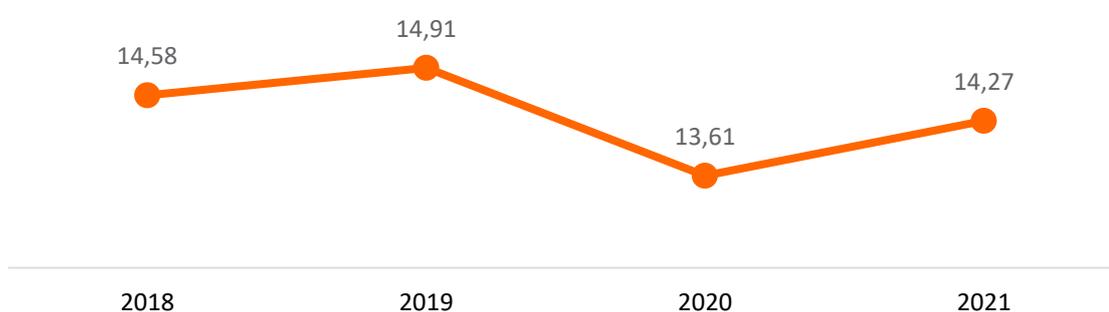
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Kontribusi industri manufaktur terus diperkuat, namun upaya yang lebih terfokus masih diperlukan. Proporsi sektor industri manufaktur terhadap PDB masih mengalami penurunan dari 20,61% pada tahun 2020 menjadi 20,55% pada tahun 2021. Pada sisi lainnya, nilai tambah sektor industri manufaktur per kapita meningkat dari 8.198 pada tahun 2020 menjadi 8.379 pada tahun 2021. Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur juga meningkat dari -2,93% pada tahun 2020 menjadi 3,39% pada tahun 2021.



Gambar 2.33 Laju Pertumbuhan PDB Industri Manufaktur

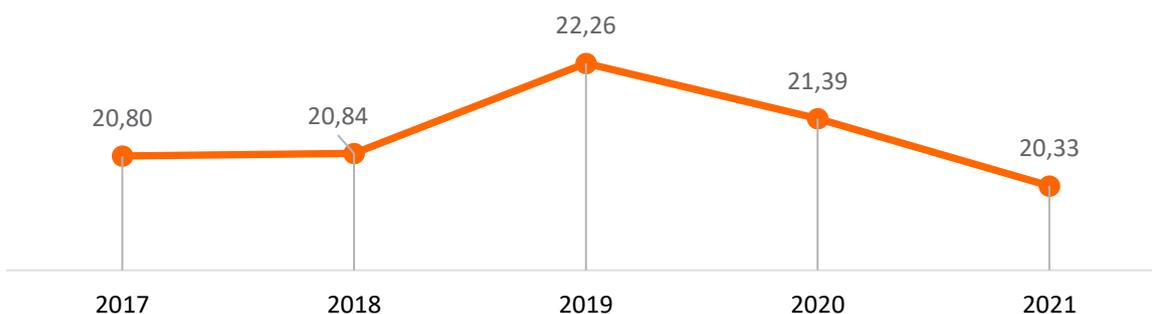
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022



Gambar 2.34 Proporsi Tenaga Kerja pada Sektor Industri Manufaktur

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Pencapaian peningkatan peran industri manufaktur sejalan dengan peningkatan proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur, dari 13,61% pada tahun 2020 menjadi 14,27% tahun 2021.



Gambar 2.35 Kontribusi Ekspor Produk Industri Berteknologi Tinggi

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Nilai tambah produk industri berteknologi tinggi juga terus meningkat yang dapat dilihat kontribusi ekspor produk industri berteknologi tinggi dari 21,38% di tahun 2020 menjadi 20,33% di tahun 2021.

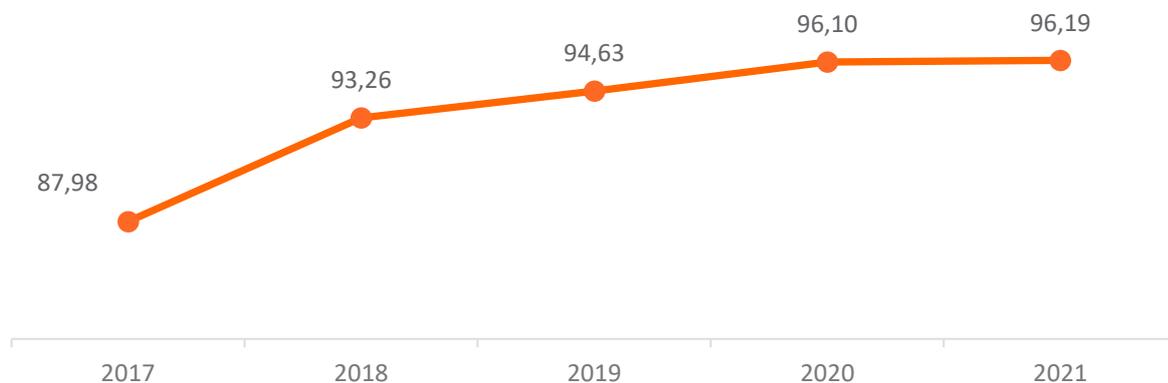
Tantangan yang dihadapi dalam pemulihan sektor industri, khususnya industri manufaktur dan peningkatan nilai tambah antara lain adalah kebutuhan akan dukungan stimulis fiskal dan nonfiskal untuk mengembalikan tingkat kapasitas produksi seperti sebelum pandemi. Pemulihan konsumsi dan daya beli masyarakat juga menjadi tantangan untuk menggerakkan

permintaan terhadap produk-produk industri manufaktur, yang akan mendorong perbaikan kapasitas finansial perusahaan dan pemulihan jam kerja dari tenaga kerja di sektor industri manufaktur. Selain itu, masih ada keterbatasan pada akses bahan baku, khususnya untuk produk industri berteknologi tinggi.

Dalam pemulihan sektor industri, strategi pemulihannya mencakup (i) peningkatan ketersediaan bahan baku dan bahan penolong dalam tingkat harga yang kompetitif; (ii) penyediaan stimulus dunia usaha; (iii) pemulihan tenaga kerja dan pemulihan jam kerja melalui *rehiring* dan *retraining* tenaga kerja; (iv) percepatan pembangunan Kawasan Industri Prioritas untuk menampung relokasi investasi, termasuk pengembangan Kawasan Industri Halal; (v) perluasan pendanaan proyek industri prioritas; serta (vi) peningkatan realisasi investasi yang berskala besar dan menyerap tenaga kerja.

Dalam peningkatan nilai tambah ekonomi, strateginya mencakup pelaksanaan Rencana Aksi Peningkatan Ekspor yang antara lain mencakup peningkatan dan perluasan ekspor, harmonisasi kebijakan yang *outward looking*, peningkatan jumlah pengekspor baru yang didukung penguatan SDM ekspor, serta peningkatan partisipasi pelaku usaha dalam ekspor jasa.

B. Infrastruktur untuk Transformasi Digital



Gambar 2.36 Proporsi Penduduk yang Terlayani Mobile Broadband

Sumber: Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2022

Dalam upaya diversifikasi ekonomi, dilakukan juga melalui peningkatan pemerataan infrastruktur dan kualitas layanan digital, yang termasuk juga bagian dari transformasi digital. Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband juga meningkat dari 96,10% di tahun 2020 menjadi 96,19% di tahun 2021.



Gambar 2.37 Proporsi Penduduk Terlayani Mobile Broadband pada 34 Provinsi

Sumber: Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2022

Pembangunan infrastruktur, pemanfaatan dan fasilitas pendukung Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) menghadapi beberapa tantangan, antara lain adalah masih rendahnya jangkauan dan keandalan akses infrastruktur TIK, terbatasnya kemampuan SDM dalam mendukung transformasi digital, dan belum optimalnya penggunaan platform digital karena masih rendahnya literasi digital dan belum terintegrasinya data antar-platform digital.

Arah kebijakan pembangunan infrastruktur TIK sebagai bagian dari transformasi digital meliputi (i) mendorong percepatan pembangunan infrastruktur TIK, terutama pada daerah non komersil dalam rangka penyediaan layanan publik, pertumbuhan sektor pariwisata, industri dan kegiatan ekonomi strategis lainnya; (ii) mendorong migrasi penyiaran dari sistem analog ke sistem digital, dengan pengembangan infrastruktur dan ekosistem pendukung penyiaran digital; dan (iii) mendorong percepatan adopsi digital pada sektor-sektor strategis seperti pemerintahan, pendidikan, kesehatan, industri, pariwisata dan sektor lainnya, melalui percepatan pembangunan infrastruktur TIK, peningkatan kapasitas SDM digital, keamanan informasi dan kesiapan industri dalam negeri.

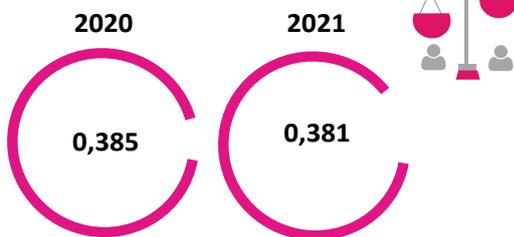


TUJUAN 10

Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar Negara

Upaya pengurangan kesenjangan dan penguatan sistem perlindungan sosial terus dilakukan melalui intervensi kebijakan untuk memastikan *minimal gap* dalam masyarakat khususnya terkait aspek sosial dan ekonomi

Rasio Gini



Kesenjangan akibat COVID-19 terus menurun, meskipun kesenjangan wilayah masih terlihat pada perkotaan (**0,398**) yang lebih tinggi dari perdesaan (**0,314**)

Penduduk Miskin di Bawah Garis Kemiskinan Nasional dan Penduduk Miskin di Daerah Tertinggal



Kemiskinan Nasional

2021
9,71%

Kemiskinan Daerah Tertinggal

2021
26,68%

Kemisikinan nasional turun cukup signifikan **0,48%**. Namun kemiskinan di daerah tertinggal meningkat sebesar **0,25%**

Anggaran Belanja Perlindungan Sosial



2020
12,70%
2021
13,30%

Sejalan dengan program PEN, penguatan perlindungan sosial dilakukan melalui peningkatan anggaran sebesar **0,60%**

Proporsi Peserta Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan

2020

Formal: 63,82%
Informal: 3,21%

2021

Formal: 53,98%
Informal: 8,41%



Cakupan pekerja dengan jaminan sosial ketenagakerjaan fluktuatif, sektor formal menurun sebesar **9,84%**. Namun sektor informal meningkat sebesar **4,93%**

Intervensi kebijakan afirmasi **40% terbawah** dan redistribusi **fiskal yang merata** merupakan strategi mengurangi ketimpangan

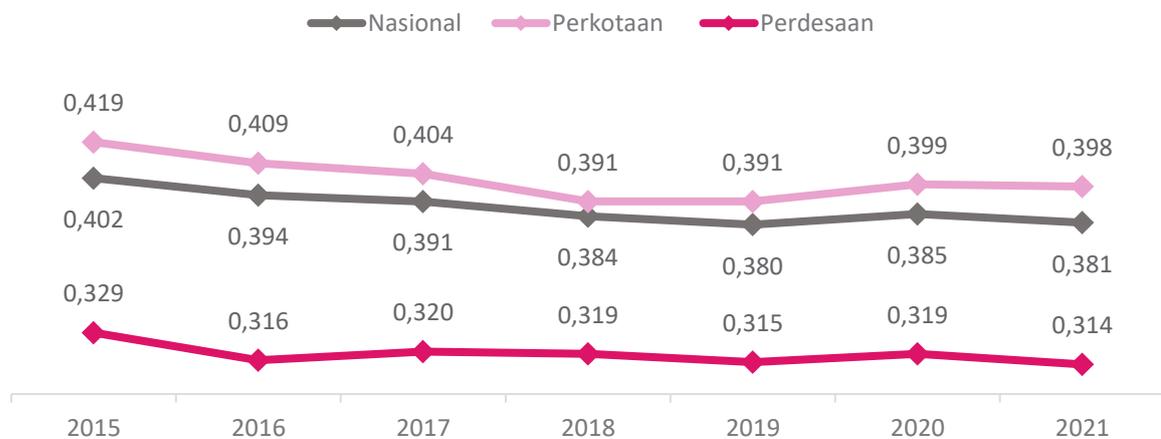


2.10. Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan

Pembangunan Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan tidak lepas dari strategi Reformasi Struktural, khususnya dalam reformasi sistem perlindungan sosial, dalam mendukung Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi.

A. Pemulihan Ekonomi untuk Menurunkan Kesenjangan antarkelompok Pendapatan dan antarwilayah

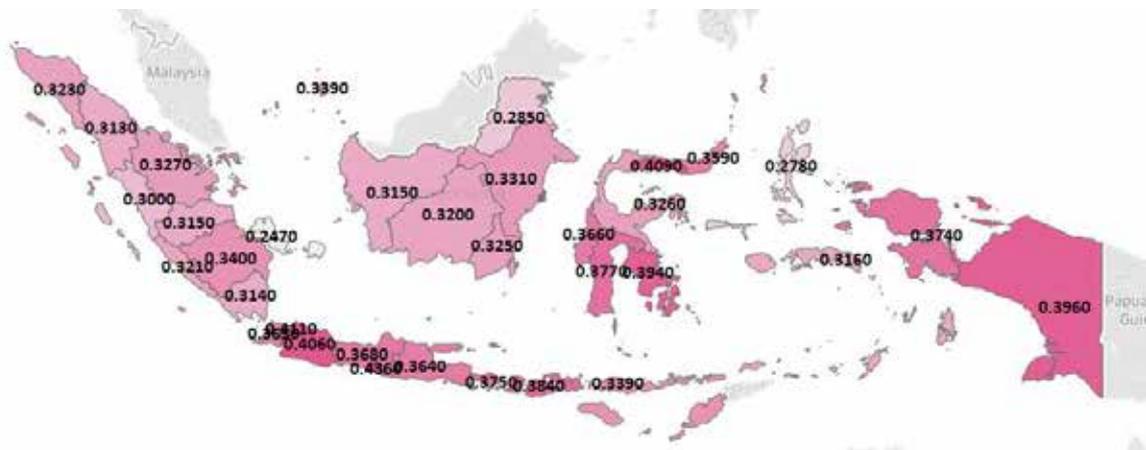
Kesenjangan, yang diukur dengan Rasio Gini, terus turun pascapandemi, dari 0,385 pada tahun 2020 menjadi 0,381 pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi pascapandemi telah juga menurunkan kesenjangan.



Gambar 2.38 Rasio Gini

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

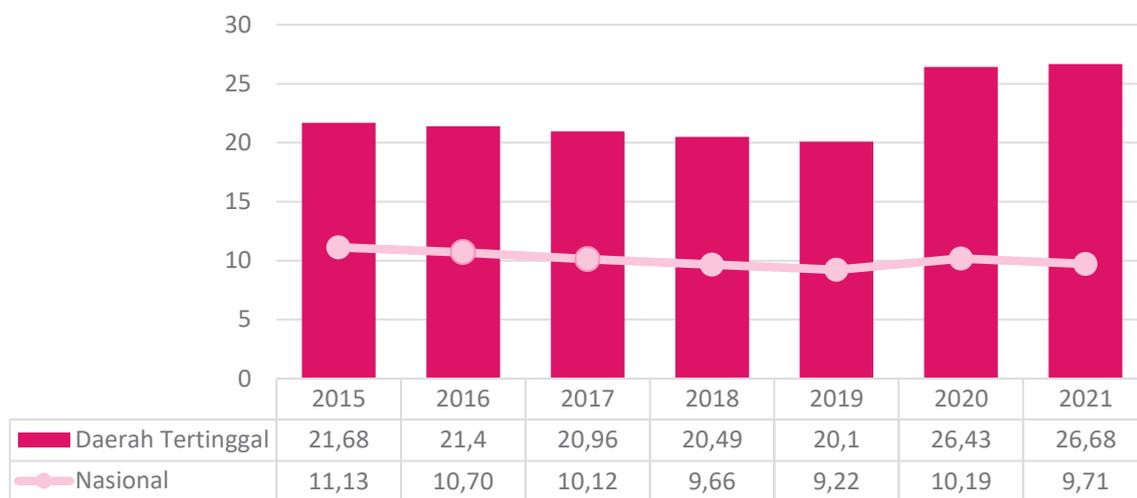
Kesenjangan pada perdesaan cukup rendah dan stabil, berbeda dengan kondisi kesenjangan di perkotaan yang tantangannya jauh lebih berat untuk diatasi. Di tahun 2021, provinsi yang memiliki rasio gini terendah adalah Kepulauan Bangka Belitung sebesar 0,247 dan provinsi yang memiliki rasio gini tertinggi adalah DI Yogyakarta sebesar 0,436.



Gambar 2.39 Rasio Gini pada 34 Provinsi

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Kemiskinan juga menunjukkan penurunan, ini diperlihatkan pada persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur, yang menurun dari 10,19% pada tahun 2020 menjadi 9,71% pada tahun 2021. Walaupun angka kemiskinan nasional turun secara signifikan, angka kemiskinan di daerah tertinggal meningkat. Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal meningkat dari 26,43% pada tahun 2020 menjadi 26,68% pada tahun 2021.



Gambar 2.40 Persentase Penduduk yang Hidup di Bawah Garis Kemiskinan Nasional dan Persentase Penduduk Miskin di Daerah Tertinggal

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Tantangan terbesar pada kesenjangan antarkelompok pendapatan adalah pembuatan kebijakan yang perlu terus diarahkan pada kelompok masyarakat pendapatan menengah-bawah dan masyarakat pendapatan tinggi. Selain itu, untuk menjaga agar angka kemiskinan dan kesenjangan bisa terus menurun, dibutuhkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata, inflasi yang stabil, penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat miskin dan rentan, iklim investasi yang terjaga, serta infrastruktur terutama di daerah 3T.

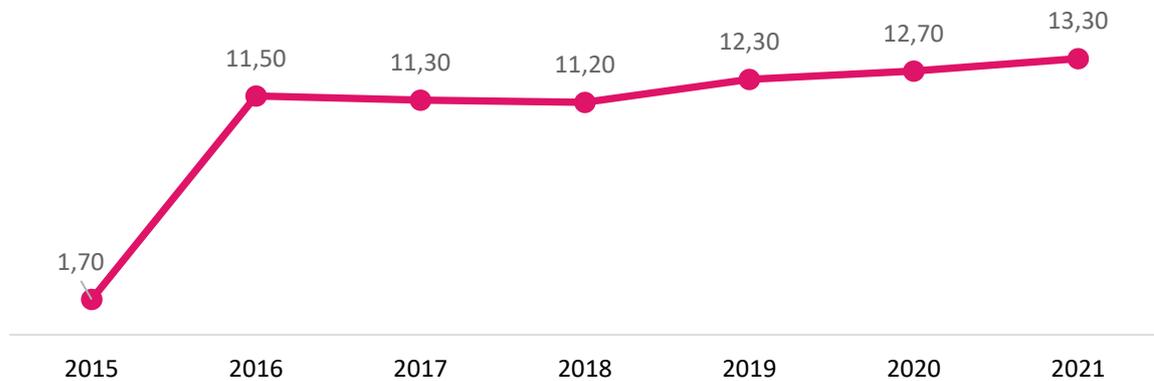
Tantangan pada kesenjangan antarwilayah adalah pemerataan pembangunan, khususnya perlunya rata-rata pertumbuhan ekonomi Kawasan Timur Indonesia (KTI) yang lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi Kawasan Barat Indonesia (KBI).

Arah dan strategi kebijakan dalam mengurangi kesenjangan antarkelompok pendapatan dan percepatan penanggulangan kemiskinan antara lain (i) penyempurnaan intervensi kebijakan afirmasi kelompok 40% terbawah melalui reformasi sistem perlindungan sosial, (ii) penguatan kelembagaan pelatihan vokasi di seluruh Indonesia yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja masa depan, (iii) pengembangan UMKM sebagai salah satu penggerak utama ekonomi kelompok menengah, (iv) penguatan kebijakan fiskal untuk redistribusi yang merata.

Dalam mengurangi kesenjangan antarwilayah dan mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi KTI, arah kebijakan mencakup perbaikan kinerja investasi di seluruh Indonesia, dan

menyiapkan SDM dengan upaya strategis antara lain (i) peningkatan keahlian tenaga kerja melalui reformasi sistem pendidikan dan pelatihan vokasi, (ii) penguatan sistem informasi pasar kerja yang kredibel sebagai dasar intervensi kebijakan ketenagakerjaan, dan (iii) penguatan sistem perlindungan sosial bagi pekerja.

B. Penguatan Sistem Perlindungan Sosial untuk Pemulihan Ekonomi



Gambar 2.41 Persentase Rencana Anggaran untuk Belanja Fungsi Perlindungan Sosial Pemerintah Pusat

Sumber: Kementerian Keuangan, 2022

Pemerintah melakukan berbagai program untuk menjaga daya beli rumah tangga melalui perbaikan perlindungan sosial. Persentase rencana anggaran untuk belanja fungsi perlindungan sosial pemerintah pusat terus naik dari 12,7% di tahun 2020 menjadi 13,3% di tahun 2021.



Gambar 2.42 Proporsi Peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan

Sumber: BPJS Ketenagakerjaan, 2022

Pada sektor ketenagakerjaan, proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan untuk pekerja formal menurun dari 63,82% di tahun 2020 menjadi 53,98% di tahun 2021, namun untuk pekerja informal meningkat dari 3,21% di tahun 2020 menjadi 8,14% di tahun 2021.

Pandemi COVID-19 telah berpengaruh besar pada jumlah orang miskin dan rentan miskin yang meningkat terutama dari kelompok rentan dan pekerja informal, bahkan kelompok menengah dan pekerja formal. Kemampuan masyarakat dalam kepesertaan dan kolektabilitas jaminan sosial juga terpengaruh, terutama bagi kelompok pekerja informal.

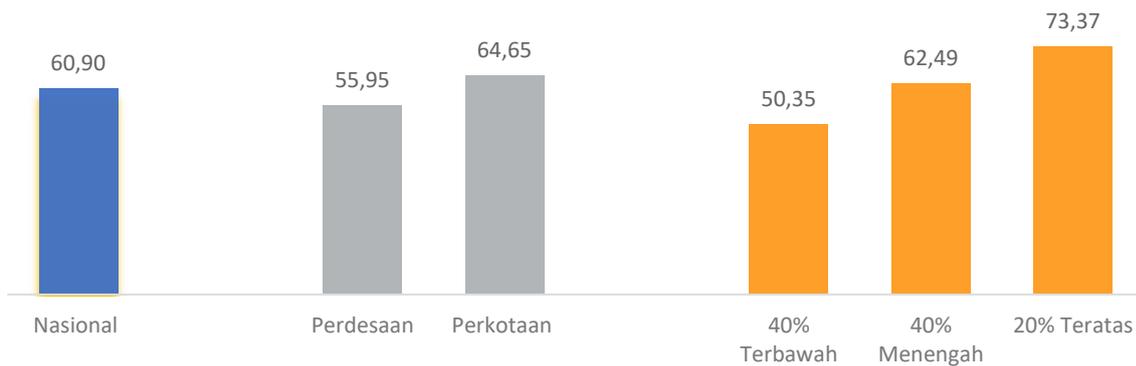
Arah kebijakan untuk perbaikan perlindungan sosial difokuskan pada beberapa strategi, yaitu (i) perluasan cakupan kepesertaan jaminan sosial, khususnya bagi sektor informal, untuk mendorong pemulihan pascapandemi; (ii) penguatan integrasi dan digitalisasi penyaluran program bantuan sosial; (iii) pengembangan mekanisme graduasi program-program bantuan sosial; (iv) perluasan jangkauan bantuan dan rehabilitasi sosial terhadap kelompok rentan; (v) pengembangan perlindungan sosial yang adaptif terhadap bencana, termasuk bencana pandemi; (vi) pengembangan registrasi sosial ekonomi melalui digitalisasi monografi desa/kelurahan untuk mendukung pengelolaan data penduduk, meningkatkan akurasi sasaran penerima manfaat, meningkatkan perencanaan penganggaran yang inklusif dan berpihak kelompok rentan, serta mendukung identifikasi penduduk yang termiskin dan rentan untuk pengurangan kemiskinan ekstrem; (vii) transformasi subsidi energi menjadi bantuan sosial agar program lebih efektif, tepat sasaran, dan adaptif kebencanaan; (viii) integrasi dan peningkatan kesinambungan data, proses pemantauan dan evaluasi, serta pengembangan skema pembiayaan program perlindungan sosial yang berkesinambungan.

2.11. Tujuan 11 Kota dan Pemukiman Yang Berkelanjutan

A. Akses Terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau

Pemenuhan akses terhadap hunian yang layak sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sehat dan produktif di tengah pandemi COVID-19. Risiko penyebaran COVID-19 dapat menjadi lebih tinggi pada perumahan dan permukiman yang padat penduduk atau kumuh. Pada tahun 2021, rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak sebesar 60,90%. Dengan kata lain, sekitar 39% penduduk Indonesia yang masih hidup di rumah yang tidak layak. Sementara itu, SDGs menargetkan akses yang universal (100%) terhadap perumahan dan layanan dasar yang layak, aman, dan terjangkau pada tahun 2030.

Wilayah perdesaan memiliki akses hunian layak yang lebih rendah, sebesar 55,95%, dibandingkan dengan perkotaan yang telah mencapai 64,65%. Pada kelompok dengan pendapatan 40% terbawah, hanya sekitar separuhnya (50,35%) yang telah menikmati rumah layak huni. Akses hunian layak pada masyarakat dengan pendapatan 20% teratas pun baru berada di angka 73,37%.



Gambar 2.43 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak Tahun 2021 (dalam %)

Sumber: Susenas, BPS, 2021

Disparitas akses terhadap rumah layak huni terjadi antar provinsi. Angka tertinggi untuk akses rumah tangga dengan hunian layak adalah Provinsi DI Yogyakarta, yaitu sebesar 85,15%, diikuti dengan Provinsi Bali sebesar 78,47%, dan Provinsi Kalimantan Timur sebesar 70,70%. Terdapat sebanyak 15 provinsi yang memiliki akses hunian yang layak di bawah angka nasional dengan Kepulauan Bangka Belitung yang menempati urutan terbawah (27,60%).

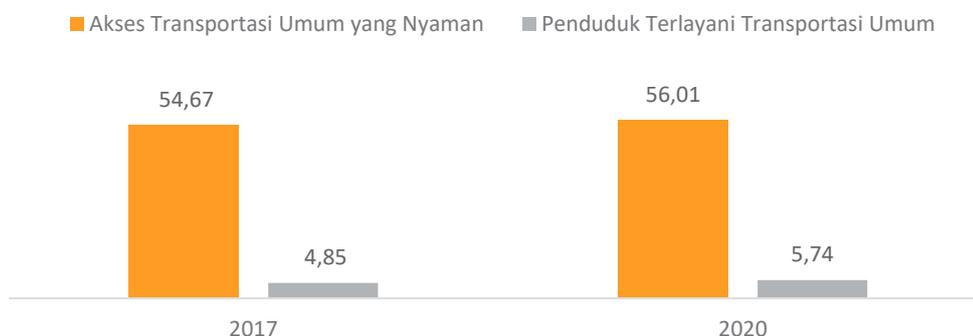
Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar perumahan yang layak menjadi salah satu prioritas pembangunan guna memperkuat kesehatan masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID-19 serta mendukung percepatan pemulihan ekonomi. Tantangan yang masih dihadapi di antaranya (i) industri perumahan belum pulih sepenuhnya baik perumahan yang dibangun secara swadaya maupun formal; serta (ii) adanya dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian masyarakat yang menyebabkan gagal membayar sewa atau kredit rumahnya. Kebijakan yang dilakukan dalam rangka memenuhi akses hunian layak dan

terjangkau antara lain: (i) perluasan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman yang layak dan terjangkau termasuk dukungan untuk pemulihan industri perumahan; dan (ii) penanganan rumah tidak layak huni dan penanganan permukiman kumuh terpadu, khususnya di perkotaan.

B. Akses Terhadap Transportasi yang Aman, Terjangkau, dan Mudah Diakses

Sistem transportasi yang andal memerlukan dukungan perencanaan dan pengelolaan yang baik agar terhubung dengan konsentrasi pemukiman. Persentase populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik dianalisis berdasarkan jumlah populasi yang memiliki jarak akses dalam radius 500 meter dari tempat tinggalnya ke transportasi publik, dibandingkan dengan jumlah semua penduduk yang berada di dalam wilayah layanan transportasi publik tersebut. Selama kurun waktu tahun 2017-2020, akses terhadap transportasi yang nyaman meningkat dari 54,67% menjadi 56,01%.

Pemanfaatan transportasi umum oleh masyarakat masih tergolong rendah. Hal ini tercermin dari persentase penduduk yang terlayani transportasi umum pada tahun 2020 hanya sebesar 5,74%. Meskipun demikian, terjadi peningkatan dari tahun 2017 yang hanya di angka 4,85%. Pembangunan sistem transportasi di berbagai wilayah, terutama di perkotaan, perlu dikembangkan agar mudah diakses serta terintegrasi dengan jalur pejalan kaki maupun sepeda.



Gambar 2.44 Persentase Populasi yang Mendapatkan Akses yang Nyaman Pada Transportasi Publik dan yang Terlayani Transportasi Umum (dalam %)

Sumber: Susenas, BPS, 2020

Berbagai tantangan yang dihadapi dalam penyediaan transportasi yang aman, terjangkau, dan mudah diakses antara lain: (i) belum mapannya pendekatan perencanaan mobilitas terpadu; (ii) belum adanya kelembagaan pengelolaan transportasi lintas wilayah dalam kawasan metropolitan; (iii) serta belum terbangunnya skema pendanaan yang dapat menjamin keberlanjutan pembangunan, pengelolaan dan pengoperasian angkutan umum massal oleh pemerintah daerah; (iv) belum optimalnya konektivitas pada koridor utama angkutan penumpang yang disebabkan oleh terbatasnya jaringan jalan dan jaringan kereta api; serta (v) pengembangan transportasi antarmoda yang masih belum terintegrasi. Pemerintah terus berupaya mendorong penyediaan transportasi dengan berbagai kebijakan di antaranya; (i) penyusunan Rencana Mobilitas Perkotaan yang terpadu dan berkelanjutan (*Urban Mobility*

Plan) oleh pemerintah daerah sebagai acuan dalam kegiatan pengembangan sistem angkutan umum massal di wilayah metropolitan; (ii) pengembangan angkutan umum berbasis rel maupun berbasis jalan yang berperan sebagai angkutan komuter di wilayah perkotaan; (iii) pengembangan skema pendanaan pembangunan sistem angkutan umum massal perkotaan; (iv) dan pembentukan kelembagaan pengelola transportasi perkotaan untuk wilayah metropolitan.

C. Kualitas Udara

Pembatasan kegiatan selama pandemi COVID-19 menjadikan aktivitas industri dan mobilitas masyarakat melambat yang mana juga memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas udara. Pada tahun 2020, hasil pengukuran rata-rata tahunan PM10 di 25 kota yang terukur oleh Stasiun Pemantauan Kualitas Udara Ambien (SPKUA) menunjukkan kualitas udara yang baik ($<50\mu\text{g}/\text{m}^3$). Indeks Kualitas Udara di tahun 2021 sebesar 87,36 yang masuk ke dalam katagori baik (Kategori Baik pada angka IKU 70-90).



Gambar 2.45 Indeks Kualitas Udara (IKU)

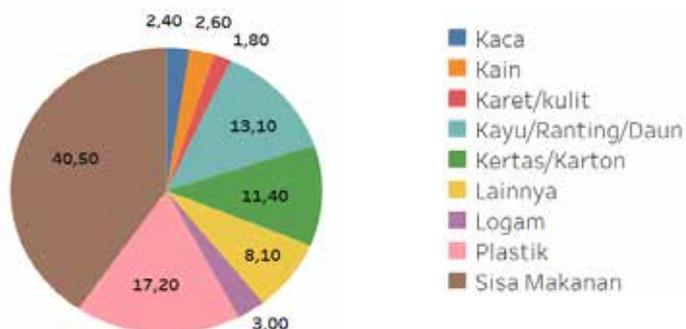
Sumber: KLHK, 2022

Sebagai wilayah metropolitan terbesar, DKI Jakarta menempati peringkat IKU terendah yaitu sebesar 66,52 dan masuk kategori sedang (Kategori Sedang pada angka IKU 60-70). Posisi terbawah berikutnya diduduki oleh Provinsi Banten dengan IKU sebesar 74,14 dan Provinsi Jawa Barat sebesar 79,34. Salah satu sumber pencemaran udara di wilayah perkotaan berasal dari sektor transportasi dari emisi kendaraan bermotor. Strategi yang dilakukan dalam menangani isu pencemaran udara antara lain pengurangan penggunaan kendaraan pribadi menjadi kendaraan umum; uji emisi kendaraan bermotor; serta promosi dan penerapan kebijakan transportasi berkelanjutan di daerah perkotaan.

TUJUAN 12

Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan

Persentase Sisa Makanan



Sampah Makanan adalah jenis sampah paling dominan di Indonesia, yaitu sebanyak 40,5% dari total sampah

Sumber: Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, KLHK
<https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/data/komposisi>



2018



2019



2020

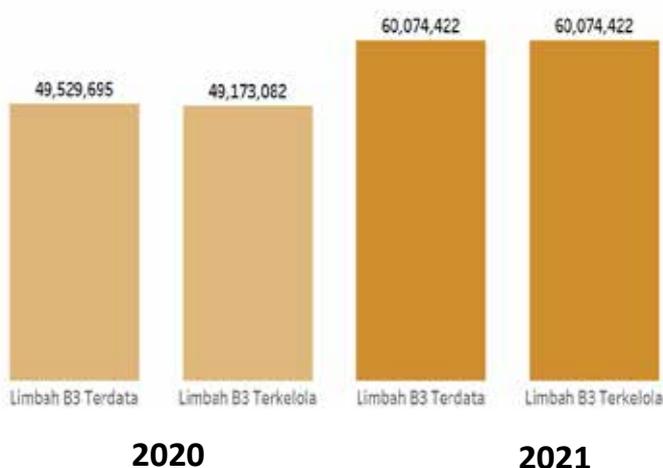
Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001 tahun 2020

2381

Perusahaan

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2022

Jumlah Limbah Terdata dan Jumlah Limbah Terkelola



Limbah bahan berbahaya dan beracun sebanyak **60,07** juta ton terkelola **100 %**

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2022

2.12. Tujuan 12 Pola Konsumsi dan Produksi Yang Bertanggung Jawab

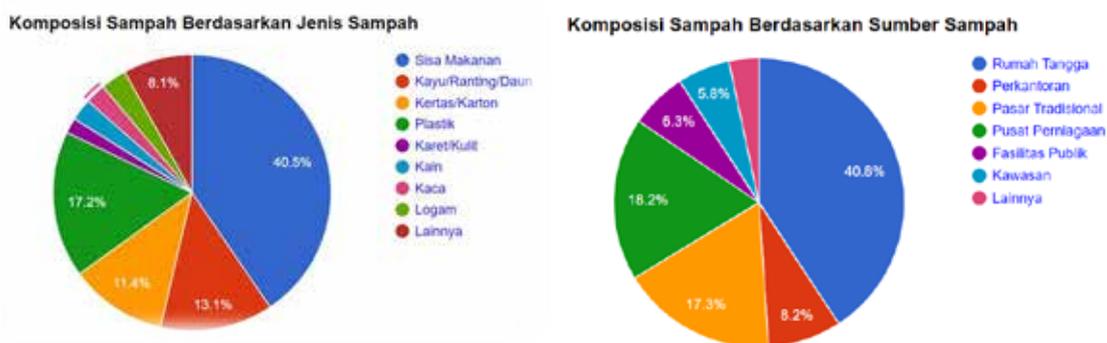
Sustainable Consumption and Production (SCP) atau konsumsi dan produksi berkelanjutan merupakan usaha dalam mewujudkan kegiatan konsumsi dan produksi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan oleh semua pemangku kepentingan secara global, dengan perubahan secara terpadu dan sistematis. SCP pertama kali dibahas pada Deklarasi Rio tahun 1992, kemudian dilanjutkan dan dikuatkan dengan *Johannesburg Plan of Implementation (JPOI)* tahun 2002 dan Konferensi *United Nations Conference on Sustainable Development* (Konferensi Rio+20) di Rio de Janeiro, Brasil pada bulan Juni 2012. Dalam Konferensi Rio+20 tersebut, penerapan SCP dikaitkan dengan upaya pengentasan kemiskinan dan *green economy*.

Pemerintah menindaklanjuti Konferensi Rio +20 (tahun 2012) dan Resolusi Sidang Umum Perserikatan Bangsa- Bangsa Nomor 66/288 tanggal 27 Juli 2012 dengan mengembangkan Kerangka Kerja 10 Tahun Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan di Indonesia (“10Y SCP Indonesia”). Dalam penyusunan 10Y SCP Indonesia tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup bekerjasama dengan BAPPENAS, kementerian/lembaga terkait dan beberapa pemangku kepentingan utama. Dokumen 10Y SCP Indonesia memuat peta jalan Indonesia dalam periode waktu 2013 – 2023 untuk pengarusutamaan penerapan SCP dalam agenda pembangunan nasional dan pelaksanaan beberapa kebijakan/program nasional prioritas secara bertahap.

Saat ini, SCP Indonesia memasuki tahap akselerasi (2020-2024) yang mendorong penerapan *resource efficiency, Low-carbon development strategy, green economy, dan Circular Economy*. Konektivitas konten tematik SCP dengan strategi pendekatan perubahan di tingkat tapak maupun pendekatan yang bersifat *top-down* diperlukan oleh semua pihak untuk mewujudkan masyarakat yang mempraktekan SCP sebagai tujuan utama konsumsi dan produksi yang berkelanjutan di Indonesia. Kunci pencapaian pembangunan berkelanjutan dan titik temu aksi menuju konsumsi dan produksi berkelanjutan tersebut terjadi pada aktualisasi di tingkat tapak.

A. Penanganan Daur Ulang Sampah dan Sampah Makanan

Pada tahun 2022, sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga mendominasi timbulan sampah secara nasional sebesar 29,56 juta ton/tahun dari 234 Kabupaten/kota se-Indonesia. Sekitar 19,74 juta ton (66,79%) sampah tersebut berhasil dikelola dengan baik melalui kegiatan pengurangan sampah (17,01%) maupun kegiatan penanganan sampah (49,78%). Sedangkan sisanya sekitar 9,82 juta ton (33,21%) belum terkelola. Komposisi sampah berdasarkan jenis sampah di dominasi oleh sampah yang berasal dari sisa makanan (40,5%), plastik (17,2%), dan kayu/ranting/daun (13,1%). Jika ditinjau dari komposisi sampah berdasarkan sumber sampah maka sampah yang berasal dari rumah tangga sebesar 40,8% kemudian diikuti dengan sampah yang berasal dari pusat perniagaan sebesar 18,2% dan pasar tradisional sebesar 17,3%.



Gambar 2.46 Komposisi sampah berdasarkan jenis sampah dan sumber sampah, 2022

Sumber: SIPSN, KLHK akses 19 September 2022

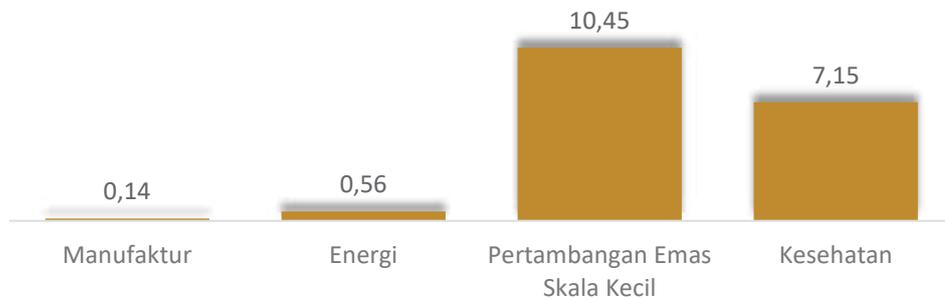
Kajian *food loss and waste* (FLW) (Bappenas, 2021b) menemukan bahwa FLW Indonesia selama periode 2000 - 2019 sebesar 115-184 kg/ kapita/tahun. Dari sisi tahap rantai pasok, timbulan terbesar FLW terjadi di tahap konsumsi. Dari sisi sektor dan jenis pangan, timbulan terbesar terjadi di tanaman pangan, kategori padipadian. Sementara sektor pangan paling tidak efisien adalah tanaman hortikultura, tepatnya di kategori sayur-sayuran. Tanpa pengendalian, diestimasikan timbulan FLW Indonesia pada 2045 akan mencapai 344 kg/kapita/tahun.

Penyebab utama adanya timbulan FLW disebabkan antara lain Kelebihan porsi makanan dan perilaku konsumen, kurangnya implementasi *Good Handling Practice* (GHP), dan kurangnya informasi/edukasi pekerja pangan dan konsumen. Untuk mendukung pengurangan FLW di Indonesia, pemerintah melakukan pengelolaan pangan berkelanjutan serta penanganan *food loss and waste* yang dilaksanakan dengan (1) pengurangan pemborosan bahan pangan setelah panen; (2) pengurangan pemborosan dan limbah dalam rantai pasok pangan; (3) pengurangan limbah makanan yang dihasilkan oleh konsumen; dan (4) pengurangan pemborosan dan limbah makanan dalam proses produksi.

B. Pengelolaan dan Penanganan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Dalam mewujudkan komitmen Indonesia terhadap penanganan limbah bahan kimia dan limbah B3, Indonesia telah meratifikasi beberapa perjanjian internasional yang terkait dengan bahan kimia dan limbah B3 seperti Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2005 tentang Pengesahan *Amendment to the Basel Convention on the Control of Transboundary of Hazardous Wastes and Their Disposal* (Amendemen atas Konvensi Basel tentang pengawasan perpindahan lintas batas limbah berbahaya dan pembuangannya), dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2017 tentang Pengesahan *Minamata Convention On Mercury* (Konvensi Minamata mengenai Merkuri). Lebih khusus lagi dalam penanganan merkuri, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri.

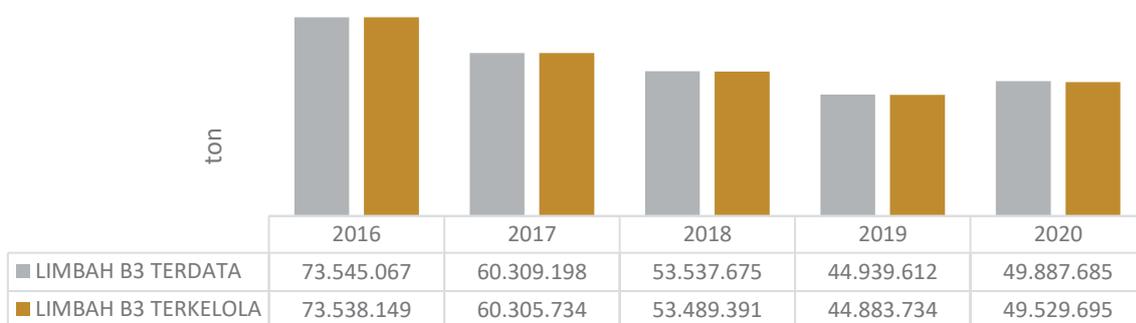
Pada tahun 2021, Indonesia berhasil mengurangi dan menghapus penggunaan merkuri sebesar 15,74 ton (31,48%). Pengurangan penggunaan merkuri berasal dari sektor energi sebesar 710 Kg (0,56%), sektor manufaktur khusus merkuri pada lampu sebesar 374,4 Kg (0,14%), sektor kesehatan khusus pada penghapusan merkuri pada Fayankes sebesar 4.731,6 Kg (7,15%) dan sektor pertambangan emas skala kecil (PESK) sebesar 9.928,4 Kg (10,45%).



Gambar 2.47 Pengurangan dan penghapusan merkuri pada sektor (dalam ton)

Sumber: KLHK, 2021

Selama masa pandemi, jumlah limbah B3 yang dikelola terus memperlihatkan angka yang signifikan dari limbah B3 yang terdata. Hampir Setiap tahun, seluruh limbah B3 yang terdata telah terkelola dengan baik rata-rata diatas 99%. Pada tahun 2020 jumlah limbah B3 yang terdata sebanyak 49,8 juta ton dan limbah B3 yang berhasil dikelola adalah sebanyak 49,5 juta ton.



Gambar 2.48 Jumlah limbah B3 yang terdata dan terkelola

Sumber: KLHK, 2021

Penanganan limbah B3 medis menjadi persoalan darurat yang harus menjadi perhatian, karena limbah medis yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan dampak lingkungan seperti pencemaran lingkungan di tanah, air dan udara. Guna mendukung pemulihan dan transformasi ekonomi pascapandemi COVID-19, penanganan limbah B3 medis dilakukan untuk mendukung penguatan ketahanan kesehatan masyarakat, melalui penanganan limbah B3 medis, serta pengelolaan limbah melalui: (a) peningkatan jasa pengelola limbah B3 yang berizin dan menerapkan standar sesuai regulasi, (iv) Pemulihan lahan terkontaminasi Limbah B3 dan Non B3 pada sektor kesehatan dan non institusi; (v) Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 Medis dan Limbah B3 Terpadu; dan (vi) Penguatan data dan sistem informasi B3, Limbah B3 dan Limbah Non B3.

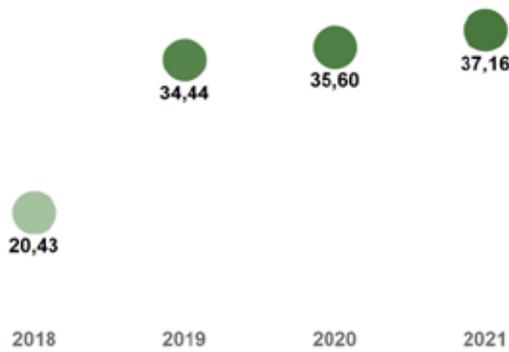
13 PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM



TUJUAN 13

Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya

Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD-PRB)

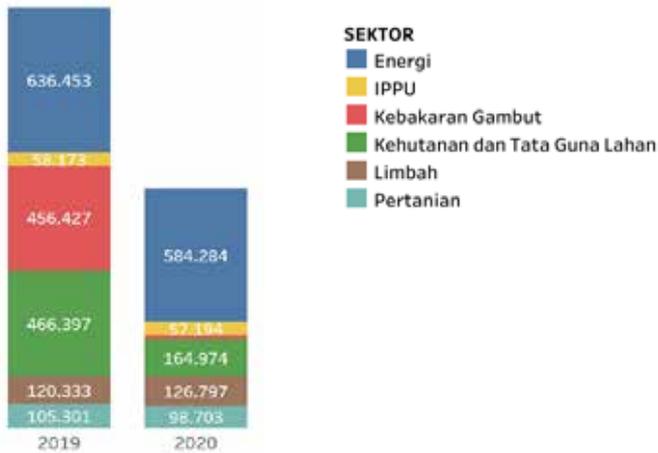


2021

37,16%

Terdapat sejumlah 191 Kab/Kota yang telah memiliki RAD PRB dari total 514 Kab/Kota Se-Indonesia

Sumber: Direktorat Tata Ruang dan Bencana Bappenas, 2022



42,06%

Emisi Gas Rumah Kaca 2020

1.080,46 Mton Co2e

Persentase Potensi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK), 2018-2020



Penurunan emisi GRK secara kumulatif hingga tahun 2020 telah mencapai sebesar

26,44%

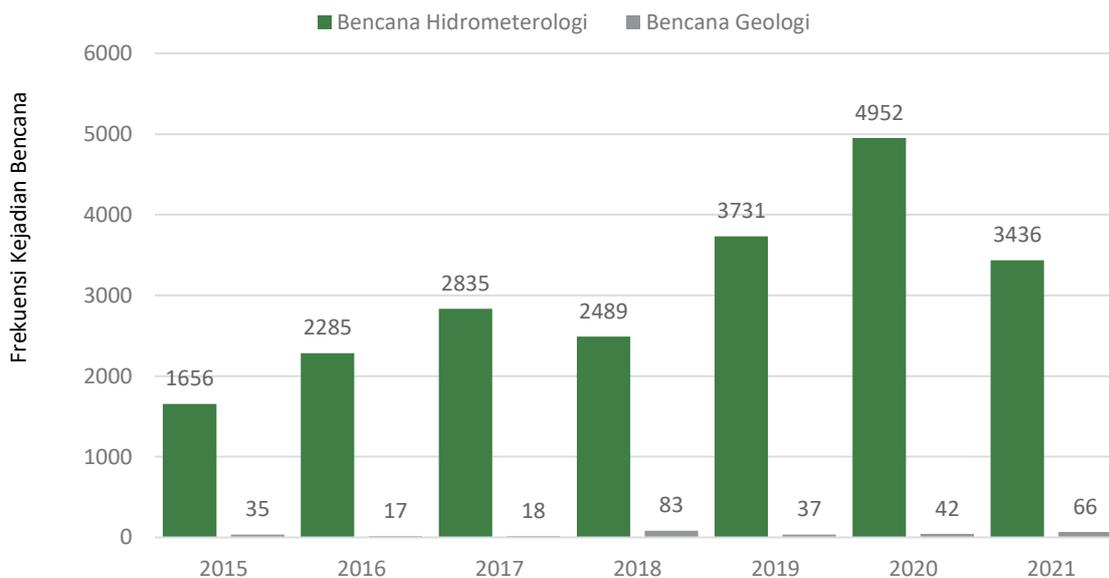
Sumber: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2022

2.13. Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim

Perubahan iklim tidak hanya berdampak pada kerugian ekonomi namun juga memberikan pengaruh terhadap kualitas kehidupan masyarakat. Aktivitas manusia dalam mencapai kesejahteraan memicu terjadinya peningkatan emisi gas rumah kaca yang merupakan penyebab pemanasan global. Kejadian cuaca ekstrim hingga bencana akibat iklim (bencana hidrometeorologi) merupakan akibat dari pemanasan global atau perubahan iklim. Indonesia memiliki komitmen tinggi dalam menangani perubahan iklim dan mengadopsi *Paris Agreement* melalui kebijakan Pembangunan Rendah Karbon (PRK) dan Pembangunan Berketahanan Iklim (PBI).

A. Kerentanan Terhadap Bencana

Bencana yang paling sering terjadi adalah kelompok bencana hidrometeorologi berupa banjir, puting beliung, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta gelombang pasang (abrasi). Bencana hidrometeorologi cenderung mengalami peningkatan dan lebih banyak terjadi jika dibandingkan dengan bencana geologi. Pada tahun 2021, terdapat sebanyak 3.464 bencana hidrometeorologi dan 66 kejadian bencana geologi.



Gambar 2.49 Frekuensi Kejadian Bencana Berdasarkan Jenisnya Tahun 2015-2021

Sumber: BNPB, 2022 (Diakses pada 3 Oktober 2022)

Pada tahun 2021, jenis bencana hidrometeorologi yang paling banyak terjadi adalah banjir (1.171 kejadian), tanah longsor (1.035 kejadian), dan puting beliung (837 kejadian). Bencana hidrometeorologi mengakibatkan sebanyak 558 korban meninggal dan 70 korban hilang. Selain itu, korban yang terkena dampak baik terluka, menderita maupun mengungsi sejumlah 5.534.856 korban.

Tabel 2.1 Jumlah Kejadian dan Korban Bencana Hidrometeorologi Tahun 2021

Jenis Bencana Hidrometeorologi	Jumlah Bencana	Jumlah Korban Meninggal	Jumlah Korban Hilang	Jumlah Korban Terdampak (Terluka, Menderita dan Mengungsi)
Banjir	1.171	392	53	4.682.478
Tanah Longsor	1.035	124	13	14.610
Banjir dan Tanah Longsor	55	26	4	797.299
Abrasi (Gelombang Pasang)	56	1	0	3.262
Puting Beliung	837	13	0	31.741
Kekeringan	15	0	0	5.403
Kebakaran Hutan dan Lahan	267	2	0	63
Jumlah	3.436	558	70	5.534.856

Sumber: DIBI, BNPB, 2022 (Diakses pada 3 Oktober 2022)

Sebagai upaya penanggulangan bencana, Indonesia telah menetapkan Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) Tahun 2020-2044 sebagai dokumen acuan yang juga selaras dengan *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030*, *Paris Agreement to UNFCCC* dan TPB/SDGs. Selain itu, BNPB juga menyusun Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2020-2024 yang memuat kebijakan untuk periode jangka menengah. Seluruh provinsi telah memiliki dokumen RPBD, meskipun diperlukan pembaharuan untuk beberapa provinsi yang masa berlaku RPBD-nya telah berakhir. Pada tahun 2021, sebanyak 37,16% atau 191 dari 514 kabupaten/kota telah memiliki Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota. Angka ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dikarenakan telah habisnya masa berlaku dokumen.

Tantangan yang dihadapi dalam isu kebencanaan antara lain: (i) wilayah Indonesia masih rentan terhadap bencana, terutama bencana hidrometeorologi menjadi jenis bencana alam dengan frekuensi yang paling sering terjadi; (ii) tingginya arus urbanisasi dan dampak perubahan iklim terhadap kejadian bencana. Kebijakan yang terus dilakukan pemerintah yaitu: (i) peningkatan ketahanan bencana melalui perencanaan terpadu dan penyediaan infrastruktur kebencanaan berbasis kewilayahan yang diprioritaskan pada daerah pascabencana, wilayah perkotaan, serta kawasan ekonomi dan strategis, termasuk pusat-pusat pariwisata; (ii) penguatan manajemen bencana berbasis masyarakat dengan kolaborasi multipihak (pentahelix); (iii) penguatan sistem ketahanan bencana dalam pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan; serta (iv) peningkatan investasi pengurangan risiko bencana.

B. Penanganan Perubahan Iklim

Pandemi COVID-19 mendorong adanya pembatasan kegiatan sosial-ekonomi yang juga diperkirakan memberikan dampak positif pada penurunan emisi gas rumah kaca (GRK). Di sisi yang lain, pandemi COVID-19 juga berimplikasi negatif pada aksi pembangunan rendah karbon yang tidak dapat berjalan secara optimal.

1. Emisi Gas Rumah Kaca

Jumlah emisi GRK berdasarkan perhitungan inventarisasi nasional adalah sebesar 1.050.0413 tCO₂e pada tahun 2020. Sektor yang menyumbangkan emisi GRK terbesar adalah sektor energi sebesar 584.284 tCO₂e (56%) dan FOLU dan kebakaran gambut sebesar 183.434 tCO₂e (18%). Terjadi pergeseran sebaran sektor yang berkontribusi tertinggi terhadap GRK pada tahun 2020 dibandingkan 2 tahun sebelumnya. Pada tahun 2019-2020, sektor FOLU dan kebakaran gambut menjadi penyumbang emisi GRK terbesar diikuti dengan sektor energi. Akan tetapi, pada tahun 2020, terjadi penurunan emisi GRK yang signifikan karena penurunan kebakaran gambut.

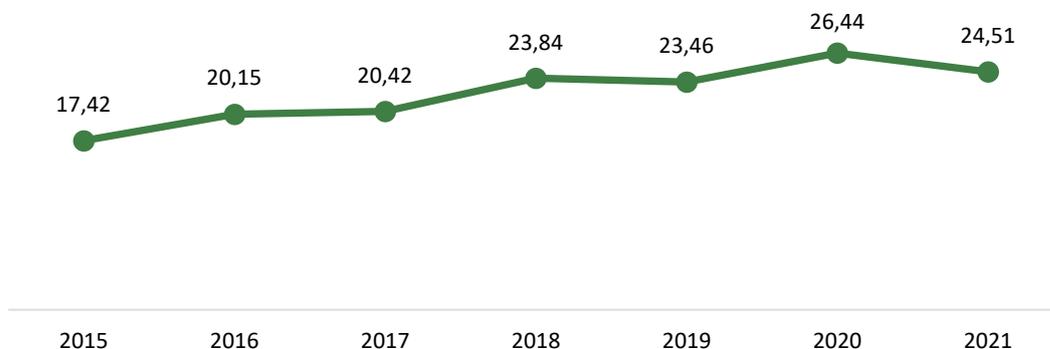
Tabel 2.2 Emisi Gas Rumah Kaca Berdasarkan Sektor

SEKTOR (tCO ₂ e)	TAHUN					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Energi	527.103	529.576	553.974	593.027	636.453	584.284
FOLU (<i>Forestry and Other Land Uses</i>)	742.843	417.385	476.005	602.188	466.397	164.974
Kebakaran Gambut	822.736	90.267	12.512	121.322	456.427	18.460
Limbah	97.539	102.105	108.939	114.637	120.333	126.797
Pertanian	100.685	102.640	105.363	104.053	105.301	98.703
IPPU (<i>Industrial Process And Product Uses</i>)	48.745	53.766	57.085	57.481	58.173	57.194
Nasional (Juta tCO₂e)	2.339.650	1.295.739	1.313.879	1.592.708	1.843.085	1.050.413

Sumber: Laporan IGRK KLHK, 2022

2. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

Berdasarkan hasil pemantauan aksi Pembangunan Rendah Karbon (PRK), capaian penurunan emisi GRK pada tahun 2021 adalah sebesar 24,51% dari baseline kumulatif. Capaian tersebut merupakan hasil dari pelaksanaan aksi PRK yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah di 34 provinsi.



Gambar 2.50 Persentase Potensi Penurunan Emisi GRK (%)

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022

(Catatan: Data tahun 2021 merupakan data sementara yang belum termasuk sektor lahan sesuai dengan Perpres RKP 2013)

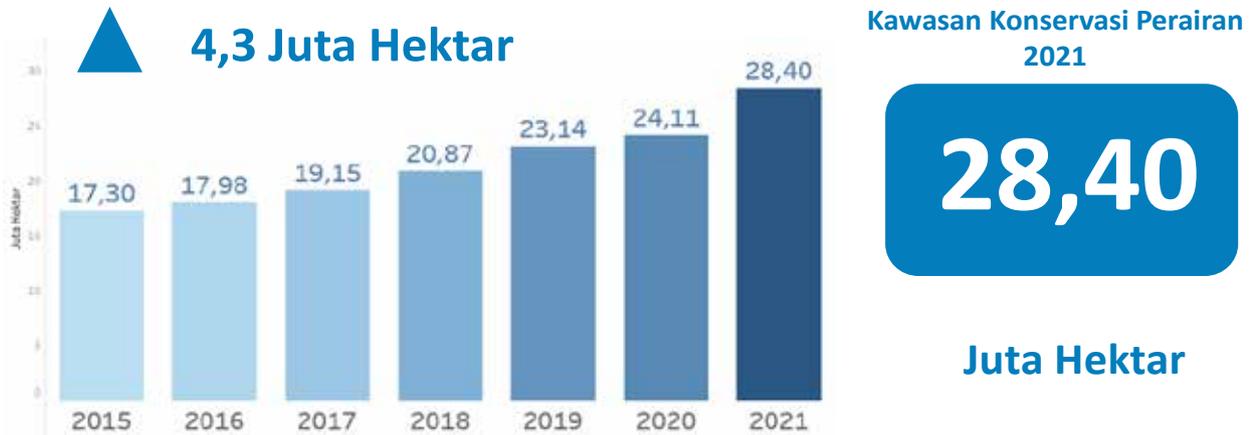
Tantangan terkait isu emisi gas rumah kaca, antara lain: (i) penurunan emisi dan intensitas emisi GRK memerlukan upaya yang holistik dan terintegrasi dalam program pembangunan; (ii) perlunya peningkatan dukungan lintas sektor dan multipihak, komitmen dan keterlibatan baik di tingkat subnasional, nasional, dan internasional, baik dari unsur pemerintah maupun nonpemerintah; serta (iii) masih kurangnya pengembangan teknologi rendah emisi. Kebijakan terkait penurunan emisi gas rumah kaca yaitu melalui peningkatan capaian laju penurunan emisi dan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) pada masa pemulihan aktivitas sosial-ekonomi, dengan fokus penurunan emisi GRK di sektor lahan, industri, dan energi.

14 EKOSISTEM LAUTAN



TUJUAN 14

Melestarikan dan Memanfaatkan Secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan



Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2022



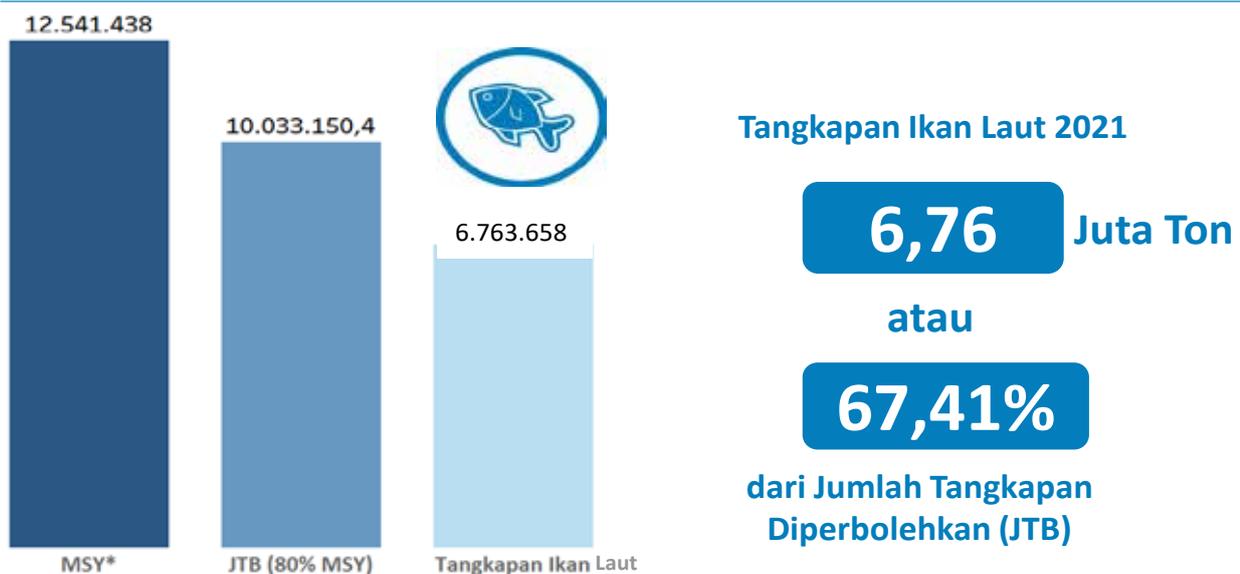
Kepatuhan
Pelaku Usaha

▲
0,96%

2021

95,72%

Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2022



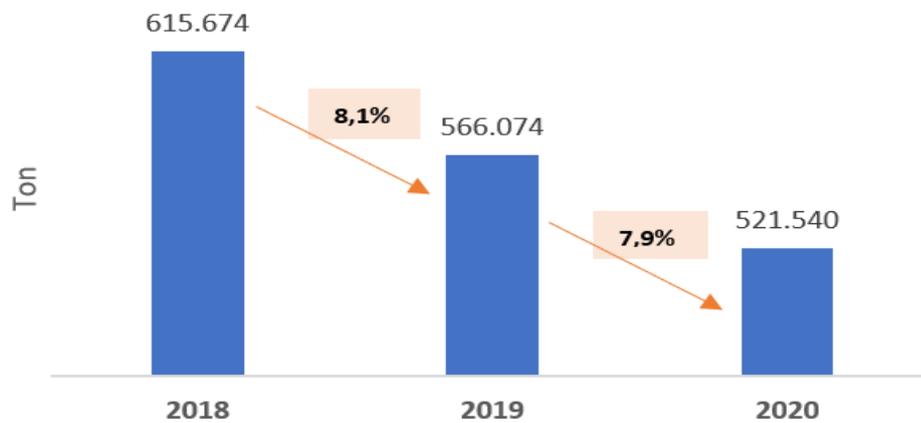
* MSY: Kepmen KP No.50 KEPMEN-KP 2017

Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2022

2.14. Tujuan 14 Ekosistem Lautan

A. Penurunan Sampah yang Terbuang Ke Laut

Selama pandemi COVID-19, perubahan gaya hidup masyarakat berkontribusi terhadap peningkatan sampah plastik. Sampah plastik tidak hanya menjadi masalah di daratan namun menjadi urusan pelik ketika sampah tersebut terbuang ke laut. Sekitar 80% sampah laut Indonesia berasal dari daratan dan 30% diantaranya dikategorikan sebagai sampah plastik. Diperkirakan setiap tahun sekitar 1,29 juta ton sampah plastik terbuang ke laut (TKNPS, 2020). Sampah laut berdampak pada sektor ekonomi dan pariwisata, mengganggu kehidupan biota laut dan ekosistem pesisir serta mengganggu kesehatan manusia. Sampah plastik yang terbuang ke laut akan menjadi mikro dan nano plastik yang merusak ekosistem pesisir dan dimakan oleh ikan. Selanjutnya, ikan tersebut akan dikonsumsi oleh manusia dan menimbulkan masalah pada kesehatan.



Gambar 2.51 Penurunan sampah plastik yang terbuang ke laut

Sumber: Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut, 2020

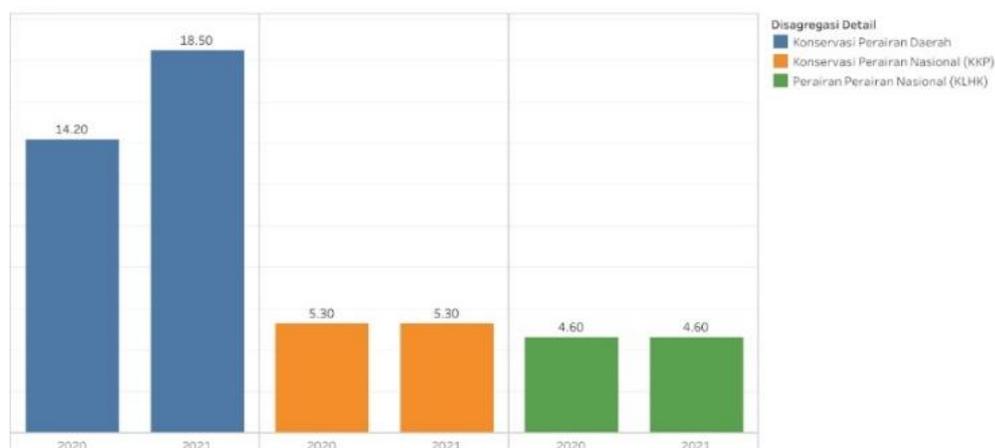
Upaya pemerintah untuk mengatasi masalah sampah laut dilakukan dengan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut. Dalam Perpres tersebut, pemerintah berkomitmen untuk mengurangi 70% sampah laut pada tahun 2025. Jumlah sampah plastik, baik dari aktivitas kapal penumpang maupun dari aktivitas kapal nelayan di laut terus mengalami penurunan, dari 615 ribu ton pada tahun 2018 menjadi 566 ribu ton pada tahun 2019. Selanjutnya pada tahun 2020, jumlah sampah laut kembali mengalami penurunan sebesar 7,9% menjadi 521 ribu ton.

Tantangan utama dalam upaya penurunan sampah yang terbuang ke laut antara lain adalah rendahnya pola pikir dan perilaku masyarakat terkait dengan bahaya membuang sampah ke laut; kurangnya kapasitas sumber daya manusia (SDM) mengenai penanganan dan pengelolaan sampah plastik; dan minimnya komitmen pemerintah daerah tentang penanganan sampah plastik di laut. Tantangan lainnya terkait dengan pemutakhiran data sampah laut nasional, terutama sampah plastik yang terapung.

Pemerintah terus mendorong upaya untuk meningkatkan kondisi dan kualitas ekosistem lautan melalui pencegahan dan pengendalian pencemaran laut dan pesisir, serta pemantauan kesehatan ekosistem lautan. Dalam rangka penanganan sampah laut, pemerintah telah menetapkan Rencana Aksi Nasional (RAN) Penanganan Sampah Laut Tahun 2018-2025 melalui strategi: (1) gerakan nasional peningkatan kesadaran para pemangku kepentingan; (2) pengelolaan sampah yang bersumber dari darat; (3) penanggulangan sampah di pesisir dan laut; (4) mekanisme pendanaan, penguatan kelembagaan, dan penegakan hukum; (5) penelitian dan pengembangan.

B. Peningkatan Kawasan Konservasi Perairan

Pemerintah Indonesia optimis untuk mencapai target kawasan konservasi perairan laut sebesar 32,5 juta ha pada tahun 2030. Pemerintah terus berusaha untuk meningkatkan luas kawasan konservasi perairan laut melalui kerja sama para pihak, baik dari pemerintah pusat melalui kawasan konservasi yang dikelola oleh Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) dan kawasan konservasi yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), maupun melalui kawasan konservasi yang dikelola oleh pemerintah provinsi. Pada tahun 2021, kawasan konservasi perairan laut meningkat luasannya sebesar 4,3 juta ha menjadi 28,4 juta ha dari 24,11 juta ha pada tahun 2020. Penambahan luas kawasan konservasi perairan laut tersebut berasal dari Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) yang dikelola oleh pemerintah provinsi dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.



Gambar 2.52 Perkembangan Kawasan Konservasi Laut

Sumber: KKP, 2022

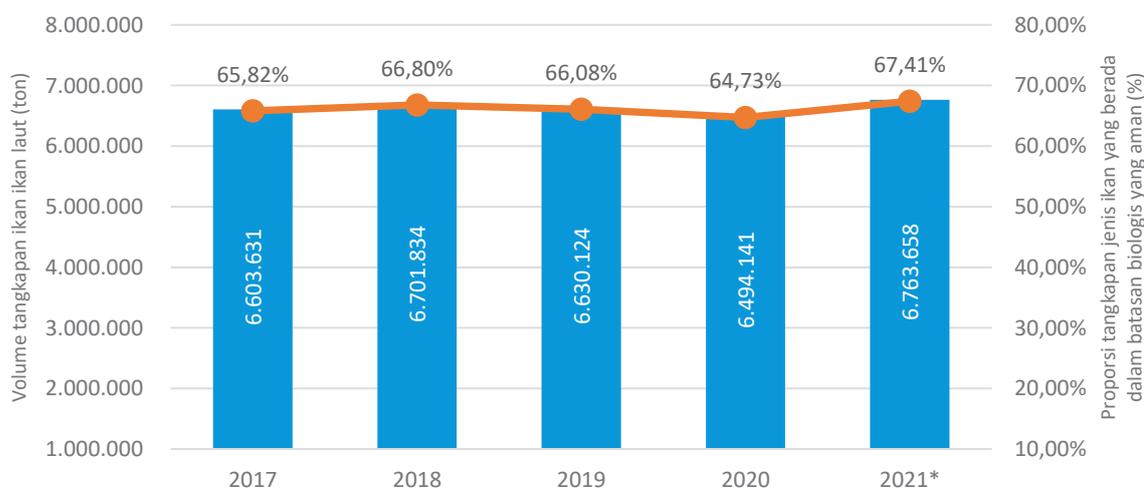
Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan kawasan konservasi adalah terkait efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan laut, meliputi: (1) isu pemanfaatan sumber daya, antara lain: penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, sistem budidaya tradisional, dan penyerapan pasar terhadap produk lokal masih rendah; (2) sarana dan prasarana, antara lain keterbatasan kapal/*speedboat* operasi untuk pengawasan; (3) kelembagaan, antara lain lemahnya koordinasi para pihak dan konflik kepentingan; dan (4) sosial ekonomi, antara lain: masih rendahnya pemahaman/pengetahuan masyarakat pesisir terkait pengelolaan kawasan. Tantangan lainnya adalah terkait belum terintegrasinya pengelolaan kawasan konservasi perairan laut dengan pelaksanaan rencana zonasi.

Banyaknya pihak yang berkepentingan di wilayah pesisir dan laut, juga menghambat harmonisasi dalam penyusunan rencana zonasi. Untuk itu diperlukan penguatan koordinasi dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan.

Kebijakan pemerintah terkait pengelolaan kawasan konservasi difokuskan pada: (1) peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi yang telah ditetapkan melalui peraturan menteri; (2) penyampaian program kawasan konservasi sebagai prioritas nasional maupun global kepada pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah dapat mengalokasikan ruang lautnya sebagai kawasan konservasi; (3) peningkatan koordinasi dan kolaborasi antara pusat dan daerah, pemerintah provinsi, K/L terkait, perguruan tinggi, Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan mitra/*Non-Government Organization* (NGO); dan (4) peningkatan kerja sama dengan instansi terkait dan mitra potensial dalam rangka alternatif sumber pendanaan.

C. Tangkapan Jenis Ikan yang Berada dalam Batasan Biologis yang Aman

Potensi sumber daya perikanan merupakan salah satu modal dasar pembangunan untuk mensejahterahkan masyarakat terutama masyarakat yang hidup di wilayah pesisir. Untuk mengelola potensi tersebut, Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan penghitungan pemanfaatan sumber daya ikan (SDI) untuk menetapkan estimasi potensi, jumlah tangkapan yang diperbolehkan, dan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan. Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 50/Kepmen-KP/2017 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia ditetapkan bahwa *Maximum Sustainability Yield* (MSY) sebesar 12,5 juta ton. Jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB) adalah sebesar 80% dari MSY (*Code of Conduct For Responsible Fishery*, FAO 1995). Pada tahun 2021, hasil tangkapan ikan laut mencapai 6,76 juta ton atau 67,41% dari JTB. Hal tersebut menunjukkan bahwa proporsi tangkapan ikan laut pada tahun 2021 masih berada dalam batasan biologis yang aman.



Gambar 2.53 Proporsi tangkapan jenis ikan laut yang berada dalam batasan biologis yang aman, 2017-2021

Sumber: KKP, 2022; Keterangan: * = angka sementara

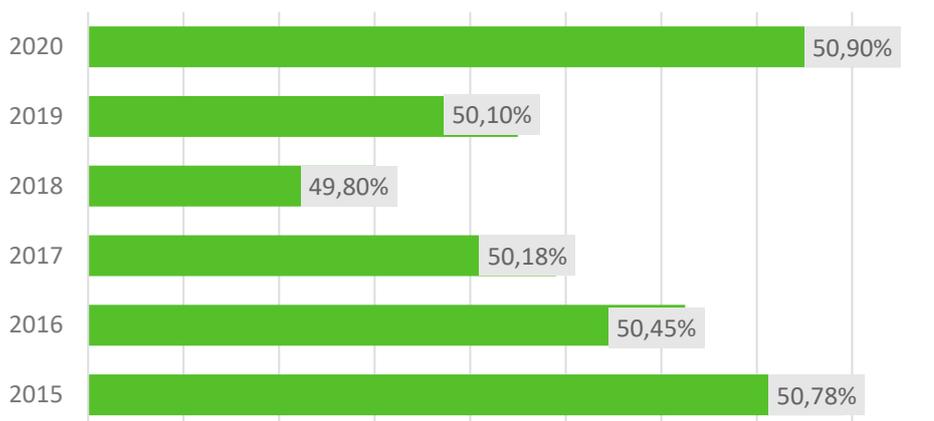
Pemerintah masih menghadapi tantangan terkait pemanfaatan potensi produksi perikanan tangkap laut yang belum optimal karena masih terbatasnya armada penangkapan perikanan (dominasi *armada* perikanan tangkap tradisional) dan masih adanya kegiatan/praktek IUU *fishing*. Selain itu, usaha perikanan tangkap di laut rentan terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan daya dukung lingkungan. Kondisi cuaca yang tidak menentu seperti ombak dan angin mengakibatkan banyak nelayan tidak dapat melaut. Belum memadainya ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten juga menjadi kendala dalam pengembangan sektor perikanan tangkap di laut. Sebagian besar pelaku usaha belum memiliki kapasitas dan pengetahuan yang cukup, dan pada umumnya usaha perikanan tangkap belum mencapai skala ekonomi yang layak (*economy of scale*).

Upaya untuk meningkatkan produksi perikanan tangkap laut secara berkelanjutan difokuskan pada: (1) peningkatan pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) melalui peningkatan akurasi pendataan stok sumber daya ikan dan penerapan penangkapan terukur; (2) peningkatan produksi, produktivitas, standardisasi mutu dan nilai tambah produk melalui pemberian bantuan sarana dan prasarana produksi kepada nelayan, penyediaan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan ramah lingkungan, penguatan sistem logistik ikan, penyediaan sarana dan prasarana rantai dingin, serta penguatan jaminan mutu dan keamanan produk kelautan dan perikanan; (3) peningkatan fasilitasi usaha, pembiayaan, dan akses perlindungan usaha perikanan skala kecil serta akses terhadap pengelolaan sumber daya melalui pengembangan korporasi nelayan, pendampingan dan fasilitasi akses pendanaan; dan (4) peningkatan SDM Kelautan serta *database* perikanan melalui pendampingan penyuluh dan pelatihan perikanan.

2.15. Tujuan 15 Ekosistem Daratan

A. Proporsi Kawasan Hutan Terhadap Total Luas Lahan

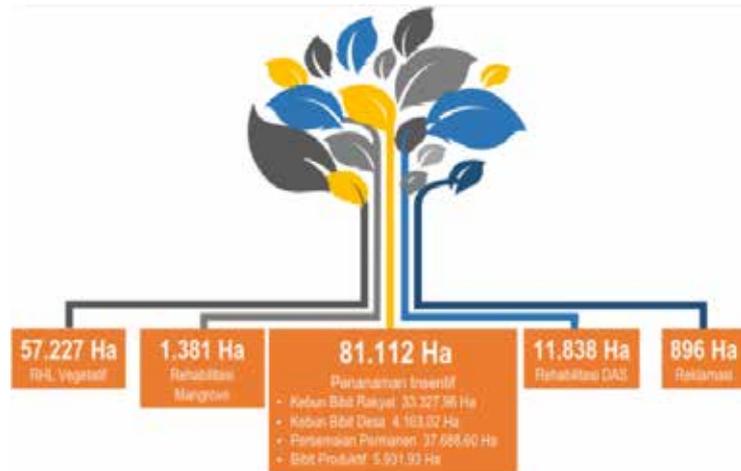
Pandemi COVID-19 menyebabkan guncangan pada aktivitas perekonomian di semua sektor, termasuk sektor kehutanan. Secara positif masa pandemi dapat diartikan sebagai pemicu (*trigger*) untuk meningkatkan perhatian dan inovasi bidang kehutanan, agar kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan berdampingan. Pengelolaan hutan yang tepat, efektif, dan efisien akan memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Salah satu indikator pengelolaan hutan adalah tutupan hutan. Pada tahun 2020, tutupan hutan Indonesia merupakan yang terluas di wilayah tropis di benua Asia, proporsi luas tutupan hutan Indonesia mengalami peningkatan menjadi sebesar 95,6 juta hektare atau 50,9 persen dari total luas lahan. Peningkatan tutupan hutan juga diikuti dengan penurunan deforestasi. Sejak tahun 2014 sampai tahun 2020, laju deforestasi mengalami penurunan signifikan sebesar 0,97 juta hektare. Pada tahun 2014 Indonesia memiliki luas deforestasi sebesar 1,09 juta hektare sedangkan pada tahun 2020 sebesar 0,12 juta hektare. Angka penurunan tersebut terjadi baik di kawasan hutan dan non kawasan hutan.



Gambar 2.54 Proporsi Tutupan Hutan Terhadap Total Luas Lahan, 2015-2020

Sumber: KLHK, 2020

Pada tahun 2021, penetapan kawasan hutan secara kumulatif sebesar 118,3 juta hektare (82,26 persen). Angka tersebut termasuk penambahan dari penetapan surat keputusan (SK) penetapan kawasan pada 44 unit kelompok hutan seluas 1,3 juta hektare, konsep SK penetapan kawasan hutan seluas 663 ribu hektare, dan potensi penetapan dari hasil tata batas tahun 2021 seluas 12,9 juta hektare. Demikian pula dengan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL), pada tahun 2021 berhasil melakukan RHL vegetatif sebesar 57 ribu hektare, rehabilitasi mangrove sebesar 1.381 hektare, rehabilitasi DAS sebesar 11 ribu hektare dan kegiatan reklamasi sebesar 896 hektare.



Gambar 2.55 Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), 2021

Sumber: KLHK, 2021

Kerusakan tutupan hutan disebabkan oleh pelanggaran hukum seperti *illegal logging*, kebakaran hutan dan lahan serta alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian, perkebunan, dan industri. Pemerintah terus berupaya melakukan terobosan pengukuhan kawasan hutan melalui antara lain: penyederhanaan kawasan hutan (menghapus Hutan Produksi Terbatas), pemberian nomor register secara wajib bagi setiap kawasan hutan yang telah ditetapkan oleh Menteri LHK, pemanfaatan koordinat geografis atau satelit dengan menggunakan teknologi penginderaan jauh pada seluruh tahapan pengukuhan kawasan serta penataan batas proyek strategi nasional, program pemulihan ekonomi (PEN), Ketahanan Pangan dan Energi, Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) tanpa melalui tahap pemancangan batas sementara dan inventarisasi hak-hak pihak ketiga.

B. Luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (*High Conservations Value-HCV*)

Penetapan luas kawasan dengan nilai konservasi tinggi dilakukan dengan inventarisasi dan diverifikasi kawasan yang mempunyai nilai keanekaragaman yang tinggi baik di dalam maupun di luar kawasan konservasi. Sampai dengan tahun 2021, luas kawasan bernilai konservasi tinggi sekitar 24,4 juta hektar yang terdiri atas HCV di dalam kawasan konservasi seluas 8,6 juta hektar dan HCV di luar kawasan konservasi seluas 15,6 juta hektar yang mencakup Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) dan kawasan lainnya. Capaian KEE sampai dengan tahun 2021 seluas 1,9 juta hektar sudah termasuk penambahan dari areal bernilai konservasi tinggi (ABKT) Ciomas, Sukabumi, Jawa Barat seluas 89,41 hektare, koridor Bekantan di Kalimantan Tengah seluas 2,5 ribu hektar, dan koridor Pulau Flores seluas 132 ribu hektar.

C. Indeks Daftar Merah (*Red-list Index*)

Selain meningkatkan kawasan yang bernilai konservasi tinggi, pemerintah juga melakukan pemantauan terhadap populasi 25 spesies prioritas yang masuk dalam IUCN *red-list index*. Data terakhir 2019 menunjukkan bahwa beberapa populasi hewan mengalami peningkatan signifikan antara lain: Owa, Orangutan, dan Bekantan, yang masing-masing mengalami peningkatan sekitar 1.000 ekor dalam periode 2014-2019. Bahkan burung kakatua jumlahnya meningkat hingga lebih dari 10 ribu ekor, yaitu dari 1.188 ekor menjadi 12 ribu ekor. Namun

demikian, terdapat pula beberapa populasi spesies yang mengalami penurunan yaitu Komodo, Babirusa, dan Anoa.

Tabel 2.3 Populasi 25 Spesies Prioritas yang Masuk dalam IUCN Red- List Index

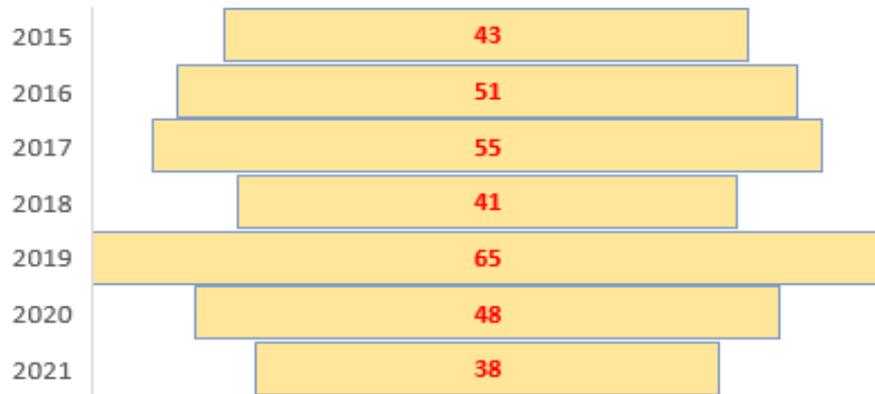
NO	SATWA	BASELINE (2014)	2019	NO	SATWA	BASELINE (2014)	2019
1	Harimau Sumatera	71	122	14	Kakatua	1.188	12.042
2	Gajah Sumatera	313	344	15	Macan Tutul Jawa	7	49
3	Badak	77	90	16	Rusa Bawean	275	304
4	Banteng	277	321	17	Cendrawasih	66	93
5	Owa	431	1,236	18	Surili	15	27
6	Orangutan	1.441	2,408	19	Tarsius	82	108
7	Bekantan	1.957	2,892	20	Monyet Hitam Sulawesi	319	469
8	Komodo	5.933	2,932	21	Julang Sumba	30	92
9	Jalak Bali	147	105	22	Kasturi Tengkuk Ungu	8	12
10	Maleo	6.397	2,816	23	Penyu	7.036	7.467
11	Babirusa	822	551	24	Kanguru Pohon	10	2
12	Anoa	513	285	25	Celepuk Rinjani	27	263
13	Elang	65	108				

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), 2021

Kegiatan pemantauan populasi 25 spesies tahun 2020 terkendala oleh pandemi COVID-19 sehingga hasil monitoring belum disampaikan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah, rencananya pemantauan akan dilakukan kembali tahun 2021/2022. Selain itu, tantangan utama hilangnya keanekaragaman hayati adalah perburuan ilegal terhadap satwa yang dilindungi dan perubahan vegetasi yang merupakan ekosistem satwa untuk berkembang biak. Upaya pemerintah terus melakukan konservasi keanekaragaman hayati melalui beberapa kegiatan, antara lain: (1) Perlindungan hutan dan silvikultur afirmatif untuk peningkatan keanekaragaman hayati dan nilai guna kawasan konservasi; (2) Konservasi keanekaragaman hayati di HCV dan kawasan konservasi satwa liar; (3) Pengelolaan koridor keanekaragaman hayati untuk spesies-spesies penting; dan (4) Perlindungan keanekaragaman hayati dan sumber plasma nutfah.

D. Penegakan Hukum terhadap Perburuan atau Perdagangan Ilegal Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL)

Keseriusan pemerintah untuk menegakan hukum terhadap perburuan atau perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar dapat dilihat dari kasus peredaran TSL ilegal yang telah diproses sampai dengan P.21. Selama tahun 2015-2020 jumlah kasus TSL ilegal yang diproses sampai dengan P.21 mengalami fluktuatif. Kasus TSL yang signifikan terjadi pada tahun 2019 sebanyak 65 kasus dan pada tahun 2021 kasus yang sampai pada P.21 sebanyak 38 kasus.



Gambar 2.56 Kasus Peredaran TSL Ilegal yang Telah Diproses Sampai dengan P.21

Sumber: KLHK, 2021

Ancaman dan gangguan terhadap kawasan hutan Indonesia disebabkan adanya aksi perambahan hutan, pembalakan liar, serta perburuan dan perdagangan TSL secara ilegal. Pemerintah melakukan operasi pengamanan Kawasan hutan, pemulihan kawasan hutan, peredaran hasil hutan serta penegakan hukum pidana. Penegakan hukum dilakukan untuk mempertahankan keberadaan keanekaragaman hayati agar tidak punah sekaligus dapat memberikan manfaat untuk kepentingan ekonomi, sosial, dan ekologi, dalam mendukung pencapaian kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

16 PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH



TUJUAN 16

Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh



Indeks Reformasi Birokrasi (RB) \geq B



Skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) \geq B



SAKIP di tingkat Pemerintah Provinsi Kabupaten/Kota membaik.

Indeks RB dan SAKIP Tingkat Kementerian/Lembaga perlu perbaikan.

Sumber: Kementerian PANRB

Jumlah instansi pemerintah dengan nilai Kepatuhan kategori baik atas pelayanan publik terus meningkat (secara persentase menurun akibat semakin banyaknya instansi yang mengikuti survei)



Perolehan Berdasarkan Tingkat/Jenis Instansi (2021)

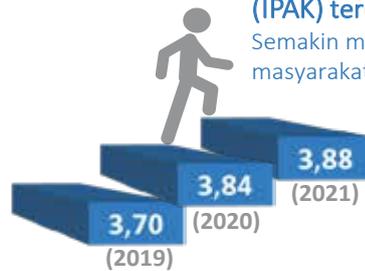


Sumber: Laporan Penilaian Kepatuhan 2021 (Ombudsman RI)

Catatan:

- Pada tahun 2020, Ombudsman RI tidak melakukan survei Penilaian Kepatuhan.
- Tidak semua instansi pemerintah ikut pada survei Penilaian Kepatuhan.

Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) terus mengalami kenaikan. Semakin mendekati angka 5 berarti masyarakat semakin anti-korupsi

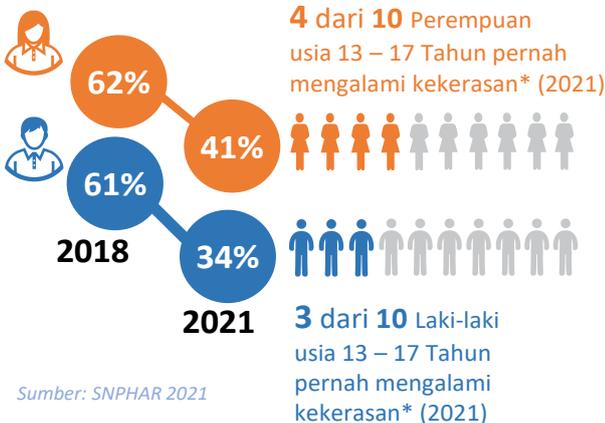


Pengalaman Masyarakat dalam Mengakses Layanan Publik



Sumber: Survei IPAK 2021 (BPS)

KEKERASAN PADA ANAK



Sumber: SNPCHAR 2021

*catatan: kekerasan dalam bentuk apapun sepanjang hidupnya

KEKERASAN PADA ANAK SELAMA PANDEMI COVID-19

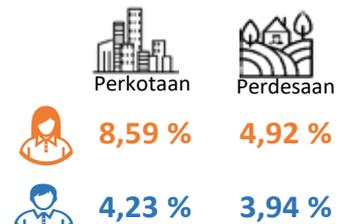
3 dari 10 Perempuan usia 13-17 Tahun

2 dari 10 Laki-laki usia 13-17 Tahun

mengalami satu jenis kekerasan atau lebih pada masa pandemi COVID-19

Sumber: SNPCHAR 2021

KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK Usia 18 – 24 Tahun



Sumber: SNPCHAR 2021

Kekerasan Seksual (kontak & nonkontak) lebih sering dialami oleh Perempuan yang tinggal di daerah perkotaan

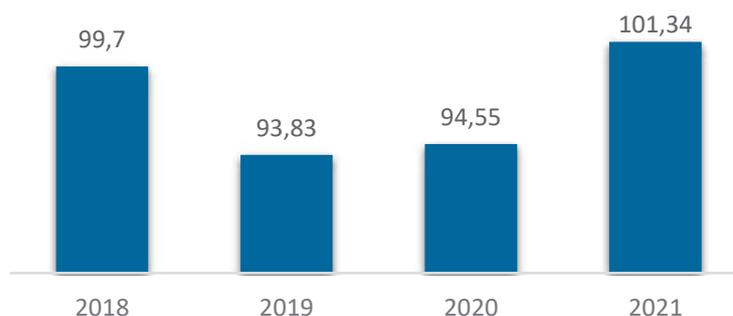
*catatan: umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.

2.16. Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan Yang Tangguh

Tingkat kasus *positive rate* COVID-19 tertinggi di Indonesia terjadi pada 15 Juli 2021 yaitu mencapai 56,757. Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk mencapai “*herd immunity*” dengan mengeluarkan berbagai kebijakan yang berdampak tepat sasaran bagi pemulihan dari pandemi. Sasaran pembangunan, kebijakan dan strategi pemerintah tidak lepas dari tata kelola dan kelembagaan yang tangguh untuk mengatasi pandemi. Sejalan dengan itu, Tujuan 16 sebagai *enabler* semua Tujuan di TPB/SDGs menjadi sangat penting, khususnya pada target-target terkait dengan kelembagaan dan tata kelola yang efektif, akuntabel, dan inklusif. Namun demikian, pandemi juga menorehkan kejadian kasus kekerasan terhadap anak yang menjadi perhatian banyak pihak.

A. Tata Kelola dan Kelembagaan yang Tangguh di Masa Pemulihan

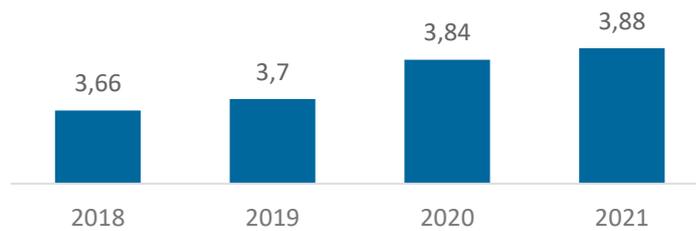
Unsur penting dalam penanganan pandemi COVID-19 baik di masa penanganan dan pemulihan di tahun 2021 adalah anggaran pemerintah. Pemerintah melakukan penajaman anggaran pada skema Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk sektor kesehatan dan DAK fisik untuk infrastruktur demikian pula penyesuaian alokasi APBD. Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui meningkat dari 94,55% (2020) menjadi 101,34% (2021) akibat kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran pada APBN 2021 untuk merespon dan mengatasi pandemi. Kementerian Keuangan bekerja sama dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang beranggota Bank Indonesia, OJK, dan LPS menghadapi krisis dan pemulihannya dengan pemberian paket Stimulus dan program penanganan krisis ekonomi melalui Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Realisasi anggaran PEN 2021 mencapai 88,4% dari pagu Rp744,77 triliun rupiah yang mencakup kluster kesehatan, perlindungan sosial, bantuan subsidi upah, UMKM dan korporasi, dan program prioritas lainnya.



Gambar 2.57 Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui, 2015-2021

Sumber: Kementerian Keuangan

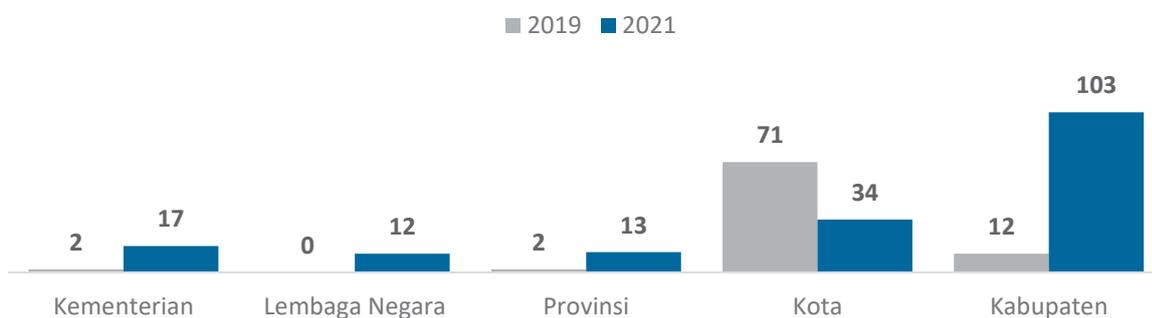
Dengan pengeluaran pemerintah yang tinggi selama pemulihan dari pandemi, potensi korupsi menjadi tinggi pula. *Indonesia Corruption Watch* (ICW) menyatakan bahwa Sepanjang 2020 - 2021 terjadi 30 kasus korupsi dana penanggulangan COVID-19, kerugian negara diperkirakan mencapai Rp22,49 miliar, sementara suap senilai Rp23,43 miliar.



Gambar 2.58 Indeks Perilaku Anti Korupsi, 2018 -2021

Sumber: Badan Pusat Statistik

Namun demikian, terjadi kenaikan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) dari 3,84% (2020) menjadi 3,88% (2021). Tren selama tahun 2015 sampai dengan 2021 menunjukkan kenaikan yang stabil, artinya tingkat persepsi serta pengalaman masyarakat terkait anti-korupsi telah meningkat dan masyarakat semakin berperilaku anti korupsi. IPAK 2021 menunjukkan bahwa masyarakat di perkotaan lebih anti korupsi dibanding dengan di pedesaan, dan semakin tinggi pendidikan, masyarakat semakin berperilaku anti korupsi. Oleh karena itu, upaya pemulihan ekonomi tentu harus didukung dengan penguatan pencegahan korupsi melalui pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) di bidang perizinan dan tata niaga, keuangan negara, serta penegakan hukum dan reformasi birokrasi.

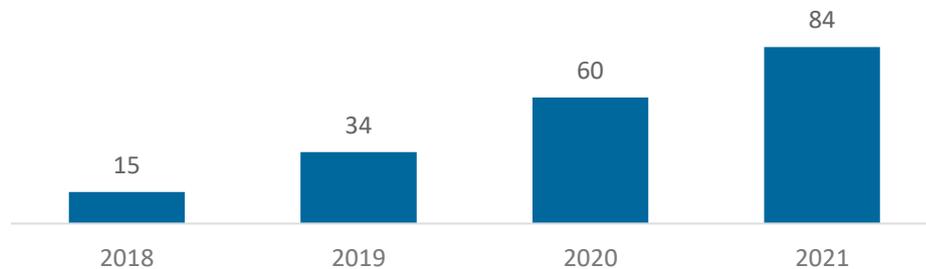


Gambar 2.59 Jumlah Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori Kepatuhan tinggi (zona hijau)

Sumber: Ombudsman

Selama masa penanganan dan pemulihan dari pandemi, pelayanan publik juga menjadi salah satu kunci utama terlaksananya program dan kegiatan pemerintah yang direncanakan dan dianggarkan. Di tengah kondisi yang tidak *usual* (biasa), pelayanan publik tidak bisa dilakukan secara *business as usual*. Hampir semua bidang telah terdistorsi, dan pelayanan publik menjadi salah satu ujung tombak untuk penanganan dan pemulihan tersebut. Ombudsman RI telah melakukan penilaian kepatuhan pelayanan publik di Kementerian/Lembaga sampai ke tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kota tahun 2021. Dari 587 instansi, terdapat 179 instansi yang mendapat Kategori Kepatuhan Tinggi (zona hijau) dengan rincian 17 Kementerian, 12 Lembaga, 13 Provinsi, 34 Kota, dan 103 Kabupaten. Sementara 315 instansi lainnya masuk dalam kategori kepatuhan sedang (zona kuning) dan 92 instansi masuk kategori kepatuhan rendah (zona merah). Jika hasil penilaian kepatuhan pelayanan publik ini dipresentasikan berdasarkan lokus survei maka kategori kepatuhan baik (zona hijau) di tingkat Kementerian

sebesar 70,8 persen, lembaga 80 persen, Provinsi 54,2 persen, Kota 34,7 persen, dan Kabupaten 24,8 persen. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Ombudsman RI perlu memprioritaskan pendampingan kepada Pemerintah Daerah dalam memenuhi standar pelayanan publik sesuai UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik demi tercapainya Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh.

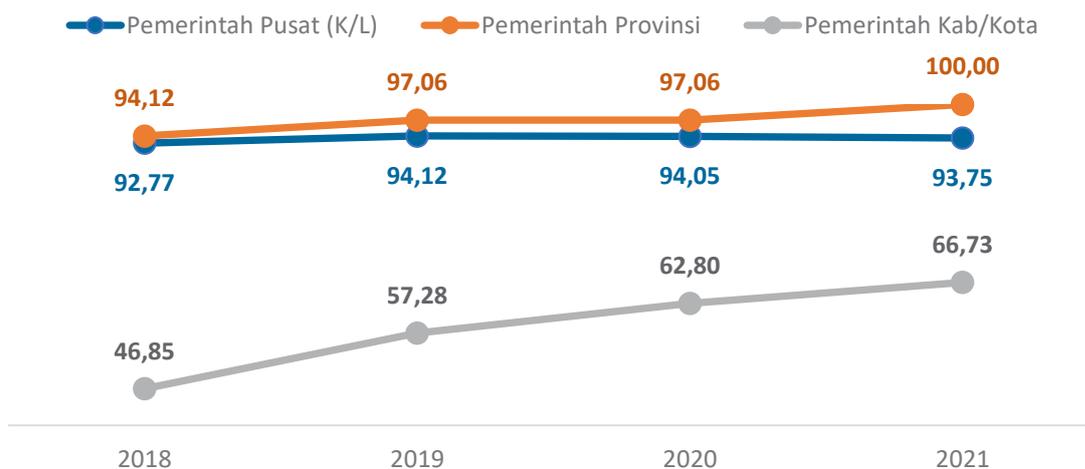


Gambar 2.60 Jumlah Badan Publik yang berkualifikasi informatif, 2018-2021

Sumber: Komisi Informasi Publik

Pelayanan publik yang baik diwujudkan dengan transparansi, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban. Untuk mewujudkan hal ini, pelaksanaan keterbukaan informasi diatur dalam UU 14/2008. Keterbukaan informasi mendorong masyarakat menjadi tahu, paham, dapat berpartisipasi pada penyelenggaraan negara, dan pada akhirnya mempercayai kebijakan pemerintah. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan UU tersebut, terlihat bahwa jumlah Badan Publik yang berkualifikasi informatif semakin meningkat setiap tahun. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat usaha untuk menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar sesuai peraturan nasional dan kesepakatan internasional, selaras dengan SDGs target 16.10.

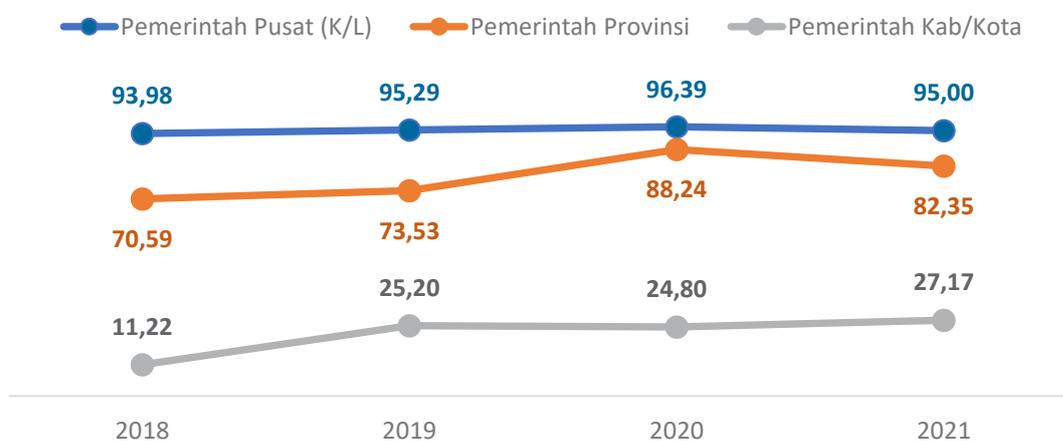
Reformasi Birokrasi (RB) yang menjadi prioritas pemerintah juga harus dapat dibuktikan di masa penanganan dan pemulihan pandemi ini. Pada pelaksanaannya, koordinasi dan percepatan pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi secara nasional berdampak besar dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Diantara keberhasilan terjadinya Reformasi Birokrasi adalah tidak adanya korupsi, APBN dan APBD baik, semua program selesai dengan baik, semua perijinan selesai dengan cepat dan tepat, komunikasi dengan publik terjalin baik, efektif dan produktif, serta hasil pembangunan yang tampak nyata. Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks RB) yang diukur secara *self-assessment* (penilaian mandiri) sedikit menurun di setiap tingkatan.



Gambar 2.61 Capaian Indikator 16.6.1.(b) Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) \geq B, 2018-2021

Sumber: Kementerian PANRB

Kinerja pemerintah ini semakin diuji di masa penanganan dan pemulihan pandemi. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menjadi salah satu alat ukurnya. Dari tahun 2015 hingga 2021, tren SAKIP cenderung meningkat baik di Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga – K/L), Pemerintah Provinsi, serta Pemerintah Kabupaten/Kota. Dapat dikatakan bahwa penerapan manajemen kinerja sektor publik dan anggaran berbasis kinerja masih baik namun terjadi penurunan.



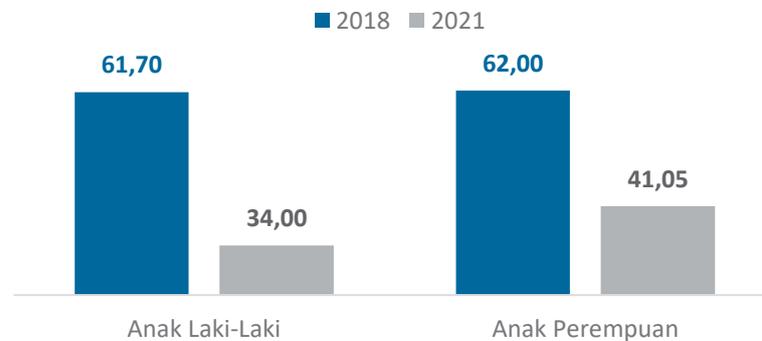
Gambar 2.62 Capaian Indikator 16.6.1.(b) Persentase instansi pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) \geq B, 2018-2021

Sumber: Kementerian PANRB

B. Pemulihan tidak lepas dari Perlindungan terhadap Anak

Pandemi menjadikan anak rentan mengalami kekerasan akibat dipicu oleh pembatasan beraktivitas di luar. Keterpurukan ekonomi keluarga dan menurunnya kualitas kesehatan juga memicu stress atau penurunan psikis. Pelaku kekerasan anak sering dilakukan oleh orang yang dikenal korban, mulai dari teman korban, tetangga, orangtua dan seterusnya

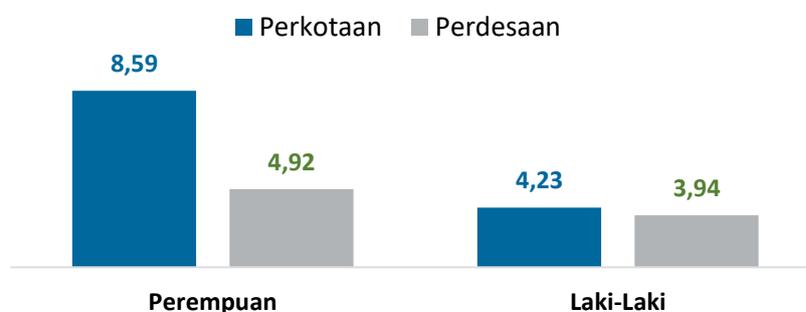
(KPAI). Kompilasi Catatan tahunan (Catahu) Komnas Perempuan, dari tahun 2018 sampai 2022 kekerasan seksual di ranah privat konsisten menjadi kasus terbanyak kedua. Sedangkan kasus tingkat pertama adalah dalam ranah publik atau komunitas. Selain itu, Lokasi menunjukkan bahwa kekerasan fisik dan/atau psikis terjadi paling banyak di lima provinsi mulai dari Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Timur, Banten, dan Sumatera Selatan.



Gambar 2.63 Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya, 2018 dan 2021

Sumber: SNPHAR – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya mengalami penurunan. Perempuan muda lebih rentan menjadi korban kekerasan seksual dibanding dengan Laki-laki muda, terutama yang tinggal di perkotaan. Tingginya korban kekerasan di perkotaan diakibatkan dari mobilisasi masyarakat dan agresivitas masyarakat, serta hubungan interaksi yang lebih tinggi di kota.



Gambar 2.64 Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18, 2021

Sumber: SHNPAR - KPPPA

Selanjutnya diperlukan optimalisasi penguatan layanan penanganan kekerasan bagi anak secara terpadu, upaya pencegahan perkawinan anak dan penarikan anak dari pekerjaan terburuk, pengasuhan berbasis hak anak pada lembaga pengasuhan alternatif, peningkatan koordinasi dalam upaya pemenuhan hak anak yang berada pada kondisi khusus, dan penciptaan lingkungan ramah anak. Komitmen Indonesia terhadap perlindungan anak tidak lepas dari Prioritas Nasional melalui (1) peningkatan peran Ibu dan keluarga dalam pendidikan/pengasuhan anak, (2) penurunan kekerasan terhadap anak (3) penurunan pekerja anak, dan (4) pencegahan perkawinan anak.



TUJUAN 17

Penguatan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan

Total Pendapatan Pemerintah mencapai **11,80%** terhadap PDB

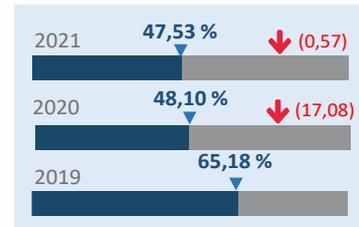


Sumber: Kementerian Keuangan dan BPS



Total penerimaan pajak terhadap PDB sebesar 9,11%. Penerimaan Pajak tahun 2021 mencapai Rp 1.277,5 triliun (naik 19,2% atau Rp 166,4T)

47,53% anggaran domestik dibiayai oleh pajak



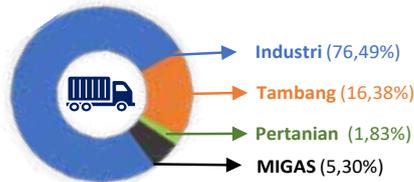
Sumber: Kementerian Keuangan dan BPS

Pandemi COVID-19 berdampak pada penerimaan negara.

Ekspor nonmigas Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan 41,52% (2021) sebagai *rebound* atas Pandemi COVID-19. Ekspor Nonmigas **menyumbang 94,70%** dari total Ekspor 2021.

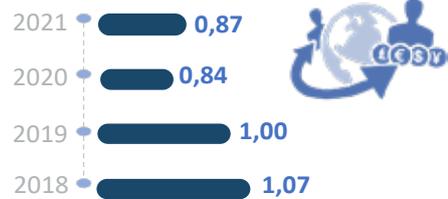


Pertumbuhan Ekspor Nonmigas (y-on-y)



Ekspor Indonesia 2021 menurut sektor

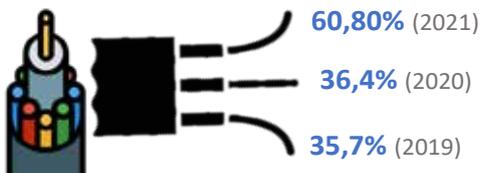
Sumber: BPS



Sumber: Bank Indonesia

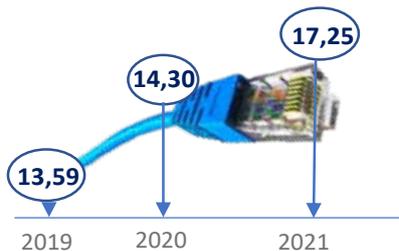
Volume penerimaan remitansi naik menjadi 0,87% dari PDB setelah mengalami penurunan cukup signifikan akibat Pandemi COVID-19

58,5 % Kecamatan di Indonesia sudah terjangkau jaringan serat optik



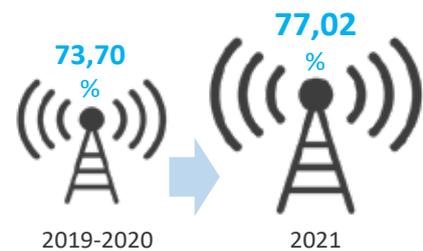
Sumber: Kominfo

15,05 % rumah tangga terlayani jaringan internet *fixed broadband*



Sumber: Kominfo

77,02 % Penduduk Indonesia sudah menjadi **pengguna internet**, meningkat cukup signifikan akibat kegiatan daring (*online*) selama pandemi.



Sumber: Laporan APJII 2022

Dashboard SDGs Indonesia

adalah platform digital untuk pemantauan pencapaian TPB/SDGs dan indikator Makro Ekonomi di Indonesia.

Tautan: sdgs.bappenas.go.id/dashboard



Sumber gambar ikon: flaticon.com (Zaenul Yahya, Freepik, dan Chattapat); iconixar; dan freeiconpng.com (Ahkâm)

2.17. Tujuan 17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan

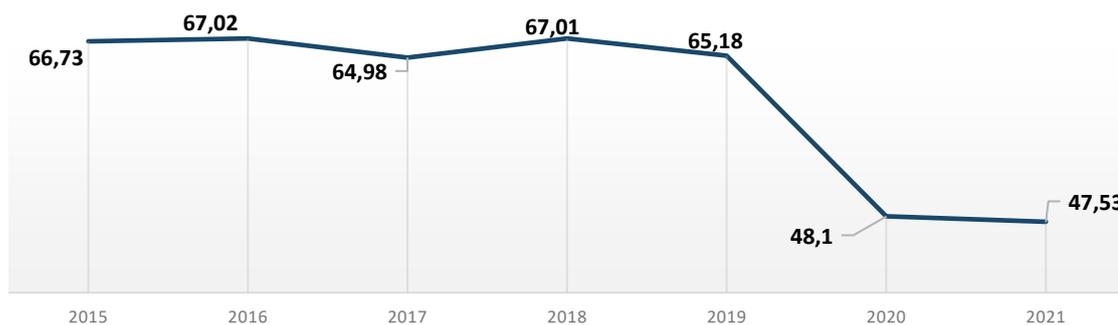
Pemulihan ekonomi Indonesia setelah pandemi membutuhkan pendanaan yang memadai. Terlebih hampasan pandemi menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar -2,1% di tahun 2020 namun meningkat menjadi 3,7% di tahun 2021. Mobilisasi sumber daya domestik menjadi sangat penting untuk meningkatkan penerimaan negara dan mendorong pemulihan ekonomi setelah pandemi. Transformasi digital juga menjadi sarana pelaksanaan yang krusial bagi masyarakat dan semua pemangku kepentingan untuk menyesuaikan sistem kerja dan komunikasi baru yang lebih mengedepankan berbasis elektronik. Pandemi juga makin mendorong segera direalisasinya Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2019 tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati (Stranas AKPSH).

A. Mobilisasi Sumber Daya Domestik



Gambar 2.65 Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB dan Rasio penerimaan pajak terhadap PDB, 2015 -2021

Sumber: Kementerian Keuangan dan BPS

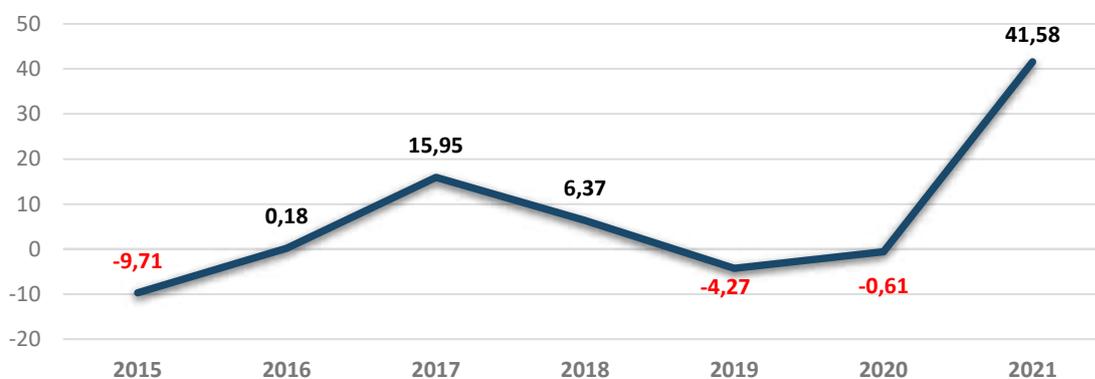


Gambar 2.66 Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik, 2015 -2021

Sumber: Kementerian Keuangan

Komitmen pemerintah untuk melaksanakan pemulihan ekonomi ditunjukkan dengan upaya peningkatan penerimaan negara untuk membiayai pemulihan dan pembangunan. Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB naik dari 10,68% (2020) menjadi 11,80% (2021). Peningkatan tersebut didukung oleh rasio penerimaan pajak terhadap PDB dari 8,33% (2020) menjadi 9,11% (2021). Tingginya penerimaan pajak disebabkan membaiknya penerimaan pajak dari mayoritas sektor utama penyumbang penerimaan pajak,

dan pemanfaatan stimulus perpajakan yang tinggi. Kenaikan tersebut belum mencapai target ideal yang ditetapkan pada RKP 2021 pada Sasaran Ekonomi Makro yang merujuk pada target di RPJMN yaitu sebesar 10,1%-10,7%. Akibatnya, defisit masih terjadi karena masih tingginya belanja negara dibanding pendapatan. Untuk itu, tahun 2022 membutuhkan inovasi pembiayaan untuk *countercyclical* melalui: (a) pemanfaatan utang sebagai instrumen penguatan *countercyclical* untuk mendukung reformasi struktural (b) pendalaman pasar untuk mendukung fleksibilitas dan pengendalian vulnerabilitas utang (c) penguatan badan usaha yang menjalankan peran khusus dan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) sebagai quasi fiskal (d) mendorong efektivitas pembiayaan investasi antara lain melalui pemberdayaan peran BUMN sebagai agen pembangunan dilakukan secara selektif; dan (e) mendorong pemanfaatan pembiayaan alternatif antara lain melalui implementasi skema Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), *blended finance*, dan *CSR*.



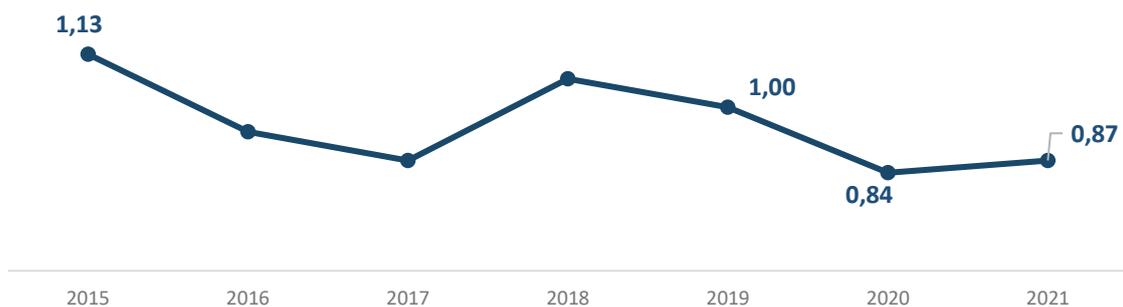
Gambar 2.67 Pertumbuhan ekspor produk non migas, 2015-2021

Sumber: Badan Pusat Statistik

Perbaikan struktural ekonomi terlihat dalam kenaikan pada ekspor produk nonmigas. Pertumbuhan tersebut lebih tinggi daripada tahun-tahun sebelum pandemi. Mulai dari -9.71% (2015) menjadi 41,58% (2021).

Sampai dengan akhir Desember 2021, terdapat kenaikan pertumbuhan ekspor nonmigas dari Desember 2020 yang mencapai 37,13%. Untuk keseluruhan total Ekspor, 95,11% terdiri dari Ekspor Nonmigas. Dari data provinsi menunjukkan selama tahun 2021, ekspor terbesar Indonesia berasal dari Jawa Barat dengan nilai US\$33,86 miliar (14,62%), kedua adalah Kalimantan Timur US\$24,32 miliar (10,50%), dan Jawa Timur US\$23,00 miliar (9,94%).

Kenaikan drastis diharapkan terus stabil dan diperlukan peningkatan akses pembiayaan ekspor serta pemanfaatan teknologi digital. Selain itu, kedepannya dibutuhkan penurunan biaya memulai ekspor (*sunk costs*) melalui pelayanan informasi ekspor terintegrasi, serta pelaksanaan promosi dan *business matchmaking* secara *virtual*.



Gambar 2.68 Proporsi volume remitansi PMI (dalam US dollars) terhadap PDB, 2018 -2021

Sumber: Bank Indonesia

Di sisi lain, penerimaan negara dari remitansi Pekerja Migran Indonesia (PMI) cukup berfluktuasi dari 0.84% (2011) dan mencapai 1 (2019) yang kemudian di tahun awal pandemi kembali menjadi 0.84% (2020). Meskipun kebijakan dan “*herd immunity*” terus diterapkan di Indonesia, pada tahun 2021 remitansi TKI baru menjadi 0.87%. Data Kementerian BUMN menyebutkan devisa negara dari PMI mencapai 130 Triliun di tahun 2021. Potensi divisi Pekerja Migran Indonesia (PMI) menjadi besar dan dilindungi dengan UU No 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Salah satu kebijakan yang didorong pemerintah sebagai upaya memulihkan dampak pandemi COVID-19 adalah pemenuhan hak finansial Pekerja Migran Indonesia.

Guna memantau perkembangan makro ekonomi dan untuk mensimulasikan indikator makro ekonomi jika mengalami *shock* contohnya dampak pandemi, Kementerian PPN/Bappenas telah meluncurkan *dashboard* simulasi makro ekonomi melalui *aplikasi software* Bappenas *Policy Modeling*. Beberapa indikator yang ditampilkan adalah Kebijakan Fiskal, Sektor External, Bencana dan Iklim, Ekonomi Regional, Pengeluaran Sosial, dan Efisiensi Infrastruktur.

B. Transformasi Digital

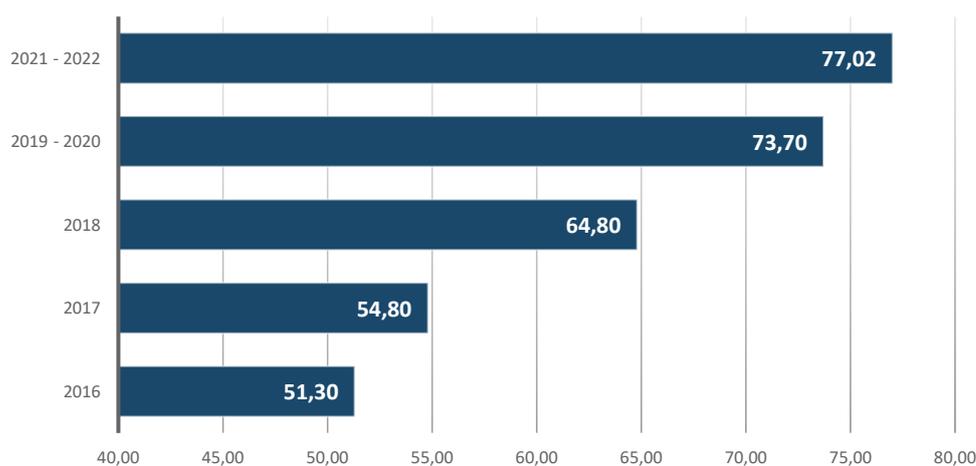
Pandemi COVID-19 telah mendorong masyarakat global dan Indonesia untuk menggunakan internet di hampir semua lini usaha dan kegiatan masyarakat termasuk pertanian. Berdasarkan laporan World Bank 2021, layanan *fixed broadband* melalui *fiber-to-the-home* di Indonesia saat ini baru sebesar 4% dari total populasi. Jika dilihat data persentase pelanggan terlayani jaringan internet akses tetap pita lebar (*fixed broadband*), total rumah tangga yang terlayani pita lebar dari 14,3% (2020) menjadi 17,25% (2021). Di sisi lain, persentase kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik terdapat kenaikan dari 57,58% (2020) menjadi 60,80% (2021). Pengguna internet juga naik dari 73,7% (2020) menjadi 77,02% (2021) karena masyarakat harus menyesuaikan diri pada kondisi “*new normal*”.



Gambar 2.69 Persentase pelanggan terlayani jaringan internet akses tetap pitalebar (*fixed broadband*) terhadap total rumah tangga, 2018-2021

Sumber: KOMINFO

Capaian tersebut menghadapi tantangan antara lain rendahnya jangkauan dan kendala akses infrastruktur TIK, belum optimalnya adopsi teknologi digital dalam sektor strategis (pemerintah, pendidikan, kesehatan, industri, dan pariwisata serta sektor lainnya) maupun dalam mendukung pengembangan kota cerdas, terbatasnya kemampuan SDM dalam mendukung transformasi digital dan belum optimalnya penggunaan platform digital karena rendahnya literasi digital.



Gambar 2.70 Persentase pengguna internet, 2016 -2021

Sumber: APJII

Kebijakan kedepannya diupayakan mendorong percepatan pembangunan infrastruktur TIK, terutama pada daerah non komersial dalam rangka penyediaan layanan publik, pertumbuhan sektor pariwisata, industri.

C. Tersedianya Data Registrasi terkait Kelahiran dan Kematian (*Vital Statistics Register*)

Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2019 tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati (Stranas AKPSH) merupakan upaya penyediaan *vital statistics register* atau statistik hayati. Perpres 62/2019 tersebut menetapkan Menteri PPN/Kepala Bappenas sebagai Ketua Pelaksana. Strategi 4 yaitu Pengembangan dan Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Statistik Hayati yang Akurat, Lengkap, dan Tepat Waktu untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan perlu terus didorong.

Dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala baik dari sisi regulasi, kelembagaan, maupun pembiayaan antara lain: (1) belum adanya institusi yang dapat memproduksi statistik hayati, (2) belum tersedia sistem yang terpusat, (3) terbatasnya anggaran, (4) belum sepenuhnya sinkronisasi pencatatan peristiwa kependudukan sejak lahir sampai meninggal, dan(5) jumlah dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih bervariasi. Pengembangan statistik hayati di Indonesia dimulai dari pelaksanaan Sensus Penduduk 2020 (SP2020) yang terhubung dengan Nomor Induk kependudukan (NIK).

BAB 3

KETERSEDIAAN DATA TPB/SDGs

3.1. Penguatan Penyediaan Data TPB/SDGs

Dalam menjalankan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 yang kemudian diperbaharui dengan Perpres Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, BPS dan kementerian/lembaga (K/L) melakukan penyediaan dan pemutakhiran data untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan TPB/SDGs Indonesia di bawah koordinasi Kementerian PPN/Bappenas. Tersedianya data capaian indikator TPB/SDGs yang berkualitas bermanfaat bagi para pemangku kebijakan untuk melihat capaian serta menentukan intervensi untuk mencapai tujuan pada tahun 2030. Sejalan dengan prinsip TPB/SDGs *no one left behind*, kebutuhan atas data yang terdisagregasi pada tingkat yang lebih rinci juga sangat tinggi. Dengan data yang terdisagregasi lebih rinci, pemangku kebijakan lebih mudah untuk: (1) melihat target spesifik yang perlu mendapat perhatian khusus; (2) memahami kesenjangan antar wilayah; dan (3) menentukan kebijakan yang lebih sesuai untuk kelompok-kelompok tertentu.

Penyediaan data capaian indikator TPB/SDGs di Indonesia saat ini dilakukan berdasarkan Metadata TPB/SDGs Edisi II. Dari 289 indikator, sebanyak 67 indikator bersumber dari BPS, 47 indikator bersumber BPS dan K/L, dan 175 indikator bersumber dari K/L. Penyesuaian penyediaan data dengan metadata terbaru dilakukan pada tahun 2021 dan capaian 210 indikator TPB/SDGs telah disampaikan dalam *Indonesia's Voluntary National Review (VNR) 2021* pada *High-level Political Forum United Nations*. Di tengah pemutakhiran dan penyempurnaan metadata TPB/SDGs nasional yang sedang berjalan pada tahun 2022, BPS dan K/L kembali berupaya untuk melakukan penyediaan dan pemutakhiran data capaian TPB/SDGs tahun 2021 yang disajikan pada laporan pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs. Dari total data yang tersedia hingga September 2022, sebanyak 86 indikator bersumber dari BPS dan sisanya dari K/L lain.

Belum tersedianya data capaian TPB/SDGs pada beberapa indikator mengindikasikan masih perlunya upaya BPS dan K/L dalam penyediaan data indikator TPB/SDGs. Agenda 2030 mendorong perubahan-perubahan yang bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan yang inklusif di semua pilar, baik pilar ekonomi, sosial, lingkungan, maupun hukum dan tata kelola. Namun, masih terdapat *gap* ketersediaan data antarpilar TPB/SDGs yang juga menjadi isu monitoring capaian TPB/SDGs. Berdasarkan VNR 2021, ketersediaan data di pilar lingkungan masih kurang dari 70%. Sementara itu, ketersediaan data di pilar lain, misalnya di pilar ekonomi sudah mencapai 97%.

Selain itu, data capaian TPB/SDGs yang saat ini tersedia sebagian besar hanya untuk tingkat nasional. Sebagian indikator yang berasal dari data administrasi dan survei dengan sampel besar, seperti Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), dan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) mampu untuk menyediakan data pada tingkat provinsi. Dengan adanya keterbatasan desain sampel pada survei-survei tersebut,

disagregasi data wilayah kabupaten/kota belum dapat disediakan untuk seluruh indikator. Meskipun demikian, survei-survei tersebut secara umum dapat memenuhi kebutuhan data TPB/SDGs pada disagregasi seperti klasifikasi desa/kota, jenis kelamin, status disabilitas, dan kelompok pendapatan/pengeluaran.

Berbagai upaya telah dilakukan BPS dan juga K/L lain untuk penyediaan indikator TPB/SDGs. BPS memaksimalkan penggunaan sumber data yang telah tersedia sekaligus mulai mencari sumber data baru, seperti *big data*, serta melakukan kajian metode statistik seperti *Small Area Estimation (SAE)*. Kajian *Big Data* di BPS dengan memanfaatkan *Mobile Positioning Data (MPD)* dimulai pada tahun 2016 untuk melihat pergerakan wisatawan serta penyusunan *Tourism Satellite Account*. Pemanfaatan MPD ini telah berhasil mendukung statistik resmi di sektor pariwisata dan TPB/SDGs Tujuan 8. Selain itu, salah satu kajian pemanfaatan *big data* yang juga sedang berlangsung di BPS pada tahun 2021 adalah pemetaan kemiskinan anak granular dengan geospasial *big data* dan kajian perhitungan indikator 9.1.1* berdasarkan derajat urbanisasi. Sedangkan untuk pemanfaatan metode SAE, lebih kepada upaya untuk memenuhi disagregasi indikator TPB/SDGs pada tingkat wilayah yang lebih kecil.

Di sisi lain, BPS sebagai pembina statistik juga melakukan upaya penguatan statistik sektoral dan mendorong K/L bertanggung jawab menyediakan data atau indikator TPB/SDGs sesuai dengan kesepakatan pada Metadata Indikator TPB/SDGs Edisi II. Pembinaan tersebut juga diarahkan sekaligus dalam upaya implementasi kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) yang berada di bawah koordinasi Kementerian PPN/Bappenas.

Pelaksanaan dan monitoring capaian TPB/SDGs adalah tanggung jawab dari semua pihak. Pelaksanaan tidak hanya menjadi tanggung jawab Kementerian PPN/Bappenas sebagai Koordinator Pelaksana TPB/SDGs Nasional dan penyediaan data tidak hanya menjadi tanggung jawab BPS sebagai *National Statistics Office (NSO)* Indonesia. Seluruh pihak berperan penting dalam pelaksanaan dan penyediaan data capaian TPB/SDGs sebagaimana pada VNR 2021.

3.2. Pengembangan Dashboard SDGs

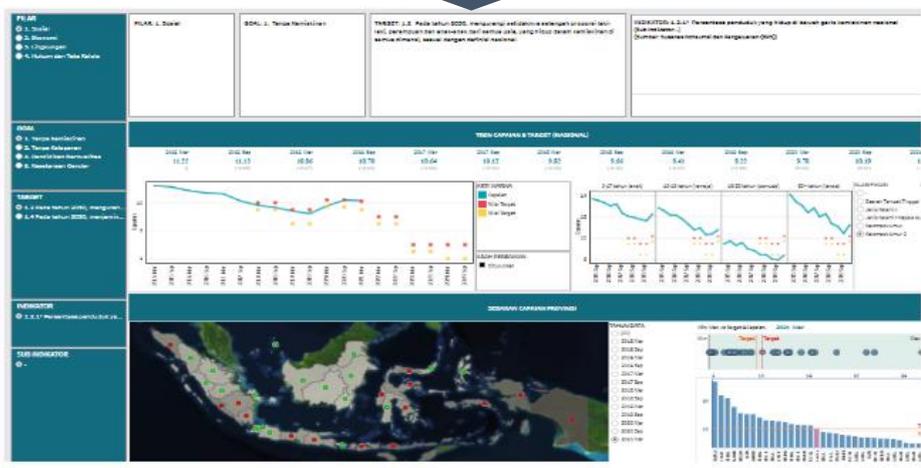
Dashboard SDGs dibangun untuk mendukung proses pengambilan kebijakan, mulai dari kementerian/lembaga, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, serta pemangku kepentingan nonpemerintah. *Dashboard* SDGs versi 1.0 pertama kali dikembangkan pada tahun 2018-2019 dengan menyajikan visualisasi informasi capaian indikator TPB/SDGs Indonesia khususnya dalam bentuk peta. *Dashboard* SDGs versi 1.0 ini masih belum memiliki fitur analitik yang lengkap.

Pada bulan Juni 2021, Kementerian PPN/Bappenas didukung oleh UNICEF Indonesia melanjutkan pengembangan *Dashboard* SDGs versi 2.0. Beragamnya karakteristik data dan semakin lengkapnya struktur data TPB/SDGs mendorong dilakukannya pengembangan fitur analitik yang jauh lebih lengkap, antara lain analisis multi-indikator, analisis menurut klasifikasi sosial dan ekonomi, serta analisis kewilayahan mulai nasional sampai kabupaten/kota. Pengembangan visualisasi dan fitur-fitur analitik tersebut dilakukan dengan perangkat lunak pengolahan data (*Business Intelligence*) *Tableau*.

Dashboard SDGs versi 2.0 dirancang memiliki 3 (tiga) layar utama, yaitu: (1) peta capaian indikator sasaran makro pembangunan; (2) peta capaian indikator TPB/SDGs; dan (3) layar analitik tren capaian indikator TPB/SDGs. Peningkatan fitur yang paling besar dan interaktif adalah pada analisis lanjut, seperti: (1) analisis monitoring dan evaluasi *gap* dan capaian; (2) analisis keterkaitan/korelasi multi-indikator; (3) analisis multi-indikator lintas wilayah; dan (4) analisis berdasarkan kelompok umur tertentu. Layar-layar tersebut dirancang untuk memberi manfaat maksimal pada pengguna yang berasal dari berbagai latar belakang.



Tampilan *Dashboard* SDGs Versi 1.0



Tampilan *Dashboard* SDGs Versi 2.0

Gambar 3.1 Perkembangan *Dashboard* SDGs

Dashboard SDGs versi 2.0 diluncurkan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas pada SDGs *Annual Conference* (SAC) bulan November 2021. Dalam beberapa bulan setelah peluncuran, terdapat lonjakan kunjungan rata-rata per hari sejumlah 800 sampai 1.000 pengakses dari dalam maupun luar negeri. Hal ini menunjukkan bahwa *Dashboard* SDGs memiliki banyak peminat sekaligus menandakan tingginya kebutuhan publik atas informasi capaian indikator-indikator TPB/SDGs Indonesia. *Dashboard* SDGs dapat diakses melalui laman web: sdgs.bappenas.go.id/dashboard/.

BAB 4 PENUTUP

Pemerintah Indonesia terus menjaga komitmen untuk mencapai Agenda 2030 TPB/SDGs, meski dalam perjalanannya menemui berbagai tantangan dan hambatan. Komitmen ini lahir dari pemahaman bahwa TPB/SDGs bukan hanya selaras dengan agenda pembangunan nasional, namun karena sejalan dengan mandat konstitusi dan pencapaiannya menjadi jembatan meraih cita-cita negeri ini menuju Indonesia 2045.

Laporan Tahunan ini menjadi bagian dari komitmen tersebut, menyajikan catatan pemantauan dan evaluasi pencapaian TPB/SDGs. Laporan ini juga menjadi salah satu bentuk akuntabilitas pemerintah: menyampaikan kepada masyarakat sejauh apa pelaksanaan dan pencapaian TPB/SDGs di Indonesia telah berjalan. Walaupun pada tahun 2021 sekitar 63% atau 141 indikator (dari 222 yang tersedia datanya dan dilaporkan) telah mencapai target yang ditetapkan pada RAN 2021-2024 dan sekitar 15% atau 33 indikator membaik capainya, perjuangan pencapaian TPB/SDGs tidak boleh berhenti sampai di sini. Apalagi karena ada sekitar 22% atau 48 indikator yang memerlukan perhatian khusus. Masih ada delapan tahun menjelang 2030. Pemerintah dan semua pihak yang terlibat tidak boleh lengah. Apa yang telah tercapai perlu dipertahankan, dan bahkan mesti ditingkatkan. Upaya lebih keras justru makin diperlukan agar bisa lebih baik lagi. Agar berhasil, percepatan atau akselerasi capaian TPB/SDGs ini membutuhkan beberapa prasyarat terutama komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi lintas aktor. Dengan demikian, masalah dan tantangan bisa dipetakan, kebutuhan bisa diidentifikasi, dan tindakan untuk menangani atau menyelesaikannya bisa dilakukan lebih efektif.

Untuk itu, Kementerian PPN/Bappenas sebagai Koordinator Pelaksana Nasional TPB/SDGs di Indonesia berupaya melakukan orkestrasi yang lebih baik dalam tata kelola percepatan pencapaian TPB/SDGs di Indonesia, baik pada tingkat nasional dan tingkat daerah. Meski koordinasi lintas kementerian/lembaga menjadi tanggung jawab utama, pendampingan ke pemerintah daerah tetap dilakukan. Fokus pendampingan di daerah adalah penguatan kapasitas pengetahuan terkait TPB/SDGs dan membantu pemerintah daerah dalam penyusunan dan pelaporan monitoring-evaluasi RAD.

Untuk memastikan semua pihak terlibat, maka diperlukan ko-kreasi antara pemerintah dengan berbagai organisasi masyarakat sipil (OMS), pelaku usaha baik besar maupun kecil, akademisi, filantropi, media, serta pihak nonpemerintah lainnya. Hal ini harus dilakukan baik di tingkat nasional maupun daerah. Oleh karena itu, komunikasi dan koordinasi dengan parapihak ini harus difasilitasi dengan lebih baik oleh pemerintah, melalui forum-forum untuk berinteraksi dan berbagi gagasan, serta inisiatif-inisiatif kerjasama.

Upaya penguatan data menjadi kunci selanjutnya untuk memastikan akurasi kebijakan dan implementasi pembangunan agar perencanaan dan pelaksanaan pembangunan makin berbasis data dan bukti. Dalam pelaporan TPB/SDGs, data menjadi hal yang mutlak. Di tingkat nasional, Kementerian PPN/Bappenas mesti terus bekerjasama dengan BPS dalam

mengupayakan ketersediaan data capaian TPB/SDGs. Upaya berikutnya adalah dengan memastikan penyediaan data sektoral oleh kementerian/lembaga. Upaya ini memerlukan koordinasi dengan Sekretariat Satu Data Indonesia (SDI) untuk memastikan tata kelola data pemerintah yang baik.

Rencana Aksi Nasional (RAN) 2021-2024 pencapaian TPB/SDGs di Indonesia sudah ditetapkan melalui Peraturan Menteri PPN. Walaupun demikian, dokumen RAN merupakan sebuah *living document* yang bisa dimuktahirkan sewaktu-waktu. Seluruh capaian yang dilaporkan dalam Laporan 2021 ini merupakan pelaporan pertama untuk RAN periode saat ini (2021-2024). Dengan demikian, Laporan 2021 ini sekaligus menjadi bahan evaluasi bersama untuk memperbaiki RAN agar semakin tepat sasaran dan target bisa ditingkatkan demi percepatan pencapaian TPB/SDGs.

Upaya pencapaian Agenda 2030 TPB/SDGs adalah upaya pencapaian semua pihak. Secara global, TPB/SDGs menjadi sebagian dari landasan dan pedoman pembangunan dunia. Bagi Indonesia, TPB/SDGs adalah bagian dari mandat konstitusi untuk membawa negeri ini meraih cita-cita bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian. (2020). *Direktori Perkembangan Konsumsi Pangan 2020*. Jakarta: Kementerian Pertanian.
- Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian. (2021). *Direktori Perkembangan Konsumsi Pangan 2021*. Jakarta: Kementerian Pertanian.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana [BNPB]. (2022). *Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI)*. Diakses pada <https://dibi.bnpb.go.id/>
- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. (2021). *Proporsi Peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan*. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- Badan Pusat Statistik [BPS]. (2021). *Berita Resmi Statistik - 5 Februari 2021*. Jakarta: BPS
- Badan Pusat Statistik [BPS]. (2022). *Berita Resmi Statistik*. Diakses dari https://www.bps.go.id/website/materi_ind/materiBrsInd-20220117120322.pdf
- Badan Pusat Statistik [BPS]. (2021). *Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia 2021 Meningkat Dibandingkan IPAK 2020*. Diakses dari https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/06/15/1847/indek_perilaku-anti-korupsi-ipak--indonesia-2021-meningkat-dibandingkan-ipak-2020.html
- Badan Pusat Statistik [BPS]. (2022). *Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Karakteristik Utama Sektor Pertanian (Hasil Survei Pertanian Terintegrasi) 2021*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik [BPS]. (2021). *Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia 2021*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik [BPS]. (2021). *Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Sektor Pertanian 2020 di Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat (Hasil Survei Pertanian Terintegrasi)*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Agustus 2020*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik [BPS]. (2012). *Penduduk Indonesia Hasil Sensus Penduduk 2010*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik [BPS]. (2022). *Press Release Ekspor Desember 2021 mencapai US\$22,38 miliar dan Impor Desember 2021 senilai US\$21,36 miliar*. Diakses dari <https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/01/17/1917/ekspor-desember-2021-mencapai-us-22-38-miliar-dan-impor-desember-2021-senilai-us-21-36-miliar.html>
- Badan Pusat Statistik [BPS]. (2021). *Statistik Wisatawan Nusantara 2020*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. *Survey Sosial Ekonomi Masyarakat (Susenas)*. Jakarta: BPS.

- Badan Pusat Statistik [BPS]. (2022). *Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas): Laci Data BPS, unpublished*.
- Badan Pusat Statistik [BPS]. (2022). *Tourism Sattelite Account Indonesia 2016-2020*. Jakarta: BPS. BPS. (2022). *Statistik Kunjungan Wisatawan Mancanegara 2021*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik [BPS]. (2022). *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Gini Ratio Menurut Provinsi dan Daerah*. Diakses dari https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data/0000/data/98/sdgs_10/1
- Badan Pusat Statistik [BPS]. (2022). *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Laju Pertumbuhan PDB Industri Manufaktur*. Diakses dari https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data/0000/data/1216/sdgs_9/1
- Badan Pusat Statistik [BPS]. (2022). *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Nilai Tambah Sektor Industri Manufaktur per Kapita (Ribu Rupiah)*. Diakses dari https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data/0000/data/1215/sdgs_9/1
- Badan Pusat Statistik [BPS]. (2022). *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Persentase Penduduk Miskin (PO) Menurut Provinsi dan Daerah*. Diakses dari https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data/0000/data/192/sdgs_1/1
- Badan Pusat Statistik [BPS]. (2022). *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Persentase Penduduk Miskin di Daerah Tertinggal*. Diakses dari https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data/0000/data/1238/sdgs_1/1
- Badan Pusat Statistik [BPS]. (2022). *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Proporsi Nilai Tambah Sektor Industri Manufaktur Terhadap PDB*. Diakses dari https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data/0000/data/1214/sdgs_9/1
- Badan Pusat Statistik [BPS]. (2022). *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Proporsi Tenaga Kerja pada Sektor Industri Manufaktur (Persen)*. Diakses dari https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data/0000/data/1217/sdgs_9/1
- Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik (BB Biogen), Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian. (2021). *Upaya Pelaporan Akses Koleksi Sumber Daya Genetik (SDG) Pertanian untuk Sustainable Development Goals (SDGs)*. Concept note, diperoleh berdasarkan komunikasi pribadi. Bogor.
- Direktorat Perencanaan Makro dan Analisis Statistik, Kedeputan Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas. (2022). *Bappenas Policy Modeling*. Diakses dari <https://policymodelling.bappenas.go.id/>
- Indonesia Corruption Watch. (2022). *Konferensi Pers*. Diakses dari <https://www.suara.com/news/2022/04/18/142435/miris-saat-pandemi-tahun-2020-2021-ada-30-kasus-korupsi-dana-covid-19-icw-paling-banyak-menyunat-dana-bansos>
- Indonesia Judicial Research Society [IJRS]. (2021). *Data dan Fakta Kekerasan Seksual di Indonesia 2021*. Diakses dari <http://ijrs.or.id/wp-content/uploads/2022/04/Data-dan-Fakta-Kekerasan-Seksual-di-Indonesia-2021-8-Apr-2022.pdf>

- Kementerian Keuangan. (2022). *Konferensi Pers Realisasi APBN 2021*. Diakses dari <https://ekonomi.bisnis.com/read/20220103/10/1484930/anggaran-pen-2021-tidak-terrealisasi-100-persen-ini-penjelasan-sri-mulyani#:~:text=Bisnis.com%2C%20JAKARTA%20%2D%20Realisasi,dari%20pagu%20Rp744%2C77%20triliun>.
- Kementerian Badan Usaha Milik Negara [BUMN]. (2022). *Webinar BNI Global Diaspora Week Bersama CNBC Indonesia*. Diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/market/20220427154802-17-335405/wow-pekerja-migran-indonesia-kontribusi-devisa-rp-130-t>
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2022). *Laporan Kinerja Kementerian ESDM 2021*. Jakarta: Kementerian ESDM.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan [KKP]. (2021). *Laporan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan*. Jakarta: KKP.
- Kementerian Kesehatan. (2020). *Generasi Bebas Hepatitis*. <http://p2p.kemkes.go.id/generasi-bebas-hepatitis/>
- Kementerian Kesehatan. (2013). *Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013*. Jakarta: Kementerian Kesehatan.
- Kementerian Kesehatan. (2018). *Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018*. Jakarta: Kementerian Kesehatan.
- Kementerian Kesehatan. (2019). *Laporan Akhir Penelitian Studi Status Gizi Balita di Indonesia 2019*. Jakarta: Kementerian Kesehatan.
- Kementerian Kesehatan. (2021). *Laporan Akhir Penelitian Studi Status Gizi Indonesia 2021*. Jakarta: Kementerian Kesehatan.
- Kementerian Kesehatan. (2021). *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2020*. Jakarta: Kementerian Kesehatan.
- Kementerian Kesehatan. (2022). *Profil Kesehatan Indonesia 2021*. Jakarta. Kementerian Kesehatan.
- Kementerian Kesehatan. (2021). *Survei Kualitas Air Minum 2021*. Jakarta: Kemenkes.
- Kementerian Keuangan. (2021). *Siaran Pers*. Diakses dari <https://dipb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/siaran-pers/3815-apbn-2021-telah-bekerja-keras-dan-berkinerja-positif-dalam-pengendalian-covid-19-dan-pemulihan-ekonomi-nasional.html>
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2022). *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2022*. Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2021). *Siaran Pers Dorong Efisiensi Infrastruktur TIK, Menkominfo: Pemerintah Siapkan Kebijakan yang Ramah*. Diakses dari <https://www.kominfo.go.id/content/detail/37899/siaran-pers-no>

[390hmkominfo112021-tentang-dorong-efisiensi-infrastruktur-tik-menkominfo-pemerintah-siapkan-kebijakan-yang-ramah/0/siaran_pers](https://www.kominfo.go.id/berita/390hmkominfo112021-tentang-dorong-efisiensi-infrastruktur-tik-menkominfo-pemerintah-siapkan-kebijakan-yang-ramah/0/siaran_pers)

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (2021). *Outlook Perekonomian Indonesia tahun 2021*. Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan [KLHK]. (2020). *Hasil Evaluasi Kualitas Udara Perkotaan*. Diakses pada <https://ditppu.menlhk.go.id/portal/read/hasil-evaluasi-kualitas-udara-perkotaan>

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan [KLHK]. (2022). *Laporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) dan Monitoring, Pelaporan, dan Verifikasi (MPV)*. Jakarta: KLHK.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan [KLHK]. (2021). *Potret Capaian TPB/SDGs Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan*. Sekretariat TPB/SDGs KLHK.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan [KLHK]. (2020). *Rencana Strategis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam (KSDAE) 2020-2024*. Jakarta: KLHK.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan [KLHK]. (2022). *Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2020-2024*. Jakarta: KLHK.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan [KLHK]. (2022). *Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN)*. Jakarta.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2021). *Konferensi pers Hasil Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional 2021*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. (2021). *Data Pokok Pendidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah*. Jakarta: Kemendikbudristek.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia [KPAI]. (2022). *Siaran Pers: Catatan Pelanggaran Hak Anak Tahun 2021 dan Proyeksi Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Tahun 2022*. Diakses dari <https://www.kpai.go.id/publikasi/catatan-pelanggaran-hak-anak-tahun-2021-dan-proyeksi-pengawasan-penyelenggaraan-perlindungan-anak-tahun-2022>

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional [Kementerian PPN/Bappenas]. (2022). *Lampiran Pidato Presiden Republik Indonesia Dalam Rangka HUT Ke-77 Republik Indonesia*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional [Kementerian PPN/Bappenas]. (2020). *Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia Edisi II: Pilar Pembangunan Sosial*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.

- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional [Kementerian PPN/Bappenas]. (2022). *Pedoman Umum Kemiskinan*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional [Kementerian PPN/Bappenas]. (2019). *Peta Jalan SDGs Indonesia Menuju 2030*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional [Kementerian PPN/Bappenas]. (2021). *Rencana Aksi Nasional (RAN) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) 2021-2024*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional [Kementerian PPN/Bappenas]. (2020). *Rencana Kerja Pemerintah 2021*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional [Kementerian PPN/Bappenas]. (2021). *Rencana Kerja Pemerintah 2022*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional [Kementerian PPN/Bappenas]. (2021). *Ringkasan Bagi Pembuat Kebijakan: Manfaat Ekonomi, Sosial dan Lingkungan dari Ekonomi Sirkular di Indonesia*. Kerjasama Kementerian PPN/Bappenas, Embassy of Denmark Jakarta, UNDP Indonesia. Jakarta.
- Kementerian Pertanian. (2020). *Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024 Revisi I*. Jakarta. (Peraturan Menteri Pertanian Nomor 760.1/Kpts/RC.020/M/11/2020).
- Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. (2020). *Laporan Kinerja Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Kemenristekdikti.**
- Politeknik Statistika STIS. *Mengapa Kemiskinan Anak Perlu Menjadi Perhatian?* Diakses dari <https://bigdata.stis.ac.id/pemetaan-kemiskinan-anak/>**
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2020-2024. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 914.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2021 Tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2020 Tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 304.

- Prasetyo, D. D., Widyaningsih, D., Tamyis, A. R., & Kusumawardhani, N. (2019). *Laporan Sintesis Studi Midline MAMPU Akses Perempuan Miskin terhadap Layanan Publik pada Lima Tema Penghidupan*.
- Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian. 2021. *Info ringkas indikator SDGs 2.5.2*, komunikasi pribadi. Bogor.
- Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan, Kementerian Keuangan. (2021). *Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)*. Diakses dari <https://pen.kemenkeu.go.id/in/post/mengapa-program-pen>
- Republic of Indonesia. (2021). *Indonesia's Voluntary National Review 2021: Sustainable and Resilient Recovery from the COVID-19 Pandemic for the Achievement of the 2030 Agenda*. Jakarta: Ministry of National Development Planning/National Development Planning Agency.
- Satuan Tugas Penanganan COVID-19. (2021). *Peta Sebaran*. Diakses dari <https://covid19.go.id/peta-sebaran>
- Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut. (2020). *Laporan pelaksanaan rencana aksi nasional penanganan sampah laut Indonesia*. Jakarta.
- UNDP Indonesia. (2021). *Seminar: Understanding the Welfare and Livelihood of Society during COVID-19 Pandemic in Indonesia*. <https://www.youtube.com/watch?v=C9hLx7q1dwc>
- World Health Organization. (2020). *World Malaria Report 2020*. Geneva: WHO.
- World Health Organization. (2021). *Global Tuberculosis Report 2021*. Geneva: WHO.



LAMPIRAN
TABEL CAPAIAN INDIKATOR TPB/SDGs TAHUN 2021
(*FORM 1* MONITORING DAN EVALUASI TPB/SDGs)



Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2020	Target 2021	Capaian 2021	Status
1.1 Pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari 1,25 dolar Amerika per hari.							
1.1.1*	Tingkat kemiskinan ekstrim	BPS	Persen	3,8 (Mar) 4,2 (Sep)	4,1	4,0 (Mar)	
1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.							
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	Susenas Konsumsi dan Pengeluaran (BPS)	Persen	9,78 (Mar) 10,19 (Sep)	9,5-10,1	10,14 (Mar) 9,71 (Sep)	
1.2.2*	Persentase laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definisi nasional						
(1)	Persentase imunisasi dasar pada penduduk usia 12-23 bulan, terjadi deprivasi jika ada penduduk usia 12-23 bulan yang tidak mendapatkan imunisasi dasar	Susenas (BPS)	Persen	65,1 (2019)	75,5-76,9	PM	-
		Riskesdas (Kemenkes)	Persen	57,9 (2018)	68	65,8 (SSGI, 2019)	
(2)	<i>Prevalence of Undernourishment</i> (tingkat kekurangan gizi), terjadi deprivasi jika ada anggota rumah tangga yang kekurangan gizi	Susenas Konsumsi dan Pengeluaran (BPS)	Persen	8,34	5,8	8,49	
(3)	Persentase penduduk yang mengalami gangguan kesehatan	Susenas Kor (BPS)	Persen	14,64	PM	13,04	
(4)	Persentase ART usia 25-60 tahun yang tidak tamat SMP, terjadi deprivasi jika ada ART yang tidak menyelesaikan pendidikan SMP pada usia 25-60 tahun	Susenas Kor (BPS)	Moderat (Persen)	33,9 (2019)	30,61	PM	-
			Pesimis (Persen)	34,95 (2019)	31,81	PM	-
			Optimis (Persen)	33,21 (2019)	29,66	PM	-

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2020	Target 2021	Capaian 2021	Status
(5)	Persentase anak usia sekolah 7-18 tahun yang tidak/belum bersekolah, terjadi deprivasi jika ada anak usia sekolah 7-18 tahun yang tidak/belum bersekolah	Susenas Kor (BPS)	Persen	0,32 (2019)	0,23	PM	–
(6)	Persentase rumah tangga yang sumber penerangan utamanya bukan listrik, terjadi deprivasi jika tanpa listrik	Susenas Kor (BPS)	Persen	1,02	0,92	0,79	
(7)	Persentase rumah tangga tanpa akses pada air minum bersih, terjadi deprivasi jika rumah tangga tanpa akses pada air minum bersih atau air bersih yang dapat diperoleh tidak lebih dari 30 menit jalan kaki dari rumah	Susenas Kor (BPS)	Persen	9,79	9,09	9,22	
(8)	Persentase rumahtangga tidak mempunyai WC layak terjadi deprivasi jika rumah tangga tidak mempunyai WC layak atau menggunakan WC bersama	Susenas Kor (BPS)	Persen	20,47	19,2	19,71	
(9)	Persentase rumah tangga dengan jenis lantai terluas adalah tanah atau luas lantai per kapita kurang dari 8 m ² , terjadi deprivasi jika rumah berlantai tanah, pasir atau lantai tercampur kotoran ternak atau luas lantai per kapita kurang dari 8 m ²	Susenas Kor (BPS)	Persen	7,85 (Luas lantai < 7,2 m ²)	7,64	6,85 (Luas lantai < 7,2 m ²)	
			Persen	3,89 (Lantai tanah)	3,46	PM	–

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2020	Target 2021	Capaian 2021	Status
(10)	Persentase rumah tangga dengan bahan bakar memasak menggunakan elpiji 3 kg, terjadi deprivasi jika memasak menggunakan elpiji 3 kg.	Susenas Kor (BPS)	Persen	79,38 (2019)	PM	PM	–
(11)	Persentase rumah tangga yang tidak punya aset produktif, terjadi deprivasi jika rumah tangga tidak mempunyai sepeda atau sepeda motor, ternak, lahan, TV, tabung gas, lemari es, emas, mobil	Susenas Kor (BPS)	Persen	PM	PM	PM	–
(12)	Persentase penduduk yang berusia 0-17 tahun yang tidak memiliki akta kelahiran, terjadi deprivasi jika ada anggota rumah tangga yang berusia 0-17 tahun yang tidak memiliki akta kelahiran	Susenas Kor (BPS)	Persen	11,89	5	11,58	
(13)	Persentase rumah tangga yang tidak punya akses internet, terjadi deprivasi jika tidak ada anggota rumah tangga yang bisa mengakses internet	Susenas Kor (BPS)	Persen	52,31 (2019)	39,61	PM	–
(14)	Persentase rumah tangga dengan anggota rumah tangga bekerja, terjadi deprivasi jika tidak ada anggota rumah tangga yang bekerja atau semua anggota rumah tangga yang bekerja kurang dari 20 jam seminggu.	Sakernas (BPS)	Persen	PM	PM	PM	–

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2020	Target 2021	Capaian 2021	Status	
1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.								
1.3.1*	Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok semua anak, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan	BPJS Kesehatan (diolah)	Persen	90,11 (PBI JKN-APBN: 96.602.766 jiwa)	96,2	PM (PBI JKN-APBN: 96,8 juta jiwa)	–	
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	BPJS Kesehatan (diolah)	Persen	90,11 (PBI JKN-APBN: 96.602.766 jiwa)	96,2	PM (PBI JKN-APBN: 96,8 juta jiwa)	–	
1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	BPJS Ketenagakerjaan	Semua (persen)	23,34	33,89	PM		
	(1) Formal		Persen	63,82	53,37 (RKP 2021)	53,98		
	(2) Informal		Persen	3,21	8,48 (RKP 2021)	8,14		
1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.								
1.4.1*	Proporsi penduduk/ rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar							
	(1) Akses pada layanan air minum	Susenas Kor (BPS)	Persen	42,31 (akses aman secara fisik)	N/A	43,81 (akses aman secara fisik)		
				90,21 (akses layak)	92,81 (akses layak)	90,78 (akses layak)		
	(2) Akses pada layanan sanitasi dasar	Susenas Kor (BPS)	Persen	79,53	79,43	80,29		
	(3) Akses pada mobilitas dasar	PODES (BPS)		N/A	N/A	N/A	–	
			a. Perkotaan	Persen	N/A	N/A	N/A	–
			b. Perdesaan	Persen	N/A	N/A	N/A	–
	(4) Akses pada fasilitas penyehatan dasar	Susenas Kor (BPS)	Persen	78,30	82,66	79,59		
(5) Indeks akses terhadap pelayanan dasar	Susenas Kor dan PODES (BPS)	Persen	N/A	N/A	N/A	–		

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2020	Target 2021	Capaian 2021	Status
1.4.2*	Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan	Susenas Kor (BPS)					
	(1) Proporsi rumah tangga dengan rumah milik		Persen	80,10	80	81,08	
	(2) Proporsi rumah tangga dengan rumah sewa/ kontrak		Persen	9,27	10,4	8,66	
1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.							
1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	BNPB					—
	(1) Jumlah korban meninggal dan hilang per 100.000 orang		Per 100.000 orang	0,16	0,2	PM (728 jiwa meninggal dunia dan 87 orang hilang)	—
	(2) Jumlah korban terluka per 100.000 orang		Per 100.000 orang	0,23	N/A	PM (14.915 orang luka-luka)	—
	(3) Jumlah korban mengungsi per 100.000 orang		Per 100.000 orang	342,12	N/A	PM (7,63 juta jiwa menderita & mengungsi)	—
1.5.2*	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap GDP	BNPB	Persen PDB	0,03	0,1	PM	—
1.5.3*	Rencana dan implementasi strategi nasional pengurangan risiko bencana yang selaras dengan <i>the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030</i>	BNPB	Dokumen	<ul style="list-style-type: none"> RIPB 2020-2024 Pengembangan perangkat analisis kerentanan dan risiko iklim (SIDIK) Peningkatan kapasitas daerah (25 kab/ kota) dalam perencanaan API 	1 dokumen	Rencana Nasional Pengurangan Bencana 2020-2024	

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2020	Target 2021	Capaian 2021	Status
1.5.4*	Proporsi pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi daerah pengurangan risiko bencana yang selaras dengan strategi nasional pengurangan risiko bencana	BNPB	Persen	35,60	45	37,16 (191 dari 514 kab/kota)	▼
1.a Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.							
1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan	Kemenkeu (diolah)	Persen	18,07	PM	16,84	▼
1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah	Kemenkeu (diolah)					▶
	(1) Persentase pengeluaran/ belanja pemerintah untuk pendidikan		Persen	20,0 (APBN 2020)	20	20,0 (APBN 2021)	●
	(2) Persentase pengeluaran/ belanja pemerintah untuk kesehatan		Persen	5,2 (APBN 2020)	5	6,2 (APBN 2021)	●
	(3) Persentase pengeluaran/ belanja pemerintah untuk perlindungan sosial		Persen	18,1 (APBN 2020)	PM	12,6 (APBN 2021)	▼

● Tercapai ▶ Akan tercapai/membaik ▼ Perlu perhatian khusus – Data tidak tersedia



Tujuan 2 Tanpa Kelaparan

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2020	Target 2021	Capaian 2021	Status
2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.							
2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>)	Susenas (BPS)	Persen	8,34	5,8	8,49	▼
2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan	Susenas (BPS)	Persen	5,12	4,8	4,79	●
2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.							
2.2.1*	Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	SSGBI 2019 SSGI 2021 (Kemenkes)	Persen	27,67 (2019)	21,1	24,4	▶
2.2.2*	Prevalensi <i>wasting</i> (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	SSGBI 2019 SSGI 2021 (Kemenkes)	Persen	7,44 (2019)	7,8	7,1	●
2.2.2.(a)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH).	Direktori Konsumsi Pangan (Kementan)	Skor	86,3 (AKE: 2.100 kkal/kap/hari)	91,6	87,2	▼
2.2.3*	Prevalensi anemia pada ibu hamil usia 15-49 tahun.	Riskesdas (Kemenkes)	Persen	48,9 (2018)	42,0	N/A	–
2.3 Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan nonpertanian.							
2.3.1*	Volume produksi per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/ peternakan/ perikanan/ kehutanan	SITASI (BPS)	USD PPP per hari kerja dalam setahun	36,30 (Rata-rata 3 provinsi: Jabar, Jatim, NTB)	37,83	45,32 (SITASI 2021 di 34 provinsi)	●
2.3.1.(a)	Nilai tambah pertanian per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/ peternakan/ perikanan/kehutanan	Sakernas (BPS)	Juta rupiah/ tenaga kerja	55,34 (angka sementara)	57,20	60,70 (angka sangat sementara)	●
2.3.2*	Rata-rata pendapatan produsen pertanian skala kecil menurut subsektor	SITASI (BPS)	USD PPP dalam setahun	641,97 (Rata-rata 3 provinsi: Jabar, Jatim, NTB)	663,60	1.099,88 (SITASI 2021 di 34 provinsi)	●
2.4 Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap							

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2020	Target 2021	Capaian 2021	Status
perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan.							
2.4.1	Proporsi areal pertanian produktif dan berkelanjutan	SITASI (BPS)	Persen	10,28 (Rata-rata 3 provinsi: Jabar, Jatim, NTB)	PM	10,46	●
2.4.1.(a)	Proporsi luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan	Kementan	Persen	50,0	65	88,21 (LAKIN Ditjen PSP 2021)	●
2.5 Pada tahun 2020, mengelola keragaman genetik benih, tanaman budidaya dan hewan ternak dan peliharaan dan spesies liar terkait, termasuk melalui bank benih dan tanaman yang dikelola dan dianekaragamkan dengan baik di tingkat nasional, regional dan internasional, serta meningkatkan akses terhadap pembagian keuntungan yang adil dan merata, hasil dari pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait, sebagaimana yang disepakati secara internasional.							
2.5.1.(a)	Jumlah sumber daya genetik tanaman dan hewan untuk pangan dan pertanian yang disimpan di fasilitas konservasi, baik jangka menengah maupun jangka panjang.	Kementan	Jumlah Akses SDG tanaman	4.655	5.696	4.675 (LAKIN BB Biogen 2021)	▼
2.5.2*	Proporsi ras ternak lokal yang berisiko punah	Kementan	Persen	0,46 (2019)	0,46	PM	–
2.a Meningkatkan investasi, termasuk melalui kerjasama internasional yang kuat, dalam infrastruktur perdesaan, layanan kajian dan perluasan pertanian, pengembangan teknologi dan bank gen untuk tanaman dan ternak, untuk meningkatkan kapasitas produktif pertanian di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang.							
2.a.1*	Indeks orientasi pertanian (IOP) untuk pengeluaran pemerintah	Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Kemenkeu) dan NTP BPS (diolah)	Indeks	0,095	PM	PM	–
2.a.2*	Total bantuan pembangunan (ODA) dan bantuan lain untuk sektor pertanian	Kemen PPN/ Bappenas	USD	121.992.606 (Mitra Bilateral total kumulatif 2015-2020) 969.839.956 (Mitra Multilateral 2020)	PM	PM	–
2.b Memperbaiki dan mencegah pembatasan dan distorsi dalam pasar pertanian dunia, termasuk melalui penghapusan secara bersamaan segala bentuk subsidi ekspor pertanian dan semua tindakan ekspor dengan efek setara, sesuai dengan amanat the Doha Development Round.							
2.b.1*	Subsidi ekspor pertanian	Kemendag, Kemenkeu	Milyar rupiah	N/A	PM	N/A	–
2.c Mengadopsi langkah-langkah untuk menjamin berfungsinya pasar komoditas pangan serta turunannya dengan tepat, dan memfasilitasi pada waktu yang tepat akses terhadap informasi pasar, termasuk informasi cadangan pangan, untuk membantu membatasi volatilitas harga pangan yang ekstrim.							
2.c.1*	Indikator anomali harga pangan.	BPS	Indeks	0,43	0,21	0,19	●

● Tercapai ► Akan tercapai/membaik ▼ Perlu perhatian khusus – Data tidak tersedia



Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2020	Target 2021	Capaian 2021	Status
3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.							
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI)	SUPAS (BPS)	Kematian per 100.000 kelahiran hidup	305 (2015)	217	N/A	–
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya	Susenas Kor (BPS)					●
	(a) ditolong oleh tenaga kesehatan		Persen	95,16	N/A	95,93	●
	(b) di fasilitas kesehatan		Persen	87,91	89,00	88,91	▶
3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.							
3.2.1*	(a) Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup	SDKI (BPS dan BKKBN)	Kematian per 100.000 kelahiran hidup	32 (2017)	N/A	N/A	–
	(b) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	SDKI (BPS dan BKKBN)	Kematian per 100.000 kelahiran hidup	24 (2017)	19,5	N/A	–
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup	SDKI (BPS dan BKKBN)	Kematian per 100.000 kelahiran hidup	15 (2017)	12,2	N/A	–
3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.							
3.3.1*	Jumlah infeksi baru HIV per 1.000 penduduk tidak terinfeksi	Kemenkes	Kasus baru per 1.000 penduduk tidak terinfeksi	0,18	0,21	0,10	●
3.3.2*	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk	WHO <i>Global TB Report</i>	Kasus baru per 100.000 penduduk	301	252	354	▼
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang	Kemenkes	Kasus per 1.000 orang	0,94 <small>(update data profil kesehatan 2020)</small>	N/A	1,12	▼
3.3.3.(a)	Jumlah kabupaten/ kota yang mencapai eliminasi malaria	Kemenkes	Kabupaten/ Kota	318	345	347	●
3.3.4*	Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk	Kemenkes	Persen	1,77	1,54	1,69	▼
3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (a) Filariasis dan (b) Kusta						▶
	(a) Angka Pencapaian Pengobatan Penyakit Filariasis	Kemenkes	Persen	78,99	N/A	71,55	▼

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2020	Target 2021	Capaian 2021	Status
	(b) Proporsi kasus kusta yang ditemukan dan diobati	Kemenkes	Persen	100,00	N/A	100,00	●
3.3.5.(a)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta	Kemenkes	Kabupaten/ Kota	401	436	415	▼
3.3.5.(b)	Jumlah kabupaten/kota endemis filariasis yang mencapai eliminasi	Kemenkes	Kabupaten/ Kota	64	93	72	▼
3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.							
3.4.1.(a)	Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun	Riskesdas (Kemenkes)	Persen	9,1 (2018)	9	N/A	–
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi	Riskesdas (Kemenkes)	Persen	34,1 (2018)	34,1	N/A	–
3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun	Riskesdas (Kemenkes)	Persen	21,8 (2018)	21,8	N/A	–
3.5 Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.							
3.5.1.(a)	Jumlah penyalahguna napza yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi medis	Laporan Tahunan Subdit Masalah Penyalahgunaan Napza Kemenkes 2020	Orang	9.585 <i>(update data Kemenkes 2022)</i>	10.000	10.149	●
3.5.1.(b)	Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi ^{a)}	BNN	Orang	1.740 <i>(update data BNN 2022)</i>	N/A	2.396	●
3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir	Susenas Konsumsi dan Pengeluaran (BPS)	Liter per kapita	0,39	N/A	0,36	●
3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.							
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern	SDKI (BPS dan BKKBN)					–
	(a) kelompok perempuan usia reproduksi 15-49 tahun (WUS)		Persen	77,0 (2017)	N/A	N/A	–
	(b) kelompok pasangan usia subur 15-49 tahun (PUS)		Persen	77,1 (2017)	N/A	N/A	–
	Angka prevalensi kontrasepsi modern (<i>Modern Contraceptive Prevalance Rate/mCPR</i>)	SDKI (BPS dan BKKBN)	Persen	57,9 <i>(SKAP/SRPJMN 2020 dalam RKP 2022)</i>	62,16	57,00 <i>(Pendataan Keluarga/PK, 2021)</i>	▼
Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>Unmet Need</i>)	SDKI (BPS dan BKKBN)	Persen	13,4 <i>(SKAP/SRPJMN 2020 dalam RKP 2022)</i>	8,30	18,00 <i>(Pendataan Keluarga/PK, 2021)</i>	▼	

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2020	Target 2021	Capaian 2021	Status
3.7.2*	Angka kelahiran remaja (umur 10-14 tahun; umur 15-19 tahun) per 1000 perempuan di kelompok umur yang sama	SDKI (BPS dan BKKBN)					–
	(a) ASFR 10-14 tahun		Kelahiran per 1.000 perempuan usia 10-14 tahun	0,179 (2017) <i>Schmertmann Model</i>	N/A	N/A	–
	(b) ASFR 15-19 tahun		Kelahiran per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun	36 (2017)	24	N/A	–
3.7.2.(a)	<i>Total Fertility Rate</i> (TFR)	SDKI (BPS dan BKKBN)	Jumlah anak per WUS 15-49 tahun	2,4 (2017)	2,24	N/A	–
3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.							
3.8.1*	Cakupan pelayanan kesehatan esensial	Riskedas (Kemenkes)	Indeks	PM	N/A	N/A	–
3.8.1.(a)	<i>Unmet need</i> pelayanan kesehatan	Susenas Kor (BPS)	Persen	5,44	N/A	5,03	●
3.8.2*	Proporsi populasi dengan pengeluaran rumah tangga yang besar untuk kesehatan sebagai bagian dari total pengeluaran rumah tangga atau pendapatan	Susenas Kor (BPS)					●
	(a) Pengeluaran kesehatan > 10% dari total pengeluaran rumah tangga		Persen	2,23	N/A	1,97	●
	(b) Pengeluaran kesehatan > 25% dari total pengeluaran rumah tangga		Persen	0,43	N/A	0,35	●
3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	BPJS Kesehatan	Persen	82,07	85 (Pemutakhiran RKP 2021)	86,96	●
3.a Memperkuat pelaksanaan <i>the Framework Convention on Tobacco Control</i> WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.							
3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun	Susenas Kor (BPS)	Persen	28,69	N/A	28,96	▼
3.b Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai <i>the Doha Declaration</i> tentang <i>the TRIPS Agreement and Public Health</i>, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.							

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2020	Target 2021	Capaian 2021	Status
3.b.1*	Proporsi target populasi yang telah memperoleh vaksin program nasional	Riskesdas (2018)					
	(a) Cakupan DPT-3		Persen	61,3 (2018)	N/A	N/A	–
	(b) Cakupan Campak-2		Persen	77,3 (2018)	N/A	N/A	–
	(c) Cakupan PCV-2		Persen	N/A	N/A	N/A	–
	(d) Imunisasi dasar lengkap anak usia 12-23 bulan		Persen	57,9 (2018)	68	65,8 (SSGI, 2021)	
3.b.2*	Total Official Development Assistant (ODA) untuk penelitian medis dan sektor kesehatan dasar	LDKPI, Kemenkeu	Milyar rupiah	8,64	N/A	15,75	
3.b.3*	Proporsi fasilitas kesehatan dengan paket obat esensial yang tersedia dan terjangkau secara berkelanjutan.	Kemenkes	Persen	92,12	90	92,33	

3.c Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.

3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	Sistem Registrasi Tenaga Kesehatan (KKI dan KTKI) diolah Pusrengun SDM Kesehatan Kemenkes					
	(a) Dokter spesialis		Per 1.000 penduduk	0,15	N/A	0,16	
	(b) Dokter umum		Per 1.000 penduduk	0,53	N/A	0,52	
	(c) Dokter gigi		Per 1.000 penduduk	0,14	N/A	0,12	
	(d) Perawat		Per 1.000 penduduk	2,19	N/A	2,28	
	(e) Bidan		Per 1.000 penduduk	1,71	N/A	1,70	
	(f) Tenaga gizi		Per 1.000 penduduk	0,14	N/A	0,14	
	(g) Tenaga kesehatan lingkungan		Per 1.000 penduduk	0,10	N/A	0,10	
	(h) Tenaga keterampilan fisik		Per 1.000 penduduk	0,07	N/A	0,07	
	(i) Tenaga keteknisian medis		Per 1.000 penduduk	0,21	N/A	0,22	
	(j) Apoteker		Per 1.000 penduduk	0,29	N/A	0,30	
	(k) Tenaga Teknik Biomedika		Per 1.000 penduduk	0,29	N/A	0,32	
	(l) Tenaga kesehatan masyarakat		Per 1.000 penduduk	0,28	N/A	0,15	
	(m) Tenaga Psikologi Klinik		Per 1.000 penduduk	0,006	N/A	0,01	
	(n) Tenaga Kesehatan Tradisional		Per 1.000 penduduk	0,002	N/A	0,002	

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2020	Target 2021	Capaian 2021	Status
	Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	Laporan tahunan BPPSDM (Kemenkes)	Persen	39,6	59	48,17	▼
	Persentase RSUD kabupaten/kota yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis lainnya	Laporan tahunan BPPSDM (Kemenkes)	Persen	69,77	75	75,31	●
3.d Memperkuat kapasitas semua negara, khususnya negara berkembang tentang peringatan dini, pengurangan risiko dan manajemen risiko kesehatan nasional dan global.							
3.d.1*	Regulasi kesehatan internasional dan kesiapsiagaan darurat kesehatan.	Kementerian Kesehatan	Persen	PM	N/A	PM	–

● Tercapai ► Akan tercapai/membaik ▼ Perlu perhatian khusus – Data tidak tersedia



Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2020	Target 2021	Capaian 2021	Status
4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.							
4.1.1.(a)	Proporsi anak-anak dan remaja di: (a) kelas 5 (b) kelas 8, dan (c) usia 15 tahun yang mencapai setidaknya tingkat kemahiran minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika						●
	(a) Proporsi anak-anak dan remaja di kelas 5 yang mencapai setidaknya tingkat kemahiran minimum dalam:						▶
	(i) Membaca	AKSI 2016 dan AKM 2021 Kemendikbud	Persen	Kelas 4: 53,17 (2016)	55	Kelas 5: 53,47	▼
	(ii) Matematika		Persen	Kelas 4: 22,87 (2016)	27,4	Kelas 5: 30,66	●
	(b) Proporsi anak-anak dan remaja di kelas 8 yang mencapai setidaknya tingkat kemahiran minimum dalam:						●
	(i) Membaca	PISA 2018 (OECD) dan AKM 2021 Kemendikbud	Persen	Kelas 9: 30,10 (2018)	55	Kelas 8: 50,78	▶
	(ii) Matematika		Persen	Kelas 9: 28,10 (2018)	27,4	Kelas 8: 35,11	●
	(c) Proporsi anak-anak dan remaja usia 15 tahun yang mencapai setidaknya tingkat kemahiran minimum dalam:						●
	(i) Membaca	PISA 2018 (OECD) dan AKM 2021 Kemendikbud	Persen	Usia 15 tahun: 30,1 (2018)	33 (RKP 2021)	Kelas 11: 52,10	●
	(ii) Matematika		Persen	Usia 15 tahun: 28,1 (2018)	30 (RKP 2021)	Kelas 11: 32,34	●
	(iii) Sains		Persen	Usia 15 tahun: 40 (2018)	42,6 (RKP 2021)	N/A	–

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2020	Target 2021	Capaian 2021	Status
4.1.2*	Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat	Susenas Kor (BPS)					
	(a) Persentase siswa yang menyelesaikan pendidikan jenjang SD/ sederajat		Persen	96,00	97,16	97,37	
	(b) Persentase siswa yang menyelesaikan pendidikan jenjang SMP/ sederajat		Persen	87,89	89,15	88,88	
	(c) Persentase siswa yang menyelesaikan pendidikan jenjang SMA/ sederajat		Persen	63,95	68,69	65,94	
4.1.2.(a)	Angka anak tidak sekolah jenjang:	Susenas Kor (BPS)					
	(a) SD/ sederajat		Persen	0,62	N/A	0,65	
	(b) SMP/ sederajat		Persen	7,29	N/A	6,77	
	(c) SMA/ sederajat		Persen	22,31	N/A	21,47	
4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.							
4.2.1*	Proporsi anak usia 24-59 bulan yang berkembang dengan baik dalam bidang kesehatan, pembelajaran, dan psikososial, menurut jenis kelamin	Integrasi Susenas (BPS) dan Riskesdas (Kemenkes)	Persen	N/A	PM	N/A	-
4.2.2*	Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang terorganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar), menurut jenis kelamin	Susenas Kor (BPS)	Persen	92,76	93,48	92,72	
4.3 Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.							
4.3.1*	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin	Susenas Modul Sosial, Budaya, dan Pendidikan (BPS)					-
	(1) Usia 15 – 24 tahun		Persen	48,66 (2018)	PM	PM	-
	(2) Usia 25 – 64 tahun		Persen	2,30 (2018)	PM	PM	-
4.3.1.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT)	Susenas Kor (BPS)	Persen	30,85	31,16	31,19	
4.4 Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.							

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2020	Target 2021	Capaian 2021	Status
4.4.1.(a)	Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	Susenas Kor (BPS)					
	(1) Usia 15 – 24 tahun		Persen	87,17	PM	91,83	
	(2) Usia 15 – 59 tahun		Persen	64,26	PM	70,17	
4.5 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.							
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/ sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/ sederajat, SMA/ SMK/ sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/ teratas, (d) disabilitas/ tanpa disabilitas	Susenas Kor (BPS)					
	Rasio APM SD/ Sederajat:						
	• Perempuan/Laki-laki		Persen	99,98	99,986	99,98	
	• Pedesaan/Perkotaan		Persen	99,44	99,50	99,18	
	• Kuintil Terbawah/ Kuintil Teratas		Persen	99,97	99,970	99,90	
	• Disabilitas/ Tanpa Disabilitas		Persen	91,18	PM	86,21	
	Rasio APK SMP/ Sederajat:						
	• Perempuan/Laki-laki		Persen	99,09	99,18	98,96	
	• Pedesaan/Perkotaan		Persen	98,98	99,08	97,26	
	• Kuintil terbawah/ Kuintil teratas		Persen	97,87	98,08	95,00	
	• Disabilitas/ Tanpa Disabilitas		Persen	78, 66	PM	68,93	
	Rasio APK SMA/ SMK/ Sederajat:						
	• Perempuan/Laki-laki		Persen	100,92	100,83	104,27	
	• Pedesaan/Perkotaan		Persen	90,63	91,57	90,80	
	• Kuintil terbawah/ Kuintil teratas		Persen	76,75	80,04	75,67	
	• Disabilitas/ Tanpa Disabilitas		Persen	62,18	PM	60,35	
	Rasio APK Perguruan Tinggi:						
	• Perempuan/Laki-laki		Persen	109,01	105,5	115,26	
	• Pedesaan/Perkotaan		Persen	51,24	54,10	51,12	
	• Kuintil terbawah/ Kuintil teratas		Persen	28,37	22,87	28,68	
• Disabilitas/ Tanpa Disabilitas	Persen	44,69	PM	51,31			

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2020	Target 2021	Capaian 2021	Status
4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.							
4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun	Susenas Kor (BPS)	Persen	96,00	PM	96,04	
4.a Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.							
4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)	Dapodik (Kemendikbud Ristek)					
	Proporsi sekolah dengan akses ke (a) listrik						
	(1) SD		Persen	96,42	N/A	97,42	
	(2) SMP		Persen	98,43	N/A	98,96	
	(3) SMA		Persen	99,56	N/A	99,71	
	(4) SMK		Persen	99,87	N/A	99,51	
	(5) SLB		Persen	99,78	N/A	99,46	
	Proporsi sekolah dengan akses ke (b) internet untuk tujuan pengajaran						
	(1) SD		Persen	56,19	N/A	84,08	
	(2) SMP		Persen	59,44	N/A	87,94	
	(3) SMA		Persen	69,61	N/A	95,07	
	(4) SMK		Persen	71,66	N/A	96,75	
	(5) SLB		Persen	66,35	N/A	65,41	
	Proporsi sekolah dengan akses ke (c) komputer untuk tujuan pengajaran						
	(1) SD		Persen	36,86	N/A	8,48	
	(2) SMP		Persen	50,30	N/A	46,48	
	(3) SMA		Persen	66,38	N/A	36,49	
	(4) SMK		Persen	68,20	N/A	77,90	
	(5) SLB		Persen	47,90	N/A	19,16	
	Proporsi sekolah dengan akses ke (d) air minum layak						
	(1) SD		Persen	92,41	N/A	69,44	
	(2) SMP		Persen	91,86	N/A	71,38	
	(3) SMA		Persen	95,02	N/A	73,95	
	(4) SMK		Persen	93,61	N/A	74,51	
	(5) SLB		Persen	97,36	N/A	74,29	

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2020	Target 2021	Capaian 2021	Status
	Proporsi sekolah dengan akses ke (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin						▶
	(1) SD		Persen	39,91	N/A	37,51	▼
	(2) SMP		Persen	52,05	N/A	46,95	▼
	(3) SMA		Persen	58,03	N/A	50,48	▼
	(4) SMK		Persen	54,35	N/A	48,13	▼
	(5) SLB		Persen	34,67	N/A	41,00	●
	Proporsi sekolah dengan akses ke (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH))						▼
	(1) SD		Persen	92,53	N/A	76,85	▼
	(2) SMP		Persen	91,90	N/A	78,36	▼
	(3) SMA		Persen	93,98	N/A	80,85	▼
	(4) SMK		Persen	94,25	N/A	80,88	▼
	(5) SLB		Persen	95,17	N/A	86,32	▼
4.a.1.(a)	Persentase siswa yang mengalami perundungan dalam 12 bulan terakhir	PISA (OECD) dan AKM 2021 Kemendikbud	Persen	41 (2018)	PM	Kelas 5: 26,80 Kelas 8: 26,32 Kelas 11: 15,54	●
4.b Pada tahun 2020, secara signifikan memperluas secara global, jumlah beasiswa bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, negara berkembang pulau kecil, dan negara-negara Afrika, untuk mendaftar di pendidikan tinggi, termasuk pelatihan kejuruan, teknologi informasi dan komunikasi, program teknik, program rekayasa dan ilmiah, di negara maju dan negara berkembang lainnya.							
4.b.1*	Jumlah bantuan resmi Pemerintah Indonesia kepada mahasiswa asing penerima beasiswa kemitraan negara berkembang	Kemendikbud	Mahasiswa	408 <i>(update data Kemendikbud 2022)</i>	528	530	●
4.c Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.							
4.c.1*	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan	Dapodik (Kemendikbud Ristek)					▼
	Persentase guru dengan kualifikasi minimal S1/D4			89,33	89,20	73,17	▼
	(1) SD		Persen	86,65	N/A	94,76	●
	(2) SMP		Persen	94,01	N/A	97,37	●
	(3) SMA		Persen	97,19	N/A	98,48	●
	(4) SMK		Persen	94,12	N/A	96,35	●
	(5) SLB		Persen	88,94	N/A	83,62	▼

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2020	Target 2021	Capaian 2021	Status
	Persentase guru yang bersertifikat pendidik			41,01	91,05	25,76	▼
	(1) SD		Persen	39,70	N/A	36,74	▼
	(2) SMP		Persen	44,34	N/A	39,74	▼
	(3) SMA		Persen	46,28	N/A	39,12	▼
	(4) SMK		Persen	37,16	N/A	34,49	▼
	(5) SLB		Persen	37,00	N/A	34,52	▼

● Tercapai

▶ Akan tercapai/membaik

▼ Perlu perhatian khusus

– Data tidak tersedia



Tujuan 5 Kesetaraan Gender

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2020	Target 2021	Capaian 2021	Status
5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan di mana pun.							
5.1.1*	Ketersediaan kerangka hukum yang mendorong, menetapkan dan memantau kesetaraan gender dan penghapusan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin	Kemen PPPA					–
	(a) Bidang dasar hukum umum		Persen	100,00	PM	N/A	–
	(b) Bidang kekerasan terhadap perempuan		Persen	91,67	PM	N/A	–
	(c) Bidang lapangan kerja dan ekonomi		Persen	90,00	PM	N/A	–
	(d) Bidang perkawinan dan keluarga		Persen	81,82	PM	N/A	–
5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.							
5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir	SHPN (Kemen PPPA dan BPS)	Persen	10,4 (2016)	Menurun	6,55	
5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir	SHPN (Kemen PPPA dan BPS)	Persen	4,66 (2016)	Menurun	5,23	
5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.							
5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20 - 24 tahun yang usia kawin pertama atau usia hidup bersama pertama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun	Susenas Kor (BPS)					
	(a) Sebelum umur 15 tahun		Persen	0,50	PM	0,58	
	(b) Sebelum umur 18 tahun		Persen	10,35	9,8	9,23	
5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.							

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2020	Target 2021	Capaian 2021	Status
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di (a) parlemen tingkat pusat dan (b) pemerintah daerah						
	(a) Parlemen tingkat pusat (DPR dan DPD RI)	KPU	Persen	22,50 (2019)	N/A	N/A	–
	• DPR RI		Persen	20,52 (2019)	N/A	20,9	
	• DPD RI		Persen	30,88 (2019)	N/A	N/A	–
	(b) Pemerintah daerah (DPRD provinsi dan kabupaten/kota dan jabatan pemerintahan (gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota))						
	• DPRD Provinsi	KPU	Persen	17,53 (2019)	N/A	17,7	
	• DPRD Kabupaten/Kota		Persen	15,30 (2019)	N/A	15,3	
	• Gubernur/ Wakil Gubernur	Kemendagri (diolah)	Persen	9,09	PM	5,97	
	• Bupati/ Wakil Bupati, Walikota/ Wakil Walikota	Kemendagri (diolah)	Persen	9,16	PM	8,56	
5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial	Sakernas (BPS)	Persen	33,08	PM	32,50	
	(a) Di pemerintahan	BKN					
	• Menteri		Persen	20,59 (Reshuffle Des 2020)	PM	N/A	–
	• Eselon I		Persen	17,83	PM	17,00	
	• Eselon II		Persen	20,44	PM	22,00	
5.6 Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan <i>Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform</i> serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut.							
5.6.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan	SDKI (BPS dan BKKBN)					–
	(1) Perempuan usia reproduksi 15- 49 tahun (seluruh wanita usia subur/WUS)		Persen	29,5 (2017)	PM	N/A	–

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2020	Target 2021	Capaian 2021	Status
	(2) Perempuan usia reproduksi 15-19 tahun berstatus kawin (hanya Pasangan Usia Subur/PUS)		Persen	41,0 (2017)	PM	N/A	–
5.6.2*	Regulasi yang menjamin akses yang setara bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi	Kemen PPPA	Persen	N/A	PM	PM	–
5.a Melakukan reformasi untuk memberi hak yang sama kepada perempuan terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, jasa keuangan, warisan dan sumber daya alam, sesuai dengan hukum nasional.							
5.a.1*	(1) Proporsi penduduk pertanian yang memiliki hak atas tanah pertanian	SITASI (BPS)	Persen	26,74 (rata-rata 3 provinsi: Jabar, Jatim, NTB)	PM	Laki-laki: 52,09 Perempuan: 13,61 (SITASI 2021 di 34 provinsi)	
	(2) Proporsi perempuan penduduk pertanian sebagai pemilik atau yang memiliki hak atas tanah pertanian, menurut jenis kepemilikan	SITASI (BPS)	Persen	18,95 (rata-rata 3 provinsi: Jabar, Jatim, NTB)	PM	19,65 (SITASI 2021 di 34 provinsi)	
5.a.2*	Ketersediaan kerangka hukum (termasuk hukum adat) yang menjamin persamaan hak perempuan untuk kepemilikan tanah dan/atau hak kontrol	Kemen PPPA	Tingkatan	N/A	PM	PM	–
5.b Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.							
5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam (penduduk usia > 5 tahun)	Susenas Kor (BPS)	Persen	62,84	72	65,87	
	(1) Perempuan		Persen	57,51	PM	60,58	
	(2) Laki-laki		Persen	68,12	PM	71,12	
5.c Mengadopsi dan memperkuat kebijakan yang baik dan perundang-undangan yang berlaku untuk peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan kaum perempuan di semua tingkatan.							
5.c.1*	Ketersediaan sistem untuk melacak dan membuat alokasi umum untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	Kemen PPN/ Bappenas	Kriteria	Kemungkinan E (Mendekati Pemenuhan Persyaratan)	PM	N/A	–

 Tercapai

 Akan tercapai/membaik

 Perlu perhatian khusus

– Data tidak tersedia



Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2020	Target 2021	Capaian 2021	Status
6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.							
6.1.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman (ladder 5)	Kementerian Kesehatan	%	6,7 (2019)	8,4 (2020)	11,9 (2020)	
6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.							
6.2.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun	1. BPS (Susenas) 2. Kementerian Kesehatan 3. PUPR					
6.2.1* (a)	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Fasilitas Cuci Tangan dengan Air dan Sabun		%	78,30	PM	79,59	
6.2.1* (b)	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak		%	79,53	79,43	80,29	
6.2.1* (c)	Persentase rumah tangga yang masih mempraktikkan buang air besar sembarangan (BABS) di tempat terbuka		%	6,19	4,46	5,69	
6.2.1* (d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap SPALD-T (Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat)		%	PM	PM	PM	-
6.2.1* (e)	Persentase rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja		%	PM	PM	PM	-
6.3 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.							
6.3.1 (a)	Persentase limbah cair industri yang diolah secara aman	KLHK	%	84 (2019)	PM	91 (2020)	

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2020	Target 2021	Capaian 2021	Status
6.3.2.(a)	Kualitas air permukaan sebagai air baku (Indeks Kualitas Air)	KLHK	Indeks	53,53	55,2	52,82	
6.3.2.(b)	Kualitas air tanah sebagai air baku	Kementerian ESDM	Indeks	NA	NA	NA	-
6.4 Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.							
6.4.2.(a)	Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air permukaan terhadap ketersediaannya	PUPR	%	NA	NA	NA	-
6.4.2. (b)	Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air tanah terhadap ketersediaannya	BPS (PODES)	%	NA	NA	NA	-
6.5 Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas sesuai kepantasan.							
6.5.1*	Tingkat pelaksanaan pengelolaan sumber daya air secara terpadu (0-100)	1. KLHK 2. PUPR 3. UNEP	Indeks	48 (2017)	NA	66 (2020)	
6.5.2*	Proporsi wilayah cekungan lintas batas dengan pengaturan kerja sama sumberdaya air yang operasional	1. KLHK, 2. PUPR 3. ESDM	%	39,37 %: (183.711 Ha) 10 DAS (2019)	PM	39,37 %: (183.711 Ha) 10 DAS (2020)	
6.6 Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.							
6.6.1 *	Perubahan tingkat sumber daya air terkait ekosistem dari waktu ke waktu: Indeks Kualitas Lahan	1. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional; 2. Badan Informasi Geospasial; 3. KLHK 4. Kementerian ESDM.	Indeks	59,54	60,43	60,72	

 Tercapai

 Akan tercapai/membaik

 Perlu perhatian khusus

- Data tidak tersedia



Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2020	Target 2021	Capaian 2021	Status
7.1 Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua							
7.1.1*	Rasio elektrifikasi.	Kementerian ESDM	Persen	99,2	100	99,45	
7.1.1.(a)	Konsumsi listrik per kapita.	Kementerian ESDM	kWh/kapita	1.089	1.203	1.123	
7.1.2.(a)	Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga.	Kementerian ESDM	Sambungan Rumah Tangga	673.222	1.470.50 ²	848.097	
7.1.2.(b)	Rasio penggunaan gas rumah tangga	1. Badan Pusat Statistik: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenans); 2. Pusat Data dan Informasi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.	Persen	81,98	PM	83,36	
7.2 Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global							
7.2.1*	Bauran energi terbarukan	Kementerian ESDM	Persen	11,20	14,5	12,16	
7.3 Pada tahun 2030, melakukan perbaikan efisiensi energi di tingkat global sebanyak dua kali lipat.							
7.3.1*	Intensitas energi primer.	Kementerian ESDM	SBM/Miliar Rp	133,5	138,0 ²	133,90	
7.a Pada tahun 2030, memperkuat kerjasama internasional untuk memfasilitas akses pada teknologi dan riset energi bersih, termasuk energi terbarukan, efisiensi energi, canggih, teknologi bahan bakar fosil lebih bersih, dan mempromosikan investasi di bidang infrastruktur energi dan teknologi energi bersih							
7.a.1	Bantuan keuangan internasional ke negara-negara berkembang untuk mendukung penelitian dan pengembangan energi bersih dan produksi energi terbarukan, termasuk sistem hibrida	-	-	-	-	-	

Keterangan:

1 Penyesuaian dampak COVID-19

2 Dihitung dengan menggunakan PDB konstan 2010

3 Dihitung dari capaian kapasitas energi terbarukan pada RKP 2022 dan hasil sensus penduduk BPS 2020

4 Dihitung dari target kapasitas energi terbarukan pada RKP 2022 dan proyeksi penduduk BPS 20152045

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2020	Target 2021	Capaian 2021	Status
7.b Pada tahun 2030, memperluas infrastruktur dan meningkatkan teknologi untuk penyediaan layanan energi modern dan berkelanjutan bagi semua negara-negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, negara berkembang pulau kecil dan negara berkembang							
7.b.1*	Kapasitas terpasang pembangkit listrik dari energi terbarukan (dalam watt per kapita)	Kementerian ESDM. Badan Pusat Statistik;	Watt per kapita	38,77 ³	44,00 ⁴	40,25	▼

● Tercapai
 ▶ Akan tercapai/membaik
 ▼ Perlu perhatian khusus
 – Data tidak tersedia



Tujuan 8 Pekerjaan Layak Dan Pertumbuhan Ekonomi

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Baseline) 2020	Target 2021	Capaian 2021	Status
8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang							
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	Badan Pusat Statistik	Persen	-3,15	3,0	2,51	●
8.1.1.(a)	PDB per kapita.	Badan Pusat Statistik	Juta Rupiah	56,93	61,9	62,23	●
8.2 Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.							
8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	Badan Pusat Statistik	Persen	-1,84	2,0–2,5	1,64	▶
8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.							
8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal, berdasarkan sektor dan jenis kelamin	Badan Pusat Statistik	Persen	60,47	NA	59,45	●
8.3.1.(a)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan	Badan Pusat Statistik	Persen	24,40	26,5	51,11	●
8.4 Meningkatkan secara progresif, hingga 2030, efisiensi sumber daya global dalam konsumsi dan produksi, serta usaha melepas kaitan pertumbuhan ekonomi dari degradasi lingkungan, sesuai dengan the 10-Year Framework of Programs on Sustainable Consumption and Production, dengan negara-negara maju sebagai pengarah.							
8.4.1.(a)	Rencana dan implementasi Strategi Pelaksanaan Sasaran Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan	Kementerian Lingkungan Hidup	Dokumen Regulasi	2	2	4	●
8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.							
8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	Badan Pusat Statistik (Sakernas)	Rupiah	17.696	NA	18.089	●
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	Badan Pusat Statistik (Sakernas)	Persen	7,07	5,9–6,5	6,49	●

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Baseline) 2020	Target 2021	Capaian 2021	Status
8.5.2.(a)	Persentase setengah pengangguran.	Badan Pusat Statistik (Sakernas)	Persen	10,19	NA	8,71	
8.6 Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.							
8.6.1*	Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	Badan Pusat Statistik (Survei Angkatan Kerja Nasional/ Sakernas)	Persen	24,28	NA	22,4	
8.7 Mengambil tindakan cepat dan untuk memberantas kerja paksa, mengakhiri perbudakan dan penjualan manusia, mengamankan larangan dan penghapusan bentuk terburuk tenaga kerja anak, termasuk perekrutan dan penggunaan tentara anak-anak, dan pada tahun 2025 mengakhiri tenaga kerja anak dalam segala bentuknya.							
8.7.1.(a)	Persentase dan jumlah anak usia 10-17 tahun, yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	Badan Pusat Statistik (Sakernas)	Persen	3,25	NA	2,63	
8.8 Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya.							
8.8.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3	Kementerian Ketenagakerjaan	Jumlah Perusahaan	14.408	3.960	1.616	
8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.							
8.9.1*	Proporsi dan laju pertumbuhan kontribusi pariwisata terhadap PDB	Badan Pusat Statistik (Neraca Satelit Pariwisata Nasional)	Persen				
	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB			4,0		4,2	
	Laju pertumbuhan kontribusi pariwisata terhadap PDB			-16,67	4,2	3,7	
8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara	Badan Pusat Statistik	Juta Orang	4.05	4,0-7,0	1,5	
8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	Badan Pusat Statistik dan Kementerian Pariwisata	Juta Orang	198,24	180-220	530	
8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata.	Kementerian Pariwisata	Miliar USD	3,46	4,8-8,5	0,54	

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Baseline) 2020	Target 2021	Capaian 2021	Status
8.10 Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.							
8.10.1*	Jumlah ATM dan kantor bank per 100.000 penduduk dewasa	Bank Indonesia	ATM dan Kantor Bank per 100.000 penduduk				
	Jumlah ATM per 100.000 penduduk dewasa		ATM per 100.000 penduduk	52,95	56,3	50,02	
	Jumlah kantor bank per 100.000 penduduk dewasa		Kantor Bank per 100.000 penduduk	17,67	15,4	22,99	
8.10.1.(a)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit	Bank Indonesia (Statistik Sistem Keuangan Indonesia)	%	19,67	20,3	20,02	
8.b Pada tahun 2020, mengembangkan dan mengoperasionalkan strategi global untuk ketenagakerjaan pemuda dan menerapkan the Global Jobs Pact of the International Labour Organization.							
8.b.1*	Adanya strategi nasional terkait ketenagakerjaan pemuda yang sudah dikembangkan dan operasional sebagai strategi khusus atau sebagai bagian dari strategi ketenagakerjaan nasional.	Kementerian PPN/Bappenas	Dokumen Strategi Nasional	1	1	1	

Tercapai
 Akan tercapai/membaik
 Perlu perhatian khusus
 Data tidak tersedia



Tujuan 9 Industri, Inovasi, Dan Infrastruktur

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2020	Target 2021	Capaian 2021	Status
9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.							
9.1.1*	Populasi penduduk desa yang tinggal dalam jarak 2 km terhadap jalan yang layak.	Badan Pusat Statistik (BPS): Potensi Desa (PODES).	Km	PM	PM	PM	-
9.1.1(a)	Kondisi mantap jalan nasional	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.	Persen	92,8	93	92	▼
9.1.1(b)	Panjang pembangunan jalan tol	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.	Km	1.461	1.703	1.800,8	●
9.1.1(c)	Panjang jalur kereta api	Kementerian Perhubungan	Km	6.357	6.463	6.466	●
9.1.2*	Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi.	1. Kementerian Perhubungan; 2. Badan Pusat Statistik (BPS).	Orang dan Barang				▼
	• Kereta Api:		Orang	NA	183130184	149763271	▼
	• Kapal Domestik Datang:		Orang	NA	11615945	-	-
	• Kapal Domestik Berangkat:		Orang	NA	11670205	-	-
	• Pesawat Domestik Datang:		Orang	NA	36164959	-	-
	• Pesawat Domestik Berangkat:		Orang	NA	33513741	-	-
9.1.2 (a)	Jumlah bandara (jumlah bandara baru yang dibangun)	1. Kementerian Perhubungan; 2. Badan Pusat Statistik (BPS); 3. PT. Angkasa Pura.	Lokasi	215 (2019)	12 (berlanjut)	217	●
9.1.2 (b)	Jumlah pelabuhan penyeberangan (jumlah pelabuhan penyeberangan baru yang dibangun)	Kementerian Perhubungan	Lokasi	24 (2019)	6 (pembangunan baru)	25	●
9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.							

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2020	Target 2021	Capaian 2021	Status
9.2.1*	Proporsi dan nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita	Badan Pusat Statistik (BPS)	Persen dan Nilai				
	Proporsi sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.		Persen	19,9	19,8	20,55	
	Nilai tambah sektor industri manufaktur per kapita.		Nilai	8.198	PM	8.379	
9.2.1(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	Badan Pusat Statistik (BPS)	Persen	-2,93	3,5	3,39	
9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	Badan Pusat Statistik: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)	Persen	13,61	14,0	14,27	
9.3 Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar							
9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	Badan Pusat Statistik (BPS)	Persen	18,5 (2019)	18,80	PM	-
9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	Badan Pusat Statistik (BPS)	Persen	2,4 (2019)	2,80	PM	-
9.4 Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing.							
9.4.1*	Rasio emisi CO2/emisi gas rumah kaca dengan nilai tambah sektor industri manufaktur.	1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 2. Badan Pusat Statistik.	Tingkat emisi CO2 (ton)	3.119.594	PM	PM	-
9.4.1.(a)	Penurunan emisi gas rumah kaca sektor industri	Kementerian PPN/Bappenas: AKSARA	Persen				
	Penurunan emisi gas rumah kaca sektor industri tahunan.			10,66	0,16	0,16	
	Penurunan emisi gas rumah kaca sektor industri kumulatif.			6,03	5,56	5,56	

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2020	Target 2021	Capaian 2021	Status
9.4.1.(b)	Intensitas emisi sektor industri.	Kementerian PPN/Bappenas: AKSARA	Ton CO2/ Miliar Rp	29,5	29,0	PM	-
9.5 Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan.							
9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.	1. Kementerian Kebudayaan, Pendidikan, Riset, dan Teknologi; 2. Badan Riset dan Inovasi Nasional; 3. Kementerian Keuangan	Persen	0,25 (2019)	0,30	PM	-
9.5.2*	Jumlah sumber daya manusia bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (peneliti, perekayasa, dan dosen) pada instansi pemerintah dan perguruan tinggi per satu juta penduduk.	1. Kementerian Kebudayaan, Pendidikan, Riset, dan Teknologi; 2. Badan Riset dan Inovasi Nasional; 3. Badan Pusat Statistik.	Jumlah SDM Iptek per 1 juta penduduk	1.197	1.163	PM	-
9.5.2.(a)	Proporsi sumber daya manusia bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dengan gelar Doktor (S3).	1. Kementerian Kebudayaan, Pendidikan, Riset, dan Teknologi; 2. Badan Riset dan Inovasi Nasional	Persen	13,73	14,55	PM	-
9.b Mendukung pengembangan teknologi domestik, riset dan inovasi di negaranegara berkembang, termasuk dengan memastikan lingkungan kebijakan yang kondusif, antara lain untuk diversifikasi industri dan peningkatan nilai tambah komoditas.							
9.b.1.(a)	Kontribusi ekspor produk industri berteknologi tinggi	Badan Pusat Statistik (BPS)	Persen	21,38	10,79	20,33	
9.c Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.							
9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani <i>mobile broadband</i> .	Badan Pusat Statistik.	Persen	96,10	98,5	96,19	

 Tercapai

 Akan tercapai/membaik

 Perlu perhatian khusus

– Data tidak tersedia



Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2020	Target 2021	Capaian 2021	Status
10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional							
10.1.1*	Rasio Gini	Badan Pusat Statistik (BPS)	Nilai antara 0 – 1	0,385	0,377-0,382	0,381 (Sept)	
10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Badan Pusat Statistik (BPS)	Persen	10,14 (Mar) 10,19 (Sept)	9,5-10,1 (<i>outlook</i>)	9,71 (Sept)	
10.1.1.(b)	Jumlah desa tertinggal.	Badan Pusat Statistik (BPS): Indeks Desa.	Desa	9.987	15.152	13.215	
10.1.1.(c)	Jumlah Desa Mandiri.	Badan Pusat Statistik (BPS): Indeks Desa.	Desa	2.310	3.444	2.906	
10.1.1.(d)	Jumlah daerah tertinggal.	Badan Pusat Statistik (BPS): Potensi Desa	Kabupaten	62	NA	NA	
10.1.1.(e)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.	Badan Pusat Statistik (BPS): Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS).	Persen	26,43	24,6-25,1	26,68	
10.2 Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya							
10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.	Badan Pusat Statistik (BPS): Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS).	Persen	11,99	PM	11,61	
10.3 Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.							
10.3.1(a)	Indeks Kebebasan	Indeks Demokrasi Indonesia	Nilai	79,40	82,5	79,72	

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2020	Target 2021	Capaian 2021	Status
10.3.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Bagian Administrasi Pelayanan Pengaduan: Laporan Data Pengaduan.	Aduan	2.639	4.324	PM	
10.3.1.(c)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan	Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan	Kasus	2.389	PM	3.838	●
10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional	Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan	Kebijakan/ Dokumen	2	10	29	●
10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.							
10.4.1.(a)	Persentase rencana anggaran untuk belanja fungsi perlindungan sosial pemerintah pusat.	Kementerian Keuangan	Persen	12,7	13,31	13,30	▶
10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	1. BPJS Ketenagakerjaan 2. BPS	Persen				●
				Formal: 63,82	Formal: 53,37	Formal: 53,98	●
				Informal: 3,21	Informal: 8,48	Informal: 8,14	▶
10.5 Memperbaiki regulasi dan pengawasan pasar dan lembaga keuangan global, dan memperkuat pelaksanaan regulasinya.							
10.5.1.(a)	Indikator Kesehatan Perbankan.	Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan	Persen				●

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2020	Target 2021	Capaian 2021	Status
	1. Jumlah modal dengan aktiva tertimbang menurut risiko (<i>Regulatory Tier 1 Capital to risk-Weighted Assets</i>)	(OJK): Laporan Bulanan Bank Umum (LBU).		22,16	PM	22,39	●
	2. Pinjaman bermasalah dengan total pinjaman (<i>Non-performing Loans to Total Gross Loans</i>)			2,75	PM	2,64	●
	3. Pendapatan bersih dengan nilai aset (<i>Return on Assets</i>)			1,50	PM	1,80	●
10.7. Memfasilitasi migrasi dan mobilitas manusia yang teratur, aman, berkala dan bertanggung jawab, termasuk melalui penerapan kebijakan migrasi yang terencana dan terkelola dengan baik.							
10.7.2.(a)	Jumlah dokumen kerjasama ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja migran antara negara RI dengan negara tujuan penempatan.	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)	Penambahan Dokumen	14	23	18	▼
10.7.2.(b)	Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan TKLN berdasarkan okupasi.	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)	Fasilitasi TKLN	365 okupasi	450 okupasi	381 okupasi	▼

● Tercapai ► Akan tercapai/membaik ▼ Perlu perhatian khusus – Data tidak tersedia



Tujuan 11 Kota dan Pemukiman Yang Berkelanjutan

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2020	Target 2021	Capaian 2021	Status
11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.							
11.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	BPS (Susenas)	%	59,54	62,32	60,90	
11.2 Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua.							
11.2.1.(a)	Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik	BPS (Susenas)	%	54,67 (2017)	PM	56,01 (2020)	
11.2.1.(b)	Persentase penduduk terlayani transportasi umum	1. BPS 2. Kemenhub	%	4,85 (2017)	PM	5,74 (2020)	
11.3 Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan Penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.							
11.3.1.(a)	Rasio laju perluasan lahan terbangun terhadap laju pertumbuhan penduduk	BIG	%	PM	PM	PM	-
11.4 Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.							
11.4.1.(a)	Total pengeluaran per kapita yang diperuntukan untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam (non-PPP)	1.Kemenkeu 2.KLHK 3.Kemendikbudristek 4. ANRI 5.Kemendikbud 6. LIPI 7. PUPR 8. Pemda	Miliar Rupiah	PM	175,2 (Kemen dikbudristek)	164,63 (Capaian Kemendikbudristek: 93,97%)	
11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relative terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.							
11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	BNPB				PM	-
	Jumlah korban terluka per 100.000 orang		Korban per 100.000 orang	0,16	0,2	PM (728 jiwa meninggal dunia dan 87 orang hilang)	-
	Jumlah korban meninggal dan hilang per 100.000 orang		Korban per 100.000 orang	0,23	N/A	0,62	-
	Jumlah korban mengungsi per 100.000 orang		Korban per 100.000 orang	342,12	N/A	PM (7,63 juta jiwa menderita & mengungsi)	-

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2020	Target 2021	Capaian 2021	Status
11.5.2.(a)	Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB	BNPB	%	0,08	0,1	0,09	
11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.							
11.6.1.(a)	Persentase rumah tangga di perkotaan yang terlayani pengelolaan sampahnya	1. KLHK 2. BPS 3. PUPR	%	54,85 Penangan- & 0,88 Pengu- rangan (2019)	73,70 Pena- nganan & 5,51 Pengu- rangan	PM	-
11.6.1.(b)	Persentase sampah nasional yang terkelola	KLHK (Ditjen PSLB3)	%	52,95	98	64,99	
11.6.2.(a)	Rata-rata tahunan materi partikulat halus PM 10	KLHK	µg/m ³	< 50 µg/m ³	< 40	PM	-
11.6.2.(b)	Indeks kualitas udara	KLHK.	Indeks	87,21	84,2	87,36	
11.7 Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.							
11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua	1. LAPAN 2. Kementerian PUPR.	%	PM	PM	PM	-
11.7.2.(a)	Proporsi penduduk yang mengalami kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir	Badan Pusat Statistik	%	0,06	≤ 0,06	0,04	
11.a Mendukung hubungan ekonomi, sosial, dan lingkungan antara urban, pinggiran kota, dan perdesaan dengan memperkuat perencanaan pembangunan nasional dan daerah.							
11.a.1.(a)	Proporsi penduduk yang tinggal di daerah dengan RTRW yang sudah dilengkapi KLHS	1. ATR/BPN; 2. Bappenas.	%	16 Provinsi	18 Pro- vinsi	PM	-
11.b Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.							
11.b.1*	Rencana dan implementasi strategi nasional penanggulangan bencana yang selaras dengan <i>the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030</i>	1. BNPB 2. KLHK	Dokumen	RENAS PB 2015- 2019	1	<ul style="list-style-type: none"> ● RIPB 2020-2024 ● Pengembangan perangkat analisis kerentanan dan risiko iklim (SIDIK) 	
11.b.2*	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/strategi nasional penanggulangan bencana	1. BNPB 2. Bappenas	%	35,60	37,93 (195 Kab/ Kot)	37,16	

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2020	Target 2021	Capaian 2021	Status
11.c Memberikan dukungan kepada negara-negara kurang berkembang, melalui bantuan keuangan dan teknis, dalam membangun bangunan yang berkelanjutan dan tangguh, dengan memanfaatkan bahan lokal							
11.c.1.(a)	Persentase daerah yang memiliki Perda bangunan gedung yang berkelanjutan, berketahanan, dan menggunakan material lokal	1. Kemendagri 2. PUPR.	%	87,42 (2017)	PM	PM	-

● Tercapai

▶ Akan tercapai/membaik

▼ Perlu perhatian khusus

– Data tidak tersedia



Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2020	Target 2021	Capaian 2021	Status
12.1 Melaksanakan <i>the 10-Year Framework of Programmes on Sustainable Consumption and Production Patterns</i>, dengan semua negara mengambil tindakan, dipimpin negara maju, dengan mempertimbangkan pembangunan dan kapasitas negara berkembang.							
12.1.1*	Rencana dan implementasi Strategi Pelaksanaan Sasaran Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan	KLHK	Dokumen	Kerangka Kerja 10 th SCP	2 Dokumen	- Dokumen Kerangka Kerja SCP Indonesia Tahun 2020 s.d 2030 - Dokumen Pedoman Menu Aksi SCP	
12.3 Pada tahun 2030, mengurangi hingga setengahnya limbah pangan per kapita global di tingkat ritel dan konsumen dan mengurangi kehilangan makanan							
12.3.1(a)	Persentase sisa makanan	KLHK	%	39,93	24	40,4	
12.4 Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.							
12.4.1*	Peran aktif dalam mengikuti kesepakatan multilateral internasional tentang bahan kimia dan limbah berbahaya	KLHK - Sekretariat masing-masing konvensi	Dokumen	- Penelaahan dan pemutakhiran rencana penerapan nasional untuk Konvensi Stockholm tentang Bahan Pencemar Organik yang persisten - Partisipasi pada sesi sidang online COPs Konvensi Basel, Rotterdam, minamata, dan Stockhollm			
12.4.1.(a)	Persentase pengurangan dan penghapusan merkuri dari <i>baseline</i> 50 ton penggunaan merkuri	KLHK	%	36,58 (18,3 ton)	10	31,84 (15,74 ton)	
12.4.1(b)	Persentase penurunan tingkat konsumsi perusak ozon dari <i>baseline</i>	KLHK	%	27,26% Pengurangan sebesar 68,83 Ton ODP dari <i>baseline</i> 2019 252,46 Ton ODP	18,66% Pengurangan sebesar 68,83 Ton ODP dari <i>baseline</i> 2019 252,46 Ton ODP	31,73% Pengurangan sebesar 68,83 Ton ODP dari <i>baseline</i> 2019 252,46 Ton ODP	

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2020	Target 2021	Capaian 2021	Status
12.4.2*	(a) Limbah B3 yang dihasilkan per kapita; dan	KLHK	Ton/ Orang	0,18	PM	0,22	
	(b) Proporsi limbah B3 yang ditangani/diolah berdasarkan jenis penanganannya/ pengolahannya	KLHK	%	99,28	100	100 (60.074.421,64 ton)	
12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali							
12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Ton	3,4 (2019)	9,53	PM	-
12.6 Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.							
12.6.1*	Jumlah perusahaan yang mempublikasi laporan keberlanjutannya	1. Otoritas Jasa Keuangan; 2. Perusahaan	Unit Perusahaan	55	107	154	
12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001	KLHK	Perusahaan	2125 (2019)	2034	2381 (2020)	
12.7 Mempromosikan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional							
12.7.1*	Tingkatan (<i>degree</i>) kebijakan pengadaan publik dan implementasi rencana aksi	LKPP	Indeks	PM	2,68	PM	-
12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister dan masuk dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Produk	6	10	9	
12.7.1.(b)	Jumlah dokumen penerapan label ramah lingkungan untuk pengadaan barang dan jasa	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dokumen	PM	15	82 -Sertifikasi ecolabel tipe 1 -Registrasi ecolabel tipe II -Registrasi teknologi ramah lingkungan	
12.8 Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.							
12.8.1.(a)	Jumlah satuan pendidikan formal dan lembaga/ komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup				260	260	
		KLHK	Sekolah Adiwiyata	PM		255	
		KLHK	Komunitas Peduli LH	PM		5	
12.8.1.(b)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister	KLHK	Produk	6 (2019)	PM	9 (2020)	

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2020	Target 2021	Capaian 2021	Status
12.a Mendukung negara-negara berkembang untuk memperkuat kapasitas ilmiah dan teknologi mereka untuk bergerak ke arah pola konsumsi dan produksi yang lebih berkelanjutan.							
12.a.1*	Kapasitas pembangkit energi terbarukan yang terpasang (dalam watt per kapita)	1. ESDM 2. BPS	Watt/ Kapita	38,77	44	40,25	▶
12.b Mengembangkan dan mengimplementasikan alat untuk memonitor dampak pembangunan berkelanjutan untuk pariwisata yang berkelanjutan yang dapat menciptakan lapangan kerja dan mendukung budaya dan produk lokal.							
12.b.1(a)	Jumlah lokasi penerapan <i>sustainable tourism development</i>	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Satuan	PM	5	PM	-
12.c Merasionalisasi subsidi bahan bakar fosil tidak efisien yang mendorong pemborosan konsumsi dengan menghilangkan distorsi pasar, sesuai dengan keadaan nasional, termasuk dengan restrukturisasi pajak dan penghapusan secara bertahap jika ada subsidi berbahaya, yang dicerminkan oleh dampak lingkungannya, dengan sepenuhnya memperhitungkan kebutuhan dan kondisi khusus negara-negara berkembang dan meminimalkan dampak negatif yang bisa terjadi pada pembangunannya dengan cara yang melindungi rakyat miskin dan masyarakat yang terkena dampak.							
12.c.1*	(a) Jumlah subsidi bahan bakar fosil sebagai persentase dari PDB; dan (b) Jumlah subsidi bahan bakar fosil sebagai proporsi dari total pengeluaran nasional untuk bahan bakar fosil	1. BPS 2. ESDM, 3. Bappenas 4. Kemenkeu	Rupiah	0,31	0,3	PM	-

● Tercapai

▶ Akan tercapai/membaik

▼ Perlu perhatian khusus

– Data tidak tersedia



Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2020	Target 2021	Capaian 2021	Status
13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara							
13.1.1(a)	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana hidrometeorologi per 100.000 orang	BNPB	Korban per 100.000 orang	0,16	Max 0,2	PM	-
	Jumlah korban terluka per 100.000 orang						
	Jumlah korban meninggal dan hilang per 100.000 orang						
	Jumlah korban mengungsi per 100.000 orang						
13.1.1.(b)	Persentase penurunan potensi kehilangan PDB sektor terdampak bahaya iklim	Bappenas	%PDB	0,34	0,59	PM	-
13.1.2*	Rencana dan implementasi strategi nasional penanggulangan bencana yang selaras dengan <i>the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030</i>	1. BNPB 2. KLHK	Dokumen	RENAS PB 2015-2019	Ada	<ul style="list-style-type: none"> • RIPB 2020-2024 • Pengembangan perangkat analisis kerentanan dan risiko iklim (SIDIK) 	
13.1.3*	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/strategi nasional penanggulangan bencana	1. BNPB 2. Bappenas	%	35,60	37,94	37,16 (191/514)	
13.2 Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional							
13.2.1*	Terwujudnya penyelenggaraan inventarisasi gas rumah kaca (GRK), serta monitoring, pelaporan dan verifikasi emisi GRK yang dilaporkan dalam dokumen <i>Biennial Update Report</i> (BUR) dan <i>National Communications</i>	KLHK	Dokumen-BUR	BUR I (2015)	1	BUR II (2018)	

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2020	Target 2021	Capaian 2021	Status	
13.2.2*	Jumlah emisi gas rumah kaca (GRK) per tahun	KLHK	tCO2e	1.864,74 (2019)	1.455,95 (2020)	1.050,41 (2020)	●	
13.2.2.(a)	Potensi penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)	Bappenas	%	26,44%	23,55%	24,51*	●	
13.2.2.(b)	Potensi penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK)	Bappenas	%	38,01	23,40	20,71	●	
13.3 Meningkatkan pendidikan, penumbuhan kesadaran, serta kapasitas manusia dan kelembagaan terkait mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini perubahan iklim								
13.3.1.(a)	Jumlah satuan pendidikan formal dan lembaga/ komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup	KLHK			260	260	●	
			Sekolah Adiwiyata	PM			255	●
			Komunitas Peduli LH	PM			5	●
13.a Melaksanakan komitmen negara maju pada <i>the United Nations Framework Convention on Climate Change</i> untuk tujuan mobilisasi dana bersama sebesar 100 miliar dolar Amerika per tahun pada tahun 2020 dari semua sumber untuk mengatasi kebutuhan negara berkembang dalam konteks aksi mitigasi yang bermanfaat dan transparansi dalam pelaksanaannya dan mengoperasionalisasi secara penuh <i>the Green Climate Fund</i> melalui kapitalisasi dana tersebut sesegera mungkin.								
13.a.1.(a)	Jumlah dana publik (<i>budget tagging</i>) untuk pendanaan perubahan iklim	1. Bappenas 2. Kemenkeu	Rupiah	11 Miliar	PM		-	

● Tercapai ► Akan tercapai/membaik ▼ Perlu perhatian khusus – Data tidak tersedia

*data sementara belum termasuk sektor lahan sesuai dengan Perpres RKP 2013



Tujuan 14 Ekosistem Lautan

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2020	Target 2021	Capaian 2021	Status
14.1 Pada tahun 2025, mencegah dan secara signifikan mengurangi semua jenis pencemaran laut, khususnya dari kegiatan berbasis lahan, termasuk sampah laut dan polusi nutrisi							
14.1.1.(a)	Presentase penurunan sampah terbuang ke laut	1. KKP 2. LAPAN; 3. BIG 4. BPLH Daerah 5. TKN Penanganan Sampah Laut	%	8,1 (2019)	PM	15,9 (2020) (Kumulatif)	
14.2 Pada tahun 2020, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif							
14.2.1*	Penerapan pendekatan berbasis ekosistem dalam pengelolaan areal lautan	KKP	Dokumen	Permen KP No. 18/PERMEN - KP/2014	Ada	Perpres No. 83 Tahun 2020	
14.2.1.(a)	Terkelolanya 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) secara berkelanjutan	KKP	WPP	11	11	11	
14.4 Pada tahun 2020, secara efektif mengatur pemanenan dan menghentikan penangkapan ikan yang berlebihan, penangkapan ikan ilegal dan praktek penangkapan ikan yang merusak, serta melaksanakan rencana pengelolaan berbasis ilmu pengetahuan, untuk memulihkan persediaan ikan secara layak dalam waktu yang paling singkat yang memungkinkan, setidaknya ke tingkat yang dapat memproduksi hasil maksimum yang berkelanjutan sesuai karakteristik biologisnya							
14.4.1*	Proporsi tangkapan jenis ikan laut yang berada dalam batasan biologis yang aman (berdasarkan MSY)	KKP	%	51,78 64,73 (JTB=80 % MSY)	< 67 (MSY)	53,93 67,45 (JTB=80% MSY)	
14.5 Pada tahun 2020, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia							
14.5.1*	Jumlah luas kawasan konservasi perairan laut	1. KKP 2. KLHK 3. Pemda	Juta Ha	24,11	24,2	28,4	
14.6 Pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan & tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang & negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada <i>the World Trade Organization (WTO)</i>							
14.6.1.(a)	Persentase kepatuhan pelaku usaha	KKP	%	94,76	95	95,72	

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2020	Target 2021	Capaian 2021	Status
14.b Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (small-scale artisanal fishers) terhadap sumber daya laut dan pasar							
14.b.1*	Tingkat penerapan kerangka hukum/regulasi/kebijakan/kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil	KKP	Dokumen	NA	NA	UU No. 7 tahun 2016	
14.b.1.(a)	Jumlah provinsi dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan	KKP	Provinsi	34	34	34	
14.b.1.(b)	Jumlah nelayan yang terlindungi	KKP	Nelayan	40.759	120.000	0 (Anggaran terkena refocussing)	
14.c Meningkatkan pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya dengan menerapkan hukum internasional yang tercermin dalam <i>The United Nations Convention on the Law of the Sea</i>, yang menyediakan kerangka hukum untuk pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya, seperti yang tercantum dalam ayat 158 dari "<i>The future we want</i>"							
14.c.1*	Tersedianya kerangka kebijakan dan instrumen terkait pelaksanaan UNCLOS (<i>the United Nations Convention on the Law of the Sea</i>)	KKP	Dokumen	UU No. 17 tahun 1985	UU No. 6 tahun 1996	UU No. 1 tahun 2014	

 Tercapai
 Akan tercapai/membaik
 Perlu perhatian khusus
– Data tidak tersedia



Tujuan 15 Ekosistem Daratan

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2020	Target 2021	Capaian 2021	Status
15.1 Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.							
15.1.1*	Proporsi tutupan hutan terhadap total luas lahan	KLHK	%	50,1 (2019)	50,1	50,9 (2020)	●
15.1.2.(a)	Luas kawasan bernilai konservasi tinggi (HCV)	KLHK	Hektar	PM	PM	24,25 Juta	●
15.2 Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan aforestasi dan reforestasi secara global.							
15.2.1.(a)	Jumlah KPH yang masuk kategori maju	KLHK	KPH (KPH Lindung)	24	30	24 (11 KPHP dan 13 KPHL)	▼
15.3 Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi							
15.3.1*	Proporsi lahan yang terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan	1. KLHK 2. Kementan	%	7,46 (2018)	PM	PM	-
15.4 Pada tahun 2030, menjamin pelestarian ekosistem pegunungan, termasuk keanekaragaman hayatinya, untuk meningkatkan kapasitasnya memberikan manfaat yang sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan							
15.4.1*	Situs penting keanekaragaman hayati pegunungan dalam kawasan konservasi	KLHK	Hektar	4,13 Juta	4,13 Juta	4,13 Juta	●
15.4.2*	Indeks tutupan hijau pegunungan (ITHP)	1. KLHK 2. BIG	Indeks	115.557/100 (2017)	PM	97,51 (2020)	▼
15.5 Melakukan tindakan cepat dan signifikan untuk mengurangi degradasi habitat alami, menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati, dan pada tahun 2020, melindungi dan mencegah lenyapnya spesies yang terancam punah.							
15.5.1*	Indeks daftar merah (<i>Red-list index</i>)	1. KLHK 2. KKP 3. LIPI	Indeks	100 (2014)	PM	PM	-
15.6 Meningkatkan pembagian keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatan sumber daya genetik, dan meningkatkan akses yang tepat terhadap sumber daya tersebut, sesuai kesepakatan internasional							
15.6.1*	Kerangka kerja legislasi, administratif dan kebijakan untuk memastikan pembagian manfaat yang adil dan merata	1. KLHK 2. KKP 3. Kementan	Dokumen	Ada	Ada	Permen LHK RI Nomor P.2/Menlhk/Setjen/Ku m.1/1/2018	●
15.7 Melakukan tindakan cepat untuk mengakhiri perburuan dan perdagangan jenis flora dan fauna yang dilindungi serta mengatasi permintaan dan pasokan produk hidupan liar secara ilegal							
15.7.1.(a)	Jumlah kasus perburuan atau perdagangan ilegal TSL	KLHK	Kasus (P-21)	48	104	38	●

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2020	Target 2021	Capaian 2021	Status
15.8 Pada tahun 2020, memperkenalkan langkah-langkah untuk mencegah masuknya dan secara signifikan mengurangi dampak dari jenis asing invasif pada ekosistem darat dan airtserta mengendalikan atau memberantas jenis asing invasif prioritas							
15.8.1*	Kerangka legislasi nasional yang relevan dan memadai dalam pencegahan atau pengendalian jenis asing <i>invasive</i> (JAI)	1. KLHK 2. Bappenas 3. Kementan	Dokumen	4 Dokumen -	Ada	12 Dokumen - Dokumen Anlisis risiko jenis invasif pada BTN Kutai, BTN Gn.Merbab abu, dll	
15.9 Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati kedalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan							
15.9.1.(a)	Rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati Aichi 2 dari Rencana Strategis	Bappenas	Dokumen	IBSAP 2003- 2020	Ada	IBSAP 2015-2020	
15.a Memobilisasi dan meningkatkan sumber daya keuangan secara signifikan dari semua sumber untuk melestarikan dan memanfaatkan keanekaragaman hayati dan ekosistem secara berkelanjutan							
15.a.1.(a)	Bantuan pembangunan resmi untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan	1. Kemen PPN /Bappenas 2. Kemenkeu	Rupiah	PM	PM	PM	-
15.b Memobilisasi sumber daya penting dari semua sumber dan pada semua tingkatan untuk membiayai pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan memberikan insentif yang memadai bagi negara berkembang untuk memajukan pengelolannya, termasuk untuk pelestarian dan reforestasi.							
15.b.1.(a)	Bantuan pembangunan resmi untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan	1. Kemen PPN /Bappenas 2. Kemenkeu	Rupiah	PM	PM	PM	-
15.c Meningkatkan dukungan global dalam upaya memerangi perburuan dan perdagangan jenis yang dilindungi, termasuk dengan meningkatkan kapasitas masyarakat lokal mengejar peluang mata pencaharian yang berkelanjutan							
15.c.1(a)	Jumlah kasus perburuan atau perdagangan ilegal TSL	KLHK	Kasus (P-21)	48	104	38	



Tercapai



Akan tercapai/membaik



Perlu perhatian khusus



- Data tidak tersedia



Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan Yang Tangguh

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2020)	Target 2021	Capaian 2021	Status
16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun							
16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir	Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri	Kasus	898	880	927	
16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk	Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri	Orang per 100.000 penduduk	0,00481 (13 orang)	< 13 orang ³	0,0041 (12 orang)	
16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir	SUSENAS - Badan Pusat Statistik (BPS)	Persen	0,04	< 0,06	PM (Capaian 2021 baru akan keluar pada akhir 2022)	-
16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya	SUSENAS Modul HANSOS - Badan Pusat Statistik (BPS)	Persen	62,62	>55	NA (survei berikutnya akan dilakukan pada 2023)	-
16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak							
16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	SUSENAS Modul HANSOS - Badan Pusat Statistik (BPS)	Persen	48,40	PM	NA (survei berikutnya baru akan dilakukan pada 2023)	-
16.2.1.(b)	Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja - SNPHAR)					
	• Anak Laki-laki		Persen	61,70 (2018)	Menurun	34	
	• Anak Perempuan		Persen	62,00 (2018)	Menurun	41,05	
16.2.2*	Angka korban perdagangan manusia per 100,000 penduduk menurut jenis kelamin, kelompok umur dan jenis eksploitasi ⁴	SIMFONI PPA- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA)					

³ Indikator 16.1.2.(a) memiliki angka target dalam RPJMN dan RAN dalam bentuk angka absolut (orang) sehingga tetap pada kolom *baseline* dan capaian tetap ditampilkan angka capaian absolut (orang)

⁴ Indikator 16.2.2* untuk saat ini data yang tersedia dari SIMFONI PPA terbagi atas dua kelompok yaitu anak (perempuan dan laki-laki) dan perempuan dewasa.

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2020)	Target 2021	Capaian 2021	Status	
	<ul style="list-style-type: none"> Anak (Perempuan dan Laki-laki) 		Orang	213	Menurun	406		
	<ul style="list-style-type: none"> Perempuan Dewasa 		Orang	196	Menurun	272		
16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun (Data Kekerasan Seksual Kontak dan Nonkontak) ⁵	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja - SNPHAR)						
	<ul style="list-style-type: none"> Perempuan di Perkotaan 		Persen	<ul style="list-style-type: none"> Kontak: 9,8% Nonkontak: 6,8% (2018)	PM	8,59% (dalam bentuk apapun)		
	<ul style="list-style-type: none"> Perempuan di Perdesaan 		Persen	<ul style="list-style-type: none"> Kontak: 10,7% Nonkontak: 3,7% (2018)	PM	4,92% (dalam bentuk apapun)		
	<ul style="list-style-type: none"> Laki-laki di Perkotaan 		Persen	<ul style="list-style-type: none"> Kontak: 3,6% Nonkontak: 5,6% (2018)	PM	4,23% (dalam bentuk apapun)		
	<ul style="list-style-type: none"> Laki-laki di Perdesaan 		Persen	<ul style="list-style-type: none"> Kontak: 2,8% Nonkontak: 3,8% (2018)	PM	3,94% (dalam bentuk apapun)		
16.3 Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua								
16.3.1.(a)	Proporsi Korban Kekerasan dalam 12 Bulan Terakhir yang Melaporkan Kepada Polisi	SUSENAS - Badan Pusat Statistik (BPS)	Persen	52,43	25,68	PM (Capaian 2021 baru akan keluar pada akhir 2022)	-	
16.3.1.(b)	Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi ⁶	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia: Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)						
	<ul style="list-style-type: none"> Litigasi 		Persen	89 % (9.677 orang)	(7.025 Orang)	81 % (11.990 orang)		

⁵ Indikator 16.2.3.(a) berasal dari Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) yang dilakukan setiap 3 tahun sekali. Capaian pada kolom baseline adalah capaian tahun 2018.

⁶ Indikator 16.3.1.(b) memiliki angka target dalam RPJMN dan RAN dalam bentuk angka absolut (orang) sehingga tetap pada kolom *baseline* dan capaian tetap ditampilkan angka capaian absolut (orang).

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2020)	Target 2021	Capaian 2021	Status
	<ul style="list-style-type: none"> Nonlitigasi 		Persen	77 % (2.660 kegiatan)	(938 Kegiatan)	82 % (3.608 kegiatan)	
16.3.1.(c)	Persentase orang tidak mampu yang menerima layanan hukum berupa pos bantuan hukum, sidang di luar gedung pengadilan, dan pembebasan biaya perkara	Mahkamah Agung					
	<ul style="list-style-type: none"> Sidang diluar gedung pengadilan 		Persen	100%	32.889 Orang	99,4% (32.708 orang)	
	<ul style="list-style-type: none"> Pembebasan Biaya Perkara 		Persen	73%	17.947 Orang	97,19% (17.442 orang)	
	<ul style="list-style-type: none"> Pos Layanan Hukum 		Persen	100%	220.322 Jam layanan	93,49% (205.990 jam layanan)	
16.3.2.(a)	Proporsi tahanan yang melebihi masa penahanan terhadap seluruh jumlah tahanan ⁷	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan	Persen	8,49	PM	18,53	
16.3.3(a)	Indeks Akses terhadap Keadilan (<i>Access to Justice Index</i>)	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas: Direktorat Hukum dan Regulasi	Indeks	69,6 (2019)	65-70 %	PM	-
16.5 Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.							
16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	Badan Pusat Statistik (Survei Perilaku Anti Korupsi - SPAK).	Indeks	3,84	3,88	3,88	
16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.							
16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui	Kementerian Keuangan: Direktorat Jenderal Anggaran	Persen	94,55	100	101,34	

⁷ Indikator 16.3.2.(a) terdapat dataset capaian terbaru yang berasal dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2020)	Target 2021	Capaian 2021	Status
16.6.1.(a)	Persentase instansi pemerintah yang mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Badan Pemeriksa Keuangan	Persen				
	• Tingkat Pemerintah Pusat (Kementerian/ Lembaga)			98	92	95	
	• Tingkat Pemerintah Provinsi			97	92	100	
	• Tingkat Pemerintah Kabupaten			95	80	91	
	• Tingkat Pemerintah Kota			88	92	96	
16.6.1.(b)	Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ≥ B	Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Persen				
	• Tingkat Pemerintah Pusat (Kementerian/ Lembaga)			94,05	96	93,75	
	• Tingkat Pemerintah Provinsi			97,06	87	100	
	• Tingkat Pemerintah Kabupaten dan Kota			62,8	55	66,73	
16.6.1.(c)	Persentase instansi pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) ≥ B	Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Persen				
	Tingkat Pemerintah Pusat (Kementerian/ Lembaga)			96,39	75	95,00	
	Tingkat Pemerintah Provinsi			88,24	60	82,35	
	Tingkat Pemerintah Kabupaten dan Kota			24,8	35	27,17	
16.6.2.(a)	Jumlah Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik.	Ombudsman RI (survei penilaian kepatuhan)	Instansi	Total: 87 Instansi (dari 264 instansi) (2019)	142 instansi	Total: 179 instansi (dari 587 instansi)	

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2020)	Target 2021	Capaian 2021	Status	
	• Tingkat Pemerintah Pusat (Kementerian)	pelayanan publik)		2 Kementerian (dari 4 Kementerian) (2019)		17 Kementerian (dari 24 Kementerian)		
	• Tingkat Pemerintah Pusat (Kementerian)			0 Lembaga (dari 3 Lembaga) (2019)		12 Lembaga (dari 15 Lembaga)		
	• Tingkat Pemerintah Provinsi			2 Provinsi (dari 6 Provinsi) (2019)		13 Provinsi (dari 34 Provinsi)		
	• Tingkat Pemerintah Kabupaten			71 Kabupaten (dari 215 Kabupaten) (2019)		103 Kabupaten (dari 416 Kabupaten)		
	• Tingkat Pemerintah Kota			12 Kota (dari 36 Kota) (2019)		34 Kota (dari 98 Kota)		
16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan								
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	Komisi Pemilihan Umum	Persen					
	(4) DPR			20,52 (2019)	PM	20,90		
	(5) DPRD Provinsi			17,53 (2019)	PM	17,70		
	(6) DPRD Kabupaten & Kota			15,30 (2019)	PM	15,30		
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	Badan Kepegawaian Nasional	Persen					
	Eselon I			17,83	PM	17,00		
	Eselon II			20,44	PM	22,00		
16.7.2.(a)	Indeks Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan didukung oleh	Indeks	75,66	77,25	75,67 ⁸		

⁸ Perhitungan indikator 16.7.2.(a) menggunakan perhitungan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dengan metode baru sehingga hasil capaian 2021 tidak bisa diperbandingkan dengan capaian 2020 (serta tahun-tahun sebelumnya).

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2020)	Target 2021	Capaian 2021	Status
		Badan Pusat Statistik (Indeks Demokrasi Indonesia - IDI))					
16.7.2.(b)	Indeks Aspek Kebebasan	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan didukung oleh Badan Pusat Statistik (Indeks Demokrasi Indonesia - IDI)	Indeks	79,40	82,5	79,72 ⁹	
16.7.2.(c)	Indeks Aspek Kesetaraan	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan didukung oleh Badan Pusat Statistik (Indeks Demokrasi Indonesia - IDI)	Indeks	67,85	77,9	78,76 ¹⁰	
16.8 Memperluas dan meningkatkan partisipasi negara berkembang di dalam lembaga tata kelola global.							
16.8.1 (a)	Jumlah keanggotaan dan kontribusi dalam forum dan organisasi internasional	Kementerian Luar Negeri: Direktorat Jenderal Kerjasama Multilateral					
	• Jumlah Keanggotaan Lembaga Internasional		Jumlah Lembaga	200	198	200	
	• Jumlah Kontribusi		Milyar Rupiah	533	908	882	
16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.							
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur	SUSENAS – Badan Pusat Statistik (BPS)	Persen	77,2	PM	77,04	

⁹ Perhitungan indikator 16.7.2.(b) menggunakan perhitungan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dengan metode baru sehingga hasil capaian 2021 tidak bisa diperbandingkan dengan capaian 2020 (serta tahun-tahun sebelumnya).

¹⁰ Perhitungan indikator 16.7.2.(c) menggunakan perhitungan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dengan metode baru sehingga hasil capaian 2021 tidak bisa diperbandingkan dengan capaian 2020 (serta tahun-tahun sebelumnya).

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2020)	Target 2021	Capaian 2021	Status
16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawah	SUSENAS – Badan Pusat Statistik (BPS)	Persen	83,47	PM	84,49	
16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran	SUSENAS – Badan Pusat Statistik (BPS)	Persen	88,11	95	88,42	
16.10 Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.							
16.10.1 (a)	Indikator Kebebasan dari kekerasan bagi jurnalis dan awak media	Dewan Pers Nasional (Survei Indeks Kemerdekaan Pers Indonesia)	Indeks	75,27	75,5	76,02	
16.10.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia: Bagian Administrasi Pelayanan Pengaduan	Aduan	2639	4324	PM	-
16.10.1.(c)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.	Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)	Jumlah	2.389	PM	3.838	
16.10.2*	Jumlah Negara yang mengadopsi dan melaksanakan konstitusi, statutori dan/atau jaminan kebijakan untuk akses publik pada informasi.	Komisi Informasi Pusat	UU	Terdapat UU No. 14/2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik	UU No. 14/2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Terdapat UU No. 14/2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik	
16.10.2.(a)	Jumlah Badan Publik yang berkualifikasi informati	Komisi Informasi Pusat (Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik)	Badan Publik	60	40	84	
16.10.2.(b)	Jumlah penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi.	Komisi Informasi Pusat: Kepaniteraan	Sengketa	76	92	301	
16.a Memperkuat lembaga-lembaga nasional yang relevan, termasuk melalui kerjasama internasional, untuk membangun kapasitas di semua tingkatan, khususnya di negara berkembang, untuk mencegah kekerasan serta memerangi terorisme dan kejahatan.							

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2020)	Target 2021	Capaian 2021	Status
16.a.1*	Tersedianya lembaga hak asasi manusia (HAM) nasional yang independen yang sejalan dengan Paris Principles.	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	Lembaga	Tersedia Lembaga HAM Terakreditasi A yaitu KOMNAS HAM	Tersedia Lembaga HAM Terakreditasi A yaitu KOMNAS HAM	Tersedia Lembaga HAM Terakreditasi A yaitu KOMNAS HAM	
16.b Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.							
16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional	Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)	Kebijakan/ Dokumen	2	10	29	

 Tercapai
 Akan tercapai/membaik
 Perlu perhatian khusus
 Data tidak tersedia



Tujuan 17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2020	Target 2021	Capaian 2021	Status
17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.							
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya	Kementerian Keuangan dan Badan Pusat Statistik	Persen	10,68	10,13 – 10,24	11,80	
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	Kementerian Keuangan dan Badan Pusat Statistik	Persen	8,33	8,32 – 8,38	9,11	
17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik	Kementerian Keuangan dan Badan Pusat Statistik	Persen	48,10	51,17 – 51,24	47,53	
17.2 Negara-negara maju melaksanakan secara penuh komitmen atas bantuan pembangunan (<i>Official Development Assistance - ODA</i>), termasuk komitmen dari banyak negara maju untuk mencapai target 0.7 persen dari Pendapatan Nasional Bruto untuk bantuan pembangunan (ODA/GNI) bagi negara berkembang dan 0,15 sampai 0,20 persen ODA/GNI kepada negara kurang berkembang; penyedia ODA didorong untuk mempertimbangkan penetapan target untuk memberikan paling tidak 0,20 persen dari ODA/GNI untuk negara kurang berkembang.							
17.2.1.(a)	Proporsi ODA terhadap PDB dan PNB	Direktorat Pinjaman dan Hibah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan	Persen	PM	PM	PM	-
17.3 Memobilisasi tambahan sumber daya keuangan untuk negara berkembang dari berbagai macam sumber							
17.3.2.(a)	Proporsi volume remitansi TKI (dalam US dollars) terhadap PDB.	BPMI dan BI	Persen	0,84	0,90	0,87	
17.4 Membantu negara berkembang untuk mendapatkan keberlanjutan utang jangka panjang melalui kebijakan-kebijakan yang terkoordinasi yang ditujukan untuk membantu pembiayaan utang, keringanan utang dan restrukturisasi utang, yang sesuai, dan menyelesaikan utang luar negeri dari negara miskin yang berutang besar untuk mengurangi tekanan utang.							
17.4.1*	Proporsi pembayaran utang dan bunga (<i>Debt Service</i>) terhadap ekspor barang dan jasa.	Laporan Bank Indonesia (Neraca Pembayaran)	Persen	27,72	27,04	21,59	
17.6 Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.							

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2020	Target 2021	Capaian 2021	Status
17.6.1.(a)	Persentase pelanggan terlayani jaringan internet akses tetap pitalebar (fixed broadband) terhadap total rumah tangga.	Kementerian Komunikasi dan Informatika (Direktorat Telekomunikasi, Direktorat Pitalebar, dan Direktorat Pengendalian Pos dan Informatika, Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika); BPS	Persen	14,3	16,25	17,25	
17.6.1.(b)	Persentase kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik (kumulatif).	Kementerian Komunikasi dan Informatika (Direktorat Telekomunikasi, Direktorat Pitalebar, dan Direktorat Pengendalian Pos dan Informatika, Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika).	Persen	57,58	60	60,80	
17.8 Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.							
17.8.1*	Persentase pengguna internet	Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII)	Persen	73,7	74,20	77,02	
17.9 Meningkatkan dukungan internasional untuk melaksanakan pembangunan kapasitas yang efektif dan sesuai target di negara berkembang untuk mendukung rencana nasional untuk melaksanakan seluruh tujuan pembangunan berkelanjutan, termasuk melalui kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan Triangular.							
17.9.1.(a)	Jumlah pendanaan kegiatan kerjasama pembangunan internasional termasuk KSST	BAPPENAS/ KL Pelaksana KSS	Rp Milyar	2,23	138,1	33,41	
17.9.1.(b)	Jumlah program/ kegiatan Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular	BAPPENAS/ KL Pelaksana KSS	Kegiatan	10	100	29	
17.10 Menggalakkan sistem perdagangan multilateral yang universal, berbasis aturan, terbuka, tidak diskriminatif dan adil di bawah the World Trade Organization termasuk melalui kesimpulan dari kesepakatan di bawah Doha Development Agenda.							
17.10.1.(a)	Jumlah PTA/FTA/CEPA yang disepakati	Kementerian Perdagangan; World Trade Organization; dan ADB ARIC (ASIA Regional Integration Center)	Jumlah dokumen	23	25	25	

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2020	Target 2021	Capaian 2021	Status
17.11 Secara signifikan meningkatkan ekspor dari negara berkembang, khususnya dengan tujuan meningkatkan dua kali lipat proporsi negara kurang berkembang dalam ekspor global pada tahun 2020.							
17.11.1.(a)	Pertumbuhan ekspor produk non migas	Laporan Ekspor BPS	Persen	-0.61	6,3	41,58	
17.13 Meningkatkan stabilitas makroekonomi global, termasuk melalui koordinasi kebijakan dan keterpaduan kebijakan.							
17.13.1*	Tersedianya Dashboard Makroekonomi.	Kementerian PPN/Bappenas	Dashboard	Ada	Ada	Ada	
17.17 Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.							
17.17.1.(a)	Jumlah Dokumen Daftar Rencana Proyek KPBU (DRK) yang diterbitkan setiap tahun.	Kementerian dan Lembaga pelaksana KPBU, pemerintah daerah	Dokumen	1	1	1	
17.17.1.(b)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	Kementerian dan Lembaga pelaksana KPBU, pemerintah daerah	Proyek	14	15	14	
17.17.1.(c)	Jumlah nilai investasi proyek KPBU berdasarkan tahap perencanaan, penyiapan dan transaksi.	Kementerian dan Lembaga pelaksana KPBU, pemerintah daerah	Nilai investasi (Rp Triliun)	229.3	198,8	151,68	
17.18 Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.							
17.18.1.(a)	Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional.	Badan Pusat Statistik: Survei Kebutuhan Data	Persen	92,93	30	92,52	
17.18.1.(b)	Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional.	Badan Pusat Statistik: Sistem publikasi statistik BPS	Persen	90,00	PM	93,96	
17.18.2*	Jumlah negara yang memiliki undang-undang statistik nasional yang tunduk pada Prinsip-prinsip fundamental Statistik Resmi	Badan Pusat Statistik	Dokumen	UU 16/1997 tentang Statistik	UU 16/1997 tentang Statistik	UU 16/1997 tentang Statistik	

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2020	Target 2021	Capaian 2021	Status
17.18.3*	Jumlah negara dengan Perencanaan Statistik Nasional yang didanai dan melaksanakan rencananya berdasar sumber pendanaan.	Badan Pusat Statistik	Dokumen	Renstra BPS 2020-2024	Renstra BPS 2020-2024	Renstra BPS 2020-2024	
17.19 Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.							
17.19.1.(a)	Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik.	Badan Pusat Statistik: Website romantik.bps.go.id dan Survei Kebutuhan Data BPS.	Persen	27,03	30	27,27	
17.19.1.(b)	Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar.	Badan Pusat Statistik: Survei Kebutuhan Data BPS	Persen	60,00	64	56,32	
17.19.2.(a)	Terlaksananya Sensus Penduduk dan Perumahan pada tahun 2020.	Badan Pusat Statistik: Sensus Penduduk Tahun 2020.	Sensus Penduduk	Terlaksana	NA	NA	-
17.19.2 (b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register) ¹¹	Kementerian Dalam Negeri.	Daerah	NA	5	5	

 Tercapai
 Akan tercapai/membaik
 Perlu perhatian khusus
 Data tidak tersedia

¹¹ Capaian indikator 17.19.2(b) dilaporkan dengan ukuran Jumlah daerah yang membentuk data kelahiran dan kematian yang terintegrasi antarlembaga. Pada tahun 2021 terdapat 5 (lima) daerah yang melaksanakannya yaitu Kabupaten Pidie, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Kudus, dan Kabupaten Padang Pariaman.

100 years of Independence

Chamber Circle

SDGs

DUTA
SANDONESIA

Kuat, Makmur dan M



LAPORAN PELAKSANAAN PENCAPAIAN TPB/SDGs TAHUN 2021